

# LAPORAN TAHUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SULAWESI SELATAN 2024



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN  
FISHERY AND MARINE SERVICES OF SOUTH SULAWESI PROVINCE**

JALAN BAJIMINASA NO. 12, TELP 0411-873680, FAX 0411-858779  
MAKASSAR Website : [www.dkpsulsel.id](http://www.dkpsulsel.id)

**2025**

# **LAPORAN TAHUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SULAWESI SELATAN 2024**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**FISHERY AND MARINE SERVICES OF SOUTH SULAWESI PROVINCE**

JALAN BAJIMINASA NO. 12, TELP 0411-873680, FAX 0411-858779  
MAKASSAR Website : [www.dkpsulsel.id](http://www.dkpsulsel.id)

**2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dapat tersusun. Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan gambaran dan informasi sejumlah pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024.

Secara umum program dan kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai sasaran. Hal ini menjadi modal dasar untuk lebih mengembangkan pembangunan Kelautan dan Perikanan di tahun 2025 dan masa mendatang.

Disadari bahwa tercapainya tujuan pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari hasil kerjasama yang baik dan terpadu antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan stakeholder lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Akhirnya kepada semua pihak dan instansi yang telah membantu terbitnya Buku Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 diucapkan terima kasih.

Makassar,

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**Dr. M. ILYAS, ST, M.Sc**

**Pangkat : Pembina Utama Muda**

**NIP : 19700606 199603 1 006**

## RINGKASAN

Provinsi Sulawesi Selatan beribukota Makassar terletak antara  $0^{\circ}12'$  -  $8^{\circ}$  LS dan diantara  $116^{\circ}48'$  -  $112^{\circ}36'$  BT dengan luas wilayah sekitar  $45.764,53$  Km<sup>2</sup>, panjang garis pantai 1.937 Km yang terdiri dari 24 kabupaten/kota, 304 kecamatan.

Jumlah Penduduk Sulawesi Selatan tahun 2024 tercatat sebanyak 9,463,390 jiwa. Diantara jumlah penduduk tersebut terdapat tenaga kerja yang mengelola sumberdaya Kelautan dan Perikanan (nelayan, pembudidaya) sebanyak 504,824 orang atau 5,3 % dari jumlah penduduk, yang terdiri dari tenaga kerja pembudidaya sebanyak 281,727 orang (2,97 %), Nelayan (Laut + Perairan Umum) sebanyak 223,097 orang (2,36 %).

Untuk mengorganisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan baik non teknis maupun teknis di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, diperlukan staf yang cukup dan memiliki integritas yang handal. Pada tahun 2024 di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki staf pegawai negeri sipil sebanyak 182 orang.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tetap mengacu pada Visi Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan dan Simpul Jejaring Akselarasi Kesejahteraan Masyarakat.

Pelaksanaan masing-masing sub program dibiayai melalui dana Tugas Pembantuan (APBN) sebesar Rp. 3,785,720,000, APBD sebesar Rp. 91,464,384,438.0 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) provinsi sebesar Rp. 23,010,677,000

Hasil pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan selama tahun 2024 tercatat total produksi sebesar 4,825,587.5 ton, sedangkan pada tahun 2023 produksi perikanan sebesar 4,620,291.8 ton dimana mengalami kenaikan sebesar 205,295.7 ton atau 4,4 %. Pada tahun 2024 total volume eksport sebesar 202,045.5 ton naik 0,6 % dari tahun 2023 dan nilai sebesar US\$ 153,5 Juta US\$ turun 11,9 % dari tahun 2023.

Sejalan dengan peningkatan produktivitas usaha, maka tingkat pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan pada berbagai usaha sebagai berikut: Tingkat pendapatan rata-rata pertahun pembudidaya ikan di Sulawesi Selatan pada tahun 2024 tercatat antara Rp. 13,382,239 sampai Rp. 44,569,316. Secara berurutan tingkat pendapatan rata-rata pertahun pembudidaya di Sulawesi Selatan adalah Budidaya Dilaut (Rumput Laut) Rp. 44,569,316, Budidaya Tambak Rp. 42,469,771 , Budidaya KJA laut Rp. 35,674,103 , Budidaya Kolam Rp. 26,762,269 , Budidaya

## **LAPORAN TAHUNAN 2024**

---

sawah Rp. 17,691,023 dan Budidaya KJA tawar Rp. 13,382,239 sedangkan pendapatan nelayan laut Rp. 36,087,495 dan nelayan perairan umum Rp. 61,261,429

Tingkat konsumsi ikan perkapita pertahun masyarakat Sulawesi Selatan tahun 2024 tercatat sebanyak 72,6 kg/kapita/tahun (naik 2,1 %).

Sekaitan dengan pelayanan baik dalam memanfaatkan asset pemerintah maupun bentuk jasa yang dilakukan, maka dengan mengacu pada perda-perda yang ada, besarnya pendapatan asli daerah sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 tercatat Rp. 1,928,587,966 (101.29 %) dari target Rp. 1,904,000,000

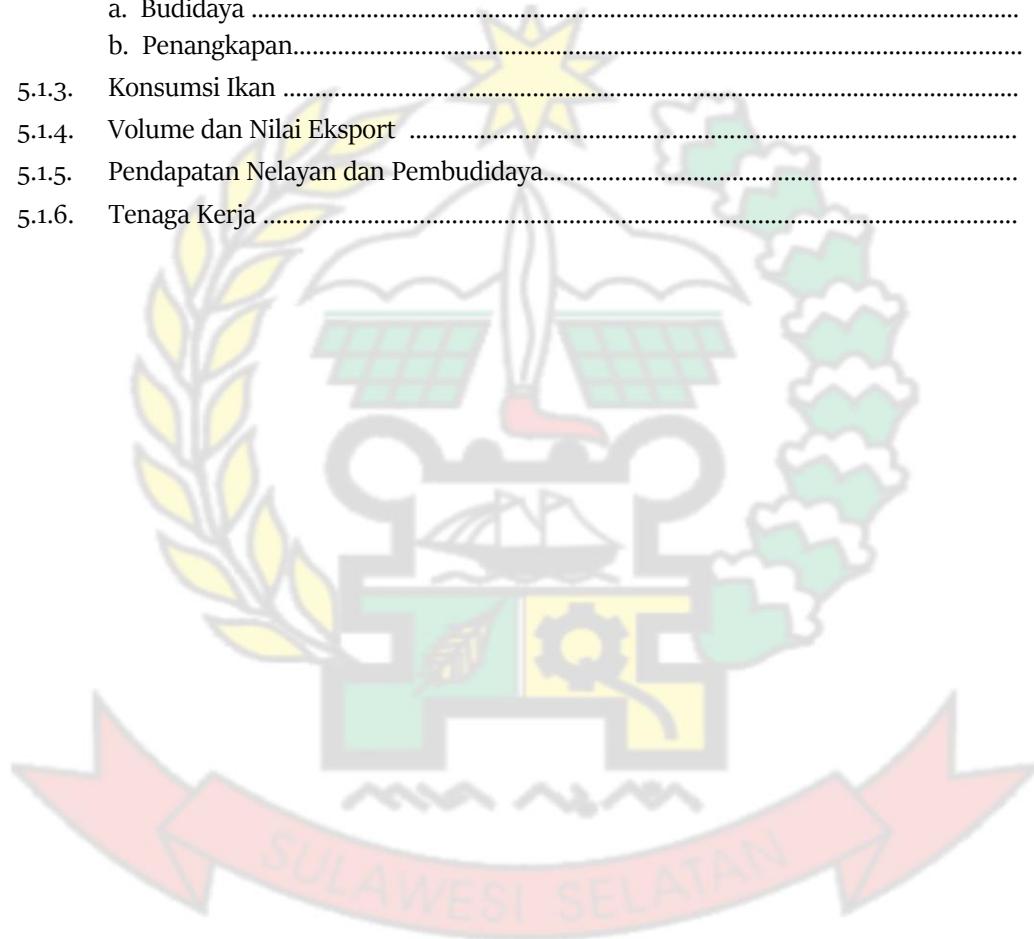


## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<i>i</i>
<b>RINGKASAN .....</b>	<i>ii</i>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<i>iv</i>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<i>vi</i>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<i>viii</i>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>II. KEADAAN DAERAH SULAWESI SELATAN.....</b>	<b>3</b>
2.1. Keadaan Geografis .....	3
2.2. Demografi .....	3
2.3. Prasarana dan Sarana Perikanan .....	3
a. Perikanan Tangkap .....	3
b. Perikanan Budidaya .....	4
c. Pengolahan dan Pengawetan Hasil Perikanan.....	4
d. Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau/Laut.....	4
e. Pengujian dan Pengembangan Mutu Produk Hasil Kelautan dan Perikanan.....	6
f. Unit Pelaksana Teknis pelabuhan Perikanan Wilayah I.....	10
g. Unit Pelaksana Teknis pelabuhan Perikanan Wilayah II.....	16
<b>III. ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.....</b>	<b>23</b>
3.1. Struktur Organisasi.....	23
3.2. Kepegawaian.....	26
3.3. Keuangan.....	28
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	28
<b>IV. PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI SULAWESI SELATAN .....</b>	<b>30</b>
4.1. Kebijakan dan Program Strategis .....	30
a. Kebijakan .....	30
b. Program Strategis .....	35
4.2. Sumber Pembiayaan .....	40
4.2.1. Dana Tugas Pembantuan (TP).....	40
4.2.2. Dana Alokasi Khusus (DAK) .....	40
4.2.3. Dana Daerah .....	41
a. Belanja Daerah.....	41
4.3. Kegiatan Pembangunan .....	42
4.3.1. Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.....	42
4.3.2. Perikanan Tangkap.....	49
4.3.3. Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	66
4.3.4. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.....	78
4.3.5. CDK Bosowasi.....	148

---

4.3.6. CDK Mamminasata.....	153
4.3.7. CDK Ajatappareng.....	159
4.3.8. CDK Wilayah Selatan.....	167
4.3.9. CDK Selayar.....	171
4.3.10. CDK Pangkep dan Kepulauan.....	173
4.3.11. CDK Luwu Raya.....	177
<b>V. HASIL PEMBANGUNAN PERIKANAN SULAWESI SELATAN .....</b>	<b>185</b>
5.1. Ekonomi .....	185
5.1.1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.....	185
5.1.2. Produksi Perikanan.....	185
a. Budidaya .....	185
b. Penangkapan.....	188
5.1.3. Konsumsi Ikan .....	188
5.1.4. Volume dan Nilai Eksport .....	188
5.1.5. Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya.....	188
5.1.6. Tenaga Kerja .....	189



**DAFTAR TABEL**

**Halaman**

1. Rekapitulasi Volume Pengujian yang dilakukan oleh UPTD BPPMHP Sulawesi Selatan Tahun 2024.....	7
2. Daftar Jumlah Sertifikat Uji Dan Jumlah Hasil Uji Per Bulan, Tahun 2024.....	8
3. Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024.....	23
4. Susunan Organisasi UPT dan CDK Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024.....	24
5. Jumlah dan Komposisi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dan 2024.....	26
6. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 31 Desember 2024.....	26
7. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pendidikan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 31 Desember 2024.....	27
8. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 31 Desember 2024.....	27
9. Target dan Realisasi PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.....	28
10. Keterkaitan Renja dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024.....	32
11. Misi dan Kebijakan Prioritas Tahun 2024 dengan mengacu RPJPD Sulawesi Selatan (Periode kelima 2005-2025).....	33
12. Daftar Kabupaten/Kota Penerima DAK Tahun 2024.....	41
13. Realisasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Nelayan Tahun 2024.....	53
14. Calon Pembangun Dan Pengelola Spdn/Spbun TAHUN 2023/2024.....	55
15. Perkembangan Produksi Perikanan dari Kegiatan Usaha di Sulawesi Selatan, Tahun 2023 – 2024.....	187

## **DAFTAR LAMPIRAN**

	<i>Halaman</i>
1. Wilayah Peta Penangkapan Udang, Tuna, dan Rumput Laut.....	191
2. Lokasi Pos Pengawasan SDKP Sulawesi Selatan Tahun 2024.....	192
3. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten /Kota di Sulawesi Selatan, Tahun 2024.....	193
4. Data Produksi Perbenihan Udang Windu pada UPT Pembinaan dan Pengembangan Budiaya Laut Tahun 2024.....	194
5. Rekapitulasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.....	195
6. Daftar Unit CBIB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 .....	201
7. Daftar Unit CPIB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.....	201
8. Data Pokmaswas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.....	202
9. Data Tindak Pidana Perikanan Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.....	213
10. Data kasus <i>illegal fishing</i> atau pelanggaran/tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah Bosowasi selama TA 2024.....	222
11. Data Penanaman Mangrove yang dilakukan Oleh CDK Bosowasi TA 2024.....	225
12. Data Penanaman Mangrove yang dilakukan Oleh CDK Mamminasata TA 2024.....	225
13. Data Illegal Fishing yang didapatkan Oleh CDK Mamminasata TA 2024 .....	225
14. Data Penanaman Mangrove yang dilakukan Oleh CDK Ajatappareng TA 2024.....	226
15. Data kasus <i>illegal fishing</i> atau pelanggaran / tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah Ajatappareng selama TA 2024.....	226
16. Data kasus <i>illegal fishing</i> atau pelanggaran/tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah CDK Wilayah Selatan selama Tahun 2024.....	228
17. Data Penanaman Mangrove yang dilakukan Oleh CDK Wilayah Selatan TA 2024.....	229
18. Data Tindak Pidana Perikanan yang Ditemukan di Wilayah CDK Pangkep Tahun 2024.....	229
19. Daftar Unit Pengolahan Ikan/Udang dan Rumput Laut Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.....	231

## **I. PENDAHULUAN**

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah pula memberikan kewenangan otonomi bagi daerah untuk membangun dan mengembangkan daerahnya sendiri sesuai kebutuhan serta sumberdaya yang dimiliki demi kemakmuran rakyatnya.

Sejalan dengan Undang-Undang tersebut, maka Provinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah otonomi telah membenahi diri untuk membangun daerahnya dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada diantaranya adalah sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Paradigma pembangunan Kelautan dan Perikanan kedepan tetap diarahkan pada visi dan misi Provinsi Sulawesi Selatan yaitu **“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”** sedangkan dari 5 (lima) Misi Provinsi Sulawesi selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan menjalankan 2 misi yaitu **“ Misi 1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif dan Misi 5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan.** Hal ini untuk mewujudkan tiga pilar pembangunan yaitu **Pro-Poor** (Pengentasan kemiskinan), **Pro-Job** (Penyerapan Tenaga Kerja), **Pro-Growth** (Pertumbuhan) dan **Pro-Sustainability** (Keberlanjutan), yang dalam pelaksanaannya perlu didukung dengan penciptaan iklim usaha yang mendorong investasi dibidang kelautan dan perikanan (**Pro-Business**).

Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan, maka dilaksanakan melalui pendekatan sektor kegiatan yang meliputi **(1) Perikanan Budidaya dan Daya Saing hasil Produk Perikanan, (2) Perikanan Tangkap (3) Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (4) Perlindungan, Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan.**

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong peningkatan pertumbuhan produksi dengan fokus pada peningkatan produksi perikanan budidaya, sementara pada pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap diupayakan melalui pengembangan sarana dan prasarana teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Adapun Produksi Perikanan Sulawesi Selatan bersumber dari usaha perikanan penangkapan

(Laut & Perairan Umum) dan usaha perikanan budidaya (Laut, Tambak, Kolam dan Sawah). Belum optimalnya pencapaian tingkat produktifitas usaha perikanan budidaya dan upaya penangkapan memberi dampak pada kegiatan pembangunan dan pengembangan sektor perikanan secara keseluruhan. Pembangunan usaha Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan ke depan akan menjadi usaha perikanan yang berproduktivitas dan memiliki daya saing yang tinggi baik pasar dalam negeri maupun pasar ekspor. Upaya yang dilakukan diarahkan pada tiga ruang lingkup pengembangan yaitu optimalisasi dan pengembangan kegiatan produksi, peningkatan daya saing melalui penanganan dan pengolahan produk hasil perikanan, dan pengembangan mekanisme dan jaringan pemasaran. Dengan komitmen ini, pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan secara optimal akan mampu memberi kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan di Sulawesi Selatan dan Nasional.



## II. KEADAAN DAERAH SULAWESI SELATAN

### 2.1. *Keadaan Geografis*

Provinsi Sulawesi Selatan beribukota di Makassar terletak antara  $0^{\circ} 12' - 8'$  Lintang Selatan dan di antara  $116^{\circ} 48' - 122^{\circ} 36'$  Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Sulawesi Barat
Sebelah Timur	: Teluk Bone dan Prov. Sulawesi Tenggara
Sebelah Selatan	: Laut Flores
Sebelah Barat	: Selat Makassar

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah  $46.083,94$  Km<sup>2</sup>, secara administrasi pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi 21 Kabupaten dan 3 kota yang terdiri dari 304 kecamatan. Kabupaten Luwu Utara merupakan kabupaten terluas dengan luas  $7.365,51$  Km<sup>2</sup> atau luas kabupaten tersebut merupakan 15,98 % dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Jumlah sungai yang mengaliri wilayah Sulawesi Selatan tercatat sekitar 67 sungai. Aliran sungai terbanyak terdapat di kabupaten Luwu, yaitu 25 aliran sungai. Sungai Saddang adalah sungai terpanjang yang mengalir meliputi Kabupaten Tator, Enrekang dan Pinrang. Panjang sungai tersebut masing-masing 150 Km.

Di Sulawesi Selatan terdapat 5 (lima) danau yakni Danau Tempe, Sidenreng dan Lapompak yang masing-masing berada di Kabupaten Wajo, Sidrap dan Soppeng serta Danau Matano dan Towuti di Kabupaten Luwu Timur.

### 2.2. *Demografi*

Jumlah penduduk Sulawesi Selatan tahun 2024 tercatat sebanyak 9,463,390 jiwa, dimana dari total jumlah penduduk Sulawesi selatan tersebut sekitar 504,824 jiwa yang terdiri dari 223,097 jiwa adalah nelayan, 281,727 jiwa adalah pembudidaya ikan.

### 2.3. *Prasarana dan Sarana Perikanan*

#### a. *Perikanan Tangkap*

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah prasarana perikanan tangkap yang berfungsi untuk menunjang kegiatan bongkar muat hasil perikanan. Pada prasarana tersebut terdapat sarana penunjang yakni tempat pemasaran ikan, tempat kapal bersandar, perkantoran, gedung pertemuan dan tempat perbengkelan.

Sampai tahun 2024 terdapat 19 unit PPI yang terdapat di 16 Kabupaten/kota yang sudah diserahkan pengelolaannya ke Provinsi Sulawesi Selatan yang kondisinya rata-rata baik, namun

terdapat 2 (dua) PPI yang tidak operasional yaitu PPI Polejiwa Kab Barru dan PPI Tanru Sampe Kabupaten Jeneponto (Musiman). Produksi PPI Tahun 2024 sebesar 13.125,4 ton dengan nilai Rp. 330.953.326.600

**b. Perikanan Budidaya**

Prasarana utama pada kegiatan budidaya adalah saluran irigasi baik untuk irigasi tambak maupun irigasi kolam/Mina Padi (sawah). Selama ini untuk membuat saluran irigasi dinas Kelautan dan Perikanan melakukan koordinasi dengan dinas Pengairan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

**c. Pengolahan dan Pengawetan Hasil Perikanan**

Di Sulawesi Selatan ada dua jenis sarana pengolahan/pengawetan hasil perikanan yakni bersifat modern dan tradisional (konvensional), kedua jenis usaha tersebut memiliki segmen pasar yang hampir sama. Untuk pengolahan modern hampir sebagian besar dipasarkan ke luar negeri (ekspor), sedangkan yang konvensional pasarnya dalam negeri dan luar negeri.

Pengolahan modern meliputi produk segar (udang, ikan dan kepiting), beku (Udang, ikan, kepiting, paha kodok), kering (sirip ikan hiu, rumput laut, telur ikan terbang dan teripang), olahan (rumput laut dan kepiting), sedangkan tradisional meliputi produk asap (ikan), kering (cumi, ikan dan rumput laut), pindang (ikan), terasi (ikan) dan peda (ikan).

**d. Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau/Laut**

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, melalui visi “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter,” berkomitmen untuk mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, termasuk budidaya perikanan, dalam rangka menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif serta meningkatkan daya saing produk sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan memainkan peran penting dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang dapat mendukung pencapaian visi tersebut.

UPT Perikanan Budidaya Air Payau Laut, sebagai salah satu unit yang berada di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, berperan aktif dalam mengembangkan dan meningkatkan produktivitas budidaya perikanan di wilayah ini. Berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, baik dalam bentuk peningkatan kapasitas produksi maupun peningkatan kualitas budidaya, menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Laporan Tahunan 2024 ini disusun untuk memberikan gambaran tentang berbagai pencapaian, tantangan, serta langkah-langkah strategis yang telah dan akan diambil oleh UPT

Perikanan Budidaya Air Payau Laut dalam mendukung pengembangan sektor budidaya perikanan, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

### REALISASI TARGET PRODUKSI, PAD UPT BAPL BOJO

#### 1. Realisasi dan Capaian Produksi Benur

NO.	URAIAN	TARGET (EKOR)	REALISASI		KET.
			PRODUKSI (EKOR)	CAPAIAN (%)	
1.	Penjualan (PAD)	20.000.000	1.355.000	6,78	
2.	KJA	15.000	808	5,39	
	<b>Jumlah</b>	<b>20.015.000</b>	<b>1.355.808</b>	<b>6,8</b>	

Sumber : UPT BAPL Bojo Kab Barru, 2024

#### 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sesuai dengan target PAD yang telah ditetapkan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 300.000.000 dengan realisasi 13,31% atau sebesar Rp. 39.935.000.

NO.	URAIAN	TARGET PAD (RP)	REALISASI		KET.
			(RP)	(%)	
1.	Perbenihan	250.000.000	33.875.000	13,55	
2.	Budidaya KJA	50.000.000	5,160,000	10,32	
	<b>Jumlah</b>	<b>300.000.000</b>	<b>39.035.000</b>	<b>13,01</b>	

Sumber : UPT PBAPL Bojo Kab Barru, 2024

Adapun permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan UPT PBAPL Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Keterlambatan SPD berdampak pada proses kontrak, menyebabkan hambatan dalam pengadaan dan pelaksanaan kegiatan.
2. Jadwal pengadaan induk yang tidak sesuai dengan musim udang mengakibatkan kesulitan dalam pemasaran dan distribusi.
3. Curah hujan yang tidak menentu mempengaruhi kualitas air, sehingga menurunkan pertumbuhan dan produksi induk serta benur.
4. Keterbatasan fasilitas laboratorium menyulitkan pengendalian hama dan penyakit, meningkatkan risiko infeksi dalam budidaya

#### Upaya Pemecahan

Melihat berbagai permasalahan yang muncul diatas, maka untuk kelancaran operasional kegiatan di UPT PBAPL kedepan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan koordinasi dengan pihak keuangan guna mempercepat penerbitan SPD.

2. Mengintensifkan kegiatan pemasaran melalui koordinasi dengan penyuluh Kabupaten/Kota untuk mengidentifikasi sumber pasar.
3. Melakukan penyesuaian lingkungan serta pengontrolan media pemeliharaan secara berkala.
4. Menyediakan sarana dan prasarana laboratorium yang memadai guna mendukung proses perbenihan.

**e. Pengujian dan Pengembangan Mutu Produk Hasil Kelautan dan Perikanan**

UPT Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dengan tupoksi melaksanakan pelayanan teknis operasional pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, mengembangkan (diversifikasi) produk hasil perikanan, dan melaksanakan penerapan Standar Nasional Indonesia pada produk hasil perikanan Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No. 37 Tahun 2017.

Sesuai tupoksi pelayanan teknis operasional pengujian mutu, UPT Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan melaksanakan sertifikasi hasil uji dengan mengeluarkan hasil uji yang benar, teliti dan dipercaya. Hal ini memegang peranan penting dalam menjamin kepercayaan konsumen akan mutu produk perikanan yang diperdagangkan dan terus mengikuti perkembangan dengan menerapkan standarisasi dan sertifikasi produk perikanan sebagai jaminan agar produk perikanan Sulawesi Selatan dapat bersaing pada pasar Ekspor.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan sertifikasi hasil uji, UPT BPMPP menghadirkan Inovasi e-Sejuta Ikan yang memudahkan pengurusan pelayanan Sertifikasi Pengujian Mutu Hasil Perikanan bagi eksportir ikan di Sulawesi Selatan dan menjadikan layanan menjadi cepat, ringkas, hemat, dan mudah. Upaya Pelayanan pengujian mutu untuk memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan permintaan standar negara tujuan menjadi enam hari kerja yang sebelumnya 12 hari kerja dan 1 Hari kerja (One Day Service) untuk pengujian Organoleptik (Sensory test). Sistem memangkas waktu pelayanan administrasi dan penerbitan sertifikat di persingkat. Bahkan, petugas UPT BPMPP menyediakan layanan jemput sampel dan antar sertifikat tanpa tambahan biaya (gratis) serta menyiapkan layanan pengaduan pengguna jasa. Selain inovasi e-sejuta ikan, UPT BPMPP dituntut melakukan pelayanan sertifikat hasil uji secara online dengan menggunakan aplikasi, dengan e-sejutaikan tersebut UPT BPMPP telah menerbitkan sertifikat sejumlah 1.653 Lembar bagi pelaku usaha eksportir dengan capaian PAD Rp.1.135.000.000,- dari target Rp. 800.000.000,- (141.90%). Dalam menjalankan tugas dan fungsi UPT BPMPP tahun anggaran 2024 melakukan dua program pokok yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan dengan total anggaran Rp. 2.156.109.670,- mencapai realisasi keuangan Rp. 2.022.154.197 dengan persentasi 93,79% dan realisasi fisik 96.69%.

**Tabel 1. Rekapitulasi Volume Pengujian yang dilakukan Oleh UPT BPMPP  
Sulawesi Selatan Tahun 2024**

No	Parameter	Jenis Pengujian	
		Test Result (TR)	Total Pengujian Tahun 2024
1	ALT Anaerob	50	50
	ALT Aerob	640	640
	ALT Kualitas Air	43	43
2	E. Coli	717	717
	E.Coli Kualitas Air	87	87
3	Coliform	215	215
	Coliform Kualitas Air	86	86
4	Salmonella	443	443
5	Vibrio Cholerae	1042	1042
6	Organoleptik	209	209
7	Vibrio Parahaemolitycus	610	610
8	Staphylococcus Aureus	276	276
9	Listeria Monocytogenes	294	294
10	Kapang	64	64
11	Khamir	62	62
12	Histamin (Spectrofotometer)	331	331
13	Mercury (Hg)	203	203
14	Plumbum/Timbal (Pb)	214	214
15	Cadmium (Cd)	222	222
16	Otc	29	29
17	Ctc	28	28
18	Tetracycline	38	38
19	Chloramphenicol (Elisa)	262	262
20	AOZ	82	82
21	AMOZ	79	79
22	AHD	36	36
23	SEM	36	36
24	TVB	114	114
25	K air	68	68
26	K lemak	2	2
27	Protein	8	8
28	Formalin	37	37
29	Enterococci	57	57
30	Eterobactriæ	54	54
31	Bobot tuntas	5	5
32	Filth	12	12

No	Parameter	Lanjutan.....	
		Test Result (TR)	Total Pengujian Tahun 2024
33	pH	12	12
34	K abu	28	28
35	Arsen	268	268
36	Suhu Pusat	7	7
<b>Total</b>		<b>7070</b>	<b>7070</b>

Sumber : Laporan tahunan UPT BPMPP Tahun 2024  
 Ket : Test Result : Pengujian berdasarkan permintaan Pelanggan

**Tabel 2. Daftar Jumlah Sertifikat Uji Dan Jumlah Hasil Uji Per Bulan, Tahun 2024**

No	Bulan	Jumlah Sertifikat Uji	Jumlah Hasil Uji
1	Januari	131	608
2	Februari	127	803
3	Maret	142	639
4	April	125	391
5	Mei	146	566
6	Juni	126	376
7	Juli	140	869
8	Agustus	154	711
9	September	129	523
10	Oktober	102	437
11	November	211	754
12	Desember	122	393
<b>Jumlah</b>		<b>1.656</b>	<b>7.070</b>

Sumber : Laporan tahunan UPT BPMPP Tahun 2024

#### Tindak lanjut Rekomendasi UPT BPMPP Atas Pengukuran Capaian Triwulan Tahun 2024

Capaian pengukuran kinerja UPT BPMPP tahun anggaran 2024 dengan realisasi keuangan 93,79% dan realisasi fisik 96,69% . Realisasi keuangan tidak tercapai 100% karena adanya

1. Kegiatan perdin koordinasi dalam daerah sudah dilaksanakan tetapi belum terbayarkan
2. Kegiatan perdin dalam kota sudah dilaksanakan tetapi belum terbayarkan.
3. Kegiatan Makanan dan Minuman Rapat sudah dilaksanakan tetapi belum terbayarkan
4. Kegiatan Bahan – Bahan Bakar dan Pelumas untuk Kendaraan Dinas Jabatan sudah dilaksanakan tetapi belum terbayarkan untuk pemakaian bulan Desember
5. Kegiatan Bahan – Bahan Bakar dan Pelumas untuk Kendaraan Operasional Dinas sudah dilaksanakan tetapi belum terbayarkan untuk pemakaian bulan November – Desember

6. Kegiatan Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi/Survailen SNI Produk Perikanan sudah dilaksanakan tetapi belum terbayarkan
- Capaian target realisasi sertifikat hasil uji diatas 100%, dimana realisasi capainnya 118.29% (1.656 dari target 1.400). Hal ini disebabkan karena :

1. Sub kontrak dari BPPMHKP semakin banyak
2. Semakin banyak costumer dari luar sulsel yang melakukan pengujian
3. Bertambahnya ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi (misalnya pengujian Arsen)
4. Parameter pengujian relatif murah (tarif retribusi sesuai Perda No 1 Tahun 2024)
5. Pelayanan melalui aplikasi E- Sejuta ikan mudah dan bisa diakses dimana saja sehingga proses layanan cepat, pembayaran dapat dilakukan melalui kanal digital misalnya QRIS, Mobile Banking Dan lain-lain, sampel dijemput tanpa biaya dalam area makassar waktu pengujian hanya 6 hari kerja untuk uji mikrobiologi dan kimia, 1 hari kerja untuk uji organoleptik, dan sertifikat uji bisa di download oleh costumer melalui akun masing-masing.

## **Permasalahan Dan Upaya Pemecahan**

### **Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi selama tahun 2024 sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat/ pelaku usaha, serta tuntutan untuk tetap mempertahankan beberapa status akreditasi seperti : ISO/IEC 17025:2017, ISO/IEC 17065:2017 dan ISO/IEC 9001:2015 Namun, belum didukung sumberdaya yang memadai;
2. Pelaksanaan Survailen ISO/IEC 9001:2015 tidak dilaksanakan pada tahun 2024 karena ketidak tersediaan anggaran.
3. Pelaku usaha UKM/UMKM belum seluruhnya menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik (CPIB).
4. Alokasi dan ketersediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pelayanan dan pembinaan mutu hasil perikanan belum memadai.

### **Upaya Pemecahan**

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menghadapi persoalan yang dihadapi sebagai berikut:

1. UPT BPMPP sebagai lembaga sertifikasi perlu melakukan peningkatan kompetensi aparatur seperti pelatihan, magang, dan in-house training;
2. Peningkatan SDM pelaku usaha UKM dan UMKM melalui kegiatan Sosialis dan pelatihan dalam peningkatan mutu produk hasil perikanan.
3. Dalam penyusunan anggaran perlu dilakukan asistensi dan pelibatan tim perencanaan UPT BPMPP.

4. Perlu dukungan Anggaran dalam rangka mendukung pelayanan dan pembinaan mutu hasil perikanan.

**f. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Wilayah I**

Provinsi Sulawesi Selatan dengan segenap wilayah administrasi darat dan perairannya sebagai kawasan maritim bagian Timur Indonesia merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPPI-713) dengan garis pantai sepanjang 1.937 km. Kawasan maritim tersebut ada dalam WPP-713 memiliki empat wilayah zona potensial penangkapan ikan yaitu Teluk Bone, Selat Makassar, Laut Flores dan Laut Bali yang masih memiliki potensi pemanfaatan yang sangat prospektif. Selain itu kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya juga masih memiliki potensi dan prospek pengembangan dan pemanfaatan, khususnya bagi budidaya air payau, budidaya laut dan kegiatan ekowisata pada beberapa kabupaten/kota. Seiring peluang pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang didominasi kegiatan bidang perikanan penangkapan dan pembudidayaan ikan, yang masih memiliki prospek pengembangan yang menjanjikan sehingga peranan pelabuhan perikanan sangat penting sekali dalam kegiatan usaha perikanan yang mana pelabuhan perikanan sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dan di darat ke dalam suatu sistem usaha dan berdaya guna tinggi. Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara terukur dan sistematis terkait dengan pengelolaan pelabuhan perikanan yang dilegitimasi melalui Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 89 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang pengelolaan pelabuhan perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan, dimana Provinsi Sulawesi Selatan telah membentuk UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki wilayah kerja meliputi : (1) PPI Bontobahari Kabupaten Maros, (2) PPI Maccini Baji Kabupaten Pangkep, (3) PPI Polejiwa Kabupaten Barru, (4) PPI Sumpang Binangae Kabupaten Barru, (5) PPI Cempae Kota Pare Pare, (5) PPI Ujung Lero Kabupaten Pinrang, (6) PPI Ulo Ulo Kabupaten Luwu, (7) PPI Balambangan Kabupaten Luwu, (8) PPI Pontap Kota Palopo, dan (9) PPI Lonrae Kabupaten Bone).

UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap tahun 2024 bertujuan untuk

meningkatkan produktivitas dan produksi perikanan tangkap, dan meningkatkan persentase pelabuhan perikanan yang memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional.

### **HASIL PROGRAM/KEGIATAN PADA UPT PELABUHAN WILAYAH I TAHUN 2024**

#### **A. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**

Program pengelolaan perikanan tangkap yang dilaksanakan oleh UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 Provinsi Sulawesi Selatan berupa kegiatan Penetapan Lokasi Pelabuhan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi dengan Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan Prasarana pagu anggaran Rp. 916.585.400,- (Sembilan Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah). UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan telah melaksanakan rehabilitasi jalan kompleks PPI Macchinibaji Kabupaten Pangkep, Pengawasan Jalan Kompleks PPI Perencanaan TPI Barru, Perencanaan air bersih barru, Sedangkan untuk Sub Kegiatan Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan Pengusahan Pelabuhan Perikanan dengan realisasi anggaran pagu 35.138.500 Realisasi Keuangan 9.317.500 Sisa anggaran 25.821.000. item tersebut yaitu Perdin dan Cetak blangko.



**PERENCANAAN AIR BERSIH PPI SUMPANG BINANGAE KAB.BARRU**



**PERENCANAAN REHAB TEMPAT PELELANGAN IKAN PPI BONTOBAHARI KAB.MAROS**



**REVIU PERENCANAAN FASILITAS AIR BERSIH PPI PONTAP KOTA PALOPO**



PERENCANAAN FASILITAS AIR BERSIH PPI LONRAE KAB.BONE



REVIU PERENCANAAN JALAN DAN DRAINASE PPI PONTAP KOTA PALOPO



REVIU PERENCANAAN REHABILITASI TPI PONTAP KOTA PALOPO



PERENCANAAN TURAP PENAHAN TANAH PPI LONRAE KABUPATEN BONE



PENGADAAN TEMPAT SAMPAH RODA DAN MESIN POMPA



PEKERJAAN REHAB JALAN DAN DRAINASE PPI MACCINIBAJI KAB.PANGKEP



**PENGAWASAN JALAN DAN DRAINASE PPI MACCINIBAJI KAB.PANGKEP**

**B. DATA PRODUKSI PADA PPI DI UPT PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I**

Produksi perikanan pada tahun 2024 di setiap PPI yang berada dalam kewenangan UPT Pelabuhan Wilayah 1 dapat dilihat pada tabel berikut :

<b>No.</b>	<b>PPI</b>	<b>Produksi (kg)</b>	<b>Nilai Produksi (Rp)</b>
1.	PPI LONRAE	767.404	14.658.377.000
2.	PPI BONTO BAHARI	16.020	400.177.500
3.	PPI MACCINI BAJI	481.602	13.798.869.000
4	PPI POLE JIWA		
5	PPI SUMPANG BINANGAE	200.408	3.136.215.500
6	PPI CEMPAAE	289.010	5.497.414.977
7	PPI UJUNG LERO	233.202	2.802.747.000
8	PPI BALAMBANG	39.429	1.243.905.000
9	PPI ULO ULO		
10	PPI PONTAP	1.648.469	39.945.180.000
<b>Total</b>		<b>3.675.544</b>	<b>81.482.885.977</b>

*Sumber : Laporan tahunan UPT Pelabuhan Wilayah I Tahun 2024*

Terdapat 2 (dua) PPI di wilayah UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 yang tidak operasional, yaitu PPI Polejiwa Kabupaten Barru dan PPI Ulo-ulو Kabupaten Luwu. Kedua PPI tersebut tidak operasional karena sarana dan prasarana pendukung yang telah rusak dan tidak dapat digunakan, saat ini kawasan PPI Ulo-ulо dimanfaatkan oleh pembudidaya rumput laut sebagai tempat mengikat bibit rumput laut dan penanganan pasca panen rumput laut. Kawasan perairan di sekitar PPI Ulo-ulо dimanfaatkan oleh nelayan setempat sebagai area budidaya rumput laut.

**JASA RETRIBUSI PPI WILAYAH I PAD 2024**

Adapun kegiatan Retribusi jasa Usaha yang sudah ditetapkan di pelabuhan perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	KEGIATAN	NILAI	SATUAN	KET
1	<b>Jasa retribusi kendaraan</b> - Motor - Mobil Roda 4 - Mobil Roda 6	Rp. 2.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000	Per unit Per unit Per unit	
2	<b>Jasa tambat perahu</b> - 0 - 5 GT - 5 - 10 GT - 10 - 30 GT	Rp. 5.000,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,-	Per kapal per hari Per kapal per hari Per kapal per hari	
3	<b>Kios</b> - Tingkat Rendah - Tingkat Sedang - Tingkat Tinggi	Rp. 5.000,- Rp. 7.500,- Rp. 10.000,-	Per Bulan Per Bulan Per Bulan	
4	<b>Lahan</b> - Tingkat Rendah - Tingkat Sedang - Tingkat Tinggi	Rp. 5.000,- Rp. 7.500,- Rp. 10.000,-	Per Bulan Per Bulan Per Bulan	

Sumber : Laporan tahunan UPT Pelabuhan Wilayah I Tahun 2024

Kegiatan Retribusi Jasa Usaha di setiap PPI di UPT.Pelabuhan Perikanan Wilayah I Telah berjalan sesuai Peraturan Daerah Sulawesi selatan No.1 Tahun 2024 . Untuk **Target PAD Tahun 2024 Sebesar Rp. 268.193.000** dan Untuk **Realisasinya PAD Tahun 2024 Sebesar Rp.207.820.266.**

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET	REALISASI	%
1	<b>PPI LONRAE KAB. BONE</b>			
	- Parkir R2, R4/ Tambat Perahu			
	(-) Parkir Roda 2	23.000.000,00	14.555.000,00	63,28
	(-) Parkir Roda 4	18.000.000,00	14.145.000,00	78,58
	(-) Tambat Perahu	6.000.000,00	4.300.000,00	71,67
	- Sewa lahan	4.000.000,00	651.600,00	16,29
	- Kios/wisma	2.400.000,00	9.240.000,00	385,00
	- Jasa TPI	20.000.000,00	15.607.500,00	78,04
2	<b>PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS</b>			
	- Parkir R2, R4/ Tambat Perahu			
	(-) Parkir Roda 2	-	-	-
	(-) Parkir Roda 4	-	-	-
	(-) Tambat Perahu	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00
	- Sewa lahan	1.000.000,00	-	-
	- Kios/wisma	-	-	-
	- Jasa TPI	-	-	-

**Lanjutan.....**

<b>3</b>	<b>PPI MACCINI BAJI KAB. PANGKEP</b>			
	- Parkir R2, R4/ Tambat Perahu			
	(-) Parkir Roda 2	6.000.000,00	3.558.000,00	59,30
	(-) Parkir Roda 4	1.500.000,00	2.495.000,00	166,33
	(-) Tambat Perahu	1.000.000,00	-	-
	- Sewa lahan	1.000.000,00	1.146.000,00	114,60
	- Kios/wisma	-	-	-
	- Jasa TPI	-	-	-
<b>4</b>	<b>PPI SUMPANG BINANGAE KAB. BARRU</b>			
	- Parkir R2, R4/ Tambat Perahu			
	(-) Parkir Roda 2	9.000.000,00	6.900.000,00	76,67
	(-) Parkir Roda 4	12.000.000,00	10.500.000,00	87,50
	(-) Tambat Perahu	1.000.000,00	-	-
	- Sewa lahan	1.000.000,00	3.200.000,00	320,00
	- Kios/wisma	16.000.000,00	9.600.000,00	60,00
<b>5</b>	<b>PPI CEMPAE KOTA PARE PARE</b>			
	- Parkir R2, R4/ Tambat Perahu	7.993.000,00	3.100.000,00	38,78
	(-) Parkir Roda 2	3.000.000,00	4.200.000,00	140,00
	(-) Parkir Roda 4	2.000.000,00	3.700.000,00	185,00
	(-) Tambat Perahu	8.000.000,00	6.725.000,00	84,06
	- Sewa lahan	11.800.000,00	11.400.000,00	96,61
	- Kios/wisma	7.993.000,00	3.100.000,00	38,78
<b>6</b>	<b>PPI UJUNG LERO KAB. PINRANG</b>			
	- Parkir R2, R4/ Tambat Perahu			
	(-) Parkir Roda 2	-	-	-
	(-) Parkir Roda 4	-	-	-
	(-) Tambat Perahu	2.000.000,00	770.000,00	38,50
	- Sewa lahan	7.000.000,00	3.385.000,00	48,36
	- Kios/wisma	5.000.000,00	600.000,00	12,00
<b>7</b>	<b>PPI BALAMBANG KAB. LUWU</b>			
	- Parkir R2, R4/ Tambat Perahu			
	(-) Parkir Roda 2	3.000.000,00	-	-
	(-) Parkir Roda 4	2.500.000,00	-	-
	(-) Tambat Perahu	1.000.000,00	-	-
	- Sewa lahan	25.000.000,00	20.000.000,00	80,00
<b>8</b>	<b>PPI PONTAP KOTA PALOPO</b>			
	- Parkir R2, R4/ Tambat Perahu			
	(-) Parkir Roda 2			
	(-) Parkir Roda 4			
	(-) Tambat Perahu			
	- Sewa lahan			
	- Kios/wisma			
	- Jasa TPI			
<b>9</b>	<b>COLD STORAGE</b>	27.500.000,00	10.416.666,00	37,88
	<b>PABRIK</b>	37.500.000,00	46.625.500,00	124,33
	<b>JUMLAH</b>	<b>268.193.000,00</b>	<b>207.820.266,00</b>	<b>77,49</b>

*Sumber : Laporan tahunan UPT Pelabuhan Wilayah I Tahun 2024*

## PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

### A. PERMASALAHAN

Pelaksanaan Program/Kegiatan di UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 Tahun 2024 terdapat permasalahan yang menghambat pelaksanaannya. Adapun permasalahan dapat disampaikan sebagai berikut :

- Sebagian besar sarana prasarana utama dan pendukung PPI sudah tidak layak digunakan dan dibutuhkan perbaikan.
- Keterbatasan alokasi anggaran untuk pengembangan pelabuhan perikanan memberikan dampak berulang optimalnya pada pelaksanaan operasional pelabuhan perikanan dan pelayanan di kawasan tersebut.
- Fasilitas pendukung operasional pelabuhan yang disewakan kepada pihak ketiga sebagian besar telah rusak sehingga berimbas pada pemenuhan target PAD UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 1.

### B. REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan dalam pelaksanaan Program/Kegiatan di UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024, yaitu :

- Menyusun DED setiap PPI di UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 sehingga memudahkan untuk melakukan pengembangan PPI.
- Melakukan rehabilitasi sarana prasarana utama dan pendukung yang ada di setiap PPI sehingga dapat memaksimalkan pelayanan operasional pelabuhan perikanan dan pelayanan lainnya.

### g. *Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Wilayah II*

Kebijakan pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam rangka meningkatkan produksi di sektor perikanan sebagai input kontribusi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sehingga dibutuhkan pemikiran mendasar tentang percepatan pelaksanaan kegiatan pengembangan kelautan dan perikanan yang mampu mengakomodasikan sarana dan prasarana, pelayanan pada masyarakat dan pengembangan teknologi dan informasi melalui konsep pengembangan kelautan dan perikanan secara regional yang dilakukan di wilayah daerah yang memiliki potensi pengembangan kelautan dan perikanan dengan sejumlah potensi sumberdaya yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan dan kewenangan yang diberikan sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 sehingga dipandang perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Wilayah II agar pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan pemanfaatan, pengawasan serta pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan lebih terarah dan tepat sasaran.

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Wilayah II adalah untuk membantu fungsi teknis khususnya pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun tujuan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Wilayah II adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran bagi pihak terkait bahwa Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Wilayah II berperan penting dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
2. Memberikan data dan informasi serta pelayanan teknis di dalam penanganan hasil tangkapan mulai dari pra penangkapan sampai dengan pasca penangkapan.
3. Memberikan gambaran bagi pihak terkait bahwa dengan fungsi yang diemban oleh Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Wilayah II meliputi penyediaan layanan dalam rangka memudahkan masyarakat dalam melakukan usaha kelautan dan perikanan di pelabuhan perikanan.
4. Membantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Teknis yang dilimpahkan kepada Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Wilayah II.

UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II beralamat di Jalan Tokambang Kecamatan Bontobahari kabupaten Bulukumba dengan wilayah kewenangan meliputi: Kota Makassar (PPI Paotere), Kabupaten Gowa (TPI Barombong), Kabupaten Takalar (PPI Be'ba), Kabupaten Jeneponto (PPI Tanrusampe), Kabupaten Bantaeng (PPI Birea), Kabupaten Bulukumba (PPI Bonto Bahari dan Kajang), Kabupaten Sinjai (PPI Lappa) dan Kabupaten Selayar (PPI Bonehalang).

### **KEGIATAN FISIK APBD TAHUN 2024**

#### **1. Lanjutan Pembangunan Penahan Gelombang (*Breakwater*) PPI Beba Tahap II**

Pelaksanaan Kegiatan Lanjutan Pembangunan Penahan Gelombang (*Breakwater*) PPI Beba Tahap II Desa Tamasaju di Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah pelaksana Oleh PT. BUMI ACEH CITRA PERSADA dengan kontrak dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 03/SP/TKP-UPT.PPWII/BWPPIB.TII/VII/2024/DKP Tanggal 01 Juli 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 15.050.000.000 (Lima Belas Milyard Lima Puluh Juta Rupiah) sedangkan Pengawas dilapangan adalah Pekerjaan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Penahan Gelombang (*Breakwater*) PPI Beba Tahap II Desa Tamasaju di Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah CV. TRIMAKO ABDI KOMSULINDO 04/SP/TKP-UPT.PPWII/P.LPPBW.T.II/VII/2024/DKP Tanggal 01 Juli 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 392.626.400 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah). Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Penahan Gelombang (*Breakwater*) PPI Beba Tahap II Desa Tamasaju di Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar Provinsi

Sulawesi Selatan Desa Tamasaju di Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar Provinsi Sulawesi Selatan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan batas kontrak pada tanggal 29 November tahun 2024 dimana telah diselesaikan oleh PT. BUMI ACEH CITRA PERSADA sesuai dengan hasil yang telah di sepakati sepanjang 177,60 meter.

Namun dalam pelaksanaan Lanjutan Pembangunan Penahan Gelombang (*Breakwater*) PPI Beba Tahap II Desa Tamasaju di Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar Provinsi Sulawesi Selatan terdapat sedimen lumpur sehingga Panjang disepakati sepanjang **166,00 meter** dimana berdasarkan hasil survei sub-bottom profiling di lokasi rencana pembangunan breakwater Pelabuhan Beba, dapat disimpulkan bahwa ketebalan lapisan sedimen lunak di area tersebut bervariasi antara sekitar 50 cm hingga 100 cm. Lapisan sedimen ini kemungkinan didominasi oleh material lumpur dan lempung, yang mengindikasikan sifat sedimen yang cenderung kohesif dan memiliki daya dukung yang rendah. Variasi ketebalan dan komposisi material ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan fondasi breakwater, karena sedimen lunak yang dominasi material lempung dapat mempengaruhi stabilitas struktur breakwater jika tidak dilakukan penguatan atau penanganan yang tepat. Temuan ini memberikan dasar penting bagi langkah-langkah teknis selanjutnya dalam memastikan keamanan dan keberlanjutan konstruksi di area tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian lapisan sedimen lunak di area rencana pembangunan breakwater Pelabuhan Beba menggunakan teknologi Sub Bottom Profiling (SBP), terdapat beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diambil untuk mendukung kesuksesan pekerjaan Pekerjaan fisik Lanjutan Pembangunan Penahan Gelombang (*Breakwater*) PPI Beba Tahap II Desa Tamasaju di Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar Provinsi Sulawesi Selatan Diperlukan pemetaan lebih mendetail di seluruh area yang direncanakan untuk pembangunan breakwater. Hasil SBP yang telah diperoleh dapat dijadikan referensi untuk mengidentifikasi area-area yang memiliki potensi risiko, seperti lapisan sedimen yang lunak yang dapat mempengaruhi stabilitas struktur breakwater. Pemetaan ini akan membantu dalam menentukan desain breakwater yang tepat dan untuk memperkuat desain breakwater sesuai dengan karakteristik sedimen bawah laut.

Berdasarkan identifikasi lapisan sedimen lunak, disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan teknik penguatan fondasi, seperti pemanatan atau penggunaan material geotekstil, untuk menambah daya dukung lapisan dasar laut. Pemilihan metode penguatan harus mempertimbangkan ketebalan dan jenis sedimen yang ada untuk memastikan fondasi breakwater tidak mengalami pergeseran atau penurunan.

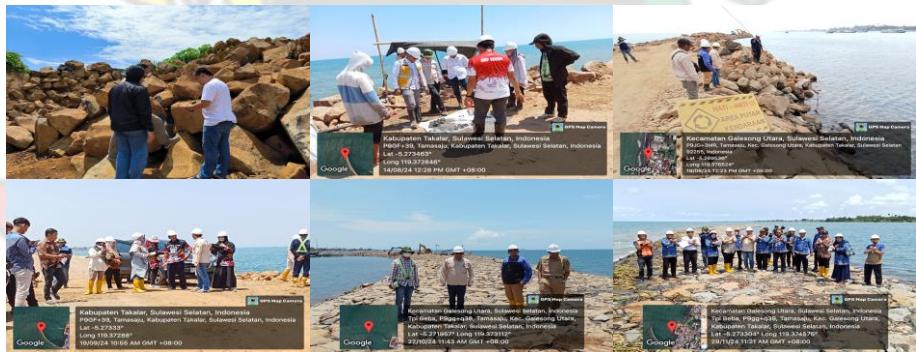
Direkomendasikan untuk melakukan pemantauan jangka panjang terhadap kondisi lapisan sedimen dan struktur breakwater setelah konstruksi selesai. Sub Bottom Profiling dapat digunakan secara berkala untuk memeriksa apakah ada perubahan signifikan pada lapisan sedimen, terutama setelah terjadi arus atau aktivitas geologis yang dapat mempengaruhi fondasi.

Kolaborasi dengan Ahli Geoteknik Untuk memastikan hasil yang akurat dan sesuai standar teknis, direkomendasikan untuk melibatkan ahli geoteknik dalam analisis data SBP dan perancangan fondasi breakwater. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa semua keputusan teknis yang diambil berdasarkan data sedimen memiliki validitas yang kuat dan relevan dengan kondisi lapangan.

Implementasi saran dan rekomendasi di atas diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan proyek pembangunan breakwater di Pelabuhan Beba, sekaligus meminimalkan risiko teknis yang mungkin timbul selama atau setelah pekerjaan Pekerjaan fisik Lanjutan Pembangunan Penahan Gelombang (*Breakwater*) PPI Beba Tahap II Desa Tamasaju di Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebagai penutup, penelitian mengenai lapisan sedimen lunak di area rencana pembangunan breakwater Pelabuhan Beba, Sulawesi Selatan, dengan menggunakan teknologi Sub Bottom Profiling, merupakan langkah dalam memastikan keamanan dan keberlanjutan infrastruktur laut. Pemahaman mendalam tentang kondisi bawah permukaan laut akan memungkinkan perencanaan yang lebih baik, serta mencegah potensi risiko yang dapat timbul akibat ketidakstabilan lapisan sedimen lunak.

Penggunaan teknologi SBP dalam studi ini tidak hanya memberikan data yang komprehensif mengenai struktur lapisan bawah laut, tetapi juga menjadi alat yang penting dalam mitigasi risiko pembangunan. Dengan demikian, hasil dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat mendukung pembangunan breakwater yang lebih kokoh, berfungsi optimal, dan bertahan lama, sejalan dengan kebutuhan operasional Pelabuhan Beba sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur maritim di Sulawesi Selatan.



## 2. Rehabilitasi Tempat Pemasaran Ikan (TPI) di PPI Kajang Desa Tana Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi TPI di PPI Kajang di Desa Tana Jaya di Kec. Kajang Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah pelaksana Oleh CV. TIGA DARA INDAH dengan kontrak dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II dengan Nomor : 01/SP/TKP-UPT.PPWII/RTPI/VII/2024/DKP Tanggal 26 Juni

2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 586.660.772 (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) sedangkan Pengawas dilapangan adalah Pekerjaan Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi TPI di PPI Kajang di Desa Tana Jaya di Kec. Kajang Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah CV. REZI ALTHAANI o2/SP/TKP-UPT.PPWII/P.RTPI/VII/2024/DKP Tanggal 26 Juni 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah).

Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi TPI di PPI Kajang di Desa Tana Jaya di Kec. Kajang Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah pelaksana Oleh CV. TIGA DARA INDAH berjalan dengan lancar dimana telah menyelesaikan pekerjaan pada tanggal 23 Oktober 2024 dimana telah diserahkan oleh Pihak UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.



**TINDAKLANJUT REKOMENDASI ATAS PENGUKURAN CAPAIAN TRIWULAN  
TAHUN 2024**

Kegiatan operasional UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mencakup berbagai aspek baik yang langsung dikelola oleh pelabuhan sendiri maupun dikelola oleh institusi/lembaga lain yang beraktifitas di dalam pelabuhan, sehingga penetapan visi dan misi tersebut dengan tujuan/harapan mampu mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelabuhan perikanan dalam memberikan pelayanan yang bermutu, menuju sasaran yang ingin dicapai dan menjadi acuan serta memberikan inspirasi dan motivasi kerja bagi organisasi. Dengan mengacu pada tujuan pembangunan perikanan tangkap, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan;
2. Meningkatnya kesejahteraan nelayan. Sasaran strategis UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka peningkatan operasional pelabuhan, melalui pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana terutama pembangunan sarana prasarana serta didukung dengan peningkatan kualitas aparatur UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, yang ingin dicapai dalam kurun waktu per triwulan Tahun 2024.

Sasaran UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan nelayan meningkat di UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Tata kelola sumber daya perikanan tangkap di UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Produksi Perikanan Tangkap meningkat di UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang berdaya saing dan berkelanjutan;
7. Pengelolaan awak kapal perikanan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;

8. Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan di Pelabuhan Perikanan UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkup Pelabuhan Perikanan UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun Program di UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
  - A. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan dengan Alokasi APBD tahun 2024 Rp. 17.876.004.250,- telah dilaksanakan dengan realisasi fisik sebesar 100 persen dan realisasi keuangan sebesar 100 persen.
  - B. Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan dengan Alokasi APBD tahun 2024 Rp. 72.234.500,- telah dilaksanakan dengan realisasi fisik sebesar 100 persen dan realisasi keuangan sebesar 100 persen.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi
  - A. Pelaksanaan Penunjang Pelabuhan Perikanan dengan Alokasi APBD tahun 2024 Rp. 631.673.724,- telah dilaksanakan dengan realisasi fisik sebesar 95,56 persen dan realisasi keuangan sebesar 84,70 persen.
  - B. Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang tidak dilaksanakan / tidak realisasi adalah sebagai berikut :
    - Bahan Bakar Minyak (BBM) Operasional Genzet Rp. 8.130.000,-
    - Peralatan CCTV di PPI Beba Kab. Takalar Rp. 13.270.000,-
    - Jaminan Kesehatan, Keselamatan dan Kematian Seluruh Non ASN

### III. ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

#### 3.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Struktur Organisasi Dinas dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan susunannya sebagai berikut :

**Tabel 3. Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024**

No.	Jabatan	Nama	Nip.	Pangkat/Golongan
1	Kepala Dinas	Dr. M. Ilyas, S.T., M.SC.	197006061996031006	Pembina Utama Muda (IV/c)
2	Sekretaris	Dr. Hj. Sitti Masniah Djabir S.Pi., M.P.	197305022005012010	Pembina Tingkat I (IV/b)
3	Kasubag UKH	Muhammad Risqan Qadri S.I.P., M.Si.	197901092010011019	Penata Tingkat I (III/d)
4	Kasubag Keuangan	Sitti Nurdjihad S.Pi., M.P.	196908231999032005	Pembina (IV/a)
5	Kasubag Program	Nurtjahyan Husain S.St.Pi, M.Si	198405122006041004	Pembina (IV/a)
6	Kabid Kelautan dan Pesisir	Dr. Ir. H. Abdul Muas, M.Si.	196704161998031003	Pembina Tingkat I (IV/b)
7	Kabid Perikanan Tangkap	Andi Mei Agung, S.ST.Pi.	197805302003121006	Pembina Tingkat I (IV/b)
8	Kabid Budidaya dan Daya Saing Produk	Suhartono Nurdin S.Pi., M.P., Ph.D.	198207072008031001	Pembina (IV/a)
9	Kabid Pengawasan	Ir. Hary Rustam Tawainella, M.M.	196703051999031004	Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan Fungsional				
10	Analisis Pasar Hasil Perikanan - Ahli Madya	Ir. Adhy Cahya Slamet, M.Si.	19650917199312100	Pembina Tingkat I (IV/b)
11	Analisis Pasar Hasil Perikanan - Ahli Madya	Ir. Ignatius Eko Susetiyo, M.M.	196601011995031005	Pembina (IV/a)
12	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan - Ahli Madya	Ir. Rosdiana, M.M.	196701161995032002	Pembina Tingkat I (IV/b)
13	Perencana - Ahli Madya	Marhamah, ST., M.Si.	197604202001122001	Pembina (IV/a)
14	Arsiparis - Ahli Muda	Nurlaila Sangkala Sirate, S.Sos.	197309031993032005	Penata Tingkat I (III/d)

*Sumber : Subag Kepegawaian*

Susunan organisasi tersebut di atas juga dilengkapi dengan 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan 7 (Tujuh) Cabang Dinas Kelautan yang melaksanakan tugas sebagai pelaksana langsung kegiatan teknis di daerah. Adapun UPT dan CDK yang dimaksud adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. Susunan Organisasi UPT dan CDK Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024**

No.	Jabatan	Nama	Nip	Pangkat/Golongan
1.	Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I			
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Hamsinah S.Pi.	196812082007012014	Penata Tingkat I (III/d)
	Kepala Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	Emirat Mayassir, S.ST.Pi.	197711032003121008	Penata Tingkat I (III/d)
	Kepala Seksi Tata Kelola Pelabuhan			
2.	Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II	Ijas Fajar, S.STP, M.A.P.	198004302000121001	Pembina Tingkat I (IV/b)
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Febrian Budianto, S.Pi., M.M.	197302011999031008	Pembina (IV/a)
	Kepala Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	Adi Bastian, S.St.Pi	197905102008011008	Penata Tingkat I (III/d)
	Kepala Seksi Tata Kelola Pelabuhan	Muh. Thamrin Nour, A.P.I., M.Si.	197507042007011013	Pembina (IV/a)
3.	Kepala UPT Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	Abdul Kadir, S.Pi., M.Si.	196712311999031031	Pembina (IV/a)
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Muhammad Noer Fadri, S.Pi.	198405052006041016	Penata Tingkat I (III/d)
	Kepala Seksi Produksi	Andi Mallombasang, S.Pi., M.Si.	197209082000031007	Pembina (IV/a)
	Kepala Seksi Pelayanan Teknologi dan Kesehatan Lingkungan	Deppalanna, S.Pi., M.M.	197406051998031007	Pembina (IV/a)
4.	Kepala UPT Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan	Dr. Siti Zaleha Soebarini, A.P.I., M.Si.	196709131991032016	Pembina Tingkat I (IV/b)
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	H. Masdar, S.Sos., M.A.P.	197406041998031005	Pembina (IV/a)
	Kepala Seksi Standarisasi Mutu	Muhammad Hasby Rasyad, S.Pi., M.Si.	198001142010011011	Penata Tingkat I (III/d)
	Kepala Seksi Pengembangan Produk	Muhammad Ridha, S.Pi., M.Si.	196806151998031013	Pembina (IV/a)
5.	Kepala Cabang Dinas Kelautan Kepulauan Selayar	Marzuki Badok, S.P., M.Sc.	196709041989031010	Pembina (IV/a)
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Amir, S.Sos.	196812311989031033	Penata Tingkat I (III/d)
	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Sitti Syamsuarni, S.Pi., M.Si.	197212102007012015	Penata (III/c)
	Kasie Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perairan	-	-	-

*Lanjutan.....*

No.	Jabatan	Nama	Nip	Pangkat/Golongan
6.	<b>Kepala Cabang Dinas Kelautan Pangkajene dan Kepulauan</b>	Aron Arfandy Pananrang, S.Pi.	198008272009041005	Penata Tingkat I (III/d)
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Andi Ashurni SL, S.H.	197104191993031009	Penata Tingkat I (III/d)
	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Muh. Erwin Azis S.Pi.	198407082010011019	Penata Tingkat I (III/d)
	Kepala Seksi Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perairan	Tenri AR, S.Pi.	197604222008012013	Penata Tingkat I (III/d)
7.	<b>Kepala Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya</b>	Arsal Abdullah, S.Hut.,M.Hut.	197002072010011009	Penata Tingkat I (III/d)
	Kepala Sub Bagian TU	Ir. Ibrahim, M.M.	196702231998031005	Pembina (IV/a)
	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Kelik Kamaruddin, S.Pi.	196807241990011001	Penata (III/c)
	Kepala Seksi Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perairan	Irwan Rahim, S.Pi.	197805102009011017	Penata Tingkat I (III/d)
8.	<b>Kepala Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng</b>	Sukmawati Gaffar, S.ST.Pi., M.Si.	197303311998032009	Pembina (IV/a)
	Kepala Tata Usaha			
	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Faizal K, S.Pi., M.Si.	196902032009021001	Pembina (IV/a)
	Kepala Seksi Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perairan	Widyawati Rusman, S.E., M.Si.	197210281993032004	Pembina Tingkat I (IV/b)
9.	<b>Kepala Cabang Dinas Kelautan Bosowasi</b>	Herimisniaty, S.Pi., M.Si.	197309231993032006	Pembina (IV/a)
	Kepala Sub Bagian TU	Taufik, S.Pi., M.M.	196904161992031013	Pembina (IV/a)
	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Nursalam, S.Pi., M.Si.	196809042005021001	Pembina (IV/a)
	Kepala Seksi Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perairan			
	<b>Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan</b>	A. M. Suhriawan S, S.STP, M.M.	198601132006021002	Pembina (IV/a)
	Kepala Tata Usaha	Andi Yusneri, S.ST.Pi., M.Si.	197611112003122009	Pembina (IV/a)
	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Nursalam, S.Pi.	197106012000031006	Penata Tingkat I (III/d)
	Kepala Seksi Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perairan	Rosliawati Arfah, S.Pi.,M.Si.	196803082007012022	Penata Tingkat I (III/d)

Lanjutan.....

No.	Jabatan	Nama	Nip	Pangkat/Golongan
11	Kepala Cabang Dinas Kelautan Mammivasata	Sayyid Zainal Abidin, S.Pi.	198205182009031006	Penata Tingkat I (III/d)
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Ismail, S.Pi.	198408032011011003	Penata (III/c)
	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Achmad Saenal, A.P.I.	197301302007011009	Penata Tingkat I (III/d)
	Kepala Seksi Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perairan	Rizky Sapharina Utami, S.Pi, M.Si.	198312042011012003	Penata Tingkat I (III/d)

Sumber : Subag Kepegawaian

### 3.2. Kepegawaian

Pada tahun 2024 tercatat jumlah pegawai Negeri Sipil lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 182 orang naik 0,6 % bila dibandingkan dengan tahun 2023. Adapun jumlah komposisi pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 5. Jumlah dan Komposisi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 dan 2024**

Tingkat/Gol	Tahun				(%)
	2023	%	2024	%	
IV	44	24,3	45	24,7	2,3
III	125	69,1	128	70,3	2,4
II	10	5,5	8	4,4	(25)
I	2	1,1	1	0,6	(50)
<b>Jumlah</b>	<b>181</b>	<b>100</b>	<b>182</b>	<b>100</b>	<b>0,6</b>

Sumber : Sub. Bag. Kepegawaian

**Tabel 6. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan dilingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 31 Desember 2024**

No	Pangkat/Golongan/Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina Utama/ IV e	0	0	0
2	Pembina Utama Madya/ IV d	0	0	0
3	Pembina Utama Muda / IV c	1	0	1
4	Pembina Tingkat I / IV b	5	5	10
5	Pembina/ IV a	19	15	34
6	Penata Tingkat I/ III d	33	48	81
7	Penata/ III c	11	8	19
8	Penata Muda Tingkat I / III b	8	3	11
9	Penata Muda / III a	9	8	17
10	Pengatur Tingkat I / II d	3	0	3
11	Pengatur / II c	3	0	3
12	Pengatur Muda Tingkat I /II b	1	0	1
13	Pengatur Muda/ II a	0	1	1
14	Juru Tingkat I / I d	0	0	0

*Lanjutan.....*

No	Pangkat/Golongan/Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
15	Juru/ I c	1	0	1
16	Juru Muda Tingkat I / I b	0	0	0
17	Juru Muda/ I a	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>94</b>	<b>88</b>	<b>182</b>

*Sumber : Subag Kepegawaian*

**Tabel 7. Rekapitulasi PNS Berdasar Pendidikan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 31 Desember 2024.**

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S3	4	2	6
2	S2	25	32	57
3	S1	47	51	98
4	Sarjana Muda	4	0	4
5	SMA	13	3	16
6	SMP	0	0	0
7	SD	1	0	1
	<b>Total</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>88</b>

*Sumber : Subag Kepegawaian*

**Tabel 8. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 31 Desember 2024**

No	Bidang/Unit	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	0	1
2	Sekretariat	18	22	40
3	Bidang Kelautan dan Pesisir	4	7	11
4	Bidang Perikanan Tangkap	5	5	10
5	Bidang Pengawasan	2	5	7
6	Bidang Budidaya dan Daya Saing Produk	4	8	12
7	Cabdin Kelautan Kep. Selayar	3	1	4
8	Cabdin Kelautan Pangkajene dan Kepulauan	7	3	10
9	Cabdin Kelautan Luwu Raya	6	4	10
10	Cabdin Kelautan Ajatappareng	4	3	7
11	Cabdin Kelautan Bosowasi	3	3	6
12	Cabdin Kelautan Wilayah Selatan	2	5	7
13	Cabdin Kelautan Mamminasata	5	2	7
14	UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I	6	6	12
15	UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II	11	1	12
16	UPT Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan	4	6	10
17	UPT Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	7	3	10
18	Jabatan Fungsional	2	3	5
18	Dipekerjakan	0	1	1
	<b>Total</b>	<b>94</b>	<b>88</b>	<b>182</b>

*Sumber : Subag Kepegawaian*

### 3.3. Keuangan

#### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan juga menangani PAD, yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada beberapa obyek pajak.

Untuk tahun 2024 Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ditargetkan sebesar Rp. 1,904,000,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1,928,587,966 atau 101.29 %. Adapun sumber dan target besarnya PAD dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9. Target dan Realisasi PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024**

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>1</b>	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan</b>	<b>990,020,000</b>	<b>1,291,825,000</b>	<b>130.48</b>
	➤ Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	180,020,000	151,145,000	83.96
	- Kerjasama Operasional Sewa Tambak	138,875,000	110,000,000	79.21
	- Sewa Rumah Dinas	37,125,000	37,125,000	100.00
	- Koperasi Pegawai	4,020,000	4,020,000	100.00
	➤ Retribusi Penyewaan Tanah	10,000,000	5,500,000	55.00
	- Kerjasama Sewa Lahan	10,000,000	5,500,000	55.00
	➤ Retribusi Pemakaian Laboratorium	800,000,000	1,135,180,000	141.90
	- Pemakaian alat Menguji untuk Lab BPMPP	800,000,000	1,135,180,000	141.90
<b>2</b>	<b>Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan</b>	<b>480,380,000</b>	<b>482,023,466</b>	<b>100.34</b>
	UPT Pelabuhan Wil. I	159,980,000	207,820,466	129.90
	- Jasa Parkir			
	• Sewa Parkir Roda Dua	44,000,000	28,113,000	63.89
	• Sewa Parkir Roda Empat	35,000,000	31,340,000	89.54
	• Sewa Parkir Tambat Perahu	35,000,000	9,770,000	27.91
	- Sewa Kios	5,480,000	27,240,000	497.08
	- Jasa Hasil Lelang/TPI	10,000,000	15,607,500	156.08
	- Kerjasama sewa Lahan	5,500,000	35,107,800	638.32
	- Pabrik dan Pengolahan	10,000,000	50,225,500	502.26
	- Coldstorage	15,000,000	10,416,666	69.44
	UPT Pelabuhan Wil. II	320,400,000	274,203,000	85.58
	- Jasa Parkir			
	• Sewa Parkir Roda Dua	33,600,000	15,900,000	47.32
	• Sewa Parkir Roda Empat	40,000,000	48,000,000	120.00
	• Sewa Parkir Tambat Perahu	30,000,000	45,600,000	152.00
	- Sewa Wisma	-	1,000,000	-
	- Sewa Kios	11,000,000	15,000,000	136.36
	- Jasa Hasil Lelang/TPI	30,000,000	15,147,000	50.49
	- Kerjasama sewa Lahan	145,800,000	133,556,000	91.60
	- Coldstorage	30,000,000	-	-

*Lanjutan.....*

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>3</b>	- <i>Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah</i>	<b>430,000,000</b>	<b>151,035,000</b>	<b>35,12</b>
	- BBI Lajoa Soppeng	130,000,000	112,000,000	86.15
	- UPT PBAPL Bojo / Barru	250,000,000	33,875,000	13.55
	- UPT PBAPL Bojo / KJA	50,000,000	5,160,000	10.32
<b>4</b>	- <i>Pendapatan Lain-lain yang Sah</i>	<b>3,600,000</b>	<b>3,704,500</b>	<b>102.90</b>
	- Denda		104,500	
	- Kantin Pegawai	3,600,000	3,600,000	100.00
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		<b>1,904,000,000</b>	<b>1,928,587,966</b>	<b>101.29</b>

*Sumber : Subag Keuang*

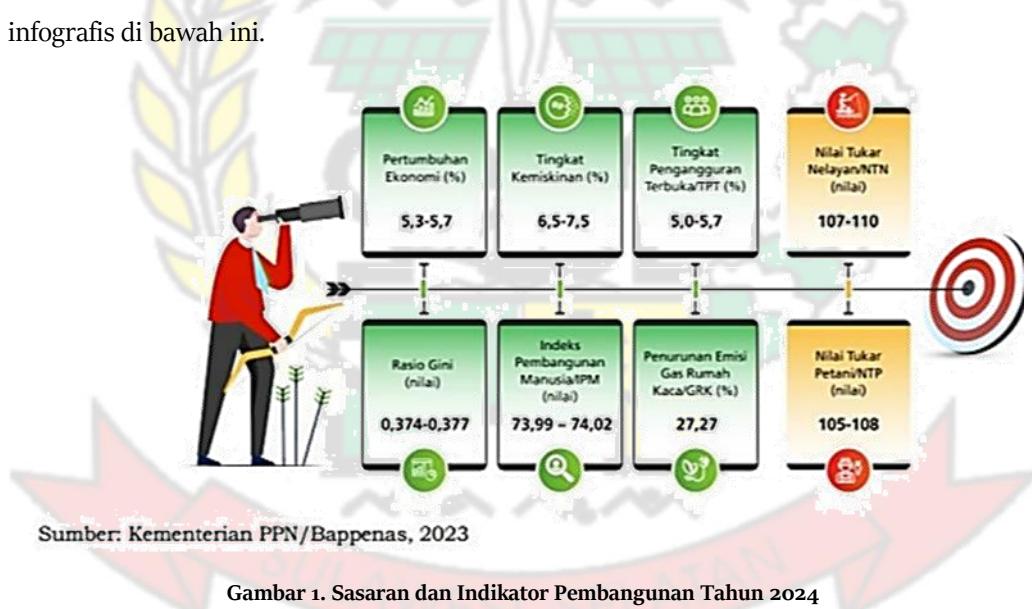


## IV. PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SULAWESI SELATAN

### 4.1. Kebijakan dan Program Strategis

#### a. Kebijakan

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2024, ditetapkan strategi pembangunan yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat dalam infografis di bawah ini.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Gambar 1. Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2024

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 pada RPD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu seluruh kebijakan pembangunan yang telah dijalankan pada akhir periode sebelumnya diakselerasi pencapaian kinerjanya. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2023-2024, maka tema pembangunan Tahun 2024 ditetapkan yaitu "**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**". Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari Perubahan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024- 2026 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2020-2024 dan RKP Tahun 2024.

Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2024 yaitu Peningkatan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang inklusif, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif (TATA KELOLA)
  2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata (INFRASTUKTUR)
  3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah (PENGEMBANGAN WILAYAH DAN HILIRISASI)
  4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata (SOSIAL EKONOMI)
- Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan (LINGKUNGAN HIDUP)



Gambar 2. Kerangka Prioritas Nasional Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis pada berbagai prospek dan tantangan ekonomi daerah, dan sejalan dengan arah kebijakan ekonomi makro tahun 2024, maka strategi yang akan ditempuh oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta inovasi dalam pelayanan publik;
2. Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah yang berkeadilan;
3. Pengembangan komoditas sektor unggulan pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;
4. Peningkatan Pemerataan pembangunan, Pengembangan dan peningkatan kualitas iklim usaha perekonomian daerah;
5. Menurunkan kemiskinan;
6. Meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan dan kesempatan kerja, termasuk penyandang disabilitas diberbagai bidang pembangunan serta Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja;
7. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah;
8. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
9. Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Sulawesi Selatan berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat;
10. Peningkatan peran dan kapasitas perempuan, anak dan disabilitas dalam pembangunan;
11. Hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam;
12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

**Tabel.10. Keterkaitan Renja dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024**

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	Satuan	Capaian 2022	Target 2024
1	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Mengoptimalkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang akuntabel	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Huruf/angka	27,07 (B)	62,27 (B)
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah	2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Huruf/angka	68,08 (B)	68,52 (B)

*Lanjutan.....*

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	Satuan	Capaian 2022	Target 2024
2	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi	%	9,40	11,01
3	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	Tingkat Kemiskinan	%	8,63	7,30-7,89
4	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Potensi Penurunan emisi GRK (Ton CO <sub>2</sub> Eq)	ton CO <sub>2</sub> Eq	7.004,89	7.351,3

Arah kebijakan pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari tahapan pembangunan lima tahun keempat dari RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025, yang difokuskan pada pemerataan hasil-hasil pembangunan dan pertumbuhan yang berkeadilan dan mengatasi efek pertumbuhan pada tahapan sebelumnya yang menyebabkan kesenjangan sosial-ekonomi antar lapisan dan antar wilayah.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2024 maka berdasarkan RPD 2024-2026 dan arahan kebijakan Pj. Gubernur Sulawesi Selatan diarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yaitu :

**Tabel 11. Misi dan Kebijakan Prioritas Tahun 2024 dengan mengacu RPJPD Sulawesi Selatan (Periode kelima 2005-2025)**

Misi ke		Kebijakan Prioritas	Kebijakan Pj. Gubernur tahun 2024
1	Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan social ekonomi yang berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penajaman implementasi program pada kabupaten/kota yang angka kemiskinannya paling tinggi;</li> <li>2. Pelibatan multipihak dalam penanganan keamanan pangan</li> <li>3. Penguatan akses pasar dengan daya saing harga yang tinggi bagi produk petani, peternak dan nelayan</li> </ol>	<p>Tematik Penanganan Kemiskinan</p> <p>Tematik Ketahanan Pangan dan Penanganan stunting</p> <p>Tematik Pengendalian Inflasi</p>

Lanjutan.....

Misi ke		Kebijakan Prioritas	Kebijakan Pj. Gubernur tahun 2024
		4. Hilirisasi produk unggulan untuk pengembangan industri strategis;	Tematik Pengendalian Inflasi
		5. Fasilitasi dan kordinasi antar kabupaten/kota dalam pemeliharaan dan pemulihian kondisi ekologis daerah aliran sungai serta danau dan kawasan pesisir;	Tematik Ketahanan Pangan
5	Meningkatkan peran Sulawesi Selatan sebagai wilayah kepulauan yang mandiri dan maju dalam memperkuat ketahanan nasional	1. Pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam kelautan melalui perumusan tata ruang kawasan pesisir dan laut yang diarahkan untuk mendukung ketahanan sosialekonomi masyarakat pada pulau-pulau di Sulawesi Selatan;	Tematik Ketahanan Pangan

Alasan penjelasan proses dilaksanakan di tahun 2024, dimana seluruh kebijakan pembangunan yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya diakselerasi pencapaian kinerjanya. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian sebagai respons terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global. Pada tahun ini juga dilakukan review RPJMD 2018-2023 guna melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam merespons perubahan lingkungan strategis yang dianggap signifikan pengaruhnya. Oleh karena itu Prioritas kebijakan pembangunan pada tahun 2024 diarahkan pada **ketahanan pangan , penanganan kemiskinan, penanganan stunting dan pengendalian inflasi**. **Arahan pada pertumbuhan dan pemerataan** pembangunan menjadi satu kesatuan yang diarahkan pada pencapaian tingkat kemakmuran masyarakat. Kualitas pertumbuhan merupakan pertumbuhan yang mengedepankan unsur pemerataan yang berkeadilan, sedangkan pemerataan pembangunan pada semua sektor pembangunan di kabupaten/Kota berdasarkan potensi dan peluang yang dimiliki setiap daerah; **Kualitas pertumbuhan** diarahkan pada pertumbuhan sektor unggulan, yang dipicu oleh meningkatnya nilai tambah pengelolaan SDA khususnya pada sektor perikanan dan industri pengolahan, diharapkan memicu pertumbuhan sektor unggulan lainnya. Untuk meningkatkan nilai tambah dalam proses produksi barang dan jasa dibutuhkan dukungan investasi; **Optimalisasi pengelolaan SDA yang berkelanjutan** menekankan pada kelestarian lingkungan hidup, berwawasan lingkungan, dan ramah lingkungan.

***b. Program Strategis Tahun 2024***

Bentuk amanah yang tertuang dalam Dokumen RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2024 untuk sektor Perikanan terdapat **program Prioritas** :

**1. Tematik Penanganan Kemiskinan**

- Pengembangan Rumah Ikan dan Terumbu Buatan
- Pengembangan Kolam Terpal Budidaya Ikan Air Tawar
- Pengembangan komoditas unggulan Rumput Laut dan komoditas lainnya yang bernilai ekonomis

**2. Tematik Penurunan Stunting**

- Dukungan peningkatan kompetensi dan pengujian mutu produk hasil perikanan, dan sertifikasi produk untuk mendukung eksport hasil perikanan Sulsel
- Pameran dan Promosi Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Nasional/Daerah

**3. Tematik Pengendalian Inflasi**

- Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
- Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
- Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

**4. Tematik Ketahanan Pangan**

- Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien
- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
- Penjaminan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
- Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Tersedia dan beroperasinya kendaraan berpendingin Untuk Mendukung Kualitas dan daya saing produk perikanan)
- Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1

Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil, Usaha Perikanan Budidaya dan usaha pengolahan produk perikanan.

**Dana APBD**

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**

■ **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

■ **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

■ **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

■ **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**

- Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah

■ **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

■ **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

■ **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Aset Tak Berwujud

■ **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

■ **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**2. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

■ **Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**

- Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
- Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

■ **Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**

- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

■ **Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

- Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

**3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**

- **Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**
  - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
  - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
  - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- **Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**
  - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
  - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- **Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**
  - Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
- **Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**
  - Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
- **Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**
  - Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
- **Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**
  - Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT.

#### 4. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

- **Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**
  - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
  - Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
- **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**
  - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
  - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
  - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi

■ **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**

- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

**5. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

■ **Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**

- Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
- Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil
- Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

■ **Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya.
- Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya.
- Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

**6. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**

■ **Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

- Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

■ **Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**

- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
  - Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing
- **Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**
- Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
  - Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

#### **4.2. Sumber Pembiayaan**

##### **4.2.1. Dana Tugas Pembantuan**

Pada tahun 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mengelola dana sebesar Rp. 3,785,720,000 atau terjadi kenaikan sebesar 7,03 % dari tahun anggaran 2023 Rp. 3,536,941,000. Anggaran Tugas Pembantuan (TP) tersebut dialokasikan pada 6 Satuan kerja yaitu :

- Satker Sekretariat sebesar Rp. 189,334,000 dengan realisasi sebesar Rp. 188,237,700 (99,42 %),
- Satker Perikanan Tangkap sebesar Rp. 1,197,742,000 dengan realisasi sebesar Rp. 1,193,451,700 (99,6 %),
- Satker Perikanan Budidaya sebesar Rp. 653,644,000 dengan relisasi sebesar Rp. 647,670,610 (99,09 %),
- Satker Pengawasan Sumberdaya KP sebesar Rp. 188,152,000 dengan realisasi sebesar Rp. 188,100,000 (99,97 %),
- Satker Daya Saing Produk KP sebesar Rp. 436,088,000 dengan realisasi sebesar Rp. 435,644,500 (99,9 %),
- Satker Pengelolaan Ruang Laut Rp. 1,120,760,000 dengan realisasi sebesar Rp. 1,108,431,640 (98,9 %).

##### **4.2.2. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Jumlah penerima dana DAK untuk Tahun Anggaran 2024 sebanyak 5 kabupaten dengan jumlah dana sebesar Rp. 34,539,091,000, bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 86,627,590,000,- mengalami penurunan sebesar 60,1 %, sedangkan untuk DKP Provinsi mendapatkan dana DAK pada tahun 2024 sebesar Rp. 23,010,677,000 dengan realisasi dana DAK sebesar Rp. 22,560,635,435.

**Tabel 12. Daftar Kabupaten/Kota Penerima DAK Tahun 2024**

No	Kabupaten	DAK (Rp)	Realisasi	%	Ket
1	PROPINSI	23,010,677,000	22,560,635,435	8.04	Pekerjaan sudah selesai dan terdapat sisa kontrak
2	MAROS	8,251,720,000	8,193,788,182	9.30	Pekerjaan sudah selesai dan terdapat sisa kontrak
3	PINRANG	8,404,850,000	8,252,090,000	8.18	Pekerjaan sudah selesai dan terdapat sisa kontrak
4	LUWU	9,055,946,000	8,769,723,663	6.84	Pekerjaan sudah selesai dan terdapat sisa kontrak
5	JENEPONTO	7,556,575,000	6,924,180,009	1.63	Pekerjaan sudah selesai dan terdapat sisa kontrak
6	TANA TORAJA	1,270,000,000	1,207,913,000	95.11	Pekerjaan sudah selesai dan terdapat sisa kontrak
<b>Total</b>		<b>57,549,768,000</b>	<b>55,908,330,289</b>	<b>97.15</b>	

*Sumber : Subag Perencanaan*

#### **4.2.3. Dana Daerah**

Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan selain di danai Tugas Pembantuan juga didukung pendanaan APBD, untuk tahun 2024 total anggaran sebesar Rp. 91,464,384,438.0,- ini berarti terjadi penurunan sebesar 8,6 % dari tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 100,020,581,653.0,

##### **a. Belanja Daerah**

Belanja daerah yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2023 sebesar Rp. 91,464,384,438.0,- dengan realisasi keuangan Rp. 85,995,489,124.0 (94,02 %).

Dana tersebut diperuntukkan untuk membiayai kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan. Alokasi dana tersebut terdapat pada Enam program kegiatan yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp. 40,260,991,191 dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 38,776,011,239.0 (96,31%).
- b. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebesar Rp. 7,495,819,323.0 dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 6,483,983,488.0 (86,5 %).
- c. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebesar Rp. 29,837,392,450.0,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 29,113,970,688.0,- (97,6 %).
- d. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebesar Rp. 9,510,481,140.0,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 8,030,917,382.0,- (84,44 %).
- e. Program Pengawasan Sumberdaya Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 2,454,035,990.0,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 2,088,758,518.0 (85,12 %).
- f. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan sebesar Rp. 1,905,664,344.0,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 1,501,847,809.0,- (78,8 %).

### 4.3. Kegiatan Pembangunan

#### 4.3.1. Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong peningkatan pertumbuhan produksi dengan fokus pada peningkatan produksi perikanan dan kemaritiman, sementara pada pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan diupayakan melalui pengembangan sarana dan prasarana teknologi yang ramah lingkungan. Belum optimalnya pencapaian tingkat produktifitas usaha perikanan memberi dampak pada kegiatan pembangunan dan pengembangan sektor perikanan secara keseluruhan. Pembangunan usaha Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan kedepan akan menjadi usaha perikanan yang berproduktivitas dan memiliki dayasaing yang tinggi baik pasar dalam negeri maupun pasar ekspor. Upaya yang dilakukan diarahkan pada tiga ruang lingkup pengembangan yaitu hilirisasi dan optimalisasi kegiatan produksi melalui pengembangan inovasi teknologi produktif, peningkatan dayasaing dan pemasaran melalui penanganan dan penerapan teknologi pengolahan produk hasil perikanan sehingga menghasilkan produk yang kompetitif dan berkarakter, dan pengembangan mekanisme serta jaringan pemasaran yang inklusif. Dengan komitmen ini, pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan secara optimal akan mampu memberi kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Sulawesi Selatan dan Nasional.

Adanya arahan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2021-2024 oleh pemerintah pusat yaitu Berbasis Ekonomi Biru dengan output dari penerapan blue economy dibungkus dalam regulasi dan program-program kerja yang tujuannya untuk menyeimbangkan ekologi dan ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun kebijakan tersebut diantaranya yaitu : Pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal.

Berbagai masalah juga akan dihadapi dalam memanfaatkan peluang tersebut, baik pada sektor hulu maupun pada pembudidaya dengan sektor hilir sehingga diperlukan suatu langkah strategis yang mampu menggerakkan secara optimal seluruh komponen yang terkait dengan usaha perikanan budidaya. Langkah tersebut adalah perubahan paradigma perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada masyarakat dengan melibatkan seluruh komponen terkait. Pemerintah dalam hal ini berfungsi sebagai fasilitator/intermediasi, sementara pelaku usaha budidaya sebagai pemeran utama.

Beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan telah terlaksana pada Tahun Anggaran 2024 melalui Anggaran Pokok dan setelah mengalami proses perubahan anggaran melalui Anggaran Perubahan TA. 2024, yakni:

## APBD

### 1. PROGRAM : Pengelolaan Perikanan Budidaya

#### ✓ Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dilaut

##### A. Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut

###### ■ Sarana Budidaya Rumput Laut

- a. Pelaksana Kegiatan : Bidang Perikanan Budidaya dan DSPKP
- b. Waktu Pelaksanaan : September – Desember.
- c. Tempat Pelaksanaan : Kab. Luwu, Wajo, Barru dan Bantaeng.
- d. Hasil yang dicapai : Terlaksananya Penyerahan Paket Bantuan Sarana Budidaya Rumput laut TA. 2024.



Penyerahan Sarana Bantuan Paket Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Luwu



Penyerahan Sarana Bantuan Paket Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Wajo



Penyerahan Sarana Bantuan Paket Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Bantaeng



Penyerahan Sarana Bantuan Paket Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Barru

###### ■ Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi CPCL, Monitoring, Pembinaan Budidaya Rumput Laut (Eselon III)

- a. Pelaksana Kegiatan : Bidang Perikanan Budidaya dan DS Produk
- b. Waktu Pelaksanaan : Januari – Desember
- c. Tempat Pelaksanaan : Provinsi Sulawesi Selatan.

- d. Hasil yang dicapai : Terlaksananya Verifikasi Pokdakan Calon Penerima dan Monitoring Bantuan Sarana Budidaya Rumput laut TA. 2024

■ **Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi CPCL, Monitoring, Pembinaan Budidaya Rumput Laut (Golongan III/IV).**

- a. Pelaksana Kegiatan : Bidang Perikanan Budidaya dan DS Produk
- b. Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember
- c. Tempat Pelaksanaan : Provinsi Sulawesi Selatan.
- d. Hasil yang dicapai : Terlaksananya Verifikasi Pokdakan Calon Penerima dan Monitoring Bantuan Sarana Budidaya Rumput laut TA. 2024

■ **Temu Tehnis Budidaya Rumput Laut.**

- a. Pelaksana Kegiatan : Bidang Perikanan Budidaya dan DS Produk
- b. Waktu Pelaksanaan : Juli
- c. Tempat Pelaksanaan : Hotel Almadera, Makassar.
- d. Hasil yang dicapai : Terlaksananya Temu Tehnis Budidaya Rumput Laut bersama Peserta dari Dinas Perikanan Kabupaten/kota se SulSel



**B. Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi.**

■ **Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi.**

- a. Pelaksana Kegiatan : Bidang Perikanan Budidaya dan DSPKP
- b. Waktu Pelaksanaan : Februari - September
- c. Tempat Pelaksanaan : Sulawesi Selatan
- d. Hasil yang dicapai : Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi TA. 2024

✓ **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**

- A. Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- **Rehab Gedung / Bangunan Instalasi Perbenihan Air Tawar (BBI LAJOA) [-] Dinas KP Pengawasan Rehab Bak Pendederan DAK Dinas Kelautan dan Perikanan**

- a. Pelaksana Kegiatan : Bidang Perikanan Budidaya dan DSPKP
  - b. Waktu Pelaksanaan : September – Desember
  - c. Tempat Pelaksanaan : Instalasi BBI Lajoa Kabupaten Soppeng
  - d. Hasil yang dicapai : Terlaksananya Pengawasan Rehab Gedung / Bangunan Instalasi Perbenihan Air Tawar (BBI LAJOA)
  - **Rehab Gedung / Bangunan Instalasi Perbenihan Air Tawar (BBI LAJOA) [-] Dinas KP Rehab Bak Pendederas DAK Dinas Kelautan dan Perikanan**
    - a. Pelaksana Kegiatan : Bidang Perikanan Budidaya dan DSPKP
    - b. Waktu Pelaksanaan : September – Desember
    - c. Tempat Pelaksanaan : Instalasi BBI Lajoa Kabupaten Soppeng
    - d. Hasil yang dicapai : Terlaksananya Rehab Bak Pendederas Instalasi Perbenihan Air Tawar (BBI LAJOA)
  - **Rehab Gedung / Bangunan Instalasi Perbenihan Air Tawar (BBI LAJOA) [-] Dinas KP Rehabilitasi mess operator perbenihan DAK Dinas Kelautan dan Perikanan**
    - a. Pelaksana Kegiatan : Bidang Perikanan Budidaya dan DSPKP
    - b. Waktu Pelaksanaan : September – Desember
    - c. Tempat Pelaksanaan : Instalasi BBI Lajoa Kabupaten Soppeng
    - d. Hasil yang dicapai : Terlaksananya Rehab mess operator perbenihan Air Tawar (BBI LAJOA))
  - **Rehab Gedung / Bangunan Instalasi Perbenihan Air Tawar (BBI LAJOA) [-] Dinas KP Rehab Tandon DAK Dinas Kelautan dan Perikanan**
    - a. Pelaksana Kegiatan : Bidang Perikanan Budidaya dan DSPKP
    - b. Waktu Pelaksanaan : September – Desember
    - c. Tempat Pelaksanaan : Instalasi BBI Lajoa Kabupaten Soppeng
    - d. Hasil yang dicapai : Terlaksananya Rehab Tandon perbenihan Air Tawar (BBI LAJOA))
- B. Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**
- **Pengadaan Calon Induk Ikan BBIS Lajoa dan Dukungan Operasional Perbenihan BBIS Soppeng**
    - a. Pelaksana Kegiatan : Bidang Perikanan Budidaya dan DSPKP
    - b. Waktu Pelaksanaan : Desember
    - c. Tempat Pelaksanaan : Instalasi BBI Lajoa Kabupaten Soppeng
    - d. Hasil yang dicapai : Terlaksananya Pengadaan Calon Induk Ikan BBIS Lajoa dan Dukungan Operasional Perbenihan BBIS Soppeng

## **APBN**

Kegiatan Satuan Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan (04) bersumber dari dana Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2024 dengan No. DIPA-032.04.4.199138/2024 tanggal 24 November 2023.

Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya sebagai Upaya Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya yang dibagi dalam beberapa sub kegiatan dan dijabarkan lebih lanjut pada jenis – jenis kegiatan operasional yang tersebar di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Jumlah Alokasi dana yang terdapat pada RKA-KL Tahun 2024 sebesar Rp. 848.595.000 yang merupakan PAGU awal dan terdapat Automatic Adjsusmen (AA) sebesar Rp. 194.951.000 dan PAGU yang dikelola oleh Satker Perikanan dan Kelautan Prov. SulSel sebesar Rp. 653.644.000.

## **Sasaran dan Output Kegiatan**

- a. Sasaran :
  - 1. Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan
    - ✓ Sampel Monitoring dan Pengujian Residu, Obat Ikan, Bahan Kimia dan Kontaminasi pada Ikan dan Udang.
    - ✓ Sampel Monitoring Penyakit Ikan Penting di kawasan Budidaya
  - 2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis Lainnya:
    - ✓ Layanan Data dan Informasi
    - ✓ Layanan Perencanaan dan Penganggaran
    - ✓ Layanan Pemantauan dan Evaluasi
    - ✓ Layanan Manajemen Keuangan
- a. Out Put
  - 1. Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan
    - ✓ Monitoring Pengambilan Sampel Residu pada Ikan dan Udang terdapat di beberapa Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.

Telah dilakukan Pengujian sampel sesuai target sebanyak 179 sampel yang telah terkirim ke Laboratorium PT.SGS Indonesia, PT. Eurofins BioChemLab, PT.Mutu Agung Lestari (MAL), Balai besar Budidaya Air Tawar Sukabumi (BBBAT) dan Balai Budidaya Air Payau/Laut Takalar (BBAP). Diberi tambahan target dari DJPB-KKP sebanyak 9 Sampel, sehingga jumlah sampel monitoring residu yang di uji sebanyak 188 sampel, melebihi dari target yang ditetapkan oleh DJPB-KKP. Sampel udang dan bandeng yang

di uji berasal dari di Kabupaten Bone, Pinrang, Bulukumba, Pangkep, Jeneponto, Parepare, Wajo, Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur .

- ✓ Sampel Monitoring penyakit ikan yang di uji dikawasan budidaya payau dan tawar yang terdapat di Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan dengan target sebanyak 26 Sampel dan terealisasi 30 sampel, melebihi dari target yang diberikan oleh DJPB-KKP. Sampel yang diuji berasal dari 5 (Lima) kabupaten yaitu Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Gowa, Kabupaten Bone, Kabupaten Barru dan Kabupaten Pinrang.

2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen Perikanan Budidaya.

- ✓ Penyelenggaraan Administrasi Kegiatan yang menyangkut pertanggung jawaban keuangan pelaksanaan kegiatan telah terlaksana dengan baik selama 1 (satu) tahun anggaran.
- ✓ Penyusunan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan telah dilakukan pada masing-masing kegiatan sebagai salah satu bagian dari pertanggung jawaban.
- ✓ Penyusunan laporan Sistim Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistim Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) dilakukan setiap bulan dan semesteran.
- ✓ Terlaksananya Perjalanan menghadiri Rapat, Koordinasi & Konsultasi serta Supervisi dan Monitoring kegiatan Perikanan budidaya,

b. Permasalahan

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2024 bahwa Tahun Anggaran 2024 ada perubahan kewenangan dari Satuan Kerja (Satker) Dekonsentrasi menjadi Satker Tugas Pembantuan. Telah dikeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal KKP kepada Seluruh Eselon 1 Lingkup KKP dan Seluruh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Seluruh Indonesia No. B.517/SJ/TU.210/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang Perubahan Kewenangan dari Satuan Kerja Dekonsentrasi menjadi Satuan Kerja Tugas Pembantuan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun perubahan kewenangan tersebut sehingga Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik pada bulan Juli

## 2. PROGRAM : Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan

**Kegiatan : Pelaksanaan Bimbungan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**

- ✓ Kegiatan Safari Gerakan Memasyaratkan Makan Ikan (GEMARIKAN) di Kabupaten Tana Toraja.

### ■ Lokasi

Pemilihan Kabupaten Tana Toraja sebagai lokasi Safari GEMARIKAN Tahun 2024, berdasarkan kenyataan bahwa prevalensi stunting Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2024 berada diangka diatas 24 persen, selain itu Angka Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 relatif kecil yaitu sebesar 28,33 Kg/Kapita.

### ■ Peserta

Target peserta sebanyak 200 orang terdiri dari kelompok target pencegahan *stunting* yaitu Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak berusia 0-59 bulan serta anak usia sekolah.

### ■ Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Safari Gemarikan secara umum terdiri dari distribusi paket GEMARIKAN sebanyak 1 (satu) kali. Pelaksanaan Safari GEMARIKAN di Kabupaten Tana Toraja juga sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap Pemkab Tana Toraja yang senantiasa masif dalam melakukan percepatan penanggulangan stunting di wilayahnya, untuk mewujudkan Tana Toraja zero stunting.

### ■ Penutup

Kegiatan Safari GEMARIKAN adalah kegiatan moril sebagai bentuk keperdulian kepada Pemerintah Kabupaten yang telah berupaya secara masif dalam menanggulangi stunting di wilayahnya. Percepatan penanggulangan stunting dan gizi buruk tentunya bukan merupakan upaya jangka pendek, tetapi merupakan upaya jangka panjang dan konsisten dalam rangka mewujudkan kabupaten/kota dalam hal ini Kabupaten Tana Toraja Zero Stunting. Selain itu Safari Gemarikan juga merupakan bentuk keperdulian terhadap UMKM karena produk yang didistribusi dalam bentuk Paket Edukasi GEMARIKAN adalah produk UMKM. Selain membantu perkonomian juga hal tersebut sebagai salah satu sara promosi produk UMKM.



Dokumentasi Kegiatan GEMARIKAN di Kabupaten Tana Toraja

#### 4.3.2. Perikanan Tangkap

Provinsi Sulawesi Selatan terletak di  $0^{\circ}12' - 8^{\circ}$  Lintang Selatan dan  $116^{\circ}48' - 122^{\circ}36'$  Bujur Timur. Luas wilayahnya  $62.482,54$  km $^2$ . Provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi selatan dan Sumatra di utara, Teluk bone dan Sulawesi tenggara di timur, Selat Makasar di barat dan Laut flores di selatan. Sulawesi Selatan secara administratif berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara dan sebelah Barat dengan Selat Makassar. Di sebelah Timur berbatas dengan Teluk Bone dan di sebelah Selatan dengan Laut Flores. Ibukotanya Makassar dengan posisi yang strategis di Kawasan Timur Indonesia memungkinkan Sulawesi Selatan dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan, baik bagi Kawasan Timur Indonesia maupun untuk skala internasional.

Sejalan dengan usaha pemberdayaan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir, maka masalah mendasar yang harus dilakukan dan dibenahi adalah yang terkait dengan dukungan serta keseriusan pemerintah dalam membantu masyarakat perikanan atau nelayan.

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan, khususnya Bidang Perikanan tangkap sangat dibutuhkan sarana prasarana penunjang perikanan tangkap berupa Kapal penangkap ikan, alat tangkap dan alat bantu penangkapan. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulewesi Selatan di Tahun 2023 ini telah menfasilitasi pemberian sarana penunjang Perikanan Tangkap berupa Mesin, alat tangkap dan kapal penangkap ikan kepada nelayan penerima manfaat. Pelabuhan Perikanan atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) ke depan, selain berfungsi sebagai tempat berlabuh atau bertambatnya perahu/kapal perikanan guna mendaratkan hasil tangkapannya, memuat perbekalan kapal serta sebagai basis kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pembinaan masyarakat perikanan juga diarahkan untuk pengembangan Industrialisasi Pengembangan Perikanan Tangkap untuk mendukung pengembangan sentra ekonomi perikanan berbasis kawasan. Paket kebijakan peningkatan pelayanan pelabuhan perikanan meliputi : (1) Peningkatan kualitas pelayanan ; (2) Revitalisasi pelabuhan perikanan; dan (3) Percepatan pembangunan sarana dan prasarana. Peningkatan peran dan fungsi pelabuhan perikanan dimasa yang akan datang mutlak diperlukan. Disamping menciptakan iklim usaha yang kondusif, pelayanan yang cepat, juga harus

memberikan rasa aman bagi setiap pelaku usaha dan dalam pelakasanaannya menuntut partisipasi aktif segenap stakeholder. Masih rendahnya tingkat operasional dan pelayanan pelabuhan perikanan tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal dilokasi masing masing pelabuhan. Evaluasi kinerja pelabuhan perikanan merupakan sebagian dari kegiatan manajemen, untuk menilai kinerja pelabuhan perikanan secara terukur dan hasilnya sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan peningkatan pengelolaan pelabuhan perikanan yang dikelola Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga keberadaanya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh nelayan dan stakeholders lainnya. Diharapkan dengan telah diserahkannya bantuan tersebut kepada nelayan penerima manfaat, sarana tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perairan yang ada, mampu meningkatkan produksi hasil tangkapan, mampu menjaga mutu ikan hasil tangkapan nelayan sehingga berdampak pada meningkatnya pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan nelayan.

■ **Kegiatan APBD**

**I. Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap**

**I. Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**

**a. Target OutPut Kegiatan :**

- 1) Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah laut sampai dengan 12 mil (unit)
- 2) Jumlah Nelayan yang mendapatkan pembinaan dan bantuan pemerintah (Kelompok)

**b. Realisasi OutPut Kegiatan :**

- 1) Jumlah arana dan Prasarana Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah laut sampai dengan 12 mil (unit)
- 2) Jumlah Nelayan yang dapat pembinaan dan bantuan pemerintah (Kelompok)
- 3) Jumlah Kapal Yang Dibangun (unit)

**c. Hasil Kegiatan :**

Penyusunan Dokumen DED program Prioritas Rumah Ikan Dasar akan melakukan penyesuaian desain dan struktur karakteristik rencana lokasi pemasangan terhadap desain dan struktur kawasan terumbu buatan dan habitat rumah ikan dasar. Kegiatan penyusunan DED program prioritas Rumah Ikan Dasar menghasilkan output :

- Tersedianya Detail Engineering Desingn (DED) Program Prioritas Rumah Ikan Dasar yaitu DED Terumbu buatan dan DED Habitat Rumah Ikan dasar
- Tersedianya peta penetapan lokasi penempatan program prioritas prumah ikan dasar yang telah diverifikasi berdasarkan kebutuhan dan karakteristik pemasangan DED terumbu buatan dan habitat rumah ikan dasar.

1. Belanja Jasa Kontruksi ( Penyusunan DED Prioritas Rumah Ikan )

- Jumlah Anggaran : Rp. 240.620.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 240.200.000,-
- Realisasi Fisik : 100 %



**II. Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap**

***I. Target OutPut Kegiatan :***

- Jumlah Alat Bantu Tangkap (unit) : 34 Unit
- Jumlah Mesin Usaha Perikanan Tangkap yang tersedia erintah (Kelompok) : 12
- Jumlah Peserta/Nelayan difasilitasi dalam akses pendanaan dan jaminan perlindungan (orang): 10.000
- Jumlah Sarana alat tangkap (unit): 34 Unit
  - ❖ Jumlah Anggaran : **Rp. 5.790.007.900,-**

***1. Realisasi OutPut Kegiatan :***

- Jumlah Alat Bantu Tangkap (unit) : 34
- Jumlah Mesin Usaha Perikanan Tangkap yang tersedia (Kelompok) : 12
- Jumlah Peserta/Nelayan difasilitasi dalam akses pendanaan dan jaminan perlindungan (orang): 10.000
- Jumlah Sarana alat tangkap (unit): 34 Unit
  - ❖ Jumlah Realisasi Anggaran : **Rp. 5.610.279.800,-**

***2. Hasil Kegiatan :***

***➤ Belanja Barang Yang Diserahkan Ke Masyarakat***

1. Pengadaan Rumah Ikan Laut (Rumpon) bahan bambu KUB Tarabas Ds.Sinjai Kec.Sinjai Timur, KUB Lappo Tuna Ds.Lappa Kec.Sinjai Utara , KUB Malisiparappe Ds.Tongke tongke Kec. Sinjai Timur, KUB Tenri Sangka Ds. Tongke tongke Kec.Sinjai Timur, KUB Taro Ada Ds.Panaikang Kec.Sinjai Timur Kabupaten Sinjai
- Jumlah Anggaran : Rp. 556.500.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 553.500.000,-
- Realisasi Fisik : 100 %



2. Pengadaan Rumah Ikan Laut (Rumpon) KUB Sinar Suci Ds. Bontokamase dan KUB Ingin Sejahtera Ds. Gunturu Kec. Herlang Kabupaten Bulukumba

- Jumlah Anggaran : Rp. 148.400.000
- Realisasi Anggaran : Rp. 147.163.800
- Realisasi Fisik : 100 %



3. Pengadaan Rumah Ikan Laut (Rumpon), KUB Turikale Ds. Tambolongan, Kec. Bontosikuyu Kab. Selayar, KUB Maju Bersama Ds. Tambolongan Kec. Bontosikuyu Kab. Selayar, KUB Pulo Janggo Ds. Mamminasa Kec. Pasimasunggu Kab. Selayar, KUB Cahaya Laut Ds. Bonto Bulaeng Kec. Psaimasunggu Kab. Selayar, KUB Bonto Dato Berkah Ds. Kayuadi Kec. Takabonerate Kab. Selayar.

- Jumlah Anggaran : Rp. 551.100.000
- Realisasi Anggaran : Rp. 551.100.000
- Realisasi Fisik : 100 %



Asuransi Nelayan BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada nelayan, telah menanggung Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Program ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Sulawesi Selatan terhadap nelayan, karena mereka semua termasuk pekerja rentan, dilihat dari besarnya resiko kerja. Namun paling tidak dengan jadi peserta ini, bisa untuk jadi jaminan terhadap anak istri yang ditinggal. Dalam hal ini nelayan mendapatkan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dimana program tersebut didapatkan oleh nelayan yang mengalami kecelakaan yang terjadi selama bekerja termasuk kecelakaan dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya. Selain itu nelayan juga akan menerima Jaminan Kematian (JKM) dimana dalam program tersebut jika terjadi musibah kematian dalam bekerja maka keluarga yang bersangkutan akan mendapatkan santunan dan diharapkan dapat meringankan beban keluarga.

Sebanyak 10.000 nelayan di 19 Kab/Kota provinsi Sulawesi Selatan telah didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Asuransi yang diberikan yaitu JKK dan JKM yang ditanggung oleh Pemerintah Sulawesi Selatan dari Bulan Juni sampai dengan Bulan Desember 2024. Diharapkan pemberian Asuransi Nelayan ini dapat menjadi stimulus agar

masyarakat terutama nelayan dapat meneruskan asuransi ini secara mandiri karena sangat besar manfaatnya bagi para nelayan.

Kegiatan pemberian bantuan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan :

- Pembayaran bantuan iuran premi selama 7 bulan (juni s,d Desember 2024)
- Penerima bantuan juni s,d agustus 2024 sebanyak 10.000 orang nelayan
- Penerima bantuan September s.d Oktober 2024 sebanyak 9.813 orang nelayan ,dikarenakan ada nelayan yang beralih ke pembayaran mandiri dan sumber pembiayaan lain
- Penerima bantuan November s.d Desember 2024 sebanyak 9.812 orang nelayan, dikarenakan ada nelayan yang meninggal dunia.

**Tabel 13. Realisasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Nelayan Tahun 2024.**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH CPCL FIX	JUNI-AGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOV-DES
1	Selayar	927	927	926	926	926
2	Bulukumba	1,152	1,152	1,152	1,152	1152
3	Bantaeng	121	121	121	121	121
4	Jeneponto	394	394	392	392	391
5	Takalar	1,193	1,193	1,190	1,190	1190
6	Gowa	140	140	140	140	140
7	Sinjai	508	508	506	506	506
8	Bone	1,187	1,187	1,187	1,187	1187
9	Maros	532	532	530	530	530
10	Pangkep	876	876	875	875	875
11	Baru	400	400	400	400	400
12	Wajo	339	339	339	339	339
13	Pinrang	561	561	561	561	561
14	Luwu	264	264	264	264	264
15	Luwu Utara	87	87	87	87	87
16	Luwu Timur	64	64	64	64	64
17	Kota Makassar	799	799	623	623	623
18	Kota Pare-pare	41	41	41	41	41
19	Kota Palopo	415	415	415	415	415
<b>Jumlah</b>		<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>9,813</b>	<b>9,813</b>	<b>9,812</b>

*Sumber : Laporan Tahunan Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2024*



4. Asuransi Jaminan kecelakaan Tenaga Kerja Nelayan.
  - Jumlah Anggaran : Rp. 692.520.000,-
  - Realisasi Anggaran : Rp. 692.500.000,-
  - Realisasi Fisik : 100 %
5. Asuransi Jaminan Kematian Tenaga Kerja Nelayan.
  - Jumlah Anggaran : Rp. 470.913.600
  - Realisasi Anggaran : Rp. 470.900.000,-
  - Realisasi Fisik : 100 %
6. Prasarana penangkapan ikan di PUD ,Pengadaan Mesin 4 Unit Kelompok Telagae Ds.Sidenreng Kec.Watang Sidenreng Kab.Sidrap.
  - Jumlah Anggaran : Rp. 31.600.000,-
  - Realisasi Anggaran : Rp. 31.000.000,-
  - Realisasi Fisik : 100 %



7. Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan , Gillnet KUB Mase Mase Ds.Sidenreng Kec. Watang Sidenreng kab.Sidrap.
  - Jumlah Anggaran : Rp. 53.000.000
  - Realisasi Anggaran : Rp. 51.875.000,-
  - Realisasi Fisik : 100 %



### III. Kegiatan : Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

#### Target OutPut Kegiatan :

- ❖ Jumlah Pelabuhan perikanan Provinsi yang di kelola : 5 Unit
- ❖ Jumlah Anggaran : Rp. 34.878.000,-

#### Realisasi OutPut Kegiatan :

- ❖ Tersedianya Sarana Prasarana dan terkelolanya pelabuhan perikanan : 100 persen
- ❖ Jumlah Anggaran : Rp. 18.190.000,-

#### Hasil Kegiatan :

Kegiatan monitoring evaluasi SPBN dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Kepelabuhan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota.

Monitoring pemberian pendaftaran rekomendasi calon pembangun dan atau calon pengelola serta tindak lanjut pembangunan dan operasional SPDN/SPBN dapat dilakukan oleh Direktur Pelabuhan Perikanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota/Provinsi dan Kepala UPT Pusat.

Monitoring bertujuan untuk mengetahui:

1. Kesesuaian pelaksanaan pemberian pendaftaran rekomendasi calon pembangun dan atau calon pengelola dengan prosedur yang telah ditetapkan;
2. Penyaluran BBM yang tepat sasaran kekonsumen yang telah terdaftar; dan
3. Perkembangan usaha SPDN/SPBN, manfaat dan dampak BBM bersubsidi dari SPDN/SPBN bagi masyarakat perikanan yang menjadi sasaran

**Tabel 14. CALON PEMBANGUN DAN PENGELOLA SPDN/SPBN TAHUN 2023/2024**

No	PENGELOLA SPBUN PT/CV/UD/KOPERASI	LOKASI / TITIK KOORDINAT	Kab/Kota	USULAN KUOTA (KL/BLN)	Status		Ket
					PEMB & PENGELOLA BARU	PEMB & PENGELOLA PENGGANTI	
1	Koperasi Produsen Tani Nelayan Sawerigading	PP Larompong -3.3829 S / 120.2442	Kab. Luwu	180		√	Proses Pertamina (2023)
2	Koperasi Pemasaran Samudera Biru Laut	PP Cempae -3.592779 / 119.375887	Kota Pare-Pare	55		√	Perbaikan dokumen
3	PT. Aril Putra Solo	Sentra Nelayan -4.848324 / 119.512966	Kab. Pangkep	88	√		Proses pertamina
4	PT. Fauzan Jaya Energi	Sentra Nelayan -4.768972 / 119.490122	Kab. Pangkep	100	√		Proses pertamina
5	Koperasi Produsen Mappatuo	Sentra Nelayan	Kab. Pangkep	70	√		Proses pertamina
6	PT. Sinar Panrita Selatan	Sentra Nelayan -5.469486 / 120.420819	Kab. Bulukumba	150	√		Proses pertamina
7	Koperasi Konsumen Nelayan Hasil Laut Fikram	Sentra Nelayan -3.3829 S / 120.2442	Kab. Luwu Utara	55		√	Proses pertamina
8	PT. Mitra Berkah Mandiri	PP Beba -4.848324 / 119.512966	Kab. Takalar	100	√		Rekomendasi kuota penyaluran BBM
9	PT. Khairul Shaatiun Jannah	Sentra Nelayan -5.49167 / 119.415103	Kab. Takalar	70	√		Tahap pembangunan SPBN
10	Koperasi Berkah Tompo Galesong	Sentra Nelayan -5.262813 / 119.377672	Kab. Takalar	100	√		Proses pertamina
11	Koperasi Nelayan Dan Perikanan Alhamidi	Sentra Nelayan -5.301014 / 119.369592	Kab. Takalar	100	√		Rekomendasi KKP
12	PT. Akbar Energi Perkasa	Sentra Nelayan -4.769273 / 119.490160	Kab. Wajo	80	√		Proses KKP

Sumber : laporan Tahunan Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2024

**IV. Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**

**Target OutPut Kegiatan :**

- ❖ Jumlah Jumlah rekomendasi izin usaha perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT
- ❖ Target : 400 SIUP
- ❖ Jumlah Anggaran : **Rp. 318.000,-**

**Realisasi OutPut Kegiatan :**

- ❖ Tersedianya Rekomendasi izin usaha perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT : 100 persen
- ❖ Realisasi : 643 SIUP
- ❖ Jumlah Anggaran : **Rp. 318.000,-**

**Hasil Kegiatan :**

Kementerian kelautan dan perikanan dalam rangka memberlakukan penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur setelah peraturan perundang undangan terkait di tetapkan dengan memprioritaskan pembagian kuota penangkapan ikan untuk pelaku subsektor penangkapan ikan dan sub sektor pengangkut ikan bendera Indonesia dengan dokumen kapal dan dokumen perizinan yang telah lengkap dan sah.

Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang telah dilengkapi dengan dokumen kapal dan dokumen perizinan yang lengkap dan sah akan menjadi pertimbangan dalam penentuan kuota penangkapan ikan dan zona penangkapan ikan terukur.

Salah satu dokumen kapal perikanan yang harus dilengkapi oleh pemilik kapal adalah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), dan sampai dengan Desember 2024. Jumlah SIUP yang terbit sebanyak 643 SIUP.

**V. Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar kapal Perikanan Berukuran Sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat di usahakan lintas Kab/Kota dalam satu waktu Daerah Provinsi.**

**Target OutPut Kegiatan :**

- ❖ Jumlah Tanda Daftar Kapal Berukuran Sampai Dengan 10 GT
- ❖ Target : 1.000
- ❖ Jumlah Anggaran : **Rp. 8.375.000,-**

**Realisasi OutPut Kegiatan :**

- ❖ Tersedianya Tanda Daftar Kapal Untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT

- ❖ Realisasi : 1.229
- ❖ Jumlah Anggaran : **Rp. 7.620.000,-**

**Hasil Kegiatan :**

Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil yang selanjutnya disingkat TDKP adalah bukti tertulis yang menyatakan bahwa Kapal Penangkap Ikan tersebut dimiliki oleh Nelayan Kecil.

TDKP merupakan dokumen yang wajib dimiliki nelayan yang memiliki kapal untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan satu kapal berukuran paling besar lima Gross Tonage (GT) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini tersurat dalam Permen KP No 58 tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap pasal 1 nomor 21 bahwa TDKP untuk nelayan kecil adalah bukti tertulis yang menyatakan bahwa kapal penangkap ikan tersebut dimiliki oleh nelayan kecil. Sehingga, TDKP mempunyai peran penting bagi para nelayan karena menjadi salah satu bukti atau surat izin dalam trip perjalanan menangkap ikan, Sampai dengan desember 2024 TDKP yang terbit sebanyak 1.229 Rekomendasi.

**VI. Kegiatan : Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT**

**Target OutPut Kegiatan :**

- ❖ Jumlah Jumlah rekomendasi izin usaha perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai 10 GT
- ❖ Target : 650 PPKP
- ❖ Jumlah Anggaran : **Rp.1.060.000,-**

**Realisasi OutPut Kegiatan :**

- ❖ Tersedianya Rekomendasi izin usaha perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai 10 GT : 100 persen
- ❖ Realisasi : 666 PPKP
- ❖ Jumlah Anggaran :

**Hasil Kegiatan :**

Kementerian kelautan dan perikanan dalam rangka memberlakukan penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur setelah peraturan perundang undangan terkait di tetapkan dengan memprioritaskan pembagian kuota penangkapan ikan untuk pelaku subsektor penangkapan ikan dan sub sektor pengangkut ikan bendera indonesia dengan dokumen kapal dan dokumen perizinan yang telah lengkap dan sah.

Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berbendera indonesia yang telah dilengkapi dengan dokumen kapal dan dokumen perizinan yang lengkap dan sah akan

menjadi pertimbangan dalam penentuan kuota penangkapan ikan dan zona penangkapan ikan terukur.

Salah satu dokumen kapal perikanan yang harus dilengkapi oleh pemilik kapal adalah dokumen Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP). Sehubungan dengan adanya kewenangan provinsi untuk penerbitan PPKP bagi kapal perikanan berukuran sampai 10 GT, maka perlu dilakukan percepatan penerbitan PPKP dan melakukan identifikasi kapal perikanan yang telah dibangun namun belum memiliki PPKP dan penerbitan PPKP sesuai dengan kewenangan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jumlah kapal perikanan yang berada dalam kewenangan pengelolaan provinsi berdasarkan permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) dan sampai dengan Desember 2024 jumlah PPKP yang terbit sebanyak 666 PPKP.

## VII. Kegiatan : Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan Ukuran diatas 10 GT - 30 GT

### **Target OutPut Kegiatan :**

- ❖ Jumlah Buku Kapal yang terbit
- ❖ Target : 1.200 Buku Kapal
- ❖ Jumlah Anggaran : **Rp. 5.300.000,-**

### **Realisasi OutPut Kegiatan :**

- ❖ Tersedianya Buku Kapal yang terbit : 100 persen
- ❖ Realisasi : 1.260 Buku Kapal
- ❖ Jumlah Anggaran : ,-

### **Hasil Kegiatan :**

Buku Kapal Elektronik atau E-BKP dokumen yang memuat informasi identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan, beserta perubahan yang terjadi terhadap informasi tersebut. Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan, pada Pasal 76 ayat 2 dijelaskan bahwa Buku Kapal Perikanan wajib dimiliki oleh setiap Pemilik Kapal sebagai bukti identitas dan nomor register pendaftaran resmi.

Selain itu, update terbaru dari Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus

Penugasan, pada Pasal 3 ayat 3 mensyaratkan nelayan yang dapat menerima penyaluran BBM adalah mereka yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan Pemerintah Daerah.

Dari dua peraturan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa nelayan wajib memiliki E-BKP, dan manfaat memiliki E-BKP salah satunya adalah dapat menerima rekom adalah yang mempunyai Buku Kapal Perikanan sebagai bukti sah bahwa kapal tersebut nyata dan telah terdaftar.

Pembuatan E-BKP sekarang proses pengurusannya sangatlah mudah, yaitu dilakukan secara online melalui aplikasi SIPALKA. Langkah pembuatannya sebagai berikut:

1. Membuat akun di <https://kapal.kkp.go.id/sipalkaonline/>
2. Melengkapi data diri dan data kapal
3. Upload dokumen persyaratan

Sampai dengan Desember 2024 Buku Kapal yang terbit sebanyak 1.260 Buku Kapal.

## **PERMASALAHAN DAN UPAYA PENCEGAHAN**

### **1. Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan perikanan tangkap di Sulawesi Selatan tahun 2024 adalah :

1. Kelompok yang mendapatkan bantuan tidak melaporkan hasil produksi tangkapannya secara berkala.
2. Masih adanya nelayan yang belum membuat izin usaha terhadap kegiatan yang mereka lakukan, sehingga terdapat permasalahan dalam melakukan aktivitas penangkapan.
3. Diharapkan Nelayan yang telah mendapatkan bantuan pembayaran Premi Asuransi Nelayan, supaya bisa melanjutkan secara mandiri
4. Masih adanya kab/kota yang belum sepenuhnya melakukan penyerahan P3D ke pemerintah provinsi.
5. Masih banyak kab/Kota Belum terlaksananya MOU terkait pengelolaan fasilitas TPI .
6. Terbatasnya personil ASN yang ditempatkan dalam pengelolaan dan operasional pelabuhan perikanan.
7. Secara umum hampir semua nelayan di Sulawesi Selatan mengalami kesulitan dalam mendapatkan BBM Solar subsidi.

## 2. Upaya Pencegahan dan Penyelesaian

Upaya pencegahan yang dilakukan antara lain :

1. Melibatkan penyuluh perikanan Kabupaten/Kota agar aktualisasi serta update data perikanan (jumlah armada, jumlah produksi dan jumlah nelayan) dapat memberikan informasi yang akurat.
2. Melakukan sinkronisasi dan sosialisasi terkait informasi tentang regulasi atau aturan yang baru kepada nelayan.
3. Melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada nelayan tentang pentingnya asuransi
4. Melakukan rekrutmen ASN yang dapat ditempatkan pada beberapa pelabuhan perikanan yang dianggap kurang.
5. Untuk optimalisasi pengelolaan dan operasional pelabuhan perikanan, maka perlu dilakukan pelatihan manajemen pengelolaan pelabuhan perikanan.
6. Pemerintah berupaya bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mengelola dan membangun SPBUN di Kab/Kota dalam upaya membantu nelayan mendapatkan BBM Solar Subsidi.

### ➤ Kegiatan APBN

Tahun 2024 ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang Perikanan Tangkap antara lain :

#### Dana Tugas Pembantuan (TP)

##### 1. Supervisi dan Evaluasi Pengelolaan Perizinan Daerah

###### ➔ Tujuan :

Kegiatan Sosialisasi Perizinan Terhadap Pelaku Usaha Perikanan Tangkap dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada nelayan agar mengetahui syarat dan prosedur penerbitan tanda daftar kapal.

###### ➔ Dasar Pelaksanaan :

Pelaksanaan kegiatan “ Sosialisasi Perizinan Terhadap Pelaku Usaha Perikanan Tangkap ” dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 523 /223/ X /DKP Tanggal 31 Juli 2024 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Perizinan Terhadap Pelaku Usaha Perikanan Tangkap.

➔ Kegiatan Pertemuan “Sosialisasi Perizinan Terhadap Pelaku Usaha Perikanan Tangkap” dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2024 di PPI Pelabuhan Maccini Baji Kabupaten Pangkep yang dihadiri oleh nelayan dan pemilik kapal yang berdomisili di sekitar Pelabuhan Perikanan Maccini Baji kabupaten Pangkep, Syahbandar Perikanan dan personil dengan peserta sebanyak 30 orang.

- ❖ Narasumber pertemuan ini adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Evaluasi Penerapan Kebijakan Pendaftaran Kapal Perikanan.
- ❖ Sumber dana Kegiatan “Sosialisasi Perizinan Terhadap Pelaku Usaha Perikanan Tangkap” dari Anggaran Tugas Pembantuan (APBN) Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan (03) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 11.400.000,- (Sebelas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- ❖ Jumlah PPBK yang terbit sampai pada tanggal 30 Desember 2024 sebanyak 666 kapal.



## **2. Sosialisasi dan Koordinasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan**

### **❖ Tujuan**

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan adalah memberikan status hukum atas kekayaan (aset) milik nelayan dan meningkatkan kepastian usaha nelayan melalui kepemilikan aset berupa tanah yang dapat didayagunakan sebagai agunan untuk mengakses permodalan, meningkatkan minat dan kepercayaan perbankan untuk menyalurkan kredit kepada nelayan skala kecil.

### **❖ Sasaran**

Sasaran dari kegiatan ini adalah nelayan dan yang sesuai kriteria calon peserta bidang tanah sertifikasi hak atas tanah nelayan.

### **❖ Dasar Pelaksanaan**

- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2024 Nomor : SP DIPA-032.03.4.199137/2023 tanggal 26 November 2024
- Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 523/120/V/DKP tanggal 17 Mei 2024 tentang panitia Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Identifikasi Fasilitas Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan.

Sumber dana Kegiatan “Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT Nelayan)” dari Anggaran Tugas Pembantuan (APBN) Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan (03) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 20.500.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dilaksanakan terdiri dari 6 Kabupaten/kota terdiri dari Kab. Bantaeng, Takalar, Bulukumba, Luwu, Bone, Selayar.



**3. Sosialisasi dan Identifikasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan (KUB dan Koperasi) Nelayan Tahun 2024**

➔ **Dasar Pelaksanaan:**

Pelaksanaan kegiatan “Sosialisasi dan Identifikasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan (KUB dan Koperasi) Tahun 2024” dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 523 /97/V/DKP Tanggal 14 Mei 2024 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi dan Identifikasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan (KUB dan Koperasi) Nelayan.

- ➔ Kegiatan Pertemuan “Sosialisasi dan Identifikasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan (KUB dan Koperasi) Tahun 2024” dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2024 di Kantor Desa Galesong Baru Kec.Galesong Kab. Takalar Provinsi Sulawesi Selatan di hadiri oleh Kelompok Usaha Nelayan dan Dinas Kabupaten /Kota peserta sebanyak 50 orang.
- ➔ Narasumber pertemuan ini adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap
- ➔ Sumber dana Kegiatan “Sosialisasi dan Identifikasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan (KUB dan Koperasi) Tahun 2024” dari Anggaran Dana Tugas Pembantuan (APBN) Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan (03) Tahun Anggaran 2024 Sebesar Rp 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah ).



**4. Sosialisasi Penerapan E-Log Book Penangkapan Ikan**

➔ **Dasar Pelaksanaan :**

Pelaksanaan kegiatan “ Sosialisasi Penerapan E Log Book Penangkapan Ikan Tahun 2024” dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 523 /262/I/DKP Tanggal 14 September 2024 tentang

Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Penerapan E-Log Book Penangkapan Ikan

- ➔ Kegiatan Pertemuan “Sosialisasi Penerapan E-Log Book Penangkapan Ikan” dilaksanakan di tiga lokasi pada tanggal 02 Agustus 2024, di PPI Maccini Baji Kabupaten Pangkep, 23 September 2024 di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, 3 Desember 2024 di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan oleh Petugas Syahbandar dan Pemilik Kapal dan Nahkoda Kapal sebanyak 90 orang.
- ➔ Narasumber pertemuan ini adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap.
- ➔ Sumber dana Kegiatan “Sosialisasi Penerapan E-Log Book Penangkapan Ikan” dari Anggaran Dana Tugas Pembantuan (APBN) Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan (03) Tahun Anggaran 2024 Sebesar Rp 20.770.000,- (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah ).



##### **5. Validasi Data Statistik Perikanan Tangkap**

➔ **Tujuan :**

Pelaksanaan kegiatan Validasi data statistik perikanan tangkap Semester I tahun 2024 dimaksudkan untuk tercapainya kesesuaian data dan statistik perikanan tangkap di Sulawesi Selatan yang akurat, tepat waktu, konsisten, terpercaya, dengan tujuan :

- a. Melakukan sinkronisasi data statistik perikanan tangkap tahun 2024 dengan petugas statistik kabupaten/kota;
- b. Koordinasi, komitmen, sinergitas, integrasi antara provinsi dan kab/kota dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kelautan dan perikanan;
- c. Mengintegrasikan sistem aplikasi LK satu data KKP.
- d. Terwujudnya data yang akurat dan terpercaya.

➔ **Sasaran :**

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Validasi data statistik perikanan tangkap Semester II tahun 2024 adalah meningkatnya kesesuaian dan keakuratan data dan informasi kelautan dan perikanan serta integrasi sistem aplikasi LK satu data KKP yang berorientasi pada keseragaman hasil pengumpulan dan pengolahan data di Kabupaten/Kota.

- ❖ Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu sampai dengan Jumat, tanggal 07 sampai dengan 09 Agustus 2024 di Hotel Almadera Jl. Somba Opu No. 235 Makassar.
- ❖ Materi dan narasumber dari kegiatan Validasi Data Statistik Perikanan Tangkap antara lain :
  1. Penguatan Definisi, Klasifikasi, Methodologi dan Alur pendataan Statistik Perikanan Tangkap
  2. Exel to LK Lembar Kerja Pelabuhan
  3. Exel to LK Lembar Kerja Non Pelabuhan
  4. Exel to LK Lembar Kerja PUD
  5. Rambu-Rambu Validasi Data Statistik Perikanan Tangkap
  6. Pengantar Apdes Validasi Nasional Satu Data
  7. Tutorial Modul Exel Terformat non Pelabuhan (Video)
  8. Tutorial Modul Exel Terformat Pelabuhan (Video)
- ❖ Narasumber : Hariyanto Adhi Prabowo (Dirjen Perikanan Tangkap)
- ❖ Sumber dana Kegiatan “Validasi Data Statistik Perikanan Tangkap” dari Anggaran Tugas Pembantuan (APBN) Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan (03) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah ).

## 6. Sosialisasi Pemulihian Sumberdaya Ikan Berkelanjutan Tahun 2024

### ❖ Dasar Pelaksanaan :

Pelaksanaan kegiatan “Sosialisasi Pemulihian Sumberdaya Ikan Berkelanjutan Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 523 /259/X/DKP Tanggal 25 Oktober 2024 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pemulihian Sumberdaya Ikan Berkelanjutan Tahun 2024, Kegiatan Pertemuan “Sosialisasi Pemulihian Sumberdaya Ikan Berkelanjutan Tahun 2024,” dilaksanakan di Dua lokasi pada tanggal 29 Oktober 2024, di Palaganan jalan. Garongkong Kec. Barru Kabupaten Barru, 31 Oktober 2024 di Kabupaten Selayar, Peserta Pertemuan Sosialisasi Pemulihian Sumberdaya Ikan anggota KUB nelayan penangkap ikan dan usaha penangkapan ikan di garongkong desa Madello kab barru. sebanyak 20 orang. Dan peserta sosialisasi pengadaan pembangunan prasarana pemulihian sumberdaya ikan berkelanjutan melalui pembuatan dan penegelaman rumah ikandengan jumlah peserta 20 orang terdiri dari kelompok usaha bersama nelayan mutiara dan dinas kelautan dan perikanan kab/kota kepulauan Selayar.

- ❖ Narasumber pertemuan ini adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan koperasi BIP Semarang.

- ❖ Sumber dana Kegiatan “Sosialisasi Pemulihan Sumberdaya Ikan Berkelanjutan Tahun 2024,” dari Anggaran Dana Tugas Pembantuan (APBN) Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan (03) Tahun Anggaran 2024 Sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).

## **7. Pengadaan Pembangunan Prasarana Pemulihan Sumberdaya Ikan Berkelanjutan Melalui Pembuatan dan Peneggelaman Rumah Ikan**

Penyediaan Pengadaan Pembangunan Prasarana Pemulihan Sumberdaya Ikan Berkelanjutan Melalui Pembuatan dan Peneggelaman Rumah Ikan di Kabupaten Barru dan Kabupaten Selayar sebanyak 2 Paket oleh CV. Rafa Sinergi Boats dengan dokumen kontrak Nomor : 523/93/SP/TKP/PPSDI/IX/DKP tanggal 17 September 2024 s/d 15 Desember 2024, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 523/BASTHP/R.IKAN/TKP/XI/DKP tanggal 11 November 2024, Berita Acara Pembayaran Nomor : 523/467/BAP/TKP/PPSDI/XI/DKP tanggal 19 November 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp 448.900.000,- (Empat Ratus Empat Puluh DelapanJuta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

## **8. Pertemuan Evaluasi dan Monitoring Dalam Rangka Pendaftaran Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi**

### **❖ Tujuan :**

Adapun tujuan dari Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Pendaftaran Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi adalah untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan pelayanan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan kewenangan provinsi kepada pelaku usaha (nelayan) yang menggunakan kapal perikanan kewenangan provinsi sesuai dengan regulasi terkini yang tercantum dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Logbook Penangkapan Ikan, Pemantauan di atas kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan. Inspeksi, pengajuan dan penandaan kapal perikanan serta tata kelola pengawakan kapal perikanan data yang akurat dan terpercaya.

### **❖ Sasaran:**

Untuk mendapatkan deskripsi (sifat, bentuk baku, cara pengoperasian dan target penangkapan), nomenklatur serta pengaturan yang meliputi (selektifitas dan kapasitas) untuk :

1. Menjamin kesetaraan akses (skala kecil VS skala industri) melalui pembagian jalur dan pembatasan kapasitas Penangkapan;
2. Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati (biodiversity) melalui penerapan selektivitas penangkapan dan pengembangan *eco-friendly fishing gear* meliputi:

- Menjaga kelestarian stok yang menjadi target penangkapan;
- Mengurangi tertangkapnya ikan non target (reductionby-catch);
- Mengurangi kerusakan dasar perairan (reduction seabeddestruction)

#### **9. Pertemuan Evaluasi dan Monitoring Dalam Rangka Pendaftaran Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi**

- ❖ Dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 523/256/X/DKP Tanggal 1 Oktober 2024 tentang Pembentukan **Pertemuan Evaluasi dan Monitoring Dalam Rangka Pendaftaran Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi**
- ❖ Kegiatan Pertemuan Pertemuan Evaluasi dan Monitoring Dalam Rangka Pendaftaran Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi
- ❖ dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2024 di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.
- ❖ Narasumber pertemuan ini adalah Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan,
- ❖ Peserta Pertemuan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Sosialisasi Thapan Pelaksanaan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur adalah Dinas Perikanan Kabupaten/Kota, Kepala CDK dan UPT Pelabuhan Perikanan Lingkup DKP SulSel, HNSI, Akademisi, petugas teknis DKP SulSel dan fungsional pengelola produksi perikanan tangkap sebanyak 30 Orang.
- ❖ Sumber dana Kegiatan “Pertemuan Evaluasi dan Monitoring Dalam Rangka Pendaftaran Kapal Perikanan Kewenangan Provinsidari Anggaran Dana Tugas Pembantuan (APBN) Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan (03) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 12.470.000,- (Dua Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

#### **4.3.3. Bidang Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau kecil**

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Sulawesi Selatan adalah ” *Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Melalui Pendekatan Kemandirian Lokal untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Selatan Tahun 2028*” (Dokumen RZWP-3-K

Sulsel). Visi tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang tangguh dan mandiri, akan tercipta jika pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dan dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip pengelolaan. Pengelolaan yang baik akan semakin meningkatkan produktivitas perairan, efektivitas pemanfaatan wilayah perairan dan kelestarian ekosistem yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat, kemandirian dan kesejahteraan untuk dapat memanfaatkan nilai dan manfaat dari sumber daya laut dan pesisir bagi pengembangan wilayah nasional secara berkelanjutan serta menjamin kepentingan umum secara luas, maka dibutuhkan adanya penataan ruang laut yang bertujuan agar wilayah laut dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal.

Faktor pertumbuhan penduduk dan eksploitasi terhadap sumber daya alam secara terus menerus menyebabkan wilayah laut dan pesisir memerlukan pengelolaan, perlindungan terhadap sumber daya alamnya dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya untuk keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang. Penataan ruang dapat dilihat sebagai kebijakan publik yang mengoptimalkan kepentingan antar pelaku pembangunan (pemerintah, swasta dan masyarakat)

dalam pemanfaatan ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil yang merupakan jasa-jasa kelautan, sehingga di dalam proses perencanaan tata ruang yang demokratis dan akomodatif terhadap semua kepentingan pelaku pembangunan. Pada Tahun 2024 Bidang Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengelolah anggaran yang berasal dari APBD dan APBN.

### **Kegiatan APBD**

- ♦ **Program : Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**
  - A. Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut Sampai dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**

**Sub Kegiatan : *Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir***

#### **1. Penyusunan Kajian Akademik Kegiatan Prioritas Rumah Ikan**

Pelaksanaan kegiatan dan Penyusunan dokumen pada bulan Maret – April 2024 di Kota Makassar

Keluaran dari kegiatan adanya Dokumen Naskah Akademik Prioritas Rumah Ikan untuk penempatannya di wilayah perairan Sulawesi Selatan.

Hasil dari kegiatan ini adalah terdapatnya acuan kondisi perairan yang mendukung untuk penempatan rumah ikan.

✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.

- ✓ Manfaat dari kegiatan ini adalah terlaksananya program kegiatan rumah ikan yang tepat lokasi penempatannya sehingga akan berdampak bagi peningkatan hasil perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.



**Sub Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat**

1. Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi/ konsultasi/ Identifikasi/ Pembinaan/ Monitoring Pengelolaan Kawasan dan Kawasan Pencadangan /menghadiri undangan dan pembinaan masyarakat pesisir di Kabupaten/Kota
- ✓ Pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bulan Januari – Juli 2024 di Yogyakarta, Pangkep, Barru, Jeneponto dan Bantaeng.
- ✓ Keluaran dari kegiatan terlaksananya kegiatan perjalanan koordinasi/ konsultasi menghadiri undangan ke Yogyakarta, dan pembinaan/monitoring ke Pangkep, Barru, Jeneponto dan Bantaeng.
- ✓ Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman SDM tentang manfaat dari suatu kawasan konservasi sehingga mendukung terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang berkelanjutan.
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 92,32%.
- ✓ Manfaat dari pengadaan alat ini adalah semakin terlindungnya ekosistem terumbu karang dari aktifitas buang jangkar sehingga dapat meningkatnya kualitas ekosistem terumbu karang sebagai salah satu obyek wisata bahari.



## B. Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

**Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan PPK**

### **1. Pembangunan Revitalisasi Gudang Garam**

- ✓ Pelaksanaan Kegiatan pada bulan Juli sampai September 2024 di Kabupaten Jeneponto dan Pangkep.
- ✓ Keluaran dari kegiatan ini adalah adanya kegiatan perencanaan, pengawasan dan Pembangunan 4 (empat) unit Gudang Garam untuk kelompok Halilintar (Jeneponto), Sinar Paccelanga (Jeneponto), Paraikatte (Pangkep), dan Sinar Mentari (Pangkep).
- ✓ Hasil dari kegiatan ini adalah adanya dukungan dalam upaya peningkatan produksi garam rakyat/industri yang memberi jaminan persediaan dan harga garam.
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- ✓ Manfaat kegiatan ini adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petambak garam yang memiliki kemampuan dalam memproduksi garam yang berkualitas dan bernilai tinggi melalui dukungan gudang garam.



### **2. Sarana Usaha Garam Rakyat (Geomembran dan Rumah Thunnel)**

- ✓ Pelaksanaan kegiatan di bulan Juli - September 2024 di Kabupaten Pangkep
- ✓ Keluaran dari kegiatan adanya bantuan Geomembran 66 (Enam Puluh Enam) rol kepada kelompok usaha garam Bajiminasa / Kab. Pangkep (22 Rol), Bajipamai / Kab. Pangkep (22 Rol), dan Paramangngai / Kab. Pangkep (22 Rol); Rumah Thunnel 1 (satu) unit untuk Kelompok Sibija / Kab. Pangkep
- ✓ Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan kualitas produksi usaha garam rakyat yang memiliki daya saing tinggi.
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- ✓ Manfaat kegiatan ini adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petambak garam yang memiliki kemampuan dalam memproduksi garam yang berkualitas dan bernilai jual tinggi



**3. Perjalanan Dinas dalam Rangka Identifikasi / Verifikasi / Pembinaan Pugar / Monitoring Sarana dan Prasarana Usaha Garam**

- ✓ Pelaksanaan Perjalanan pada bulan Januari – Agustus 2024, ke Kabupaten Jeneponto, Takalar dan Pangkep.
- ✓ Keluaran dari kegiatan adanya informasi dari kelompok yang diidentifikasi dan juga terverifikasi untuk dapat menerima bantuan dan adanya dukungan terhadap produksi usaha garam rakyat di Kab. Jeneponto, Takalar dan Pangkep.
- ✓ Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan kualitas produksi usaha garam rakyat.
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 81,83%.
- ✓ Manfaat kegiatan ini adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petambak garam yang memiliki kemampuan dalam memproduksi garam yang berkualitas dan bernilai tinggi.



**Kegiatan APBN**

- |                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Program</b>      | <b>: Pengelolaan Ruang Laut</b>                 |
| <b>Kegiatan</b>     | <b>: Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan</b> |
| <b>Sub Kegiatan</b> | <b>: Penyusunan Tata Kelola Pergaraman</b>      |

**1. Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut untuk Ekstraksi Garam**

- ✓ Pelaksanaan kegiatan Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut untuk Ekstraksi Garam berjalan dari bulan Juni hingga Desember 2024 yang mencakup kegiatan perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, Koordinasi dan Verifikasi ke Kabupaten Maros, Takalar, Pangkep dan Jeneponto. FGD kegiatan sebanyak 2 kali, yaitu :
  - FGD I, Pada Tanggal 5 – 6 November 2024 di Hotel Travellers dengan narasumber Kepala BPSPL Makassar (Mekanisme Perizinan PKKPRL dan Air Laut Selain Energi), Dinas PUTR Kab. Jeneponto, Maros, Pangkep dan Takalar (Presentase Kesesuaian Lahan Tambak Garam dengan RTRW Kabupaten), Tim Kerja Verifikasi (Verifikasi Lahan Tambak Garam Kabupaten Kepulauan Selayar, Jeneponto, Takalar, Maros dan Pangkep).
  - FGD II Pada Tanggal 3 – 4 Desember 2024 di Hotel Travellers dengan narasumber Kabid Kelautan dan Pesisir DKP Sulsel (Dukungan Kebijakan Pengembangan Garam Sulawesi Selatan), Dinas SDACKTR Prov. Sulawesi Selatan), Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan (Status Perdagangan dan Kebutuhan Garam di Sulawesi

Selatan), Tim Kerja Verifikasi (Profil pemanfaatan Ruang Laut Untuk Ekstraksi Garam Sulawesi Selatan).

- ✓ Keluaran dari kegiatan ini adalah adanya Dokumen Profil Pemanfaatan Ruang untuk Ekstraksi Garam di Provinsi Sulawesi Selatan yang akan mendukung pengelolaan dan pengembangan pergaraman di Sulawesi Selatan,
- ✓ Hasil dari kegiatan ini adalah adanya tata kelola pergaraman yang mendukung pelaksanaan program SEGAR di Provinsi Sulawesi Selatan.
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- ✓ Manfaat kegiatan ini adalah meningkatnya produksi dan kualitas garam di Sulawesi Selatan yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pengelola garam.



## **2. Workshop Pengolahan dan Produksi Garam**

- ✓ Workshop Pengolahan dan Produksi Garam merupakan kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Petambak Garam dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 Oktober 2024, bertempat di Hotel Mercure Regency, Jl. Daeng Tompo No. 8, Makassar, dan pelaksanaan Ujian Lapangan di Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep.
- ✓ Narasumber dan materi pada kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Petambak Garam antara lain, Dr. Makhfud E (Arahan Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Petambak Garam); Ary Giri Dwi Kartika, M.Si (Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Produksi Garam dan Pengoperasian Pemadat Tanah); Wiwi Sri Werdi P, M.Si., M.Si (Persiapan dan Pelaksanaan Produksi Garam); Eka Nurrahema Ning Asih, M.Si (Pengoperasian Kincir Angin dan Komunikasi Efektif); Dr. Meyke N. Sultan/Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan (Penanganan Hasil Panen dan Teknik Pemasarannya); dan Nike Iza Nuzula, MT (Ujian Praktek dan Wawancara).
- ✓ Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya 1 paket pertemuan Pelatihan dan Sertifikasi Petambak Garam Sulawesi Selatan yang diikuti oleh 20 (dua puluh) peserta yang memiliki komitmen dalam upaya peningkatan produksi garam baik itu garam konsumsi maupun garam industri di Sulawesi Selatan,

- ✓ Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya produksi garam di Sulawesi Selatan yang memiliki kualitas dan daya saing yang tinggi dengan nilai jual yang tinggi pula, sehingga dapat memberi andil dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- ✓ Manfaat kegiatan ini adalah meningkatnya produksi dan kualitas garam di Sulawesi Selatan yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pengelola garam.



**Kegiatan : Perencanaan Ruang Laut**

**Sub Kegiatan : Rekomendasi Kebijakan Pendeklarasian Kewenangan Penerbitan Persetujuan dan Konfirmasi KKPRL**

#### 1. Koordinasi dan Verifikasi Pelaksanaan KKPRL

- ✓ Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Verifikasi Pelaksanaan KKPRLa dalam bulan Maret – Desember 2024 yang meliputi kegiatan perjalanan dinas koordinasi/konsultasi, Pengendalian, Penilaian dan verifikasi lapangan KKPRL.
- ✓ Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut melalui Pengendalian, Penilaian dan verifikasi lapangan terkait pemanfaatan ruang laut.
- ✓ Hasil dari pelaksanaan kegiatan Pengendalian, Penilaian dan verifikasi lapangan KKPRL adalah terselenggaranya kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah laut, pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang sesuai dengan zona peruntukan pemanfaatannya.
- ✓ Pelaksanaan kegiatan Pengendalian, Penilaian dan verifikasi lapangan KKPRL yang mencakup kegiatan koordinasi dan konsultasi ke pusat, kabupaten/kota, Bulukumba, Pinrang, Pangkep, Parepare, Takalar, Jeneponto, dan Barru. Perjalanan dinas Pengendalian, Penilaian dan verifikasi lapangan ke Luwu Timur, Takalar, dan Kepulauan Selayar.
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- ✓ Manfaat kegiatan ini adalah berjalanannya kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang sesuai dengan alokasi ruangnya dan turunnya kasus konflik pemanfaatan ruang di wilayah P3K.



**Program : Kualitas Lingkungan Hidup**  
**Kegiatan : Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut**

**1. Data dan Informasi Pemanfaatan Kawasan**

- ✓ Pelaksanaan kegiatan Data dan Informasi Pemanfaatan berlangsung dari bulan Juli – Agustus 2024. Rapat Koordinasi dilaksanakan pada tanggal 17 dan 18 Juli 2024 di Logos Caffee Kota Pangkep dan Balai Desa Mattiro Langi, Pulau Sarappo Lombo. Untuk kegiatan Perjalanan Dinas di Pulau Salemo, Pulau Sarappo Lombo dan di Kota Pangkep.
- ✓ Narasumber dan materi pada Rapat Koordinasi Pendataan dan Informasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Liukang Tupabbiring adalah Kepala Dr. Ir. Abdul Muas, M.Si / Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir DKP Sulsel (Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Sulawesi Selatan), Permana Yudiarso / Kepala BPSPL Makassar Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi), Muh. Dalvi Mustafa, S.Pi., M.Si / Unhas (Database Pemanfaatan Kawasan Konservasi dalam Mendukung Pengelolaan Secara Berkelanjutan).
- ✓ Output dari kegiatan ini adalah ikut sertanya 60 (enam puluh) peserta dalam 1 paket Pertemuan Koordinasi Pendataan dan Informasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Liukang Tupabbiting, Kabupaten Pangkep.
- ✓ Hasil yang dicapai pada kegiatan ini adalah adanya data dan informasi terkait kegiatan/pemanfaatan SDA di kawasan KK Liukang Tupabbiring dan menghasilkan komitmen bersama di tingkat daerah (Kab. Pangkep) dalam pengelolaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan.
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%
- ✓ Manfaat dari kegiatan ini adalah adanya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang bijak dan dengan mengedepankan lestari dan keberlanjutan



**Kegiatan : Rekomendasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

**1. Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

- ✓ Kegiatan dilaksanakan dari bulan Juli – Desember 2024 yang meliputi kegiatan Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi, survey di Perairan Teluk Bone yang mencakup Kabupaten Bone dan Sinjai pada bulan Juli – Agustus 2024, FGD di Kabupaten Bone dan Sinjai pada bulan Oktober 2024, Konsultasi Publik I dan II pada bulan Oktober – November 2024.
- ✓ Tujuan kegiatan adalah melakukan percepatan pengusulan penetapan Kawasan Konservasi Teluk Bone melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.
- ✓ Keluaran dari kegiatan ini adalah ikut berperannya stakeholders terkait pemanfaatan perairan Teluk Bone yang berada di Kabupaten Bone dan Sinjai dalam paket kegiatan survey, FGD, Konsultasi Publik yang selanjutnya melahirkan kesepahaman dan komitmen bersama untuk mendorong percepatan keberadaan KKD di perairan Provinsi Sulawesi Selatan.
- ✓ Kegiatan Pertemuan diikuti keseluruhannya oleh 120 (seratus dua puluh) peserta, yaitu BPSPL Makassar, CDK Bosowasi, Dinas Perikanan Kab. Bone dan Sinjai, Dinas Perhubungan Kab. Bone dan Sinjai, Dinas Pariwisata Kab. Bone dan Sinjai, Dinas Bappelitbangda Kab. Bone dan Sinjai, Kepala Kecamatan Pemerintah Kecamatan Pesisir di Kab. Bone dan Sinjai, Kepala Kelurahan/Desa Pesisir di Kab. Bone dan Sinjai Penyuluh Perikanan, Perguruan Tinggi, dan Tokoh masyarakat/nelayan.
- ✓ Materi dan Narasumber yang dihadirkan pada pertemuan FGD di Kabupaten Bone dan Sinjai adalah Hasil Survey Percepatan Penetapan KKP Teluk Bone oleh Tim Teknis/Tenaga Ahli dari Akademisi UNHAS. Konsultasi Publik I; Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi oleh Kepala BPSPL, Kebijakan Pengelolaan KKD di Provinsi Sulawesi Selatan oleh Tim Pokja Kawasan Konservasi Perairan, Arahan Zonasi Wilayah dalam Kawasan Konservasi Perairan di Teluk Bone Bagian Selatan oleh Tim Penyusun Dokumen KK Teluk Bone, Pembahasan Draft Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Teluk Bone Tim Penyusun Dokumen KK Teluk Bone. Konsultasi Publik II; Inisiasi Kemitraan dalam Pengelolaan Yang Efektif dan Berkelanjutan Oleh Kepala BPSPL Makassar, Arah Kebijakan dan Potensi Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Sulawesi Selatan oleh Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir DKP Sulsel, Arahan Zonasi Wilayah dalam KKP Teluk Bone oleh Tim Penyusun Dokumen KK Teluk Bone, Pembahasan Kondisi KKP Teluk Bone oleh Tim Penyusun Dokumen KK Teluk Bone, dan Pembahasan Zonasi KKP Teluk Bone oleh Tim Penyusun Dokumen KK Teluk Bone.

- ✓ Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Konsultasi Publik Percepatan Penetapan KKD yang memberi arahan zonasi bagi pengelolaan dan pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- ✓ Manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas ekosistem di kawasan konservasi yang ada di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya meningkatkan fungsi ekosistem yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.



### Kegiatan : Layanan Pemantauan dan Evaluasi

#### 1. Kapasitas dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Pengelola Kawasan Konservasi

- ✓ Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Kawasan dilaksanakan dengan menghadiri undangan dari pusat (KKP) yaitu menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah) di Yogyakarta pada tanggal 05 - 07 Maret 2024, dan Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pemanfaatan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Papua Barat, pada tanggal 31 Agustus - 01 September 2024.
- ✓ Keluaran dari kegiatan ini adalah informasi terkait kawasan konservasi perairan dan kelembagaan/pengelolaan suatu Kawasan Konservasi.
- ✓ Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan kualitas SDM terkait konservasi perairan dalam pengelolaan Kawasan Konservasi. Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- ✓ Manfaat kegiatan ini adalah terjaganya sumberdaya alam perairan yang menjamin pemanfaatan SDA yang berkelanjutan.



**Program : Dukungan Manajemen**

**Kegiatan : Layanan Dukungan Manajemen Internal**

**Sub Kegiatan : Layanan Data dan Informasi**

#### 1. Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan

- ✓ Pelaksanaan perjalanan dinas pada tanggal 24 - 26 November 2024 ke Jakarta yaitu konsultasi dan koordinasi pelaksana validasi Produksi Garam Tahun 2024, dan kegiatan validasi daerah pada tanggal 10 Desember 2024, di Hotel Travellers, Makassar.

- ✓ Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya validasi produksi garam di tingkat daerah dan juga pusat pusat.
- ✓ Hasil dari kegiatan ini adalah tervalidasinya data garam secara nasional yang dapat mendukung bagi perencanaan pengembangan produksi garam secara nasional.
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%
- ✓ Manfaat dari kegiatan ini berjalannya perencanaan pengembangan garam usaha garam dengan tepat yang dapat memberikan dampak peningkatan produksi garam yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



**Kegiatan : Layanan Manajemen Kinerja Internal**

**Sub Kegiatan : Layanan Perencanaan dan Penganggaran**

**1. Layanan Perencanaan Program dan Anggaran**

- ✓ Pelaksanaan kegiatan dan perjalanan dinas pada tanggal 29 September – 05 Oktober 2024 ke Bandung dalam rangka menghadiri undangan Finalisasi Dokumen Pengsasanar Tugas Pembantuan TA. 2025, Bandung.
- ✓ Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi ke Dirjen PRL KKP terkait program kegiatan dan anggaran Tahun 2025 di DKP Sulawesi Selatan.
- ✓ Hasil dari kegiatan ini adalah adanya pelaksanaan program yang pelaksanaannya sesuai dengan tahapan perencanaan pencapaian target dan output.
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%
- ✓ Manfaat kegiatan ini adalah adanya perencanaan dan penganggaran yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan yang maksimal out putnya dan memiliki manfaat bagi pengelolaan dan pemanfaatan WP3K yang lestari berkelanjutan.



**Sub Kegiatan : Layanan Pemantauan dan Evaluasi**

**1. Layanan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

- ✓ Pelaksanaan kegiatan pada bulan Januari – Desember 2024 di Makassar, Perjalanan dinas dalam rangka Rapat Verifikasi Pelaporan Pada Aplikasi Kinerja E-Monev Bappenas, SMART DJA dan Kinerjaku TRWL VI 2023, Tanggal 8 – 12 Januari 2024 di Bandung.

- ✓ Output dari kegiatan adalah adanya monitoring dan evaluasi kegiatan PRL, dan adanya pelaporan on-line bulanan terkait perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- ✓ Hasil dari kegiatan adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan wilayah dan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sesuai dengan aturan yang berlaku, serta terlaksananya pelaporan on-line E-Monev dan Kinerjaku ke Bappenas dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- ✓ Manfaat kegiatan ini adalah adanya evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang berjalan yang mendukung bagi perencanaan program dan anggaran tahun selanjutnya.



### Sub Kegiatan : Layanan Manajemen Keuangan

#### 1. Layanan Manajemen Keuangan

- ✓ Pelaksanaan kegiatan Layanan pada bulan Januari – Desember 2024 di Makassar, dan Perjalanan dalam rangka Konsultasi Penyusunan Sistem Akuntansi pada tanggal 15 – 19 Januari 2024 di Surabaya.
- ✓ Output dari kegiatan ini adalah adanya layanan administrasi keuangan kegiatan dan pelaporan bulanan terkait pemanfaatan barang dan anggaran kegiatan TA. 2024 di Bidang Kelautan dan Pesisir.
- ✓ Hasil dari kegiatan adalah berjalannya layanan administrasi keuangan dan pelaporan pemanfaatan barang dan anggaran ke KKP dan Kemenkeu terkait dengan pelaksanaan kegiatan .
- ✓ Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- ✓ Manfaat dari kegiatan ini adalah adanya kontrol terhadap pengeluaran dan pemanfaatan anggaran sehingga dapat mendukung pelaksanaan kegiatan yang berjalan.



#### 4.3.4. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan-DKP Provinsi Sulawesi Selatan dituntut untuk dapat memberikan solusi melalui tugas pokok dan fungsi teknis yang diemban selama tahun 2024. Bidang ini bertanggung jawab melaksanakan program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dan lebih khusus lagi melaksanakan kegiatan Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil, serta kegiatan Pengawasan sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya, yang bebabankan oleh organisasi (DKP Provinsi Sulsel). Pelaksanaan kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mendukung peningkatan peran dan kemampuan operasional aparat pengawasan di bidang perikanan agar dapat mewujudkan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang lestari dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.

Beberapa permasalahan penting yang masih dijumpai dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan, diantaranya adalah minimnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran para pelaku usaha dalam pemanfaatan sumber daya; minimnya ketiaatan dan kesadaran hukum para pelaku usaha; minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya perlindungan dan plestarian; maraknya peraktek *destructive fishing*, penangkapan ikan secara berlebih (*over fishing*), pencemaran perairan dan pembuangan limbah secara *illegal, degradasi* habitat pesisir (mangrove, terumbu karang, padang lamun, estuari); minimnya peran kelembagaan pengawasan di daerah serta lemahnya koordinasi dan kerjasama pengawasan serta penegakan hukum di daerah.

Pelaksanaan kegiatan dalam program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2022 masih menyisahkan beberapa permasalahan *destruktive fishing* dan *illegal fishing* yang kini telah menjadi isu nasional yang menimbulkan kerugian negara atau pemerintah. Kondisi tersebut tentunya melegitimasi pemerintah daerah provinsi akan pentingnya pelaksanaan tugas dan peran dalam seksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan sebagaimana diamanatkan UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004, serta UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Mengakhiri pelaksanaan kegiatan Bidang Pengawasan tahun 2024, terdapat beberapa rencana program dan kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan akan menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2029.

Salah satu bentuk keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan oleh Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan selama tahun 2024, diantaranya adalah : 1) Meningkatnya jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang berperan aktif dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; 2) Meningkatnya jumlah aparatur pengawas perikanan dan kemampuan teknis SDM aparatur dalam peran pengawasan dan penegakan hukum;

3) Terdatanya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku

#### **Kegiatan APBD**

##### **A. Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mill**

###### **1. Sub Kegiatan Pengawasan Ruang Laut sampai dengan 12 Mill**

###### **a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri dalam rangka Pengawasan/ Menghadiri Undangan Rapat Kerja Teknis Pengawas Perikanan Tahun 2024 di Kota Manado, Sulawesi Utara**

- Waktu Pelaksanaan : Tanggal 03 - 06 Juni 2024
- Hasil yang dicapai :
  - ✓ Hasil reviu terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2024 menunjukkan bahwa masih terdapat pelaksanaan pengawasan yang tidak sesuai ketentuan dan belum optimalnya pemantauan pelaksanaan rekomendasi sanksi administrasi
  - ✓ Strategi yang dilakukan Ditjen Perikanan Budidaya untuk mengembangkan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan antara lain melalui a) revitalisasi dan pemodelan sistem perikanan budidaya, b) pembangunan Kampung Perikanan Budidaya, c) pengembangan bahan pakan berbasis local, d) peningkatan produksi, nilai produk dan akses pasar untuk 5 komoditas unggulan udang, rumput laut, nila, lobster, kepiting, e) pengembangan Pusat Induk Ikan (Broodstock Center) dan peningkatan sektor hilir (coldstorage dan unit pengolahan ikan), dan f) penguatan sumber daya manusia, regulasi, dan pengawasan
  - ✓ Arah kebijakan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan didorong untuk peningkatan konsumsi ikan dalam negeri dan ekspor hasil kelautan dan perikanan melalui penjaminan mutu dan keamanan produk, serta pemenuhan standar pasar lainnya.
  - ✓ Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Berbasis Kuota merupakan transformasi pengelolaan penangkapan ikan di Indonesia dan sudah dimulai pelaksanaannya dengan penerapan modelling PIT di zona 3.
  - ✓ BPPMHKP menjamin mutu hasil kelautan dan perikanan melalui mekanisme pengendalian dan pengawasan mutu dari hulu hingga hilir melalui sertifikasi terhadap hasil budidaya, penangkapan ikan maupun penanganan dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan;

- ✓ Pengaturan pengenaan sanksi administrasi sudah ada peraturan perundangannya yang sebenarnya dapat digunakan untuk pengenaan sanksi administrasi di daerah. Namun demikian apabila akan mengenakan sanksi administrasi berupa denda, peraturan tersebut tidak dapat digunakan karena pengenaan denda hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan daerah. Oleh sebab itu harus dibuat Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah pengenaan sanksi.



**b. Perdin Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut di Kabupaten Barru**

- Waktu pelaksanaan : 26-27 Februari 2024
- Hasil yang dicapai :
- Berdasarkan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Barru dilaporkan sebagai berikut :

NO	JENIS KEGIATAN	PENANGANAN PELANGGARAN	LOKASI
1	Reklamasi Pantai	<ul style="list-style-type: none"><li>➢ Memberikan surat teguran kepada Ibu Darmawati selaku Pemilik tanah / lokasi yang melakukan penimbunan untuk menghentikan segala bentuk kegiatan penimbunan / reklamasi sampai terbit izin lingkungan.</li><li>➢ Mengurus bukti kepemilikan pada ATR BPN dan izin penggunaan / pemanfaatan air laut pada DPLH Prov.Sulsel.</li><li>➢ Bukti kepemilikan tanah yang selama ini diklaim oleh Ibu Darmawati hanya sebuah surat Keterangan Jual Beli dan SPPT dan itu tidak bisa disebut Bukti Kepemilikan yang sah.</li></ul>	Desa Pancana Kec Tanete Rilau Kab Barru
2	Reklamasi Pantai	<ul style="list-style-type: none"><li>➢ Memberikan surat teguran kepada Andi Darmawan selaku Pemrakarsa kegiatan penimbunan untuk menghentikan segala bentuk kegiatan penimbunan/reklamasi sampai terbit izin lingkungan.</li><li>➢ Menyarankan untuk mengurus perizinan tersebut sebelum melanjutkan kegiatan penimbunan.</li></ul>	Desa Cilellang Kab Barru

*Lanjutan.....*

NO	JENIS KEGIATAN	PENANGANAN PELANGGARAN	LOKASI
3	Reklamasi Pantai	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Adanya aktivitas penimbunan di Pesisir Pantai Kupa yang menimbulkan sejumlah kerusakan lingkungan</li> <li>➢ Hasil kajian WALHI proyek reklamasi ilegal ini melanggar 16 peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan. Serta Pengelolaan Lingkungan Hidup, Permen Lingkungan Hidup No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-undang No. 5 tahun 1990.Tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan lain-lain.</li> </ul>	Desa Kupa Kec Mallusetasi Kab Barru

*Sumber : Laporan Tahunan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2024*

- ✓ Terdapat 3 (tiga) kegiatan yang melanggar pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Barru, didapatkan informasi bahwa pelaku usaha tersebut tidak memiliki dokumen perizinan, hal tersebut disebabkan ketidaktahuan dan minimnya informasi.
- ✓ Kegiatan tersebut menurut organisasi WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) dan masyarakat setempat menimbulkan sejumlah kerusakan lingkungan seperti kerusakan mangrove, kepiting, udang, terumbu karang, air keruh dan beberapa jenis ikan hias yang hidup di laut



**c. Perdin Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut di Kabupaten Bone**

- Waktu pelaksanaan : 15-17 Mei 2024
- Hasil yang dicapai :
- Kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai 12 mil diawali kunjungan Dinas Perikanan Kabupaten Bone. Team diterima oleh Kadis perikanan, Kepala Bidang kenelayanan Ibu Tari dan beberapa penyuluh perikanan yang akan mendampingi kami ke lokasi binaannya. Pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil salah satu alokasi

bantuan rumpon di Kabupaten Bone. Adapun informasi yang disampaikan bahwa akhir tahun 2023, menerima bantuan untuk pelaku usaha dari DKP Provinsi berupa rumpon dan kelengkapannya pada lokasi wilayah perairan Bone penempatannya yang berada di perairan teluk Bone. Adapun data penerima Rumpon yang disampaikan sebagai berikut :

- 1) Kelompok Harapa Baru, Ketua Bpk. Jumadi , Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kel.Lonrae Kab.Bone
  - 2) Kelompok Makmur Jaya, Ketua bpk Basri, Kecamata Tanete Riattang Timur, Kel. Harapa baru Kab Bone
  - 3) Kelompok Laggoppo Mandiri IV, Ketua Bpk Syamsuddin , Kecamatan Kajuara, Kel. Massangkae Kab. Bone
  - 4) Kelompok Pertiwi, Ketua Sofyan, Kecamatan Taete Riattang Timur, Kel. Waetuo Kab. Bone
- Dilanjutkan kunjungan lapangan/lokasi sebagai penerima bantuan pada Kelompok Harapan Baru, yang terletak di Kec. Tanete Riattang Timur, Kel.Lonrae, yang diketua Bpk Jumadi yang beranggotakan 10 orang berdasarkan hasil wawancara dan diskusi beberapa hal yang disampaikan bahwa pengelolaan pemanfaatan ruang laut yang dilakukan kelompok ini berupa penerimaan bantuan dari DKP Prov berupa Rumpon, tali ,pelampung yang diberikan akhir Desember 2023, sementara pemberatnya baru diserahkan bulan Mei 2024, dan sudah diletakkan sesuai area penempatan rumpon diperairan teluk Bone.
- Pemanfaatan ruang laut sampai 12 mil salah satunya dengan pengalokasian rumpon di wilayah perairan teluk Bone untuk melindungi kelestarian sumberdaya ikan dan juga berkembangbiaknya ikan sebagai tempat rumah ikan untuk berlindung.
- Penempatan Rumpon diletakkan di perairan Teluk Bone dengan Titik Koordinat S  $05^{\circ}10'031.$ , E  $120^{\circ} 46' 79.1"$  dengan ketinggian 9 derajat dengan luas area kira-kira 500 km dengan dilengkapi dengan pemberat ,tali dan pelampung.
- Selain itu juga kelompok ini melakukan aktifitas penangkapan ikan seperti Ikan Tuna ekor kuning, layang, cakalang yang rata 50-100 kg hasil tangkap dengan menggunakan kapal Indah jaya bermuatan 27 GT.
- Terhadap pemenuhan perizinan Kelompok ini sudah dilengkapi dengan ijin SIUP namun belum memiliki ijin terkait pemanfaatan pemasangan rumpon sebagai jalur penangkapan ikan. Dan beberapa surat ijin kapal tidak dapat diperlihatkan dikarenakan berada bersama kapal yang sementara berlayar mencari ikan.

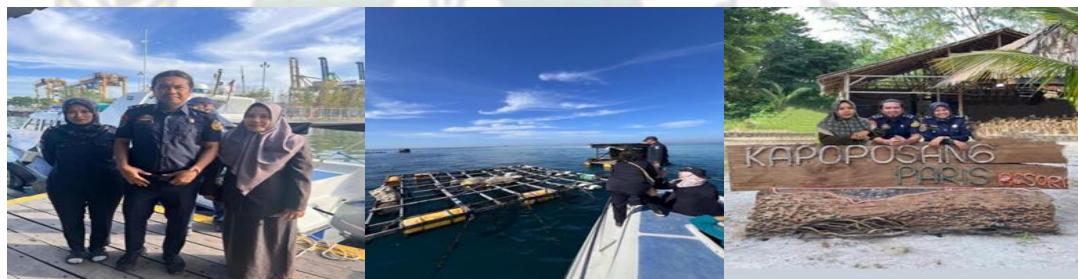
- Kemudian dilanjutkan ke kelompok penerima rumpon oleh Kelompok Makmur Jaya, Ketua bpk Basri, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kel. Harapan baru Kab Bone yang didampingi dengan penyuluh perikanan Ibu Nurfadillah. Menurut informasi dari ketua kelompok Pak Basri menyampaikan memiliki kelompok yang berjumlah 10 orang juga telah menerima bantuan rumpon , namun alat pemberat sementara dalam persiapan ketempat penempatan lokasi di area perairan teluk Bone
- Pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil yang alokasi penempatannya juga diletakkan di perairan Teluk Bone dengan Titik Koordinat S  $4^{\circ}35'40.5''$ , E  $120^{\circ}22'07.7''$  dengan ketinggi 10 derajat dengan luas area kira-kira 1 ha di wilayah sekitar perairan teluk Bone.
- Untuk pemenuhan penggunaan alokasi rumpon pada Penerbitan Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR), sementara berkas pengajuan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam proses penerbitan izin, yang disampaikan oleh salah seorang staf DKP Provinsi.



**d. Perdin Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut di Pulau Kapoposang dan Gondong Bali Kabupaten Pangkep**

- Waktu pelaksanaan : 24-26 Juli 2024
- Hasil yang dicapai :
- Kegiatan ini diawali dengan melakukan koordinasi ke Cabang Dinas Kelautan Pangkep, untuk mendapatkan gambaran/informasi terkait kegiatan pemanfaatan ruang laut yang ada di Pulau Kapoposang dan Pulau Gondong Bali, dan diterima oleh Kepala Seksi Pengawasan SDKP, Bapak Muhammad Erwin Azis, S.Pi, beserta tim, yang sekaligus mendampingi perjalanan menuju ke Pulau Kapoposang dan Pulau Gondong Bali.
- Penetapan Kepulauan Kapoposang dan Laut sekitarnya menjadi Kawasan Konservasi mempunyai dasar hukum sebagai berikut :
  1. Tahun 2009 : Berita Acara Nomor BA.01/Menhut-IV/2009-BA 108/MEN.KP/III/2009 tentang serah terima Kawasan oleh Departemen Kehutanan kepada Departemen Kelautan dan Perikanan

2. Tahun 2009 : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 60 tahun 2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi perairan nasional kepulauan kapoposang dan laut sekitarnya di provinsi Sulawesi Selatan
  3. Tahun 2014 : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 59 tahun 2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi taman wisata perairan kepulauan Kapoposang dan Laut sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014-2034
  4. Tahun 2022 : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang dan Laut sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan
- Pengelolaan Kawasan dikelola oleh BKKPN Kupang melalui Satuan Kerja (Satker) Maros, yang mempunyai perwakilan kantor lapangan di Pulau Kapoposang.
- Jenis kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dilakukan adalah Penangkapan Ikan, (dengan menggunakan pancing tonda, pancing dasar, pere pere, jarring insang, rawai dasar, tombak, dll) Pariwisata alam perairan (terdapat kurang lebih 20 titik penyelaman dengan berbagai karakteristik kontur dan keanekaragaman biota), dan kegiatan penelitian.



**e. Perdin Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut di Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang**

- Waktu pelaksanaan : 07-09 November 2024
  - Hasil yang dicapai
- Kegiatan ini diawali dengan melakukan koordinasi ke Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng, untuk mendapatkan gambaran/informasi terkait kegiatan pemanfaatan ruang laut yang ada di Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang, dan diterima oleh Kepala Seksi Pengawasan SDKP, Bapak Faisal Kamaruddin, S.Pi, beserta tim, yang sekaligus mendampingi perjalanan kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut di Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang.
- Selain itu, dilakukan pula koordinasi ke UPTD TPI Cempae dalam rangka koordinasi dengan pemerintah Kota Parepare dan diterima oleh Bapak Andi Abdillah, S.Pi, MP

- Untuk Kabupaten Pinrang, dilakukan koordinasi ke Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang yang diterima oleh Bapak Makkawaru Ismail, S.Pi selaku Kabid Pemberdayaan Budidaya Ikan di Kabupaten Pinrang.
- Pengelolaan ruang laut di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, memerlukan perencanaan yang efektif untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan. Berikut beberapa aspek penting dalam pengelolaan ruang laut di Parepare dan Kabupaten Pinrang :
  - ✓ Aspek Kebijakan dan Perencanaan
    1. Peraturan Daerah (Perda): Membuat perda yang mengatur penggunaan ruang laut, seperti Perda tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan.
    2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW): Mengintegrasikan pengelolaan ruang laut ke dalam RTRW Kota Parepare.
    3. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan: Mengembangkan kebijakan untuk melindungi lingkungan laut dan pesisir.
  - ✓ Aspek Ekonomi
    1. Pariwisata Bahari: Mengembangkan pariwisata bahari yang berkelanjutan, seperti wisata diving dan snorkeling.
    2. Perikanan: Mengelola perikanan secara berkelanjutan dengan memantau kuota tangkap dan melindungi habitat ikan.
    3. Pengembangan Pelabuhan: Meningkatkan infrastruktur pelabuhan untuk mendukung kegiatan ekonomi.
  - ✓ Aspek Sosial
    1. Penglibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan ruang laut dan pengambilan keputusan.
    2. Pendidikan dan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan.
    3. Pengembangan Kapasitas: Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya laut.
  - ✓ Aspek Lingkungan
    1. Konservasi: Melindungi dan mengkonservasi habitat laut, seperti terumbu karang dan mangrove.
    2. Pengelolaan Limbah: Mengelola limbah laut dan darat untuk mencegah pencemaran.

3. Pemantauan Kualitas Air: Memantau kualitas air laut secara teratur.

✓ Instansi Terkait

1. Pemerintah Kota Parepare: Bertanggung jawab atas perencanaan dan pengelolaan ruang laut.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan: Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan.
3. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH): Mengelola lingkungan hidup dan konservasi.

✓ Sumber Dana

1. Dana Pemerintah: Mengalokasikan dana untuk pengelolaan ruang laut.
2. Dana Internasional: Mencari dana dari organisasi internasional untuk mendukung pengelolaan ruang laut.
3. Partisipasi Swasta: Mengajak sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pengelolaan ruang laut.

- Dengan mengintegrasikan aspek-aspek tersebut, Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang dapat mencapai pengelolaan ruang laut yang efektif, berkelanjutan dan menguntungkan semua pihak.
- Dari hasil pengamatan di lapangan serta koordinasi dengan CDK Ajatappareng dan Dinas Kab/Kota, Pemanfaatan Ruang Laut khususnya kegiatan Karamba Jaring Apung di Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang belum ada yang mengantongi ijin PKKPL.
- Khusus untuk Kabupaten Pinrang, sebagian besar nelayan pembudidaya laut beralih ke budidaya perikanan umum daratan. Hak tersebut sebagai dampak terhadap operasional budidaya laut yang lebih tinggi dari Budidaya PUD, dimana hasilnya tidak terlalu diminati oleh masyarakat lokal.
- ✓ Bidang Pengawasan mengarahkan bagi nelayan minimal untuk pengurusan NIB, yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh personil dari Cabang Dinas Kelautan maupun dari Penyuluh.



**f. Perdin Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut di Pulau Podang-Podang dan Bontosua Kabupaten Pangkep**

- Waktu Pelaksanaan : 19-21 November 2024
- Hasil yang dicapai :
  - Mengawali kegiatan ini team melakukan beberapa persiapan baik adminstrasi maupun operasional seperti persiapan kapal speed Pengawas Perikanan , guna menyusun agenda yang akan dilakukan dilapangan dalam melaksanakan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil di Pulau Podang-Podang dan Pulau Bontosoa yang berada diperairan Kabupaten Pangkep. Dan berangkat bertolak dari Dermaga Cafe Ombak menuju perairan Pangkep ke Pulau Podang-Podang dan Pulau Bontosoa untuk melakukan pemanfaatan rual laut sambil yang berada di perairan Pangkep..
  - Tiba di Pulau Podang-Podang dan Pulau Bontosoa yang terletak di wilayah perairan Pangkep, team melakukan koordinasi terkait adminstrasi baik dengan dan juga diterima oleh kepada Desa Mattiro Lore Bapak Rusdi untuk penyelesaian kelengkapan adminstrasi
  - Kegiatan Pemantauan pemanfaatan laut yang dilakukan di Pulau Podang-Podang dan Pulau Bontosoa yakni pemanfaatan rumpon KJA yang dilakukan secara mandiri/perorangan yakni berupa :
    1. Rumpon ikan seperti cumi
    2. Pembuatan Transplantasi ikan
    3. Spot Daiving
    4. Keramba Jaring Apung untuk kerang mutiara dan ikan
    5. Juga melakukan aktifitas penambangan pasir ketika terjadi pertemuan arus ombak dimana pasir terbawa arus ombak sehingga membentuk semacam ALTO t4 berkumpulnya pasir yang beberapa pelaku usaha mengambil untuk di gunakan sebagai tanggul/ abrasi laut.
  - Adapun penggunaan wilayah pemanfaatan rumpon oleh pelaku usaha untuk melakukan aktifitas pemanfaatan ruang laut di Pulau Podang-Podang dan Bontosoa, alokasi rumpon belum memiliki surat izin pemanfaatan seperti pada Penerbitan Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR), berkas sementara dalam pengajuan ke Dinas Kabupaten setempat.
  - Terkait pemantauan pengawasan pemanfaatan ruang laut di perairan Pulau Podang-podang dan Pulau Bontosoa beberapa kendala kami hadapi antara lain :

1. Jarak antar pulau ke pulau yang jauh
2. Kurangnya sosialisasi terhadap pelaku usaha terkait kegiatan aktifitas pemanfaatan ruang laut
3. Kurangnya keterlibatan stakeholder terkait aktifitas pemanfaatan ruang laut.
4. Keterbatasan Anggaran dan juga keterbatasan kemampuan kapasitas personil



**g. Perdin Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut di Kabupaten Bulukumba**

- Waktu Pelaksanaan : 09 - 10 Desember 2024
  - Hasil yang dicapai
- Berikut beberapa aspek penting dalam pengawasan pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Bulukumba:
- ✓ **Penegakan Peraturan:** Pengawasan memastikan bahwa semua pemanfaatan ruang laut sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Peraturan Daerah Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)
  - ✓ **Pengendalian Konflik:** Pengawasan membantu mengendalikan konflik antara berbagai pihak yang memanfaatkan ruang laut, seperti konflik antara nelayan tradisional dan modern, serta konflik antara pembudidaya rumput laut dan penangkap ikan
  - ✓ **Pengawasan Ketersediaan Sumber Daya:** Pengawasan membantu memantau ketersediaan sumber daya kelautan dan memastikan bahwa pemanfaatan dilakukan secara efisien dan tidak eksploratif
  - ✓ **Pengawasan Pemanfaatan Ruang oleh Nelayan Lokal:** Pengawasan memastikan bahwa nelayan lokal memanfaatkan sumber daya laut dengan benar dan tidak ada pemanfaatan yang dilakukan oleh nelayan pendatang tanpa izin
- Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut di Kabupaten Bulukumba :
- ✓ Kawasan Pesisir Pantai Bira: Salah satu area strategis yang diarahkan untuk pengembangan kawasan pesisir sebagai Waterfront City. Kawasan ini memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung kegiatan ekonomi

- ✓ Kelurahan Sapoloh, Kecamatan Bontobahari: Area ini merupakan salah satu lokasi yang sering mengalami ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, termasuk bangunan yang melanggar garis sempadan pantai dan fungsi eksisting
- ✓ Pantai Timur Bulukumba: Area ini memiliki potensi untuk kegiatan wisata bahari seperti pantai rekreasi, snorkeling, dan selam. Pantai Timur ini juga memiliki daya dukung untuk aktivitas wisata yang dapat meningkatkan pendapatan ekonomi daerah.
- ✓ Kawasan Tepian Air (Waterfront) Kota Bulukumba: Pengembangan kawasan tepian air ini bertujuan untuk menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Hal ini juga bertujuan untuk mengatasi masalah banjir tahunan yang sering terjadi di kawasan ini.
- ✓ Terdapat 2 (dua) kegiatan yang melanggar pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Bulukumba yaitu : Bangunan yang melanggar garis sempadan Pantai yang ditetapkan sehingga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan masalah banjir, serta pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan perencanaan.
- ✓ Pelanggaran-pelanggaran ini sering kali disebabkan oleh kurangnya sosialisasi perencanaan, pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan perencanaan, dan kurangnya pengendalian pemanfaatan ruang oleh pemerintah setempat.



**2. Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mill**

**a. Perdin Pengawasan Pembudidayaan Ikan Laut di Kabupaten Barru**

- Waktu Pelaksanaan : 29 Februari - 1 Maret 2024
- Hasil yang dicapai :
- Pelaksanaan Pengawasan Usaha Perikanan budidaya di laut kab. Barru di awali dengan kunjungan ke Dinas Perikanan Kabupaten Barru dan di terima oleh bapak Asriadi Muin, S.Pi selaku kepala bidang pengelolaan pembudidayaan dan Pengawas perikanan Ahli Muda, Bapak Marwan Edy. Menurut bapak Marwan Edy bahwa untuk usaha budidaya laut Kabupaten Barru belum berkembang seperti daerah lainnya, yang mana untuk budidaya laut baru mulai dikembangkan pada Tahun 2021 dengan skala kecil di wilayah

Soppeng Riaja sedangkan Keramba jaring apung yang ada saat ini berada di Mallusetasi dengan komoditas ikan kerapu/sunu pun masih skala kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembesaran ikan kerapu/sunu masuk dalam standar usaha pembesaran pisces/ikan bersirip laut (KBLI 03211) dan budidaya rumput laut masuk dalam standar usaha pembesaran tumbuhan air laut (KBLI 03217) yang mana kedua usaha tersebut masih skala mikro dan kecil yang tidak membutuhkan persyaratan umum, namun tetap harus memperhatikan persyaratan khusus, yakni :

1. Menerapkan cara budidaya yang baik, membutuhkan
  - ✓ Sarana ;
  - ✓ Struktur organisasi dan SDM;
  - ✓ Persyaratan proses;
  - ✓ Sistem manajemen usaha.
2. Menerapkan kesehatan, keselamatan kerja dan Lingkungan (K3L). Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak *self declare*
- Selain itu, di Kabupaten Barru juga terdapat usaha budidaya kerang Mutiara yang dilakukan oleh PT. Timur Otsuki Mutiara (PT.TOM) dengan jumlah rakit sebanyak 9 rakit di perairan dekat pulau dukungan, budidaya ini masuk dalam standar usaha pembesaran Mollusca Laut (KBLI 03215) dan skala usaha menengah dan besar yang mana wajib memiliki persyaratan umum, yakni rencana usaha meliputi :
  1. Rencana Kegiatan Usaha ;
  2. Rencana Tahapan kegiatan;
  3. Rencana teknologi yang digunakan;
  4. Sarana usaha yang dimiliki;
  5. Rencana Pengadaan sarana usaha;
  6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan;
  7. Rencana pembiayaan
- Durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat pengajuan permohonan perizinan berusaha. Adapun persyaratan khusus, yakni :
  1. Memiliki sertifikat cara budidaya yang baik, membutuhkan :
    - ✓ Sarana ;
    - ✓ Struktur organisasi dan SDM;
    - ✓ Persyaratan proses;
    - ✓ Sistem manajemen usaha.
  2. Standar proses produksi Mollusca

3. Menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha disesuaikan dengan siklus pembesaran komoditas yang diusahakan.
- Pada saat tim mendatangani tempat budidaya kerang Mutiara PT TOM hanya ada petugas jaga sehingga tim tidak dapat mendapatkan dokumen usaha untuk di cek list. Namun, dari informasi dari petugas jaga bahwa PT TOM telah memiliki dokumen perizinan berusaha dan memiliki lokasi di Batupute, Mangkoso dan Pinrang, sedangkan kantor cabangnya berada di Labuange. Pada kesempatan ini tim, melakukan pemantauan terhadap sarana usaha berupa keramba jaring apung, alat pembersihan dan sarana pengelolaan lingkungan. Dari hasil pemantauan didapatkan bahwa PT TOM telah memenuhi persyaratan khusus sarana dan persyaratan proses produksi. Diharapkan ke depannya tim dapat melakukan pemantauan secara menyeluruh.



**b. Perdin Pengawasan Pembudidayaan Ikan Laut di Kabupaten Pangkep**

- Waktu Pelaksanaan : 07-08 Maret 2024
  - Hasil yang dicapai :
- Pelaksanaan Pengawasan Usaha Perikanan budidaya laut di kab. Pangkep di awali dengan kunjungan ke Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep dan di terima oleh bapak Mursalin J, S.Pd selaku kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan ibu Risna Irawati, S.Pi,M.Si sebagai ibu penyuluh Perikanan di Wilayah Kecamatan Ma'rang menerangkan bahwa untuk usaha budidaya laut di wilayahnya ini, masih dalam skala kecil dan usaha perikanan tersebut merupakan Mata Pencaharian Alternatif bagi nelayan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa budidaya rumput laut masuk dalam standar usaha pembesaran tumbuhan air laut (KBLI 03217) yang mana usaha tersebut masih skala mikro dan kecil yang tidak membutuhkan persyaratan umum.
- Pada kesempatan ini, tim melakukan kunjungan ke kelompok budidaya rumput laut yang berada di wilayah Desa Pitusunggu dan Desa Tamangapa Kecamatan Ma'rang. pengawasan usaha perikanan budidaya laut dilakukan terhadap pelaku usaha budidaya rumput laut milik bapak syuti ketua kelompok SIPAKARAJA dimana tenaga kerja yang

digunakan dalam usaha rumput laut berasal dari anggota keluarga sedangkan bibitnya diperoleh dari luar daerah, hal ini disebabkan sampai saat ini belum ada bibit rumput laut di sekitarnya. Usaha budidaya rumput laut ini merupakan mata pencaharian alternatif dan baru dilakukan sejak setahun terakhir sehingga belum kelihatan memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Namun demikian, pelaku usaha telah memiliki sarana pasca panen yang memadai berupa para-para penjemuran rumput laut yang mana penjualan rumput laut masih dalam bentuk setengah kering ke penampung.

- Pengawasan dilakukan terhadap pelaku usaha perikanan rumput laut milik bapak H. Mustakim Kelompok MAMMINASAE yang mana pada saat pemantauan sedang dilakukan pengikatan bibit rumput laut dan pada saat diikat masih terdapat trisipan/kerang yang menempel pada bibit, terindikasi bibit tersebut belum cukup baik dalam standar budidaya yang baik. Rata-rata pelaku usaha rumput laut memiliki 500 bentangan, seperti yang disampaikan oleh salah satu pelaku usaha. Untuk tenaga kerja mengikat bibit berasal dari ibu-ibu rumah tangga yang disewa per bentangan dengan upah 5.000 rupiah. Usaha budidaya rumput laut di Desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang telah ada sejak 4 tahun terakhir sebagai salah satu mata pencaharian alternatif.
- Jumlah Pembudidaya Rumput Laut Per kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2024

No	Kecamatan	Pembudidaya Rumput Laut	Komoditas R.L Unggulan
1.	Pangkajene	790	Gracillaria
2.	Minasatene	125	Gracillaria
3.	Bongoro	225	Gracillaria dan Cottoni
4.	Labakkang	500	Gracillaria dan Cottoni
5.	Ma'rang	830	cottoni
6.	Segeri	710	cottoni
7.	Mandalle	610	Cottoni
8.	Balocci	-	
9.	Tondong Tallasa	-	
10.	Liukang Tupabbiring Utara	130	Cottoni
11.	Liukang Tupabbiring	-	
12.	Liukang Kalmas	105	Spinosium
13.	Liukang Tangaya	210	Spinosium
	<b>Jumlah</b>	<b>4.235</b>	



c. Perdin Pengawasan Pembudidayaan Ikan Laut di Kabupaten Bone

- Waktu Pelaksanaan : 13-15 Mei 2024
- Hasil yang dicapai :
- Pelaksanaan Pengawasan Usaha Perikanan budidaya laut di Kab. Bone di awali dengan kunjungan ke Dinas Perikanan Kabupaten Bone dan di terima oleh bapak Sukiman,S.ST., Msi selaku Plt. Kepala Dinas Perikanan dan Azikin S.Pi, sebagai penyuluh Perikanan di Wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur menerangkan bahwa untuk usaha budidaya laut di wilayahnya ini, masih dalam skala kecil dan usaha perikanan tersebut merupakan Mata Pencaharian Alternatif bagi nelayan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa budidaya rumput laut masuk dalam standar usaha pembesaran tumbuhan air laut (KBLI 03217) yang mana usaha tersebut masih skala mikro dan kecil yang tidak membutuhkan persyaratan umum
- Pada kesempatan ini, tim melakukan kunjungan ke kelompok budidaya rumput laut yang berada di wilayah Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur .pengawasan usaha perikanan budidaya laut dilakukan terhadap pelaku usaha budidaya rumput laut milik bapak Nurdin ketua kelompok MADECENG dimana tenaga kerja yang digunakan dalam usaha rumput laut berasal dari anggota keluarga sedangkan bibitnya diperoleh dari luar daerah, hal ini disebabkan sampai saat ini belum ada bibit rumput laut di sekitarnya. Usaha budidaya rumput laut ini merupakan mata pencaharian alternatif dan baru dilakukan sejak setahun terakhir sehingga belum kelihatan memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Dan penjemurannya dengan menggunakan waring yang diletakkan diatas tanah dimana teknik tersebut sangat tidak disarankan karena akan menyebabkan rumput laut terkontaminasi oleh pasir, kerikil, kerang-kerang kecil dan kotoran lainnya. Dan penjualan rumput laut masih dalam bentuk setengah kering kepenampung.
- Pengawasan dilakukan terhadap pelaku usaha perikanan rumput laut milik bapak NURDIN Ketua Kelompok MADECENG yang mana pada saat pemantauan telah dilakukan penanaman rumput laut dengan metode longline sebanyak 500 bentangan, seperti yang disampaikan oleh salah satu pelaku usaha. Untuk tenaga kerja mengikat bibit berasa dari ibu-ibu rumah tangga yang disewa per bentangan dengan upah 5.000 rupiah. Usaha

budidaya rumput laut di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur sejak 2 tahun.



**d. Perdin Pengawasan Pembudidayaan Ikan Laut di Pulau Kapoposang dan Gondong Bali Kabupaten Pangkep**

- Waktu Pelaksanaan : 31 Juli - 2 Agustus 2024
- Hasil yang dicapai :
- Pulau Kapoposang dan P.Gondong Bali yang terletak di wilayah Pulau Kapoposang team melakukan koordinasi terkait admininstrasi baik dengan pelaku usaha budidaya laut dan juga diterima oleh kepada Desa Mattiro Ujung untuk penyelesaian kelengkapan admininstrasi.
- Kegiatan pengawasan budidaya laut sebagaimana disampaikan oleh ketua Kelompok Bpk Safar yang juga sebagai ketua Pokmaswas bahwa awalnya jumlah kelompok pembudidaya laut cukup banyak sekitar 15 kelompok melakukan kegiatan budidaya laut rumput laut dan ikan dengan rata-rata produksi berjumlah 200 - 500 kg dengan 3-4 kali panen, dengan penamanan rumput laut dengan 10 - 25 bentangan dengan jarak masing-nasing 20 meter setiap bentangan yang di letakkan sekitar 5-7 mil dari bibir pantai.
- Namun 1 tahun terakhir ini pelaku usaha pembudidaya di laut khususnya budidaya rumput laut tidak lagi melakuan aktifitas budidaya dikarenakan pertumbuhan rumput laut tidak tumbuh dengan baik dikarenakan banyak anak-anak penyu yang memakan rumput laut sehingga perkembangan untuk tumbuh tidak maksimal malah kadang-kadang rumput lautnya mati, sehingga pelaku usaha tidak lagi intens melakukan kegiatan budidaya di laut khususnya budidaya rumput laut dan beralih ke usaha penangkapan di sekitar wilayah pulau kapoposang.
- Perlu terus berkoordinasi pelaku usaha dan pemerintah khususnya CDK Pangkep dalam melakukan pembinaan dan mencari solusi yang menghambat pertumbuhan budidaya laut diperairan Pulau Kapoposang dan Gondong Bali agar pertumbuhan rumput laut bisa berkembang dengan baik.



**e. Perdin Pengawasan Pembudidayaan Ikan Laut di Kabupaten Jeneponto**

- Waktu Pelaksanaan : 09-10 Desember 2024
- Hasil yang dicapai :
- Pelaksanaan Pengawasan Usaha Perikanan budidaya laut di Kab. Jeneponto di awali dengan kunjungan ke Dinas Perikanan Kabupaten Jeneponto dan Langsung bertemu ibu Suarwini,S.Pi sebagai Koordinator Penyuluh Kabupaten menerangkan bahwa untuk usaha budidaya laut di wilayahnya ini, masih dalam skala kecil dan usaha perikanan tersebut merupakan Mata Pencaharian Alternatif bagi nelayan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa budidaya rumput laut masuk dalam standar usaha pembesaran tumbuhan air laut (KBLI 03217) yang mana usaha tersebut masih skala mikro dan kecil yang tidak membutuhkan persyaratan umum.
- Pada kesempatan ini, tim melakukan kunjungan ke kelompok budidaya rumput laut yang berada di wilayah Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu. Pengawasan usaha perikanan budidaya laut dilakukan terhadap pelaku usaha budidaya rumput laut milik bapak Sampara B ketua kelompok BINA USAHA dimana tenaga kerja yang digunakan dalam usaha rumput laut berasal dari anggota keluarga sedangkan bibitnya diperoleh dari luar daerah, (Kab.Bantaeng) hal ini disebabkan sampai saat ini belum ada Kebun bibit rumput laut di sekitarnya. Usaha ini merupakan mata pencaharian alternatif yang berdiri sejak tahun 2010,
- Pada saat Pemantauan belum ada aktivitas Budidaya Rumput Laut dikarenakan musim hujan dan bibit belum siap, Lanjut dijelaskan Bapak Sampara B selaku ketua kelompok Bina Usaha Bahwa usaha Budidaya Rumpu Laut menggunakan metode Longline menurutnya salah satu keuntungan budidaya rumput laut dengan metode longline adalah menghasilkan panen yang baik. Metode longline merupakan cara membudidaya rumput laut dekat permukaan perairan dengan menggunakan tali yang dibentangkan. Dengan jumlah bentangan 500-1000 bentangan, Untuk tenaga kerja mengikat bibit berasal dari ibu-ibu rumah tangga yang disewa per bentangan dengan upah 3500 - 5000 rupiah. Penjemurannya dengan menggunakan waring yang diletakkan diatas tanah dimana teknik tersebut tidak disarankan karena akan menyebabkan rumput

laut terkontaminasi oleh pasir, kerikil, kerang-kerang kecil dan kotoran lainnya. Dan penjualan rumput laut masih dalam bentuk setengah kering ke penampung.

- Setelah berbincang-bincang maka kami memberikan sosialisasi terkait pemenuhan kepatuhan pelaku usaha tentang persyaratan Permen KP No.10 Tahun 2021 tentang Standard Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko bidang Perikanan
- Berdasarkan hasil Pengawasan dan diskusi dengan Penyuluhan Perikanan dan Kelompok Bina Usaha dapat disimpulkan bahwa usaha perikanan yang dilakukan tersebut belum memenuhi Standard Kegiatan Usaha karena belum memiliki Nomor Ijin Berusaha sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga memerlukan perhatian dari instansi terkait .
- Pengembangan budidaya laut khususnya budidaya rumput laut di Kabupaten Jeneponto masih membutuhkan bimbingan teknis baik dari Tim ahli, penyuluhan maupun dari Dinas terkait sehingga dapat menghasilkan produksi yang lebih baik dari produksi sebelumnya.
- Dalam rangka Pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Jeneponto, diharapkan adanya kerjasama yang baik antara sesama dalam satu kelompok dan penyuluhan yang ada di Kabupaten sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik.



#### f. Perdin Pengawasan Pembudidayaan Ikan Laut di Kabupaten Bantaeng

- Waktu Pelaksanaan : 09-10 Desember 2024
- Hasil yang dicapai :
- Kegiatan ini diawali dengan melakukan koordinasi dengan Dinas setempat untuk mendapatkan informasi/ masukkan sekaligus team diterima Pejabat Fungsional Analisis Aqua Kultur Ibu Yenny M. Mandala, S.Sos, MM , Penyuluhan Perikanan Ibu Jhum dan Ibu Aryani sebagai pendamping kelompok pembudidaya di Kabupaten Bantaeng.
- Informasi yang di peroleh dari Ibu Yenny selaku Pejabat Fungsional Analisis Aqua Kultur yang menyampaikan bahwa untuk menunjang dan peningkatan produksi pelaku usaha budidaya rumput laut Dinas setempat memberikan bantuan sapras DAK Tahun 2024 berupa paket pelampung, tali, bibit dll sebanyak 6 (enam) kelompok yang berada di Kecamatan Pajujukan Kabupaten Bantaeng yakni:

- ✓ Kelompok Harapan baru
- ✓ Kelompok Maju Bersama
- ✓ Kelompok Padaidi Padaelo
- ✓ Kelompok Sumber laut
- ✓ Kelompok Pantai Mentari
- ✓ Kelompok Marina Indah
- Sebelum team ke lapangan kunjungi kelokasi yang didampangi oleh penyuluh perikanan dan pendamping kelompok penerima bantuan , beberapa hal disampaikan yang bahwa kegiatan usaha budidaya di laut yang ada di Kab. Bantaeng yang terdata sebanyak 97 kelompok pembudidaya rumput laut yang masih aktif yakni budidaya kolam, bioflok maupun usaha budidaya di laut berupa kegiatan pembibitan rumput laut. Khusus untuk pembudidaya rumput laut tersebar di beberapa wilayah antara lain :
  - ✓ Kecamatan/Kel Panoang Desa Baruga ,Kororng batu Desa Baruga
  - ✓ Pasir Putih Lama Desa Baruga ,Dusun Mawang Desa Papan Loe
  - ✓ Balla Tinggi Desa Papan Loe, Desa Borong Loe,Ujung Katinting,Pajujukang
  - ✓ Desa Nipa-Nipa,Tanetea Pico, Desa Biangkeke, Gallea, Lumpangang, Rappoa
  - ✓ Lasepang, Kasoreang, Kamupung Gusung, Pabbinaeng, Kampung Mattoaging
  - ✓ Lasepang dan Tino Toa
- Adapun sasaran pengawasan usaha perikanan budidaya laut yang akan kami kunjungi yakni kelompok POKDAKAN Harapon Baru yang berlokasi di Kecamatan Pajujukang Dusun Kampilayya, desa Pajujuakang Kabupaten Bantaeng di ketuai Bapak Sangkala yang beranggotakan 11 orang. Informasi yang disampaikan bahwa kelompok ini aktifitas keseharianya melakukan budidaya rumput laut dan penangkapan ikan di perairan Bantaeng. Dengan melakukan pembibitan serta penanaman budidaya rumput laut di perairan Bantaeng dengan jumlah bentang sebanyak 200 bentangan dengan jarak benangan 25-30 m. Adapun masa taman pertumbuhan selama 45 hari. Adapun kendala terkadang pertumbuhan rumput laut tidak tumbuh sempurna salah satu faktor cuaca dan arus. ombak sehingga rumput laut banyak yang patah dan tenggelam. Hasil produksi rata-rata 300-450 kg sekali panen, dengan harga penjualan Rumput Laut basah Rp 5.000,- dan kering Rp.12.000,- dengan kadar air kisaran 35 % , untuk pemasaran biasa pengumpul membawa ke Makassar ke eksportir rumput laut.
- Kelompok ini telah mendapatkan pembinaan dari Dinas setempat terkait melakukan cara budidaya yang baik dengan mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berupa

*Nomor Induk Berusaha (NIB) nomor : 300424016931 dengan KBLI 03219, (Budidaya Biota Air laut) lainnya yang dikeluarkan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai persyaratan pemenuhan pesyaratan perizinan berusaha berbasis resiko bagi setiap pelaku usaha pembudiaya yang melakukan budidaya di bidang perikanan.*

- Berdasarkan hasil pengawasan dilapangan disimpulkan bahwa Kelompok Pokdakan Harapan Baru telah memenuhi kepatuhan usaha budidaya perikanan di Laut dengan dibuktikan surat perijinan NIB sebagai salah satu syarat untuk melakukan usaha budidaya yang baik dan benar.
- Kami juga memberikan sosialisasi terkait pemenuhan kepatuhan pelaku usaha tentang persyaratan Permen KP No. 10 Tahun 2021 Permen KP No. 10 Tahun 2021 tentang Standard Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko bidang Perikanan.



**g. Perdin Pengawasan Pembudidayaan Ikan Laut di Kabupaten Sinjai**

- Waktu Pelaksanaan : 02-04 Desember 2024
- Hasil yang dicapai :
- Pelaksanaan Pengawasan Usaha Perikanan budidaya laut di kab. Sinjai diawali dengan kunjungan ke Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai yang bertujuan untuk melakukan koordinasi tentang pelaksanaan kegiatan pengawasan Usaha Budidaya Ikan atau Biota Laut lainnya.
- Dari hasil diskusi diperoleh bahwa di kabupaten Sinjai untuk Budidaya rumput laut, terdapat dua jenis usaha yaitu budidaya gracilaria yang dibudidayakan di tambak dan Euchema cottoni yang di budidayakan di laut. Pembudidaya rumput laut jenis E. Cottoni ada beberapa di kecamatan tongke-tongke di Sinjai Timur dan terdapat 4 kelompok di pulau sembilan, antara lain:

No	NAMA KELOMPOK	Kecamatan	Desa	Jenis Rumput Laut
1	Batu Balandae	Pulau Sembilan	Padaelo	Spinosum
2	Budi Utama	Pulau Sembilan	Pulau Harapan	Spinosum
3	Kambuno IB	Pulau Sembilan	Pulau Harapan	Spinosum

**Lanjutan.....**

No	NAMA KELOMPOK	Kecamatan	Desa	Jenis Rumput Laut
4	Tunas Muda	Pulau Sembilan	Padaelo	Spinosum
5	Sipatokkong	Sinjai Timur	Tongke-tongke	Cottoni
6	Bahari	Tellulimpue	Tellulimpue	Glacilaria
7	Sinar alam	Sinjai Utara	Bulu Tellue	Glacilaria

- Petani rumput laut di desa sembilan melakukan usaha budidaya rumput laut dari jenis spinosum. 4 kelompok di kecamatan pulau sembilan ini sudah lama melakukan pembudidayaan rumput laut rata2 sudah berjalan 2-3 tahun. Tapi belum melakukan pengembangan usaha meskipun sudah ada dari luar kabupaten seperti akademisi dan usaha swasta yang melirik usaha mereka tapi mereka hanya terbatas pada pemasaran hasil produksi saja.
- Petani budidaya rumput laut sangat bersemangat dalam berkolaborasi dalam kelompok budidaya. Tapi sayangnya sampai sekarang mereka pun belum memenuhi persyaratan laian yang harus dipenuhi untuk melakukan usaha budidaya yaitu terkait legalitas usaha mereka. Seperti memiliki NIB dan CBIB dalam usaha rumput laut.
- Selanjutnya Petani rumput laut di desa tongke-tongke yang awalnya membudidayakan rumput laut jenis gracilaria, mulai beralih ke cotton karena harga cotton lebih tinggi dirapada jenis lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga, karena petani budidaya rumput laut masih tergolong usaha mikro.
- Pelaku usaha rumput laut yang dikunjungi di desa tongke-tonge Snjai Timur adalah pokdakkan sipatokkong. Kelompok ini pun sudah pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah sinjai berupa tali.
- Dari hasil pemantauan dokumen usaha yang dapat kami peroleh data bahwa pelaku usaha di desa tongke-tongke dan pulau sembilan belum memiliki NIB, terkait perlunya petani usaha rumput laut sudah di siosialisikan oleh penyuluhan dinas setempat, tapi menurut mereka belum merasa perlu untuk memiliki NIB.



**h. Perdin Pengawasan Pembudidayaan Ikan Laut di Kabupaten Bulukumba**

- Waktu Pelaksanaan : 09-10 Desember 2024
- Hasil yang dicapai :

➤ Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, memiliki potensi besar dalam kegiatan budidaya laut, antara lain:

# Jenis Budidaya

1. Budidaya Rumput Laut: Bulukumba memiliki potensi besar dalam budidaya rumput laut, terutama di daerah pantai dan pulau-pulau kecil.
2. Budidaya Ikan Kerapu: Ikan kerapu menjadi salah satu komoditas unggulan Bulukumba.
3. Budidaya Udang: Udang vaname dan udang windu menjadi primadona budidaya di Bulukumba.
4. Budidaya Kerang: Kerang hijau dan kerang merah menjadi komoditas yang potensial.
5. Budidaya Terumbu Karang: Bulukumba memiliki potensi besar dalam budidaya terumbu karang.

# Lokasi Budidaya

1. Kecamatan Bulukumba: Daerah pantai dan pulau-pulau kecil.
2. Kecamatan Bontotiro: Daerah pantai dan perairan dangkal.
3. Kecamatan Ujung Bulu: Daerah pantai dan perairan dangkal.
4. Kecamatan Gantarang: Daerah pantai dan perairan dangkal.

# Fasilitas dan Infrastruktur

1. Pelabuhan Perikanan: Pelabuhan Perikanan Bulukumba.
2. Pusat Budidaya Laut: Pusat Budidaya Laut Bulukumba.
3. Laboratorium Budidaya Laut: Laboratorium Budidaya Laut Universitas Hasanuddin.
4. Jaringan Irigasi: Jaringan irigasi laut untuk mendukung budidaya.

# Perizinan dan Regulasi

1. Izin Budidaya Laut: Dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bulukumba.
2. Peraturan Daerah: Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Budidaya Laut.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Budidaya Laut.

# Kebutuhan dan Peluang

1. Pasar domestik: Pasar domestik yang besar untuk produk budidaya laut.

2. Ekspor: Peluang ekspor ke negara-negara lain.
  3. Pengembangan industri: Pengembangan industri pengolahan hasil budidaya laut.
  4. Pengembangan pariwisata: Pengembangan pariwisata bahari.
- Dari 7 Kecamatan yang terdapat di Bulukumba, hanya 4 Kecamatan yang terdapat budidaya rumput laut. Berikut adalah data produksi rumput laut menurut kecamatan di Kabupaten Bulukumba.

**Jumlah produksi Rumput Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba (Ton)**

NO	KECAMATAN	2021	2022	2023
1	Gantarang	59.828,10	55.415,50	53.120,33
2	Ujung Bulu	50.129,30	46.490,30	52.137,19
3	Ujung Loe	54.534,50	50.594,50	52.130,75
4	Bonto Bahari	41.595,70	36.862,00	51.392,28
	Total	<b>206.087,60</b>	<b>189.362,30</b>	<b>208.780,55</b>

*Sumber : laporan Statistik Budidaya kab. Bulukumba*

- Proses kegiatan budidaya rumput laut yang dilakukan oleh petambak adalah Pengeringan tambak, penurunan bibit, Pemupukan, Panen dan Pengeringan. Dalam melakukan alur proses, petambak sudah menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk.
- Pada umumnya, petani rumput laut menanam bibit rumput laut dengan panjang bentangan 20m. Jarak bentangan maksimal 20m, selama massa tanam bibit harus selalu dipantau apakah pelampung botol perlu ditambah atau jika talinya bermasalah/putus, dimana prosesnya cukup lama dan tidak efisien serta biaya operasional bertambah karena membutuhkan tenaga kerja untuk mengikat rumput. Dengan cara budidaya rumput metode long line/karamba jaring rata-rata masa pertumbuhan kurang lebih 40-45 hari sudah bisa dipanen yang rata rata setahun bisa dipanen sebanyak 3-4 kali tergantung kondisi iklim selama pembibitan dengan rata rata produksi rumput laut jenis *gracilaria* 2 ton (3x panen) sedangkan *cottoni* 250gr, disebabkan pertumbuhan yang kurang bagus sehingga hasil produksi berkurang dikarenakan kondisi iklim.
- Pemasaran hasil budidaya rumput laut, kepada pengumpul tetap (juragan). Harga jual rumput laut (dalam keadaan kering) berkisar antara Rp. 6.500 – Rp. 7.000/kg, tergantung kualitas dari rumput laut itu sendiri. Adapun faktor yang mempengaruhi kualitas rumput laut antara lain dipengaruhi oleh musim, misalnya kadar air dipengaruhi oleh sinar matahari selama pproses penjemuran, dan rasa rumput laut yang dipengaruhi oleh oleh curah hujan.

- Kendala yang dihadapi dalam melakukan budidaya rumput laut adalah dokumen perizinan yang belum terpenuhi dan kurangnya lokasi penjemuran rumput laut, dan kalaupun ada tempatnya jauh dari lokasi pembudidayaan. Selain itu, alat penjemuran yang terbuat dari jaring hitam juga dinilai kurang memadai.
- Kendala lain yang dihadapi adalah konflik pemanfaatan lahan. Kepemilikan lahan yang selama ini belum dapat dilegalkan dengan sertifikat kepemilikan, kerap menimbulkan masalah dalam pemanfaatan lahan tersebut. Akan tetapi konflik yang ada tersebut, sejauh ini dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan.
- Harapan dari petani rumput laut kepada pemerintah adalah adanya pendampingan dalam hal ketersediaan dokumen administrasi terkait perizinan. Selain itu, bantuan yang sangat diharapkan adalah bantuan pemberian pupuk terhadap petani rumput laut.



i. **Perdin Pengawasan Pembudidayaan Ikan Laut di Kabupaten Pinrang**

- Waktu Pelaksanaan : 05-06 Desember 2024
- Hasil yang dicapai :
- Budidaya laut di Pinrang, Sulawesi Selatan, merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang potensial dan berkembang di daerah tersebut. Pinrang memiliki garis pantai yang panjang dan kondisi laut yang mendukung untuk budidaya laut.
- Berikut beberapa komoditas budidaya laut yang umum di Pinrang :
  - ✓ Budidaya Udang: Pinrang terkenal dengan produksi udang yang berkualitas, baik udang vaname maupun udang windu.
  - ✓ Budidaya Ikan: Ikan seperti kerapu, kakap, dan grouper dibudidayakan di kawasan laut Pinrang
  - ✓ Budidaya Rumput Laut: Rumput laut jenis *Eucheuma cottonii* dan *Gracilaria verrucosa* dibudidayakan untuk keperluan ekspor.
  - ✓ Budidaya Kerang: Kerang hijau dan kerang merah dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan ekspor.
  - ✓ Budidaya Teripang: Teripang merupakan salah satu komoditas budidaya laut yang berpotensi besar di Pinrang.

- Pelaksanaan Pengawasan Usaha Perikanan budidaya laut di kabupaten Pinrang di awali dengan kunjungan ke Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang dan di terima oleh Bapak Makkawaru, S.Pi selaku Kepala Bidang Budidaya. Pada kesempatan ini beliau menyampaikan bahwa usaha budidaya laut paling besar adalah usaha rumput laut jenis *Euchema Cottonii*.
- Menurut Data Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sampai pada bulan November 2024, produksi rumput laut di Kabupaten Pinrang sebesar 35.874 ton (*Euchema Cottonii*) dan 296,7 ton (*Gracillaria*).
- Daerah budidaya rumput laut terutama terletak di wilayah pesisir Kecamatan Suppa. Kecamatan Suppa merupakan salah satu daerah yang menjadi fokus utama dalam pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Pinrang. Berkat garis pantai yang panjang dan kondisi lingkungan yang mendukung, Suppa menjadi lokasi ideal untuk budidaya rumput laut.
- Pada kegiatan ini, Tim melakukan kunjungan ke kelompok Padaidi milik Bapak Muh Wilo di kelurahan Watang Suppa Kecamatan Suppa. Pada tahun 2024 kelompok ini telah menerima bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sulawesi Selatan berupa bibit dan tali untuk budidaya rumput laut.
- Menurut PP No 5 Tahun 2021 Kelompok Padaidi termasuk pelaku usaha Resiko Menengah Rendah (skala usaha mikro dan kecil) dimana pelaku usaha tersebut wajib memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha).
- Pengawasan terhadap pelaku usaha ini dilakukan dengan memeriksa keberadaan laporan kegiatan usaha (LKU) dan keberadaan pernyataan mandiri (self declare).



### **3. Sub Kegiatan : Penumbuhan dan Pengembangan Pokmaswas**

#### **a. Perdin Evaluasi dan Penilaian Pokmaswas di Kota Parepare**

- Waktu Pelaksanaan : 15-16 Februari 2024
- Hasil yang dicapai :
- Kota Parepare terletak di pesisir barat Pulau Sulawesi dengan teluk di sebelah barat dan perbukitan di sebelah timur. Kawasan pesisir Kota Parepare merupakan salah satu

wilayah kota yang terus berkembang dengan jarak 100 m dari garis tertinggi ke arah darat dan daerah pantai dangkal dengan kedalaman sampai dengan 1,5 m waktu pasang

- Terdapat 2 (dua) Pokmaswas aktif yang berada di Kota Parepare yaitu Pokmaswas Bagan Lolo dan Madecenge dengan jumlah anggota sebanyak 24 (dua puluh empat ) orang.
- Pada kegiatan evaluasi penilaian Pokmaswas ini difokuskan pada Pokmaswas Madecenge Desa Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 523/157/II/DKP tanggal 21 Februari 2023, Pokmaswas ini terbentuk atas inisiasi dari tokoh masyarakat setempat sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan di Kota Pare Pare
- Dalam membantu membantu kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Pokmaswas Madecenge banyak mendapatkan pengarahan dan pendampingan dari Dinas Kab/Kota, Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng dan tenaga penyuluhan perikanan. Selain itu, mereka juga secara konsisten mendapatkan pembinaan pokmaswas dan sosialisasi sistem pengawasan berbasis masyarakat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Pembinaan ini mencakup pembinaan teknis dan pembinaan kapasitas kelembagaan.
- Selain pendampingan dan pembinaan yang dilakukan, Pokmaswas Madecenge telah menerima Kartu Anggota Pokmaswas Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng dan Pokmaswas Madecenge tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Kepada Kelompok Masyarakat Yang Berprestasi sesuai Per Dijen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor 4/Per-DJPSDKP/2021.



**b. Perdin Evaluasi dan Penilaian Pokmaswas di Kabupaten Takalar**

- Waktu Pelaksanaan : 22-24 April 2024
- Hasil yang dicapai :
- Kepulauan Tanakeke terletak di Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di kabupaten Takalar, kepulauan ini terdiri atas 6 (enam) desa meliputi Balangdatu, Maccini baji, Tompotanah, Rewatayya, Mattirobaji dan Minasa Baji.

- Kepulauan Tanakeke memiliki ekosistem mangrove seluas 1,437 Ha yang keberlangsungannya saat ini perlu diperhatikan karena mangrove di kepulauan ini memiliki tantangan besar yang sedang dihadapi yakni adanya aktivitas penebangan mangrove oleh sekelompok orang untuk dijadikan sebagai bahan baku pembuatan arang
- Pada kegiatan evaluasi penilaian Pokmaswas ini difokuskan pada Pokmaswas Jagad Samudera Desa Minasa Baji Kecamatan Kepulauan Tanakeke yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 523/157/II/DKP tanggal 21 Februari 2023.
- Pokmaswas Jagad Samudera merupakan pokmaswas yang aktif bersinergi dengan pemerintah setempat dalam membantu penanaman mangrove dan pengawasan terhadap aktivitas yang merusak lingkungan di wilayah perairan Tanakeke termasuk penebangan mangrove dan *destructive fishing*.
- Dalam membantu membantu kegiatan pengawasan, pada tahun 2023 pokmaswas Jagad Samudera telah melakukan kegiatan penanaman mangrove bersama dengan Cabang Dinas Kelautan Mamminasata dan saat ini sedang melakukan rehabilitasi kawasan tambak terlantar yang sebelumnya merupakan wilayah ekologis mangrove bersama dengan Yayasan Hutan Biru.
- Pokmaswas ini telah mendapatkan pendampingan dari Dinas Kab/Kota, Cabang Dinas Kelautan Mamminasata, Yayasan Hutan Biru dan tenaga penyuluhan perikanan. Selain itu, mereka juga secara konsisten mendapatkan pembinaan pokmaswas dan sosialisasi sistem pengawasan berbasis masyarakat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Pembinaan ini mencakup pembinaan teknis dan pembinaan kapasitas kelembagaan. Mereka juga telah mendapatkan pelatihan berupa peningkatan kapasitas dan patroli bersama di kawasan mangrove secara berkala yang akan berpengaruh terhadap masyarakat sehingga mereka tahu manfaat dan fungsi hutan mangrove bagi kehidupan, mengenal berbagai jenis mangrove serta bentuk aktivitas yang dapat merusak hutan mangrove. Pokmaswas ini juga dinilai **sangat aktif** melaporkan kegiatan setiap bulan melalui Forum Pokmaswas Sulawesi Selatan
- Pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada Cabang Dinas Kelautan Mamminasata dan Pokmaswas Jagad Samudera tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Kepada Kelompok Masyarakat Yang Berprestasi sesuai Per Dijen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor 4/Per-DJPSDKP/2021.



c. Perdin Evaluasi dan Penilaian Pokmaswas di Kabupaten Pinrang

- Waktu Pelaksanaan : 25-26 April 2024
- Hasil yang dicapai :
- Kabupaten Pinrang memiliki potensi perikanan yang cukup besar dengan luas wilayah 1.961,77 km<sup>2</sup> dan panjang garis pantai 101 km. Potensi perikanan Kabupaten Pinrang terdiri dari perikanan laut dan perikanan budaya .
- Terdapat 8 (delapan) Pokmaswas aktif yang berada di Kabupaten Pinrang yaitu
  1. Pokmaswas Bina Bahari Desa Binanga Karaeng Kec. Lembang
  2. Pokmaswas Bina Bahari Desa Sabangparu Kec. Lembang
  3. Pokmaswas Sinar Bahari Kel Langnga Kec Mattirosompe
  4. Pokmaswas Siamasei Desa Ujung Labuang Kec Suppa
  5. Pokmaswas Mario Marennu Desa Waetuo Kec Lasinrang
  6. Pokmaswas Samaturue Kel Pallameang Kec Mattirosompe
  7. Pokmaswas Lotang Salo Desa Lotang Salo Kec Suppa
  8. Pokmaswas Bersatu Desa Labuang Kec Suppa
- Pada kegiatan evaluasi penilaian Pokmaswas ini difokuskan pada Pokmaswas Bina Bahari Desa Sabbangparu Kecamatan Lembang yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 523/215/SK/PGS/Pokmaswas/DKP/ tanggal 08 Mei 2019. Pokmaswas ini terbentuk atas inisiasi dari tokoh masyarakat setempat sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Pinrang
- Dalam membantu membantu kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Pokmaswas Bina Bahari telah mendapatkan bantuan sarana prasarana pengawasan berupa Perahu Pokmaswas, GPS, HT, teropong, Senter, kamera digital, dan rompi
- Pokmaswas ini telah mendapatkan pendampingan dari Dinas Kab/Kota, Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng dan tenaga penyuluhan perikanan. Selain itu, mereka juga secara konsisten mendapatkan pembinaan pokmaswas dan sosialisasi sistem pengawasan berbasis masyarakat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Pembinaan ini mencakup pembinaan teknis dan pembinaan kapasitas kelembagaan.

Pokmaswas ini juga dinilai cukup aktif melaporkan kegiatannya melalui Forum Pokmaswas Sulawesi Selatan

- Pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng dan Pokmaswas Bina Bahari tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Kepada Kelompok Masyarakat Yang Berprestasi sesuai Per Dijen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor 4/Per-DJPSDKP/2021.



**d. Perdin Evaluasi dan Penilaian Pokmaswas di Kabupaten Bantaeng**

- Waktu Pelaksanaan : 16-17 Mei 2024
- Hasil yang dicapai :
- Diawali kunjungan dan berkoordinasi pada Dinas Perikanan dan Kelautan yang beralamat jalan Raya lanto No.76 Kabupaten Bantaeng, untuk bersama-sama melakukan kegiatan Evaluasi Penilaian Pokmaswas Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
- Sebagai informasi bahwa sampai saat ini jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang aktif sesuai data base Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa Pokmaswas yang berada di Kab. Bantaeng berjumlah 12 Kelompok/Pokmaswas dengan jumlah anggota sebanyak 131 orang, yang aktif melakukan pengawasan pemantauan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Kabupaten Bantaeng.
- Pada kesempatan ini Evaluasi Penilaian Pokmaswas Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang kami kunjungi yakni Pokmaswas Pantai Lamalaka yang baru terbentuk dan telah di ikut sertakan tahun lalu 2023 dalam kegiatan studi tiru di Yogyakarta yang beralamat Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang diketua Bapak Aidil Adha yang beranggotakan 20 orang. Pokmaswas ini terbentuk pada tanggal 11 Mei 2023, bersama dengan para nelayan atas inisiasi kesadaran serta kepedulian masyarakatnya atas lingkungan untuk menjaga kelestarian biota perairan, mengurangi tingkat kerusakan perairan sebagai tempat mencari nafkah dan mengawasi adanya praktek-praktek ilegal fishing and destructive fishing pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayahnya.

- Ketua Pokmaswas yang sekaligus juga sebagai Ketua HNSI kab. Bantaeng Bpk Aidil menyampaikan belum optimal melaksanakan kegiatan pengawasan dikarenakan sebagian besar nelayan belum memiliki sarana prasarana seperti kapal nelayan untuk kegiatan pengawasan pemantauan/mengawasi sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Kab. Bantaeng, Kelompok ini sementara hanya melakukan kegiatan berupa mengawasi aktifitas masyarakat yang mengambil pasir laut untuk dipakai membangun rumah tinggal sehingga kalau terus menerus diambil kedepan nantinya kondisi perairan laut di sekitar perairan Kab. Bantaeng bisa berdampak abrasi. Dan kelompok ini juga melakukan kegiatan bersih-bersih pantai untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat disekitarnya agar menjaga kondisi laut tidak membuang sampah atau sisa plastik yang dapat merusak kondisi laut.
- Pokmaswas Pantai Lamalaka masih perlu melengkapi administrasi buku laporan kejadian / kegiatan. Buku agenda surat, buku tamu, dan jenis kegiatan pengawasan yang sudah dilakukan, diagendakan dan dilaporkan secara berkala ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.



**e. Perdin Evaluasi dan Penilaian Pokmaswas di Pulau Barrang Caddi Kota Makassar**

- Waktu Pelaksanaan : 07-09 November 2024
- Hasil yang dicapai :

- Pulau Barrang Caddi secara administrasi masuk dalam kelurahan Barrang Caddi Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar. Secara umum, nelayan di Pulau Barrang Caddi merupakan nelayan pemancing dengan komoditi musiman seperti tenggiri, sotong, atau gurita. Sementara secara khusus untuk nelayan kakak-kerapu menggunakan rawai dasar dan atau pancing dasar. Saat ini di Pulau Barrang Caddi juga telah lahir inisiatif program rehabilitasi terumbu karang, inisiatif pemuda pada pelestarian penyu, inisiatif pengembangan Co-Management perikanan skala kecil. Dilain sisi kondisi perairan di Pulau Barrang Caddi sedang mengalami ancaman akan destructive fishing dan kondisi Pokmaswas yang kurang aktif. Dengan kondisi tersebut, upaya untuk menekan laju kerusakan atau aktivitas destructive fishing diperlukan penguatan dalam regulasi, pengawasan dan monitoring yang digalakkan oleh berbagai pihak terutama para

Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) disetiap wilayah. Peran Pokmaswas sangat penting dalam pengawasan, dikarenakan Pokmaswas ini bertempat tinggal diwilayah tersebut sehingga durasi pengawasan yang dimiliki jauh lebih tinggi.

- Tujuan dari Peningkatan Kapasitas untuk anggota Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) adalah untuk:
  - ✓ Meningkatkan Pemahaman: Memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran, tugas, dan tanggung jawab Pokmaswas dalam menjaga lingkungan dan ekosistem perairan.
  - ✓ Mengembangkan Keterampilan: Melatih anggota dalam keterampilan pengawasan, pengumpulan data, dan pelaporan pelanggaran yang ditemukan di lapangan.
  - ✓ Membangun Kapasitas: Meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggota Pokmaswas agar mampu melaksanakan tugas pengawasan secara efektif dan efisien.
  - ✓ Mendorong Kepemimpinan: Mempersiapkan anggota untuk menjadi pelatih atau fasilitator bagi anggota Pokmaswas lainnya, sehingga ilmu dan keterampilan yang diperoleh dapat disebarluaskan lebih luas.
  - ✓ Meningkatkan Kerjasama: Menguatkan koordinasi dan kerjasama antara Pokmaswas dengan pemerintah, penegak hukum, dan stakeholder lainnya untuk memastikan efektivitas program pengawasan.
  - ✓ Mengatasi Tantangan: Mengidentifikasi dan mencari solusi atas tantangan dan kendala yang dihadapi oleh Pokmaswas di lapangan.
- Dengan mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pokmaswas, diharapkan anggota Pokmaswas dapat lebih percaya diri dan berdaya dalam melaksanakan tugas pengawasan, serta mampu mengedukasi dan membimbing komunitas lain dalam menjaga lingkungan perairan yang sehat dan lestari.
- Peningkatan kapasitas anggota Pokmaswas akan dilakukan di Pulau Barrang Caddi bekerja sama dengan YKL Indonesia dengan membahas mengenai peran pokmaswas terhadap keberlanjutan sumberdaya perairan dan perikanan serta pelatihan ini berkaitan dengan mekanisme pengawasan dan pelaporan Pokmaswas dan resource person dari Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut mengenai pengertian biota yang dilindungi dan bagaimana cara penanganannya. Adapun point pembahasan dalam kegiatan peningkatan kapasitas anggota Pokmaswas yaitu:
  - ✓ Bagaimana Peran dan Fungsi POKMASWAS
  - ✓ Pengenalan sarana dan prasarana POKMASWAS

- ✓ Wilayah Monitoring
- ✓ SOP Monitoring dan Patroli serta pelaporan
- ✓ Pengidentifikasi jenis pelanggaran
- ✓ Metode dan Cara Pengumpulan Informasi
- Kedepannya, Pokmaswas Pulau Barrang Caddi berharap mendapatkan pendampingan dan sosialisasi terkait Pengawasan khususnya terkait Illegal and Destructive Fishing. Selain itu, mereka juga berharap adanya pelibatan anggota Pokmaswas pada kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas SDM Masyarakat Pengawas. Terkait hal tersebut, Bidang Pengawasan akan mengupayakan adanya sosialisasi dan pendampingan peningkatan Kapasitas Pokmaswas khususnya di Daerah Kepulauan dengan bekerja sama dengan pemerintah desa, Dinas Perikanan Kab/Kota dan Cabang Dinas Terkait.



**f. Perdin Evaluasi dan Penilaian Pokmaswas di Pulau Kaposang Kabupaten Pangkep**

- Waktu Pelaksanaan : 20-22 November 2024
- Hasil yang dicapai :
- Pulau Bontosua merupakan pulau kecil berpenghuni yang berada di gugusan Kepulauan Spermonde, perairan Selat Makassar dan secara administratif masuk pada wilayah Desa Mattiro Bone, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- Terdapat 1 (satu) Pokmaswas aktif yang berada di Pulau Bontosua yaitu Pokmaswas Komando, Pokmaswas ini terbentuk tahun 2015 dengan No.SK 523/215/SK/Pokmaswas/V/DKP tanggal 8 Mei 2019 yang beranggotakan 13 orang.
- Lokasi pengawasan yang dilakukan oleh Pokmaswas Komando berkedudukan di Desa Mattiro Bone, yang meliputi wilayah perairan di sekitar pulau Bontosua. Pulau Bontosua memiliki ekosistem terumbu karang di pulau tersebut dapat dikatakan sangat baik. Manfaat langsung dari keberadaan terumbu karang di Pulau Bontosua berdasarkan hasil pemantauan Pokmaswas adalah kegiatan penangkapan ikan dan kegiatan Pariwisata. Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap pancing terbagi menjadi dua yakni penangkapan ikan-ikan karang yang termasuk dalam golongan ikan-ikan target seperti ikan kakap, kerapu, baronang dan beberapa spesies ikan lainnya.

- Pokmaswas ini aktif melakukan pengawasan dengan menggunakan sarana dan prasarana berupa perahu Pokmaswas, kamera, Rompi dan GPS. Selain aktif melakukan pengawasan pokmaswas ini juga aktif melaporkan hasil pengawasannya ke instansi terkait melalui forum koordinasi pokmaswas Sulawesi Selatan
- Kepulauan Kapoposang merupakan bagian dari Kepulauan Spermonde dan secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan. SK Menteri Kehutanan No. 588/Kpts-VI/1996 tanggal 12 September 1996 menetapkan Kepulauan Kapoposang sebagai Taman Wisata Perairan dengan luasan sebesar 50. 000 hektar dan memiliki panjang batas 103 km. Posisi geografis kawasan ini berada di  $118^{\circ} 54' 00''$  BT -  $119^{\circ} 10' 00''$  BT dan  $04^{\circ} 37' 00''$  LS -  $04^{\circ} 52' 00''$  LS.
- Terdapat 2 (dua) Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) aktif yang berada di wilayah Perairan Kapoposang yaitu Pokmaswas Mattiro Ujung dengan jumlah anggota sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan Pokmaswas Cinta Bahari dengan jumlah anggota sebanyak 13 (tiga belas) orang
- Pada kegiatan evaluasi penilaian Pokmaswas di Pulau Kapoposang difokuskan pada Pokmaswas Pokmaswas Mattiro Ujung berlokasi di Desa Mattiro Ujung yang meliputi wilayah perairan Pulau Kapoposang dan Papandangan
- Pokmaswas ini sangat aktif dalam membantu melakukan pengawasan disekitar wilayah tersebut dengan swadaya sendiri menggunakan bantuan sarana dan prasarana pengawasan yang telah diterima dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
- Mereka menyadari bahwa wilayah mereka sangat kaya akan potensi alam sehingga perlu dijaga untuk keberlanjutannya, Selain potensi ekosistem, terdapat pula sejumlah potensi lain yaitu keanekaragaman jenis fauna yang saat ini ditetapkan sebagai spesies yang langka dan dilindungi. Dari sejumlah monitoring yang telah dilakukan, teridentifikasi bahwa ekosistem terumbu karang di Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya merupakan habitat bagi 2 jenis penyu yaitu Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricate*) dan Penyu Hijau (*Chelonia mydas*), dan pantai di Pulau Kapoposang, Pulau Papandangan Spesies lain yang menjadi target konservasi adalah Hiu Paus (*Rhincodon typus*)
- berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan di TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya, spesies hiu ini telah lama terlihat di kawasan konservasi ini. Biasanya

kemunculan Hiu Paus bersamaan dengan musim ikan Teri (*Anchovy*) yang merupakan makanan bagi hiu paus.

- Dalam membantu membantu kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Pulau Bontosua dan Kapoposang Pokmaswas tersebut banyak mendapatkan pengarahan dan pendampingan dari Dinas Kab/Kota, Cabang Dinas Kelautan Pangkep, NGO dan tenaga penyuluh perikanan.
- Selain pendampingan dan pembinaan yang dilakukan, pokmaswas tersebut telah menerima Kartu Anggota Pokmaswas Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada Cabang Dinas Kelautan Pangkep tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Kepada Kelompok Masyarakat Yang Berprestasi sesuai Per Dijen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor 4/Per-DJPSDKP/2021.



#### g. Perdin Evaluasi dan Penilaian Pokmaswas di Kabupaten Enrekang

- Waktu Pelaksanaan : 28-29 November 2024
- Hasil yang dicapai :
- Kabupaten Enrekang merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak memiliki wilayah pesisir dan laut. Karenanya, fokus pengawasan yang dilakukan oleh Pokmaswas adalah Pengawasan Perairan Umum Daratan yang meliputi Pengawasan di Sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya.
- Terdapat 4 DAS yang terletak di Kabupaten Enrekang, yaitu sebagai berikut

No	Sub DAS	Luas Cakupan DAS (Ha)	Panjang Sungai Utama (Km)	Lokasi
1	Mata Allo	35.211	± 65	Kec. Alla Anggeraja
2	Malua	39.366	± 97	Kec. Baraka Anggeraja
3	Saddang	39.127	± 85	Kec. Alla Anggeraja
4	Bila/Bulu' Cendrana	68.609	± 147	Maiwa
<b>Jumlah</b>		<b>182.293</b>	<b>± 394</b>	

Sumber : *Rencana Tata Ruang Pengembangan Komoditas Andalan(Berorientasi Agropolitas) Prov. Sulsel (Kab. Enrekang) 2024* dan *BPS Kab Enrekang 2023*

- Berdasarkan Database, terdapat 14 Pokmaswas Di Kabupaten Enrekang, dengan total jumlah anggota sebanyak 207 orang. Pada kesempatan ini Pokmaswas yang dikunjungi adalah Pokmaswas SAMATA di Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang dan Pokmaswas

Anggeraja di Desa Tompo Kecamatan Anggeraja, yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sulsel dengan No SK. 523/215/SK/PGS/POKMASWAS/DKP tanggal 8 Mei 2019

- Dari hasil sosialisasi dan diskusi dengan Pokmaswas Samata di Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang diperoleh Informasi sebagai berikut :
  - ✓ Struktur keanggotaan Pokmaswas Samata mengalami perubahan, dimana ketua Pokmaswas Samata, Bapak Supatman Polimin telah meninggal dunis, untuk itu kepengurusan sementara digantikan oleh Sekretaris Pokmaswas An. Bapak Sapar. Terkait perubahan struktur keanggotaan tersebut, dianjurkan untuk membuat berita acara perubahan anggota yang selanjutnya ditembuskan ke DKP Provinsi Sulsel untuk didaftarkan pada database perubahan anggota. Untuk proses administrasi perubahan struktur anggota tersebut akan didampingi oleh Penyuluhan Perikanan setempat.
  - ✓ Dugaan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya yang terdapat di Perairan Umum Daratan Kabupaten Enrekang adalah penggunaan setrum ikan. Menurut laporan dari Pokmaswas, kegiatan tersebut tidak menimbulkan konflik pemanfaatan karena masih dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat dan tidak menimbulkan gangguan bagi yang lain.
  - ✓ Terkait dugaan pelanggaran yang terjadi, anggota Pokmaswas melakukan teguran lisan, serta penyadartahanan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap dampak yang timbul akibat penangkapan ikan dengan cara yang merusak. Sejauh ini, tidak terdapat catatan pelanggaran yang dioses lebih lanjut, sebab dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui sosialisasi dan pembinaan.
  - ✓ Pokmaswas samata tercatat pernah mendapatkan bantuan perlengkapan Pokmaswas pada tahun 2018, berupa rompi, teropong, HT, dan kamera Pokmaswas. Bantuan perlengkapan pokmaswas tersebut masih tersimpan di kediaman Ketua sebelumnya (Almarhum) dan hingga saat ini tidak pernah dimanfaatkan lagi.
  - ✓ Terkait keaktifan, kedua Pokmaswas ini, telah aktif melakukan pemantauan dan pengawasan, akan tetapi terkait pelaporan, mereka kurang mengerti terkait tujuan pelaporan. Untuk itu, bidang memfasilitasi Pokmaswas ke dalam group pelapiran Forum Pokawas se Sulawesi Selatan.
- Kedepannya, Pokmaswas samata berharap mendapatkan pendampingan dan sosialisasi terkait Pengawasan khususnya di Perairan Umum Daratan. Selain itu, mereka juga

berharap adanya pelibatan anggota Pokmaswas pada kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas SDM Masyarakat Pengawas. Terkait hal tersebut, Bidang Pengawasan akan mengupayakan adanya sosialisasi dan pendampingan peningkatan Kapasitas Pokmaswas khususnya di Kabupaten Enrekang dengan bekerja sama dengan pemerintah desa, Dinas Perikanan Kab. Enrekang, CDK Ajatappareng.



## B. Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya

### 1. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan gengangan air lainnya

#### ■ Perdin Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap PUD di Kab. Wajo

- Waktu Pelaksanaan : 24-26 April 2024
- Hasil yang dicapai :
- Team didampingi oleh Ibu Arfah , S.Pi sebagai penyuluhan perikanan yang sehari-hari bertugas melakukan pembinaan bagi nelayan pada wilayah kerjanya. Sebagai bahan informasi disampaikan bahwa jumpa nelayan yang alat tangkap yang digunakan jaring insang tetap sebanyak 84 kelompok, Nelayan alat tangkap seser 13 kelompok dan nelayan yang menggunakan alat tangkap anco 14 kelompok.
- Obyek pengawasan perikanan tangkap PUD adalah pelaku usaha kelompok nelayan Bapak Daeng Paranreng ( KUB Samaturue) yang berlokasi di Kelurahan Samaturue menyampaikan bahwa aktifitas sehari-harinya sebagai nelayan yang beranggotakan sebanyak 3-5 orang , melakukan penangkapan ikan di perairan Danau Tempe.dengan menggunakan kapal motor tempel 1 GT, dengan menggunakan alat tangkap jaring insang tetap.
- Jenis ikan hasil tangkap seperti ikan niila, ikan tawes, ikan gabus , ikan betok, ikan patin, ikan beloso, ikan betutu, ikan sidat, ikan tokke , ikan spu-sapu dan ikan mas dengan rata-rata hasil tangkapan 200-300 kg dengan menggunakan kapal motor tempel 1 GT dengan menggunakan alat tangkap jaring insang tetap didaratkan di TPI 45% hanya sebagai persinggahan langsung di bawa ke pasar atau pengumpul ikan.

- Hasil pengawasan pelaku usaha pada KBLI 03121, standar usaha penngkapan pisces di perairan darat yakni pelaku usaha KUB Samaturue belum memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan surat izin usaha perikanan (SIUP) belum memenuhi kepatuhan perizinan berusaha berbasis resiko dan juga belum melakukan cara penanganan ikan yang higeinis.
- Kelompok usaha ini masih tergolong usaha skala mikro, yang berdasarkan pemenuhan kepatuhan khususnya standar persyartan umum usaha, persyaratan khusus, pemenuhan sarana serta strukur orgisasi dan SDM belum memadai sehingga masih perlu dukungan Dinas DKP kab.wajo terus melakukan pembinaan dan sosialisai sesuai standar penangkapan di wilayah perairan umum daratan.



■ **Perdin Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap PUD di Kab. Enrekang**

- Waktu Pelaksanaan : 11-13 November 2024
- Hasil yang dicapai :
- Dari data yang diperoleh (data terlampir) bahwa aktifitas perikanan tangkap di kabupaten enrekang sangat massif di beberapa kecamatan. Begitu pula dari data produksi pada tahun 2023 mencapai 24 kilo dan di tahun 2024 hampir sama yaitu rata-rata 2 kg per bulannya. Dari data tersebut tim pengawasan menyamplling lokasi berdasarkan jumlah nelayannya (data terlampir) yaitu 2 kecamatan, antara lain kecamatan enrekang yang memiliki 109 rumah tangga dan kecamatan angngeraja 41 rumah tangga.
- Dari hasil pengamatan dan hasil diskusi dengan pelaku usaha maka dapat kami simpulkan bahwa pelaku usaha penangkapan ikan pak abidin masih tergolong usaha mikro dan belum patuh karna belum memiliki NIB.
- Selanjutnya kami ke lokasi kedua yaitu di kecamatan Enrekang. Di kecamatan Enrekang ini kami menemui salah satu Kelompok Usaha bersama Matira Bampu. Kelompok usaha ini memiliki 9 orang anggota, salah satunya pak sappe. Pak sappe adalah penangkap ikan dengan menggunakan jaring dan beraktivitas di perairan sungai saddang.
- Kelompok ini pernah mendapatkan bantuan 1 (satu) unit prasarana penangkapan ikan yaitu berupa alat tangkap jaring, perahu dan mesin motor untuk perahu pada tahun

2022. Bantuan ini kemudian akan di gunakan secara bergilir bagi anggota kelompok yang membutuhkan prasarana tersebut, termasuk pak Sappe.

- Rata-rata hasil tangkapan pak sappe adalah 5-10 kg dengan menggunakan jaring, ikan yang diperoleh adalah ikan tawes dan ikan nila. Armada yang digunakan adalah peahu dengan kapasitas < 5 GT.
- Meskipun pak Sappe sudah masuk dalam Kelompok Usaha Bersama tapi beliau belum memiliki NIB sebagai legalitas dari usahanya sehingga masih tergolong tidak patuh pada persyaratan berusaha sesuai aturan yang berlaku.
- Alasan mereka belum memiliki NIB adalah karena mereka menganggap merupakan nelayan kecil yang belum perlu untuk memiliki NIB krna untuk mendapatkan bantuan hanya cukup tergabung ke dalam kelompok usaha.
- Selain itu adalah pemahaman mereka apabila sudah memiliki NIB, selanjutnya akan dibebani oleh pembayaran pajak atas usaha mereka yang masih tergolong usaha mikro. Karena minimnya informasi yang diperoleh oleh pelaku usaha kecil, maka timbul pemahaman yang salah terkait aturan yang berlaku.



## 2. Pengawasan Usaha Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan di wilayah Sungai, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya.

### ■ Perdin Pengawasan Usaha Bidang Perikanan Budidaya di Wilayah PUD Kab. Wajo

- Waktu Pelaksanaan : 24-26 April 2024

- Hasil yang dicapai :

- Informasi yang diperoleh dari penyuluhan perikanan sebelum ke lapangan adalah saat ini kegiatan usaha budidaya di sekitar perairan danau tempe belum aktif karena sebelumnya telah terjadi peluapan air danau yang mengakibatkan usaha budidaya ikan pada saat itu banyak yang rusak dan pelaku usaha masih melakukan pemberian.
- Sasaran kami berikutnya adalah jenis budidaya ikan di daratan yang masih berskala mikro. Hal ini bertujuan untuk memantau apakah pelaku usaha mikro khususnya budidaya sudah memiliki syarat standar berusaha dan cara budidaya yang baik.

- Tim pengawasan mengunjungi usaha budidaya ikan nila di tambak tradisional di desa Mannagae Kecamatan Tanasitolo. Pak H. Kamaruddin selaku pemilik usaha membudidayakan ikan di tambak air tawar tradisional. Diltinjau dari penggunaan obat selama budidaya hanya digunakan pada saat pertama penebaran yaitu di bulan pertamaan sebagai pencegahan terhadap penyakit. Selanjutnya akan diberikan hanya pada saat terlihat gejala penyakit. Berdasarkan resiko aktivitas budidayanya masih berskala mikro.
- Selanjutnya kami kunjungi pelaku usaha di lokasi yang berbeda yaitu di Desa Pasaka Kecamatan Sabrangparu. Pemilik usaha ini adalah pak Syamsuddin. Usaha budidayanya adalah budidaya ikan nila di tambak air tawar tradisional. Pak Syamsuddin tergabung dalam klompok Budidaya Anugrah Mina tapi belum memiliki NIB dan CBIB.
- Dari hasil kunjungan usaha budidaya yang dikunjungi, keduanya belum memiliki syarat standar berusaha, meskipun resiko dari usahanya masih mikro, tapi setiap usaha di bidang perikanan yang hasil akan dijual kepada Masyarakat maka harus memiliki persyaratan standar dan izin usaha.
- Menurut informasi dari penyuluh yang ikut mendampingi kami melakukan pengawasan, alasan mengapa mereka belum memiliki NIB adalah bahwa mereka masih merasa belum merasa perlu untuk memiliki, karena untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah cukup hanya tergabung dalam kelompok budidaya saja. Pemahaman tentang persyaratan izin usaha belum mereka dapatkan.



■ **Perdin Pengawasan Usaha Bidang Perikanan Budidaya di Wilayah PUD Kab.**

**Soppeng**

- Waktu Pelaksanaan : 26-28 Juni 2024
- Hasil yang dicapai :
- Tim Pengawasan melakukan kunjungan didampingi oleh Kepala Bidang Budidaya dan penyuluh Aditya Kurniawan,S.Pi ke kelompok perikanan Massedi Deceng di Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata. Pak Edy Marwan M selaku ketua Kelompok menerangkan bahwa tahun 2022 mulai membudidayakan ikan Nila dengan sistem Bioflok.
- Kelompok Massedi Deceng sudah memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha karena sudah memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan NIB.

- Lokasi Bangunan Bioflok indoor yang selalu mendapatkan pasokan cahaya matahari dengan 10 kolam yang ternaungi dengan baik, sumber air sumur bor yang dibuat khusus untuk budidaya, saluran pasok dan saluran buang dibuat secara terpisah, mempunyai tandong pasok, mempunyai penyimpanan pakan dan obat ikan, mempunyai fasilitas mandi, MCK dan septic tank.
- Bibit/Benih digunakan adalah yang dipijahkan sendiri yang indukan dari Siduarjo dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (SKA).
- Pada saat kunjungan dari 10 kolam hanya 3 kolam yang beroperasi dengan diameter 4 dengan penebaran 1200 ekor bibit dengan menggunakan pakan propil 781 Sedangkan Persyaratan khusus yaitu persyaratan teknis seperti sarana dan prasarana penebaran bibit sudah memenuhi standar.
- Masa panen pada usia 2 – 6 bulan namun umumnya dipanen usia 4 bulan dengan bobot 300 - 500 gram yang di pasarkan sendiri/tidak melalui pengumpul.



■ **Perdin Pengawasan Usaha Bidang Perikanan Budidaya di Wilayah PUD Kab.**

**Enrekang**

- Waktu Pelaksanaan : 6-8 November 2024
- Hasil yang dicapai :
- Disampaikan pula A. Anhar S.TP selaku Kepala bidang Budidaya perikanan dan penyuluh perikanan yang mendampingi kami dilokasi bahwa, disetiap Kecamatan terdapat beberapa usaha budidaya tapi belum terdata karena masih merupakan kegiatan perorangan/mandiri dan bukan sebagai pendapatan utama bagi pembudidaya ikan , selain itu belum ada arahan langsung dari Dinas setempat untuk melalukan pendataan di mana jarak cukup jauh. Dan beberapa tahun terakhir ini bahwa kegiatan budidaya ikan bagi pelaku usaha pembudidaya khususnya pembudidaya yang melakukan kegiatan budidaya di perairan umum daratan seperti memanfaatkan media air ( Cekdam)/bendungan, rawa dan aliran air sungai tidak lagi dilakukan karena beberapa pelaku usaha merasa terganggu di mana tempat melakukan usaha tersebut marak pencurian ikan sehingga sangat merugikan para pembudidaya ikan dan terkadang menggunakan cara bius /strom ikan sehingga pelaku usaha sangat terganggu dan kuatir

terkadang terjadi kesalahpahaman dan para pembudidaya beralih ke usaha penangkapan untuk menghindari resiko2 yang timbul demi keslamatan jiwanya juga beralih keusaha budidaya kolam maupun Biolfolk.Kelompok Massedi Deceng sudah memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha karena sudah memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan NIB.

- Informasi terakhir pelaku usaha yang kami kunjungi yakni Kelompok usaha bersama pembudidaya KUB. JALA MATTIRA yang berlokasi Desa Karueng Kecamatan Enrekang,Bapak Ridwan sebagai Ketua kelompok dan beranggotakan 15 orang. Pada kesempatan ini disampaikan bahwa awalnya pelaku usaha ini melakukan kegiatan budidaya ikan diperairan umum daratan tepatnya di aliran sungai Sa'dan dengan komoditi tawes, nila, sidat, dengan masa budidaya sekitar 4-8 bulan dan hasil panen ukuran rata-rata ikan seberat 200 gram/ekor dengan jumlah rata-rata 300-450 kg sekali panen.dengan dibantu peralatan yang sangat sederhana saat panen.
- Namun usaha budidaya ikan diperairan umum daratan khususnya di sungai tidak lagi dilakukan aktifitas dikarenakan terdapat permasalahan yang dihadapi pelaku usaha masyarakat pembudidaya adalah seringnya terjadi pencurian ikan sangat meresahkan dan sudah dilaporkan oleh aparat setempat dan Pokmaswas lagi-lagi selalu kejadian tersebut terulang kembali
- Dan Akhirnya kelompok ini KUB Jala Mattira beralih ke usaha penangkapan ikan tidak lagi melakukan usaha budidaya ikan di PUD dikarenakan masalah tersebut.yang sering terjadi di wilayahnya. Dan beralih ke usaha Penangkap ikan melakukan dengan menggunakan alat Bubu Naga/Jaring.untuk mendapatkan hasil tangkapan berupa ikan tawes, mas, sidat dan tembang.



### **3. Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan**

- **Perdin Pengawasan Usaha Pemasar dan Pengolah di Kab. Sinjai**
  - Waktu Pelaksanaan : 20-22 Februari 2024
  - Hasil yang dicapai :

- Tim Pengawasan melakukan kegiatan pengawasan pengolah pada 2 (dua) unit UMKM yaitu pada unit pengolahan Makanan ringan dengan bahan dasar ikan dan udang di UMKM Mutiara Laut di Samataring Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dan UMKM Lengkonge 1 Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai yang bergerak dalam bidang pengolahan Ikan kering
- Kedua UMKM ini masih merupakan usaha mikro dan resiko rendah. Dimana jumlah aset < 50 juta dan omzet < 300 juta. Dimana modal usaha Ibu Juniati selaku pemilik usaha UMKM Kedai Pesisir masih membutuhkan suntikan dana dari KUR.
- Dokumen usaha yang sudah dimiliki UMKM ini adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), dan sertifikat pengolahan yang merupakan persyaratan umum perizinan berusaha.
- Sedangkan Persyaratan khusus yaitu persyaratan teknis seperti sarana dan prasarana pengolahan sudah memenuhi dan higienis
- Dari hasil kunjungan kerja pada unit usaha di UMKM Mutiara Laut dan Lengkonge 1 maka kesimpulan yang dapat diambil adalah pelaku usaha patuh terhadap persyaratan berusaha di bidang pengolahan ikan Persyaratan yang masih perlu dipenuhi adalah penjaminan mutu produk dengan melakukan pengujian terhadap produk akhir maupun bahan baku ke instansi yang berkompeten dalam melakukan uji mutu produk pangan.



#### ■ Perdin Pengawasan Usaha Pemasar dan Pengolah di Kota Parepare

- Waktu Pelaksanaan : 19-20 Februari 2024
- Hasil yang dicapai :
- Tim Pengawasan melakukan kegiatan pengawasan pengolah di unit pengolahan abon ikan tuna di UMKM KEDAI PESISIR di Jl. Keterampilan No 36 kecamatan Bacukiki barat kelurahan Cappagalung kota Pare Pare. Tujuan kunjungan pengawasan kali ini adalah melihat kepatuhan pelaku usaha terhadap persyaratan
- Tim Kerja Pengawasan juga mengamati proses pengolahan abon ikan tuna yaitu pada proses pencampuran bumbu dengan daging ikan sampai proses penyaringan minyak.

- Jenis usaha Kedai Pesisir masih merupakan usaha mikro dan resiko rendah. Dimana jumlah aset < 50 juta dan omzet < 300 juta. Dimana modal usaha Ibu Juniati selaku pemilik usaha UMKM Kedai Pesisir masih membutuhkan suntikan dana dari KUR.
- Dokumen usaha yang sudah dimiliki UMKM ini adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), dan sertifikat pengolahan yang merupakan persyaratan umum perizinan berusaha.
- Sedangkan Persyaratan khusus yaitu persyaratan teknis seperti sarana dan prasarana pengolahan sudah memenuhi dan higienis.
- Dalam menjalankan usahanya Ibu Juniati dibantu oleh 6 orang pekerja harian yang bekerja sebagai peracik bumbu, pemasakan dan pengemasan. Dimana sistem manajemen usahanya sudah cukup baik dan memadai.



■ **Perdin Pengawasan Usaha Pemasar dan Pengolahan di Kabupaten Takalar**

- Waktu Pelaksanaan : 27-28 Februari 2024
- Hasil yang dicapai :
- Pelaksanaan kegiatan pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dilaksanakan di kabupaten Takalar selama 2 hari, diawali dengan berkoordinasi dengan Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar, informasi yang kami peroleh adalah bahwa usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan meliputi dengan berbagai macam produk dan jenis skala usaha usaha pengolahan dan pemasaran.
- Dari hasil diskusi dengan sekretaris Dinas Perikanan Kab. Takalar, Bapak Mustaqiem Hasim, dikatakan bahwa sektor perikanan memiliki peran penting dalam perekonomian wilayah, Potensi besar dari perairan Takalar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian dari sektor perikanan. Namun, pengembangan sektor perikanan ini masih belum menjadi prioritas dan mendapatkan perhatian sepenuhnya. Kegiatan dari sektor perikanan hanya pada tahap distribusi bahan baku mentah sehingga hanya terbatas nilai produksi sektor bukan nilai tambah, dan untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan memberikan sebuah arahan industri strategis industri pengolahan perikanan yang akan mengurangi kesenjangan dan penikatan ekonomi wilayah
- Kegiatan Pengawasan yang dilakukan adalah mengunjungi CV. Gembira Galesong yang terdaftar atas nama pemilik Muhammad Saleh. UPI ini terletak di Jalan Abdul Kadir

Kelurahan Galesong Kota Kecamatan Galesong Kabupaten Galesong Takalar. CV Gembira Galesong memiliki usaha di bidang penggaraman/ pengeringan ikan laut.

- UMKM CV Gembira Galesong ini, masih merupakan usaha mikro dan menengah dengan tingkat resiko Menengah-Rendah, dimana jumlah aset < 50 juta dan omzet < 300 juta. Modal usaha Bapak Muhammad Saleh selaku pemilik usaha UMKM CV Gembira Galesong berasal dari swadaya sendiri dan masih membutuhkan suntikan dana dari KUR.
- Sedangkan Persyaratan khusus yaitu persyaratan teknis seperti sarana dan prasarana pengolahan sudah memenuhi dan higienis.
- Kendala yang dihadapi oleh UMKM ini adalah permodalan yang masih minim dan masih butuh pendampingan dalam rangka bantuan modal dari pemerintah/KUR. Selain itu, pemasaran yang masih bersifat lokal juga masih perlu ditingkatkan ke cakupan yang lebih luas.



#### ■ Perdin Pengawasan Usaha Pemasar dan Pengolah di Kabupaten Pangkep

- Waktu Pelaksanaan : 4-5 Maret 2024
- Hasil yang dicapai :
- Kegiatan pengawasan pengolah dan pemasar yang dilakukan di Kabupaten Pangkep diawali dengan kunjungan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi sekaligus melakukan kunjungan ke lokasi pengolahan pelaku usaha perikanan yang berada di Kabupaten Pangkep.
- Saat kunjungan team didampingi oleh Bapak Suardi dan Ibu Risna Irawati sebagai penyuluh perikanan ke lokasi pengolahan wilayah binaan, sebagai bahan informasi bahwa jumlah pengolah pelaku usaha skala mikro yang terdaftar sebanyak 30 unit dan pemasarpengumpul berjumlah 34 kelompok dan beberapa minipant rajungan yang ada di Kab. Pangkep.
- Jenis olahan perikanan yang paling di dominasi adalah jenis olahan bandeng tanpa duri, abon dan presto yang menghasilkan berbagai jenis diversifikasi produk antara lain berupa

bandeng tanpa duri, bandeng presto, abon ikan, keripik, stick ikan bandeng, bakso ikan, ikan kambu, otak-otak bandeng, pallumara bandeng, dan abon ikan.

- Dilanjutkan kunjungi pengawasan dilakukan ke pengolah UKM Mattoanging, yang terletak Jalan Binangatoa, Bonto Mania, Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep yang di ketuai Ibu Sitti Saenab, menyampaikan usaha pengolahan berdiri tahun 2014 yang karyawan kebanyak kalangan ibu-ibu , awalnya berjumlah 11 orang pekerja , namun karena kesibukan/aktifitas masing-masing sehingga pekerja yang aktif sekarang tinggal 3 orang.
- Usaha ini mengolah 2(dua) jenis olahan berupa bandeng cabut duri dan bandeng cabut duri tamabah asam, di mana hanya untuk mebedakan cita rasa saja. Asal bahan baku dari wilayah pangkep langganan dari pengumpul ikan yang rata-rata produksi perbulan 40-80 kg, dengan memnggunakan sarana produksi yang ada seperti loyang, baskom, alat pemotong dll, dengan omzet penjualan rata-rata sebesar 8-10 jt perbulan dan dipasarkan disekitar kota Pangkep.
- Sesuai klasifikasi Baku Lapang Usaha Indonesia (KBLI) dalam Perdirjen no. 6 tahun 2021 terhadap pemenuhan kepatuhan berbasis resiko yang mengacu pada formulir 10219 Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, tempat usaha pengolah yang dikunjungi Legatiitas usaha ini sudah memiliki izin usaha seperti TDP, IZIN Halal (ID.737110000180951121), NIB (2510210010725) , IPRT, NPWP usaha dan SKP semetara dalam proses penerbitan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan juga sudah dilengkapi dengan bukti pendukung admistrasi lain seperti pencatatan pembukuan mulai dari penerimaan produksi sampai ke pemasaran dan juga pemenuhan persyaratan teknis seperti prasarana yang hiegins dan memadai sesuai dengan standar jaminan mutu hasil perikanan. Terhadap hasil pegwsn d pemantauan pada pemenuhan perizinan berbasis resiko sesuai dengan standar KBLI di kategorikan UKM ini telah **Memenuhi Kepatuhan** perizinan usaha berbasis resiko bidang pengolahan hasil perikanan.



■ **Perdin Pengawasan Usaha Pemasar dan Pengolah di Kabupaten Bone**

- Waktu Pelaksanaan : 15-17 Mei 2024
- Hasil yang dicapai :
- Dari hasil pengamatan, penanganan ikan pada saat penerimaan tidak dilakukan dengan higienis. Ikan yang diturunkan dari kapal diletakkan di lantai tanpa pengelas sedangkan lantai dalam keadaan kotor. Demikian pula pada saat pengangkutan ikan, ikan diletakkan begitu saja di dalam bak mobil tanpa perlakuan rantai dingin dan penanganan yang higienis. Pengumpul ikan yang lain masih ada yang menerapkan rantai dingin dengan menempatkan ikan dalam steiroform dan dibalur dengan es sebelum ditutup. Tapi ikan yang dikemas tidak higienis karna diletakkan di atas lantai pada saat penerimaan dan tidak dicuci terlebih dahulu sebelum dimasukkan dalam steiroform.
- Hasil yang dicapai pada pengawasan ikan di TPI/PPI Lonrae yaitu, keempat pelaku usaha antara lain 2 (dua) penangkap ikan dan 2 (dua) pengumpul ikan tidak patuh dalam mempertahankan mutu ikan.
- Selanjutnya tim mengunjungi unit usaha WATU, unit usaha ini berupa pengolahan kepiting rajungan, pemilik usahanya adalah pak syamsuddin. Lokasinya berada di dusun watu, desa watu, kecamatan Barebbo kabupaten Bone.
- Bahan baku yang diolah di mini plant ini adalah kepiting rajungan yang masih utuh tapi sudah melalui proses pemasakan. Selanjutnya kepiting dikupas, dosortir, pengelompokan produk akhir dan pengemasan. Dari kepiting utuh akan menghasilkan 4 produk akhir berdasarkan letak daging, antara lain, daging kaki (claw), daging bagian badan (spesial), daging siku pada capit (jumbo), dan daging capit (spesial claw). Masing-masing produk memiliki harga yang berbeda-beda.
- Dari hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha masih patuh dalam menerapkan sanitasi dan sistem rantai dingin dalam proses pengolahan daging kepiting rajungan. Tapi ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi yaitu, sistem sanitasi bagi tamu yang masuk, yaitu belum menerapkan prosedur khusus bagi tamu yang akan masuk ke dalam ruang proses yang bertujuan untuk menghindari kontaminasi bagi produk yang diproses, yaitu tamu tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam ruang proses, tidak ada baju, masker dan alas kaki khusus bagi tamu. Selain itu pelaku usaha juga belum memiliki NIB

- Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha pengolahan daging kepiting rajungan WOTU, masih belum patuh dalam memenuhi persyaratan berusaha berbasis resiko.
- Pelaku usaha pemasaran ikan di TPI/PPI Lonrae kabupaten Bone masih belum patuh mempertahankan mutu pada proses penerimaan dan pengangkutan produk ikan tuna, hal tersebut merupakan bagian dari persyaratan berusaha berbasis resiko sesuai permen KP nomor. 10 Tahun 2021.



#### ■ Perdin Pengawasan Usaha Pemasar dan Pengolah di Kabupaten Bulukumba

- Waktu Pelaksanaan : 12-13 Juni 2024
- Hasil yang dicapai :
- Dari hasil diskusi dengan sekretaris Dinas Perikanan Kab. Bulukumba, Bapak Muhammad Ardi Nur, S.Kel, M.Si, dikatakan bahwa sektor perikanan memiliki peran penting dalam perekonomian wilayah, Potensi besar dari perairan Bulukumba dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian dari sektor perikanan. Namun, pengembangan sektor perikanan ini masih belum menjadi prioritas dan mendapatkan perhatian sepenuhnya. Kegiatan dari sektor perikanan hanya pada tahap distribusi bahan baku mentah sehingga hanya terbatas nilai produksi sektor bukan nilai tambah, dan untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan memberikan sebuah arahan industri strategis industri pengolahan perikanan yang akan mengurangi kesenjangan dan penikatan ekonomi wilayah
- Pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Bulukumba dilakukan terhadap unit usaha Jutsuka Desa Balleangin Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
- Parameter pengawasan yang dilakukan pada UMKM ini adalah persyaratan kategori umum dan kategori khusus berdasarkan form KBLI 10291 yaitu Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya. Legalitas usaha ini adalah untuk persiapan, operasional, dan atau komersial kegiatan usaha.

- Unit usaha Jutsuka dikelola oleh Bapak Rizki Awalfindy dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 10 orang dan telah beroperasi sejak tahun 2021. Berdasarkan hasil pengawasan dan pemantauan didapatkan bahwa dokumen perizinan yang sudah diperoleh berupa SKP, NIB, IUMK, PIRT, NPWP, sertifikat Halal dan BPJS Ketenagakerjaan.
- Produk unit usaha Jutsuka berupa ikan kering, ikan kanasa, ikan frozen, tepung ikan, yang dipasarkan melalui reseller toko-toko di sekitar Bulukumba, dan penjualan secara online, sehingga mampu mencakup beberapa daerah di Indonesia, bahkan sampai keluar negeri. Produk yang dihasilkan mencapai sekitar 200kg dengan omzet kurang lebih Rp. 240.000.000/tahun.
- Sedangkan Persyaratan khusus yaitu persyaratan teknis seperti sarana dan prasarana pengolahan sudah memenuhi dan higienis.



#### ■ Perdin Pengawasan Usaha Pemasar dan Pengolah di Kabupaten Soppeng

- Waktu Pelaksanaan : 01-03 Juli 2024
- Hasil yang dicapai :
- Sebagai bahan informasi bahwa di Kabupaten Soppeng jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro yang terdaftar baik pemasar, pengumpul, yang berjumlah 34 kelompok yang tersebar di beberapa wilayah antara lain, Kec. Lilitirilau, Lalabata, Lilitiraja dan Mario riawa yang berjumlah 340 orang yang didominasi pekerja perempuan, Adapun jenis pengolahan berupa segar, beku dan pengeringan dengan berbagai jenis olahan yang diproduksi berupa abon ikan, tenteng ikan, bakso ikan, kerupuk ikan, amplang ikan dan ikan segar seperti nilai, sepat siam , nilem tawes yang rata produksi di lakukan seminggu sekali atau sesuai pesanan/orderan dgn jumlah produksi rata-rata 5- 50 kg/Bulan.
- Kunjungan pengawasan dilakukan ke pengolah skala mikro yakni UKM Poklahsar Anugerah yang diketua Ibu Ernawati Adam yang berlokasi jalan Ujung No.157 , Desa/kel Lemba, kec.Lalabata Kabupaten Soppeng, Usaha ini mulai dirintis tahun 2015 dengan jumlah pekerja sebanyak 10 orang yang didominasi perempuan. Adapun jenis ikan layang yang diolah menjadi Abon ikan dan kerupuk ikan yang rata-rata produksi perbulan +/- 20 Kg/bulan.Adapun bahan baku ikan layang yang digunakan berasal dari wilayah

perairan Soppeng atau dengan pagandeng langganan langsung dibawakan dan omzet rata-rata 5-10 juta/bulan.

- Hasil pelaku Pengawasan pada pemenuhan adminisitrasи terkait kepatuhan perizinan pelaku usaha pemasar dan pengolah hasil perikanan pada perizinan berusaha berbasis resiko dimana pelaku usaha **UKM Anugerah** telah memiliki berberpa peizinan usaha antara lain seperti Nomor Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan diterbitkan tanggal 16 September 2021 oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Soppeng., Sertifikat Perizinan Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 2811220078065 , diterbitkan pada tanggal 28 November 2022, oleh Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta Perizinan Halal , Nomor Sertifikat ID 737110013569951223 diterbitkan tanggal 29 Desember 2023 oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Mutu Halal di Jakarta
- Dari Segi pemenuhan teknis dan sarana dan prasarana UKM ini juga telah memiliki beberapa peralat penunjang seperti spiner, baskom , alat masak dan alat prsee sebagai syarat dalam melakukan pengolahan hasil perikanan Dan di simpulkan bahwa UKM ini sesuai dengan standar KBLI di kategorikan telah **Memenuhi Kepatuhan** perizinan usaha berbasis resiko bidang pengolahan hasil perikanan.
- Team melanjutkan kunjungan ke pelaku usaha pengolah **Poklashar UKM Aisyah** berlokasi jln.Kayangan Desa Lemba Kecamatan Lalbata Kab.Soppeng yang diketuai Ibu Rusdiana, jumlah tenaga kerja sebanyak 10 orang, jenis olahan yang diproduksi Abon Ikan dengan je is ikan layang , rata -rata produksi per minggu 5-10 kg dengan omset perbulan senayak 10-15 juta, dengan wilayah pemasaran sekitar wilayah Kab.Soppeng di toko/swalayan dititipkn dan juga permintaan/ orderan saat bulan musim Jamaah Haji. Bahan Baku ikan Layang berasal dari pasar ato didapat dari langgang yang mengantar langdung kepengolah.
- Pada aspek pemenuhan teknis dan sarana dan prasarana UKM ini juga telah memiliki beberapa peralatan penunjang seperti wajan ,alat kukusan, spiner, baskom , alat masak dan alat prress abon sebagai syarat dalam melakukan pengolahan hasil perikanan. Untuk itu ukm ini telah memenuhi sesuai dengan standar KBLI di dengan perundang- undangan yang berlaku yang dikategorikan telah **Memenuhi Kepatuhan** perizinan usaha berbasis resiko bidang pengolahan hasil perikanan.



■ **Perdin Pengawasan Usaha Pemasar dan Pengolah di Pulau Podang Podang dan Bontosua Kabupaten Pangkep**

- Waktu Pelaksanaan : 24-26 Juli 2024
- Hasil yang dicapai :
- Tim Pengawasan melakukan kegiatan pengawasan usaha pengolahan dan pemasaran di 2 (dua) pulau di kabupaten Pagkep yaitu Pulau Podang-Podang desa Mattiro Bone dan pulau Botosua desa Mattiro Bolangeng.
- Pada Kunjungan di pulau Podang-podang dan Pulau Bontosua kegiatan usaha pemasaran yang ada adalah pengawetan ikan dengan cara dikeringkan dengan penambahan garam sebagai pengawet.
- Terlhat bahwa pengawetan ikan di dua lokasi ini menggunakan bahan pengawet yang sesuai dan tidak menggunakan penambahan bahan pengawet yang berbahaya dan tidak membahayakan kesehatan.
- Sistem pengeringan ikan dengan cara di letakkan diatas wadah para-para dengan ketinggian kurang lebih 1 meter dari tanah, sehingga aman dari gangguan binatang ternak milik penduduk.
- Proses pengeringan masih manual, yaitu dengan cara dijemur di bawah sinar matahari selama 1 – 2 hari. Yang selanjutnya akan dijual atau diambil oleh pengumpul dan di bawa ke Pangkep atau Makassar untuk di jual.
- Pelaku usaha masih bersifat perorangan, di pulau Podang-podang terdapat kurang lebih 50 orang yang memiliki usaha pengeringan ikan sedangkan di Pulau Bontosua hanya berkisar 4 pelaku usaha. Pelaku usaha masih tergolong usaha mikro dengan resiko rendah.
- Jenis ikan yang dikeringkan di pulau Podang-podang adalah ikan teri, ja'jala, lure (sejenis teri), bete-bete, dan ikan penjang, yang merupakan hasil tangkapan dengan alat tangkap perre-perre atau serok permukaan. Alat tangkap ini merupakan alat tangkap yang ramah lingkungan yang menggunakan alat bantu lampu.

- Sedangkan di pulau Bontosua hanya satu jenis yaitu ikan teri atau nama biasa di sebut oleh warga sekitar pulau adalah, mairo sarden. Yang diperoleh juga dari hasil tangkapan yang sama yaitu dengan alat tangkap Perre-perre.
- Harga jual ikan yang sudah kering adalah 50-70 ribu rupiah per ember untuk ikan ja'jala, dan ikan mairo 60 ribu per ember. Sedangkan harga ikan pada saat basah lebih di rendah, yaitu 50 ribu per ember untuk ikan mairo sedangkan kan ja'jala 70 ribu rupiah per ember.
- Dilihat dari harga jual ikan, untuk ikan yang sudah dikeringkan dan basah hampir sama bahkan ada yang lebih tinggi harganya. Oleh karena itu usaha ikan kering banyak yang meminati karena disamping hasil tangkapannya banyak, juga akan lebih awet apabila hasil tangkapan berlimpah dan dari nilai ekonomis masih menguntungkan. Apalagi pada bulan-bulan tertentu seperti bulan Juli sampai dengan Oktober, hasil tangkapan ikan mairo berlimpah. Dan akan berkurang pada bulan Januari.
- Yang dapat kami simpulkan dari kegiatan pengawasan Pemasaran dan Pengolahan ikan di Pulau Podang-Podang dan Pulau Bontosua adalah, Pelaku usaha ikan kering tergolong patuh, dari penggunaan bahan pengawet, dan asal bahan baku yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.



#### ■ Perdin Pengawasan Usaha Pemasar dan Pengolah di Kabupaten Maros

- Waktu Pelaksanaan : 25-26 November 2024
- Hasil yang dicapai :
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Maros mengarahkan kami ke TPI Labuang yang mana TPI ini berfungsi ganda sebagai pasar ikan dengan berbagai jenis ikan yang dipasarkan seperti ikan layang, kakap, lamuru, katombo, ekor kuning dan bahkan ada yang menjual ikan hiu yang mana jenis ikan hiu ini masih diperbolehkan asalkan di luar jenis-jenis ikan yang dilindungi.
- Dalam kegiatan pengawasan terhadap pemenuhan teknis pada usaha produk perikanan, di mana sarana dan prasana yang di miliki untuk menampung ikan berupa styrofoam yang rata-rata menampung 25-30 kg ikan setiap box berisi ikan layang, kakap, katambo,

lamuru, yang bersumber/asal dari wilayah perairan kab. Maros dan sekitarnya , pedagang ikan menerima langsung kapal perahu/ punggawa, yang rata penjualan 1 ikat ikan/1 kg dengan harga Rp.30.000,- dimana Kondisi ikan yang mereka perjual belikan cukup segar ditandai dengan kenampakan ikan dari insang /mata masih segar dan merah terang disertai dengan adanya lalat , yang di indikasi belum terkontaminsi dengan bahan kimia berbahaya seperti penggunaan formalin dan lain sebagainya.

- Hasil pemantauan pengawasan langsung sarana penampung ikan berupa styrofoam sudah agak berkotor sehingga ke higienisan ikan dapat terkontaminasi sehingga mudah mengalami penurunan mutu ikan ditambah saat penyimpanan dalam styrofoam ikan dan es tidak sebanding . Ikan yang dipasarkan rata-rata ikan layang dan katambo, bandeng, ikan ekor kuning dan lain-lain.
- Terhadap ketelusuran asal ikan sesuai dengan pemenuhan perijinan perundang-undangan yang berbasis resiko pada produk perikanan khususnya ikan yang diperjualbelikan tidak dilengkapi dengan surat asal ikan , dikareakan ikan tersebut diambil langsung dari nelayan yang mana nelayan maupun punggawas tersebut tidak mengetahui dan memahami secara teknis maupun admininstrasi terhadap kelayakan ikan sebelum ikan akan dipasarkan sehingga kami menyimpulkan belum memenuhi Patuh pada pemenuhan teknis dan persyaratan umum usaha.
- Salah satu Kendala kurangnya kesadaran para pedagang ikan saat menyimpan ikan di styrofoam pada penggunaan es terlihat ada yang hanya pakai es seadanya dan ada ikan yang tidak sama sekali di beri es sehingga berpotensi penurunan mutu ikan dan mudah terjadi pembusukan ikan. Dan salah satu cara agar ikan tetap dalam kondisi segar agar ikan selalu diberi es dengan 1:2, untuk pemenuhan rantai dingin es sehingga kala ikan dipasarkan tetap dalam kondisi segar dan baik sehingga aman untuk dikonsumsi



**TINDAK LANJUT REKOMENDASI  
ATAS PENGKURAN CAPAIAN TAHUN 2024**

Capaian realisasi keseluruhan bidang Pengawasan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu realisasi fisik yang mencapai 90,78 % dan realisasi keuangan sebesar 47,13 %. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam capaian kinerja Bidang Pengawasan tahun 2024. Yang paling berpengaruh adalah kendala Bidang Administrasi dan Keuangan yang mengakibatkan terhambatnya beberapa Pembayaran Realisasi Keuangan terhadap beberapa kegiatan yang telah dilakukan.

**A. Rekomendasi**

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, yaitu :

- Mengoptimalkan dukungan Administrasi Kegiatan dan Keuangan, sehingga tidak terjadi hambatan dalam Distribusi Syrat Perintah Tugas serta Pembayaran Realisasi Keuangan.
- Mengoptimalkan pembinaan POKMASWAS di wilayah kab/kota terutama pada daerah rawan pelanggaran dan daerah pulau terpencil.
- Menyediakan sarana dan prasarana Pokmaswas yang berada di wilayah rawan pelanggaran, serta melakukan pembinaan secara rutin baik melalui kunjungan/tatap muka langsung ataupun melalui WAG Forum Pokmaswas Sulse.
- Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Meningkatkan sinergitas dengan Cabang Dinas Kelautan dan Instansi Pengawasan terkait lainnya khususnya yang berada di Kabupaten/ Kota.

**IV. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN**

**A. PERMASALAHAN**

Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengawasan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 terdapat permasalahan yang menghambat pelaksanaannya. Adapun permasalahan dapat disampaikan sebagai berikut :

- Banyaknya kendala di bidang Administrasi dalam melakukan kegiatan. Distribusi Surat Perintah Tugas yang terhambat dan Proses Realisasi Keuangan yang tidak terbayarkan sehingga realisasi **Keuangan Kurang Dari 50 %** yang mengakibatkan terdapat beberapa kegiatan yang telah dilakukan dan tidak terbayarkan hingga akhir tahun Anggaran 2024.

- Belum optimal pelaksanaan pembinaan POKMASWAS di kabupaten/kota, terutama POKMASWAS yang berada di wilayah kepulauan yang disebabkan keterbatasan alokasi anggaran untuk pembinaan POKMASWAS.
- Sebagian Pokmaswas belum mampu menyediakan sarana dan prasarana pengawasan SDKP secara mandiri sehingga masih berharap bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
- Kurangnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga diperlukan sosialisasi peraturan dan pembinaan serta pendampingan terhadap pelaksanaan peraturan yang berlaku.

## B. UPAYA PEMECAHAN

- Penguatan di Bidang Admnistrasi dan Keuangan
- Diharapkan sinergitas antara bidang Pengawasan dan Cabang Dinas Kelautan guna mendukung program Pengawasan Kelautan dan Perikanan
- Dibutuhkan dukungan penganggaran yang sesuai dengan ruang lingkup pengawasan guna mendukung kelancaran program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

### Kegiatan APBN

Program Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023 bersumber dari Dana Dekonsentrasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai berikut :

#### 1. Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan

##### a. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif dalam pengawasan SDKP, dengan output/keluaran Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan. Target Kinerja untuk Sulawesi Selatan, yaitu 44 kelompok.

##### b. Pelaksana, Waktu, dan Tempat Pelaksanaan

- |                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| - Pelaksana          | : Pengawas Perikanan / PPNS |
| - Waktu              | : Januari s/d Desember 2024 |
| - Tempat Pelaksanaan | : Sulawesi Selatan          |

##### c. Hasil Kegiatan

#### I. Perencanaan Pembinaan Pokmaswas

- Hasil yang dicapai :

Telah terlaksana secara fisik dan keuangan berupa rapat perencanaan pembinaan Pokmaswas diwilayah Provinsi Sulawesi Selatan serta pembuatan baju kaos Pokmaswas sebanyak 100 lembar.

## **II. Pelaksanaan Pembinaan Pokmaswas**

### **1) Pembinaan Pokmaswas di Kabupaten Jeneponto**

- Waktu pelaksanaan: 03 – 04 April 2024
- Hasil yang dicapai :
- Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pokmaswas di Kabupaten Jeneponto ini adalah mengunjungi pokmaswas yang pernah aktif dan sekarang sudah tidak melaksanakan kegiatan pengawasan di wilayahnya. Berdasarkan Data Pokmaswas Tahun 2023, terdapat 34 kelompok Pokmaswas yang terdata sudah tidak aktif melakukan kegiatan pengawasan dan 6 kelompok diantaranya terdapat di kabupaten Jeneponto
- Pelaksanaan Pembinaan Pokmaswas di Wilayah Kabupaten Jeneponto dilaksanakan dengan mengunjungi 4 (kelompok) kelompok Pokmaswas yaitu pokmaswas Pannara Indah dan Senapan di Kecamatan Binamu Kelurahan Empong Selatan, Pokmaswas Bahari di kecamatan Bangkala Kelurahan Pantai Bahari
- Kegiatan Pembinaan pokmaswas di kelompok Pannara Indah didampingi oleh ketua pokmaswas pak Dado Dg. Joa. Kelompok ini sudah lama tidak aktif sejak tahun 2021. Pokmaswas ini sudah tidak aktif karena pak Dado sebagai ketua kelompok sudah beralih profesi sebagai penjual ikan eceran dan bertani. Sedangkan anggota kelompoknya juga tidak meneruskan kegiatan pengawasan
- Bantuan yang pernah diterima oleh kelompok ini antara lain rompi pokmaswas, senter, kamera digital, GPS, Teropong dan HT.
- Selanjutnya kami mengunjungi pokmaswas Senapan yang diketuai oleh pak Sudirman. Kelompok Pokmaswas ini sudah tidak aktif sekitar 7 tahun yaitu pada tahun 2018. Terakhir mengikuti kegiatan BIMTEK POKMASWAS yang diadakan oleh Cabang Dinas Wilayah Selatan pada tahun 2018.
- Pak Sudirman Sebagai Ketua Pokmaswas Senapan sudah berpindah domisili di Kelurahan Batang Kecamatan Tarowang dan sudah beralih profesi, oleh karena itu pokmaswas ini sudah tidak aktif lagi melakukan kegiatan pengawasan kelautan. Bantuan yang pernah di peroleh oleh Pokmaswas Senapan adalah Teropong Tahun 2017. Pada saat pindah domisili bantuan itu diberikan kepada anggotanya, tapi sekarang sudah rusak.
- Selanjutnya yang dikunjungi adalah Pokmaswas Bahari di kelurahan Pantai Bahari Kecamatan Bangkala. Ketua Pokmaswas ini adalah Bapak Nasir. Hasil diskusi diperoleh

informasi bahwa pokmaswas ini masih melakukan kegiatan pengawasan tapi tidak terpantau aktivitasnya dikarenakan tidak terlapor dan tidak terdokumentasi dengan baik. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pokmaswas ini masih aktif tapi kegiatannya tidak terlapor. Oleh karena itu Kelompok ini masih bisa didata kembali keaktifannya

**2) Pembinaan Pokmaswas di Kabupaten Bulukumba**

- Waktu pelaksanaan : 03 – 05 April 2024
- Hasil yang dicapai :
- Kabupaten Bulukumba memiliki 7 (tujuh) Pokmaswas yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Herlang, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Bontobahari. Adapun Pokmaswas tersebut, yaitu :
  - ✓ Pokmaswas Ujung Baru Desa Tanah Lemo Kecamatan Bontobahari
  - ✓ Pokmaswas Cakalang Kelurahan Eka Tiro Kecamatan Bontobahari
  - ✓ Pokmaswas Batu Mesu Kelurahan Sapoloh Kecamatan Bontobahari
  - ✓ Pokmaswas Lumba-Lumba Putih Desa Tana Jaya Kecamatan Kajang
  - ✓ Pokmaswas Lombok Desa Pantama Kecamatan Kajang
  - ✓ Pokmaswas Katinroang Jangang-Jangang Kelurahan Bonto Kamase Kecamatan Herlang
  - ✓ Pokmaswas Singkolo Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari
- Pada Kegiatan ini didampingi oleh Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba dan Penyuluh Perikanan KKP, Pokmaswas yang dikunjungi adalah pokmaswas Singkolo Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari dengan jumlah anggota sebanyak 14 (empat belas) orang.
- Pokmaswas ini baru terbentuk pada tahun 2023 dengan No. SK : 523/289/XII/DKP Tanggal 27 Desember 2023 yang diinisiasi oleh Yayasan Konservasi Laut yang bertujuan bersama masyarakat setempat mengelola dan melestarikan sumberdaya laut secara berkelanjutan
- Ketua Pokmaswas Singkolo menyampaikan pada saat ini masih terdapat kegiatan destructive fishing yang biasa ditemukan di sekitar perairan Desa Lembanna seperti penggunaan bius yang mengakibatkan kerusakan karang, sehingga pokmaswas tersebut berkolaborasi bersama Yayasan Konservasi Laut untuk melakukan kegiatan transplantasi terumbu karang. Kegiatan ini merupakan aksi nyata menjaga ekosistem untuk masa depan dan sebagai ruang pembelajaran mengenai keanekaragaman hayati

- Anggota Pokmaswas Singkolo juga aktif dalam melakukan rutinitas pemantauan diwilayah perairan Desa Lembanna, seperti upaya melepaskan penyu yang terjerat di jaring nelayan
- Terkait kelengkapan administrasi, Pokmaswas Singkolo telah memiliki sekretariat, sedangkan buku laporan kejadian/kegiatan, buku agenda surat dan buku tamu belum dimiliki oleh Pokmaswas ini. Namun penyuluh KKP akan mendampingi untuk pembuatan kelengkapan administrasi tersebut.

### 3) Pembinaan Pokmaswas di Kabupaten Bantaeng

- Waktu pelaksanaan : 04 – 05 April 2024
- Hasil yang dicapai :
- Sebagai informasi bahwa sampai saat ini jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang aktif sesuai data base DKP Prov, bahwa Pokmaswas yang berada di Kab. Bantaeng berjumlah 12 Kelompok/Pokmaswas dengan jumlah anggota sebanyak 131 orang, yang aktif melakukan pengawasan pemantauan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Kabupaten Bantaeng.
- Pada kesempatan ini Pembinaan Pokmaswas yang kami kunjungi yakni Pokmaswas yang berfokus kepada Pokmaswas yang baru terbentuk dan telah di ikut sertakan tahun lalu 2023 dalam kegiatan studi tiru di Yogyakarta , dimana untuk mendapatkan informasi /pemahaman serta bekal ilmu terkait dengan kegiatan pengawasan Sumberdaya kelautan dan perikanan.
- Pembinaan pokmaswas yang dikunjungi yakni Pokmaswas Pantai Lamalaka yang beralamat Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang diketua Bapak Aidil Adha yang beranggotakan 20 orang. Pokmaswas ini terbentuk pada tanggal 11 Mei 2023, bersama dengan para nelayan atas inisiasi kesadaran serta kepedulian masyarakatnya atas lingkungan untuk menjaga kelestarian biota perairan, mengurangi tingkat kerusakan perairan sebagai tempat mencari nafkah dan mengawasi adanya praktik-praktek ilegal fishing dan destructive fishing pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayahnya.
- Ketua Pokmaswas yang sekaligus juga sebagai Ketua HNSI kab. Bantaeng Bpk Aidil menyampaikan belum optimal dilaksanakan dikarenakan sebagian besar nelayan belum memiliki sarana prasarana seperti kapal nelayan untuk kegiatan pengawasan pemantauan/mengawasi sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Kab. Bantaeng, Kelompok ini sementara hanya melakukan kegiatan berupa mengawasi aktifitas masyarakat yang mengambil pasir laut untuk dipakai membangun rumah tinggal sehingga kalau terus menerus diambil kedepan nantinya kondisi perairan laut di sekitar perairan Kab.

Bantaeng bisa berdampak abrasi. Dan kelompok ini juga melakukan kegiatan bersih-bersih pantai untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat disekitarnya agar menjaga kondisi laut tidak membuang sampah atau sisa plastik yang dapat merusak kondisi laut.

#### 4) Pembinaan Pokmaswas di Kabupaten Wajo

- Waktu pelaksanaan : 19 – 21 Juni 2024
- Hasil yang dicapai :
- Berdasarkan data base Pokmaswas Prov.2024 terdapat 14 kelompok Pokmaswas yang tersebar di beberapa lokasi seperti Kecamatan Takkala ,Kecamatan maiangpajo, kecamatan Pitumpnua, Kecamatan Penrang, Kecamatan Bola, Kecamatan Sajoangging, Kecamatan Keera, Kecamatan Pammana, Kecamatan Transito, Kecamatan Tempe, Kecamatan Belawa
- Kunjungan Pembinaan Pokmaswas dilakukan di Desa Watalipue Kecamatan Kabupaten Wajo, yakni Pokmaswas Siparingerrang yang diketuai oleh Bapak Arifin dengan jumlah anggota sebanyak 15 orang. Ketua kelompok menyampaikan 2 tahun terakhir kelompok ini kurang melakukan kegiatan pengawasan di perairan daratan umum dikarenakan sebagian anggota ada yang berpindah tempat dan mempunyai aktifitas/ kegiatan lain
- Sesuai Data base kami bahwa kelompok Pokmaswas Siparingerrang mulai terbentuk pada Tahun 2016, nomor Surat Keputusan Pembentukan 523/215/SK/PGS/Pokmaswas/DKP, tanggal 08Mei 2019 yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Selatan. Adapun beberapa bantuan sarana prasaranan yang yang telah di berikan melalui anggaran DAK 2017 dan Dekon 2018 berupa Rompi, senter, gps, kamera, HT,teropong, perahu pokmaswas dan HP android, untuk untuk menunjang kegiatan pengawasan perairan daratan umum juga, menjaga dan mengawasi sumberdaya kelautan dan perikanan di perairan wilayahnya dari kerusakan biota perairan dan kesejahteraan masyarakat nelayan itu sendiri. Disamping juga melakukan akitifitas penangkapan ikan di perairan daratan umum di wilayah Kabupaten Wajo
- Selain itu kelompok juga kadang –kadang melakukan penangkapan ikan di perairan Danau Tempe dengan menggunakan kapal motor tempel 1 GT, dengan menggunakan alat tangkap jaring insang tetap. Jenis ikan hasil tangkap seperti ikan niila, ikan tawas, ikan gabus , ikan betok, ikan patin, ikan beloso, ikan betutu, ikan sidat, ikan tokke , ikan spusupu dan ikan mas dengan rata-rata hasil tangkapan 200-300 kg dengan menggunakan kapal motor tempel 1 GT dengan menggunakan alat tangkap jaring insang tetap didaratkan di TPI 45 hanya sebagai persinggahan langsung di bawa ke pasar atau pengumpul ikan sebagai kebutuhan keluarganya dan kesejahteraan masyarakat disekitarnya.

**5) Pembinaan Pokmaswas di Pulau Kapoposang Kabupaten Pangkep**

- Waktu pelaksanaan : 05 – 07 Agustus 2024
- Hasil yang dicapai :
- Pulau Kapoposang terletak di Kecamatan Liukang Tupabbiring pada 2 desa berbeda, yakni Desa Mattiro Ujung di sebelah barat, yang meliputi Pulau Pandangan dan Pulau Kapoposang; dan Desa Mattiro Matae di sebelah timur, yang meliputi Pulau Gondongbali, Pulau Tambakulu, Pulau Suranti, dan Pulau Pamanggangan
- Terdapat 2 (dua) Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) aktif yang berada diwilayah Perairan Kapoposang yaitu Pokmaswas Mattiro Ujung dengan jumlah anggota sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan Pokmaswas Cinta Bahari dengan jumlah anggota sebanyak 13 (tiga belas) orang
- Pada pertemuan ini Ketua Pokmaswas Mattiro ujung (Saparuddin) menyampaikan bahwa sudah tidak terdapat aktivitas yang merusak seperti destructive fishing di sekitar Pulau Kapoposang. Mereka juga aktif melakukan pengawasan disekitar wilayah tersebut dengan swadaya sendiri menggunakan bantuan sarana dan prasarana pengawasan yang telah diterima dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan .
- Sebagai Pokmaswas yang telah lama dikukuhkan, pengurus/anggota kelompok telah cukup memahami fungsi dan tugas Pokmaswas, namun kami tetap memberikan materi pembinaan yang dianggap penting untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- Untuk mendukung kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan telah memberikan bantuan melalui anggaran DAK berupa perahu Pokmaswas dan sarana prasarana pengawasan (rompi, GPS, HT, teropong, senter dan kamera digital).
- Pada pertemuan ini Ketua Pokmaswas Mattiro ujung (Saparuddin) menyampaikan bahwa sudah tidak terdapat aktivitas yang merusak seperti destructive fishing di sekitar Pulau Kapoposang.
- Mereka juga aktif melakukan pengawasan disekitar wilayah tersebut dengan swadaya sendiri menggunakan bantuan sarana dan prasarana pengawasan yang telah diterima dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

**6) Pembinaan Pokmaswas di Kabupaten Maros**

- Waktu pelaksanaan : 12 – 13 Agustus 2024
- Hasil yang dicapai :

- Berdasarkan data base Pokmaswas Provinsi tahun 2023 terdapat 9 (Sembilan) kelompok dan saat ini, ada dua kelompok yang dinyatakan sudah tidak aktif lagi oleh Bapak Awal Rahmat, yakni kelompok Sipakatau anggota kelompok tersebut beralih Ke kelompok Rajawali dan Kelompok Sejahtera dinyatakan sudah tidak aktif. Sehingga data base Pokmaswas di Kabupaten Maros berjumlah 7 (tujuh) kelompok Pokmaswas yang aktif yaitu :
  - 1) Pokmaswas Mina Bahari di Kelurahan Nisombalia Kecamtan Marusu
  - 2) Pokmaswas Minasa Baji di Kelurahan Bori Masunggu Kecamatan Maros Baru
  - 3) Pokmaswas Singa Laut di Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa
  - 4) Pokmaswas Kuda Laut di Desa Ampekale Kecamatan Bontoa
  - 5) Pokmaswas Samudra Bahari Jaya di Dusun Kuri Caddi Desa Nisombalia Kecamatan Marusu
  - 6) Pokmaswas Rajawali di Dusun Kalokko Desa Marannu Kecamatan Lau
  - 7) Pokmaswas Bahari di Desa Bonto Bahari Kecamatan Bontoa
- Pada Kesempatan ini Pokmaswas yang kami kunjungi adalah Pokmaswas Singa Laut yang bertempat di Desa Pajukukan Kecamatan Bontoa kabupaten Maros diketuai oleh Bapak Ilham yang memiliki anggota sejumlah 10 (sepuluh) orang yang mana semua anggota berprofesi sebagai nelayan tangkap. Sesuai data base bahwa kelompok pokmaswas Singa Laut mulai terbentuk pada Tahun 2020, Nomor Surat Keputusan Pembentukan 523/1/PGS/Pokmaswas/I/DKP Tanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Selatan. Adapun bantuan sarana dan prasarana yang telah diberikan melalui Anggaran APBD 2021 berupa 1 perahu pokmaswas untuk menunjang kegiatan pengawasan perairan, umum dan daratan, serta menjaga dan mengawasi sumberdaya kelautan dan perikanan di perairan wilayahnya dari kerusakan biota perairan dan kesejahteraan masyarakat nelayan itu sendiri.
- Yang menjadi permasalahan masyarakat pesisir Kabupaten Maros pada umumnya adalah penangkapan dengan menggunakan alat tangkap cantrang yang di lakukan oleh Nelayan dari Kabupaten Pangkep, dimana cara pengoperasiannya merusak ekosistem laut dan membahayakan sumber daya ikan. Nelayan Cantrang sering memasuki wilayah nelayan kecil dan tradisional yang dapat menimbulkan konflik.
- Terkait kelengkapan administrasi, Pokmaswas Singa Laut masih perlu melengkapi buku laporan kejadian/kegiatan, buku agenda surat yang belum dimiliki oleh pokmaswas ini. Namun penyuluh KKP akan mendampingi untuk pembuatan kelengkapan administrasi tersebut.

**7) Pembinaan Pokmaswas di Kabupaten Pangkep**

- Waktu pelaksanaan : 12 – 14 Agustus 2024
- Hasil yang dicapai :
- Sebagai bahan informasi secara umum wilayah Kabupaten Pangkep terdapat sekitar 115 pulau yang berada di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pulau-pulau tersebut sebagian besar berada di Kecamatan Liukang Tangaya, Liukang Tupabbiring dan Liukang Kalmas
- Pokmaswas yang kami datangi dan kunjungi kali ini adalah Pokmaswas Komando yang bealamat di Pulau Bontosua Desa Mattiro Bone Kec. Liukang Tuppabiiring yang di Ketua Bpk Ridwan, yang menyampaikan bahwa kelompok ini mulai terbentuk Tahun 2015 dengan No.SK 523/215/SK/Pokmaswas/V/DKP, tanggal 8 Mei 2019 yang beranggotakan 13 orang yang kesehariannya melakukan pengawasan di perairan laut dan rehabilitasi terumbu karang yang berada di perairan Kabupaten Pangkep. Dengan beberapa saran prasarana yang dimiliki seperti Perahu Pokmaswas, kamera, HP Android , Rompi dan GPS
- Pokmaswas Komando merupakan kelompok yang aktif melakukan pengawasan terutama mengawasi adanya kegiatan-kegiatan pelanggaran Illegal Fishing dan Destructive Fishing terhadap oknum/nelayan luar yang melakukan penangkapan ikan dan juga melewati wilayah penangkapannya.
- Pada kesempatan ini juga di berikan pembinaan Pokmaswas bagi Pokmaswas Komando agar terus melakukan/ mengawasi secara intens dan melaporkan semua kejadian/pelanggaran yang terjadi kepada CDK Kap. Pangkep terdekat serta melakukan pengadmnistrasian / pencatatan /agenda kejadian secara baik dan rapi bilamana menemukan pelanggaran ketika melakukan operasi pengawasan di wilayah perairan Kab.Pangkep
- Agar terus berperan aktif dalam kegiatan pengawasan SDKP dalam menjaga kelestarian kelautan dan perikanan di wilayah perairan khususnya di Perairan Pulau Bontosoa Kabupaten Pangkep.

**8) Pembinaan Pokmaswas di Pulau Podang – Podang di Kabupaten Pangkep**

- Waktu pelaksanaan : 19 – 21 Agustus 2024
- Hasil yang dicapai :
- Berdasarkan hasil diskusi, maka diputuskan untuk melakukan Pembinaan Pokmaswas di Pokmaswas Podang Lestari. Pokmaswas ini sudah terbentuk sejak tanggal 7 Juni 2024 melalui Keputusan Kepala Desa Mattiro Dolangeng Nomor 65 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas Podang Lestari tahun 2024, namun hingga saat awal kunjungan Pokmaswas ini belum di SK kan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulsel sebagai Instansi Pembina untuk Pokmaswas.

- Pembentukan Pokmaswas Podang Lestari di-Inisiasi oleh Fauna dan Flora Indonesia melalui Program ‘Securing Spermonde’s Seascape Through Community-Based Coral Reef Fisheries Management’. Program ini bertujuan untuk berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan pesisir dan laut di Kepulauan Spermonde dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya perbaikan terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam laut oleh masyarakat. Untuk itu dibentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Pulau Podang-podang. Sebagai pelaksana pengawasan di tingkat lapangan dan membantu pemerintah dalam upaya penyadaran hukum melalui sosialisasi dan pelaksanaan prinsip 3 M (Melihat/Mendengar, Mencatat, dan Melaporkan)
- Jumlah anggota Pokmaswas Podang Lestari sebanyak 16 orang, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota. Pada kesempatan ini, Tim Pengawas memberikan pembinaan melalui sosialisasi materi Pokmaswas berupa penjelasan singkat mengenai definisi Pokmaswas, Tugas Pokok dan Fungsi, Mekanisme Pelaporan dan Mekanisme Pemberian Bantuan.
- Ketua kelompok, Bapak Abbas menyampaikan bahwa perlunya dari pemerintah DKP Kab/Kota maupun DKP Provinsi Sulawesi Selatan serta stakeholder lainnya, untuk terus memberikan bimbingan/pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pokmaswas serta meningkatkan kemampuan/ keterampilan dalam melakukan pengawasan SDKP di wilayah perairan Kabupaten Pangkep.
- Pokmaswas Podang Lestari juga meminta pendampingan/bimbingan teknis terkait kegiatan pemantauan pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Pokmaswas berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh anggota Pokmaswas, agar kedepannya, dalam melakukan kegiatan pemantauan dan Pengawasan, Pokmaswas dapat berperan sesuai dengan kewenangannya.

### 9) Pembinaan Pokmaswas di Kabupaten Sinjai

- Waktu pelaksanaan : 21 – 23 Agustus 2024
- Hasil yang dicapai :
- Berdasarkan data base DKP Prov. tahun 2023 dan informasi yang disampaikan jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas yang ada di Kabupaten Sinjai sebanyak 7 Kelompok. Pokmaswas tersebar di beberapa lokasi antara lain di Pulau Sembilan dan Kecamatan Sinjai Timur dan masih aktif melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Kab.Sinjai
- Kegiatan Pembinaan Pokmaswas yang dikunjungi yakni Pokmaswas Adapi Nagau yang bertempat di Kecamatan Sinjai imur, Desa Panaikang, yang diketuai Bapak Umar, S.Pi. Kelompok ini sudah terbentuk tahun 2014 dan memiliki jumlah anggota sebanyak 8 orang

yang aktif melakukan pengawasan di perairan wilayah Kabupaten Sinjai.dan di Tahun 2016 melalui Dana Dekon telah menerima bantuan sapras berupa HP android.

- Kelompok Pokmaswas Kab. Sinjai menyampaikan bahwa masih adanya pelaku pembiusan ikan oleh nelayan luar kadang mereka melakukan aktifitasnya disiang hari maupun malam hari, sehingga dapat merusak ekosistem yang ada disekitarnya.

**10) Pembinaan Pokmaswas di Kabupaten Bulukumba**

- Hasil yang dicapai :
  - Berdasarkan hasil diskusi, maka diputuskan untuk melakukan Pembinaan Pokmaswas di Pokmaswas Kasuso Bersatu, ketua Mappiwali yang beralamat di Desa Darubiah Dusun Kasuso. Sesuai Data Base Pokmaswas ini sudah terbentuk sejak tahun 2022 dengan PenetapanPembentukan SK No.523/292/POKMASWAS/PGS/XII/DKP tanggal 12 Desember 2022 yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Sulawesi Selatan
  - Pada kesempatan ini, memberikan pembinaan melalui sosialisasi materi Pokmaswas berupa penjelasan singkat mengenai defenisi Pokmaswas, Tugas Pokok dan Fungsi, Mekanisme Pelaporan dan Mekanisme Pemberian Bantuan.
  - Merencanakan dan mengusulkan pembinaan kemampuan SDM anggota kepada Pembina Pokmaswas dengan berkoordinasi Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan sebagai perpanjangan tangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.
  - Ketua Pokmaswas Kasuso Bersatu Bapak Mappiwali menyampaikan bahwa belum optimal dilaksanakan dikarenakan sebagian besar nelayan belum memiliki sarana prasarana seperti kapal nelayan untuk kegiatan pengawasan pemantauan/mengawasi sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah perairan Kabupaten Bulukumba.
  - Kegiatan pembinaan pokmaswas agar kelompok ini sesuai dengan perundang undangan yang berlaku terkait tugas pokok pokmaswas dalam melakukan kegiatan pengawasan tiga hal mendasar yang penting yakni, melihat,mencatat,dan melaporkan bilamana menemukan adanya tindakan pelanggaran yang terjadi diperairan laut maupun perairan umum daratan serta tidak diperkenakan untuk melakukan penangkapan atau main hakim sendiri segerah melaporkan kepada Pengawas perikanan /PPNS/ aparat penegak Hukum atau Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten setempat
  - Kelompok Kasuso Bersatu mulai membentuk kelompok para nelayan atas inisiasi/kesadarannya serta kepedulian masyarakat untuk menjaga dan mengawasi sumberdaya kelautan dan perikanan di perairan wilayahnya dari kerusakan biota perairan dan kesejahteraan masyarakat nelayan itu sendiri. Disamping juga melakukan aktifitas penangkapan ikan di perairan Laut di wilayah Kabupaten Bulukumba.

- Ketua Kelompok Bapak Mappiwali, menyampikan perlunya dari pemerintah DKP Kab/Kota maupun DKP Prov untuk terus memberikan bimbingan/pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pokmaswas untuk meningkatkan kemampuan/ keterampilan dalam melakukan pengawasan SDKP di wilayah perairan Kabupaten Bulukumba
- Pokmaswas Kasuso Bersatu merupakan kelompok yang aktif melakukan pengawasan terutama mengawasi adanya kegiatan pelanggaran illegal Fishing dan Destrutive Fishing terhadap oknum/nelayan luar yang melakukan penangkapan ikan dan juga melewati wilayah penangkapannya.
- Masih perlu dilengkapi administrasi buku laporan kejadian/kegiatan. Buku agenda surat, buku tamu, dan jenis kegiatan pengawasan yang sudah dilakukan diagendakan dan dilakukan dilaporkan secara berkala ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

**11) Pembinaan Pokmaswas di Kabupaten Pinrang**

- Waktu pelaksanaan : 25 – 27 September 2024
- Hasil yang dicapai :
- Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Masyarakat Pengawas di Kabupaten Pinrang dilaksanakan di Kecamatan Mattirosompe. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 523/215/SK/PGS/POKMASWAS/DKP Tanggal 08 Mei 2019 Terdapat 2 (dua) pokmaswas aktif yang berada pada wilayah tersebut yaitu Pokmaswas Samaturue dengan jumlah anggota 24 (dua puluh empat) orang dan Pokmaswas Sinar Bahari dengan jumlah anggota 28 (dua puluh delapan).
- Sebagai Pokmaswas yang telah lama dikukuhkan, pengurus/anggota kelompok telah cukup memahami fungsi dan tugas Pokmaswas, namun kami tetap memberikan materi pembinaan yang dianggap penting untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

**12) Pembinaan Pokmaswas di Pulau Lanjukang Kota Makassar**

- Waktu pelaksanaan : 14 - 16 Oktober 2024
- Hasil yang dicapai :
- Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pokmaswas di Pulau Lanjukang dirangkaikan dengan kegiatan Jambore Pokmaswas tahun 2024. Jambore Pokmaswas itu sendiri merupakan inisiasi dari NGO bekerjasama dengan DKP Prov. Sulsel. Kegiatan Jambore Pokmaswas ini dirangkaikan pula dengan Hari jadi Sulsel yang ke 355 tahun. Peringatan hari jadi tersebut diisi dengan beberapa rangkaian kegiatan sebagai berikut :
  - ✓ Sharing Session (Succe Story dari anggota POKMASWAS)
  - ✓ Penyerahan 265 lembar Pas Kecil secara simbolis bagi nelayan Kota Makassar dan kabupaten Pangkep
  - ✓ Penyerahan secara simbolis asuransi nelayan sebanyak 355 buah

- ✓ Penyerahan rumah ikan secara simbolis untuk nelayan di Kabupaten Barru dan Kabupaten Selayar
  - ✓ Pengukuhan Pokmaswas Sipakatau Pulau Barrang Caddi Kota Makassar dan Pengukuhan Pokmaswas Podang Lestari Kabupaten Pangkep
  - ✓ Penyerahan bantuan Life jacket bagi anggota Pokmaswas
  - ✓ Penyerahan dan penanaman 355 bibit pohon untuk masyarakat pulau
  - ✓ Pelepas-liaran 355 tukik dan penurunan media reef star
  - Peringatan hari jadi dihadiri oleh Pj. Gubernur Sulsel yang diwakili oleh Kepala Dinas pariwisata sebagai Ketua Panitia Hari jadi SulSel. Disamping itu hadir Ketua Darma Wanita (ibu Sekretaris Daerah) Kepala Dinas Kelautan beserta pejabat administrator dan beberapa peserta dari stakeholder kelautan dan perikanan lainnya
- Adapun Pokmaswas yang terlibat dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :
- 1) Podang Lestari Pangkep
  - 2) Mattiroujung Pangkep
  - 3) Barakuda Takalar
  - 4) Ma'minasa Baji Takalar
  - 5) Balang Datu Takalar
  - 6) Jagad Samudera Takalar
  - 7) Komando Pangkep
  - 8) Harma Laut Selayar
  - 9) Sipakatau Makassar
  - 10) Barrang Lombo Makassar
  - 11) Bahari Nusantara Makassar
  - 12) Mutiara Laut Makassar
- Output pertemuan ini adalah pembahasan dan penyusunan keseragaman Lembar Pemantauan POKMASWAS untuk memantau, melindungi, dan melestarikan ekosistem pesisir, khususnya Mangrove, Padang Lamun, Terumbu Karang dan Sumberdaya Perikanan.

### **13) Pembinaan Pokmaswas di Kota Pare - Pare**

- Waktu pelaksanaan : 21 – 23 Oktober 2024
- Hasil yang dicapai :
- Mengawali Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Pokmaswas di kota Pare-pare diawali dengan berkoordinasi dengan Sekretaris Dinas Peternakan, Kelautan da Perikanan Kota Pare Pare drh. Nurdin, S.KH, dan Cabang Dinas Kelautan ajatappareng sebagai bahan informasi pada Tahun 2023 Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng telah melakukan pembentukan dan pembinaan pada 3 POKMASWAS yaitu Pokmaswas Madecenge,

Pokmaswas Pantai Bahari Coppo dan Pokmaswas Bolong Bojo untuk Di Kota Pare-pare sendiri terdapat pokmaswas aktif yang terbentuk dengan Nomor SK 523/157/II/DKP Tanggal 21 Februari 2023 dengan jumlah 10 orang anggota Pokmaswas yang terdiri dari tokoh masyarakat.

- Selain pendampingan dan pembinaan yang dilakukan, Pokmaswas Madecenge telah menerima Kartu Anggota Pokmaswas Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kondisi kelembagaan Pokmaswas Madecenge baik, dilihat dari kelengkapan administrasi pembukuan dan dokumentasi tersimpan dengan lengkap dan rapi.
- Pokmaswas Madecenge mengharapkan bantuan sarana dan prasarana pengawasan untuk menunjang tugas pengawasan yang mereka kerjakan.
- Pada kesempatan ini, Ketua Pokmaswas Garuda Bahari bapak Andi Mattewakkang menyampaikan masih sering terjadi aktifitas pengeboman dan pembiusan ikan oleh para oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan hasil tangkapan yang besar dimana mereka tidak menyadari dampak yang ditimbulkan seperti kerusakan ekosistem laut terumbu karang sebagai tempat rumah ikan/ berkembang biak serta semakin jauhnya nelayan menangkap ikan yang diakibatkan semakin berkurangnya komoditi ikan dan juga pada usaha budidaya seperti rumput laut dan tambak garam yang merupakan komoditi andalan Kab. Jeneponto.
- Olehnya itu disampaikan pula bahwa tugas utama pokmaswas 3 (tiga) M dalam melakukan pengawasan pengelolaan di wilayahnya yakni Melihat, Mencatat dan Melaporkan, bila menemukan adanya tindakan/ pelanggaran yang terjadi di perairan laut maupun perairan umum daratan serta tidak diperkenankan melakukan penangkapan dan main hakim sendiri , selanjutnya diserahkan kepada pengawas perikanan/PPNS / aparat penegak hukum.

#### 14) Pembinaan Pokmaswas di Kabupaten Takalar

- Waktu pelaksanaan : 31 Oktober – 01 November 2024
- Hasil yang dicapai :
- Pelaksanaan Pembinaan Pokmaswas di awali ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Takalar dengan melakukan Koordinasi dengan penyuluh Perikanan
- Berdasarkan hasil diskusi, maka diputuskan untuk melakukan Pembinaan Pokmaswas di Pokmaswas Jagad Samudera, ketua Masriadi yang beralamat di Desa Matrobaji Kecamatan Kepulauan Tanahkeke. Sesuai Data Base Pokmaswas ini sudah terbentuk sejak tahun 2022 dengan Penetapan Pembentukan SK No.523 / 157 / II /DKP tanggal

21 Februari 2023 yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Selatan

- Kegiatan pembinaan pokmaswas agar kelompok ini sesuai dengan perundang undangan yang berlaku terkait tugas pokok pokmaswas dalam melakukan kegiatan pengawasan tiga hal mendasar yang penting yakni, melihat, mencatat, dan melaporkan bilamana menemukan adanya tindakan pelanggaran yang terjadi diperairan laut maupun perairan umum daratan serta tidak diperkenakan untuk melakukan penangkapan atau main hakim sendiri segerah melaporkan kepada Pengawas perikanan /PPNS/ aparat penegak Hukum atau Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten setempat.
- Masih perlu dilengkapi administrasi buku laporan kejadian/kegiatan. Buku agenda surat, buku tamu, dan jenis kegiatan pengawasan yang sudah dilakukan diagendakan dan dilakukan dilaporkan secara berkala ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
- Agar terus berperan aktif dalam kegiatan pengawasan SDKP dalam menjaga kelestarian kelautan dan perikanan di wilayah perairan khususnya di Kabupaten Takalar

### **III. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Pokmaswas**

#### **1) Konsolidasi data Pokmaswas di Kab CDK Wilayah Ajatappareng**

- Waktu pelaksanaan : 06 – 08 Maret 2024
- Hasil yang dicapai :
- Pada wilayah kerja CDK Ajatappareng terdapat 5 (lima) kabupaten/Kota yaitu Barru, Pare-Pare, Sidrap, Pinrang dan Enrekang. Jumlah pokmaswas yang berada pada wilayah tersebut sejumlah 32 ( tiga puluh dua) kelompok dengan rincian :
  - ❖ Kabupaten Barru terdapat 7 Pokmaswas (7 aktif)
  - ❖ Kota Pare Pare terdapat 3 Pokmaswas (2 aktif, 1 tidak aktif)
  - ❖ Kabupaten Sidrap terdapat 2 Pokmaswas (2 aktif)
  - ❖ Kabupaten Pinrang terdapat 8 pokmaswas (8 aktif)
  - ❖ Kabupaten Enrekang terdapat 12 Pokmaswas (12 Aktif).
- Untuk Meningkatkan peran serta Pokmaswas dalam membantu pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kota Pare-pare diperlukan pendampingan dari Instansi terkait baik dari Dinas Perikanan Kab/Kota, CDK dan DKP Provinsi agar pokmaswas dapat melaksanakan tugas dan fungsinya

#### **2) Konsolidasi Data Pokmaswas di CDK Luwu Raya**

- Waktu pelaksanaan : 13 – 15 Maret 2024
- Hasil yang dicapai :
- Wilayah kerja Cabang Dinas Kelautan wilayah Luwu Raya meliputi Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Tana Toraja, dan Toraja Utara. Sampai pada bulan Maret 2024 terdapat 34 Pokmaswas dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Kota Palopo terdapat 6 Pokmaswas
  - ❖ Kabupaten Luwu Timur terdapat 9 Pokmaswas
  - ❖ Kabupaten Luwu Utara terdapat 13 Pokmaswas
  - ❖ Kabupaten Luwu terdapat 6 Pokmaswas.
- Dari total jumlah Pokmaswas yang ada, terdapat 6 Pokmaswas yang sama sekali belum memperoleh bantuan. Kedepannya, diharapkan peranan CDK Luwu Raya dalam memberikan pembinaan dan penumbuhan, terutama Pokmaswas yang tidak aktif, untuk memperoleh data dan informasi mengenai kendala yang dihadapi Pokmaswas tersebut sehingga mereka tidak dapat berperan aktif dalam melakukan kegiatan pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
  - Pada wilayah kerja CDK Luwu raya terdapat beberapa pokmaswas yang aktif melaporkan kegiatan pengawasan sehari hari sambil melakukan kegiatan penangkapan ikan. Akan tetapi hasil pengawasan mereka tersebut sulit terpantau akibat kurangnya pelaporan yang masuk. Hal ini terjadi karena kendala alat komunikasi serta akses yang sulit ke beberapa Pokmaswas di daerah Luwu Raya. Selain itu kemampuan pribadi Pokmaswas dalam penggunaan alat Komunikasi (Aplikasi Pelaporan dsb) masih terbilang rendah. Hal itu juga menjadi salah satu hambatan dalam melakukan pelaporan.
  - Pada tahun 2024 akan dibentuk Pokmaswas baru di kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara untuk membantu pengawasan sumberdaya perikanan disebabkan pada wilayah tersebut masih banyak yang menggunakan bahan pengawet kimia berbahaya dalam pengawetan ikan
  - Diharapkan dukungan dan peran aktif dari Dinas Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan khususnya CDK Wilayah Luwu Raya serta instansi terkait lainnya agar dapat melakukan upaya pembinaan dan pembentukan Pokmaswas baru agar dapat membantu kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berada di wilayah Kota Palopo, kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja dan Toraja Utara.

### 3) Konsolidasi Data Pokmaswas di CDK Wilayah Selatan

- Waktu pelaksanaan : 26 – 28 Maret 2024
  - Hasil yang dicapai :
- Wilayah kerja Cabang Dinas Kelautan wilayah Selatan meliputi kabupaten Bantaeng, Jeneponto dan Bulukumba. Sampai pada bulan Maret 2024 terdapat 32 Pokmaswas dengan rincian sebagai berikut :
    - ❖ Kabupaten Jeneponto terdapat 11 Pokmaswas (3 aktif, 8 tidak aktif)
    - ❖ Kabupaten Bantaeng terdapat 14 Pokmaswas (4 aktif, 10 tidak aktif)

- ❖ Kabupaten Bulukumba terdapat 7 Pokmaswas (4 aktif, 3 tidak aktif)
- Untuk mendukung kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan telah memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana melalui anggaran DAK dan APBD kepada Pokmaswas Lumba-Lumba Putih Kec.Kajang Desa Tana Jaya, Pokmaswas Batu Mesu Kec. Bontobahari Kelurahan Sapolohé dan Pokmaswas Katinroang Jangang-jangang Kec. Herlang Kelurahan Bonto Kamase berupa Perahu Pokmaswas dan perlengkapan Pokmaswas
- Untuk tahun 2024 juga akan diberikan bantuan sarana dan prasarana pengawasan berupa perahu motor pokmaswas melalui anggaran DAK kepada 2 (dua) Pokmaswas yaitu Pokmaswas Marina Indah Kelurahan Borong Loe Kecamatan Pajukukkang Kabupaten Bantaeng dan Pokmaswas Garuda Bahari Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto

#### 4) Konsolidasi Data Pokmaswas di CDK Pangkep

- Waktu pelaksanaan : 05 – 06 Agustus 2024
- Hasil yang dicapai :
- Kegiatan Konsolidasi Data Kelompok Masyarakat Pengawas pada wilayah Cabang Dinas Kepulauan Pangkep di lakukan di kantor Cabang Dinas Kelautan Pangkep. Secara umum, wilayah Kabupaten Pangkep Terdapat lebih dari setidaknya 115 pulau yang berada di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pulau-pulau tersebut sebagian besar berada di kecamatan Liukang Tupabbiring, Liukang Tangaya, dan Liukang Kalmas.
- Di kabupaten Pangkep, terdapat 42 Kelompok Masyarakat Pengawas yang telah dibentuk. Untuk 42 Pokmaswas yang berada di wilayah Kab. Pangkep, belum seluruhnya dapat terverifikasi keaktifan anggotanya. Hal ini terkendala oleh ketersediaan jaringan komunikasi dan akses ke pulau terluar yang sulit dijangkau sehingga sulit dilakukan pembinaan Pokmaswas
- Pada umumnya, ke 42 Pokmaswas tersebut adalah pokmaswas yang aktif dalam melakukan pengawasan. Mereka melakukan kegiatan pengawasan sehari hari sambil melakukan kegiatan penangkapan ikan. Akan tetapi hasil pengawasan mereka tersebut sulit terpantau akibat kurangnya pelaporan yang masuk. Hal ini terjadi karena kendala alat komunikasi serta akses yang sulit ke beberapa pulau di Kabupaten Pangkep. Selain itu kemampuan pribadi Pokmaswas dalam penggunaan alat Komunikasi (Aplikasi Pelaporan dsb) masih terbilang rendah. Hal tersebut juga menjadi salah satu hambatan dalam melakukan pelaporan

- Diharapkan Cabang Dinas Kelautan Kabupaten Pangkep terus melakukan pembinaan dan pendampingan khususnya bagi Pokmaswas aktif untuk memotivasi dan mempertahankan keaktifan Pokmaswas yang dibina. Pemberian bantuan juga sangat dibutuhkan untuk memberikan sarana dan prasarana sebagai motivasi bagi Pokmaswas untuk melakukan kegiatan pengawasan.

#### 4.3.5. CDK BOSOWASI

Cabang Dinas Kelautan Bosowasi yang berkedudukan di kabupaten Bone pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo dan Sinjai, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur berdasarkan wilayah kerja. Cabang Dinas Kelautan Bosowasi memiliki tugas sebagai berikut :

1. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur;
2. Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur;
3. Koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, dan;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Cabang Dinas Kelautan Bosowasi, DKP Sulawesi Selatan Tahun 2024 salah satunya adalah kegiatan Pengawasan SDKP di Wilayah Laut Flores . Kegiatan tersebut memprioritaskan penanganan pengendalian *illegal fishing* dan *destructive fishing*. Yaitu kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh masyarakat/nelayan atau pelaku usaha dengan cara merusak sumberdaya ikan dan lingkungannya seperti pemboman ikan, penggunaan racun sianida/pembiusan dan penggunaan alat tangkap terlarang seperti *trawl* (pukat harimau) serta eksplorasi habitat laut yang dilindungi. *Destruktive fishing* merupakan mal praktek dalam kegiatan penangkapan ikan yang secara yuridis merupakan perbuatan melawan hukum.

Secara umum, maraknya kegiatan *destructive fishing* disebabkan oleh beberapa faktor : (1) Rentang kendali dan luasnya wilayah pengawasan tidak seimbang dengan kemampuan tenaga pengawas yang ada saat ini, (2) Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan di laut, (3) Orientasi keuntungan jangka pendek secara maksimal, (4) Kemiskinan, (5) Posisi tawar industri lebih tinggi dari pada kepentingan pelestarian lingkungan, (6) Bahan handak dan zat kimia mudah di dapat dan tidak mengenal musim, (7) Kurangnya alternatif alat tangkap yang produktif tapi ramah lingkungan, (8) Rendahnya penguasaan iptek dalam pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan dan menguntungkan, (9) Masih lemahnya penegakan hukum, serta ( 10 ) Lemahnya koordinasi dan

komitmen antar aparat penegak hukum. Untuk itu diperlukan kebijakan dalam peran pengawasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di daerah kab/kota Sulawesi Selatan. Pada dasarnya, prinsip dan kebijakan pengawasan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan sampai sekarang ini masih tetap mengedepankan pembinaan dan pemberdayaan, sosialisasi penyadaran dan penegakan hukum/ refressif. Semakin tinggi kesadaran dan ketataan hukum para pelaku usaha maka penindakan/refressif akan menurun, dimana penindakan terhadap para pelaku yang melanggar ketentuan merupakan upaya terakhir dalam kebijakan pengawasan SDKP Pemprov Sulawesi Selatan.

Hal tersebut diatas, merupakan acuan bagi Cabang Dinas Kelautan Bosowasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel dalam menyusun program kegiatannya dalam kurun waktu tahun anggaran 2022. Hal ini juga merupakan realisasi dari tupoksi CDK Bosowasi, sebagaimana yang telah digariskan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Cabang Dinas Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan.

Dalam melaksanakan tupoksinya, CDK Bosowasi melakukan beberapa program/kegiatan antara lain :

➤ **Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil**

a. **Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil**

No	Kegiatan	Target Output Kegiatan	Realisasi output Kegiatan
1	Kegiatan : 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil.	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Prioritas) sebanyak 90 %	93,98 %
2	Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil.	Jumlah usaha perikanan tangkap yang mendapatkan Pengawasan IUU Fishing dan Pemantauan Kapal Perikanan sebanyak 250 dokumen kapal perikanan	266 dokumen kapal perikanan
3	Uraian : Patroli pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, CDK Bosowasi	2 kali	2 Kali

Kegiatan Patroli Pengawasan SDKP, CDK Bosowasi dalam tahun anggaran 2024 dilaksanakan sebanyak 2 kali guna mendukung terwujudnya Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan tangkap Sampai dengan 12 Mill, dengan uraian hasil pelaksanaan sebagai berikut :

- a) Patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Cdk Bosowasi di wilayah perairan Tanete Riattang Timur, Barebbo, Sibulue Mare, Tonra, Salomekko Kab. Bone

dan Perairan Pulau Sembilan Kab.Sinjai Tanggal 27-29 Mei 2024. Telah dilakukan penghentian dan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 12 unit. Terdapat 10 unit kapal perikanan taat aturan (antara lain memiliki dokumen perizinan yang lengkap sah dan masih berlaku) dan 2 unit kapal perikanan lainnya tidak membawa SIPI/BPKP yang asli diatas kapal sehingga diberikan teguran. Berdasarkan hitungan aplikasi google map, Luas wilayah patroli pengawasan selama 3 hari (15 Jam) mencapai sebesar 755,79 Km<sup>2</sup>, dengan jarak tempuh lintasan patroli pengawasan selama 3 hari (15 Jam) sejauh 415,19 Km, dengan Kecepatan Rata Rata Speedboat Kapal Pengawas Perikanan yaitu 27,60 Km/Jam.



**Patroli Pengawasan SDKP Di Perairan Tanete Riattang Timur, Barebbo, Sibulue, Mare, Tonra, Salomekko Kab Bone dan Perairan Pulau Sembilan Kab. Sinjai Tanggal 27-29 Mei 2024**

- b) Patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Cdk Bosowasi di wilayah Perairan pedalaman Tanete Riattang Timur, Awangpone, Tellu Siattinge (Lamuru) Kab Bone pada tangga 25-26 juni 2024. Telah dilakukan penghentian dan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 10 unit. Terdapat 8 unit kapal perikanan taat aturan, memiliki dokumen perizinan yang lengkap sah dan masih berlaku dan 2 unit kapal perikanan lainnya tidak memiliki/tidak membawa SIPI/BPKP yang asli diatas kapal sehingga diberikan teguran. Berdasarkan hitungan aplikasi google map, Luas wilayah patroli pengawasan selama 2 hari (10 Jam) mencapai sebesar 275,23 Km<sup>2</sup>, dengan jarak tempuh lintasan patroli pengawasan selama 2 hari (10 Jam) sejauh 128,83 Km, dengan Kecepatan Rata Rata Speedboat Kapal Pengawas Perikanan yaitu 25,60 Km/Jam.



**Patroli Pengawasan SDKP Di Perairan Tanete Riattang Timur, Awangpone, Tellu Siattinge (Lamuru) Kab Bone pada tangga 25-26 Juni 2024**

➤ **Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil Di Luar Minyak dan Gas Bumi**

a. **Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil**

➤ **Rehabilitasi Mangrove Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai**

Kegiatan rehabilitasi mangrove Di Desa Tongke- Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai yaitu kegiatan bibit mangrove sebanyak 38.000 batang dengan nilai nominal realisasi keuangan sebesar Rp. 196.992.000 atau presentase realisasi keuangan mencapai 99,69 %, dan realisasi fisik sebesar 100 %.



➤ **Rehabilitasi Mangrove Di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone.**

Kegiatan rehabilitasi mangrove Di Desa Mappatoba Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone yaitu kegiatan bibit mangrove sebanyak 38.000 batang dengan nilai nominal realisasi keuangan sebesar Rp. 197.552.000 atau presentase realisasi keuangan mencapai 99,97 %, dan realisasi fisik sebesar 100 %



➤ **Penanaman Mangrove di Desa Pattiyo Sompe Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone**

Kegiatan rehabilitasi mangrove Di Desa Pattiyo Sompe Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone yaitu kegiatan bibit mangrove sebanyak 38.000 batang dengan nilai nominal realisasi keuangan sebesar Rp. 197.040.000 atau presentase realisasi keuangan mencapai 99,71 %, dan realisasi fisik sebesar 100 %.



**b. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil**

➤ **Tambatan Perahu**

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil berupa tambatan perahu Di Desa Angkue Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone Pada tahun ini yang terealisasi baru berupa perencanaan Tambatan Perahu, sedangkan fisik (Pembangunan tambatan perahu) dan Pengawasannya direncanakan ke tahun 2025 sehingga yang terealisasi hanya kegiatan perencanaan pembangunan tambatan perahu dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 9.934.500 (keuangan 99,70 %). dan realisasi fisik (perencanaan) sebesar 100 % .

**TINDAK LANJUT REKOMENDASI ATAS PENGUKURAN CAPAIAN TRIWULAN TAHUN 2023**

■ **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Berdasarkan hasil pengukuran target yang telah direncanakan yang diikuti dengan capaian kinerja yang telah diperoleh pada setiap triwulan dalam kalender kegiatan Tahun Anggaran 2023, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pelaksanaan Sub Bagian Tata Usaha, CDK Bosowasi pada setiap triwulan telah mengalami peningkatan nilai secara kuantitatif dengan capaian nilai kinerja secara signifikan. Namun demikian secara kualitatif, tingkat perencanaan capaian kinerja rata-rata mencapai 93,95 %.

Oleh karena itu sebagai tindaklanjut rekomendasi atas hasil pengukuran capaian kinerja tersebut diatas pada tiap triwulan dalam tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

- 1) Perlu ditingkatkan koordinasi antar instansi provinsi dan instansi daerah
- 2) Perlu diadakan pelatihan dalam membangun skill para pegawai dalam hal pengadministrasian

■ **Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil**

Berdasarkan hasil pengukuran target yang telah direncanakan yang diikuti dengan capaian kinerja yang telah diperoleh pada setiap triwulan dalam kalender kegiatan Tahun Anggaran 2024, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pelaksanaan patroli pengawasan SDKP, CDK Bosowasi pada setiap triwulan telah mengalami peningkatan nilai secara kuantitatif dengan capaian nilai kinerja secara signifikan. Selanjutnya secara kualitatif, tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku telah mencapai pemenuhan target 90 % sebagai target prioritas, bahkan lebih. Capaian tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang diperoleh hingga akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar 93,98 %. Dimana target pemeriksaan kapal perikanan melalui patroli pengawasan dan pemantauan sebanyak 250 dokumen dengan realisasi sebanyak 266 dokumen kapal perikanan. Secara kuantitatif jumlah pelanggaran atau ketidak patuhan pelaku usaha sebesar 16 dokumen kapal perikanan atau sebesar 6,02 %, sehingga secara kualitatif tingkat kepatuhan pelaku usaha sangat signifikan (93,98%).

Oleh karena itu sebagai tindaklanjut rekomendasi atas hasil pengukuran capaian kinerja tersebut diatas pada tiap triwulan dalam tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

- 1) Perlu adanya dukungan organisasi secara prioritas untuk meningkatkan frekuensi/volume kegiatan sosialisasi, pembinaan dan penyadaran hukum secara konsisten dan berkelanjutan melalui kegiatan/sub kegiatan/ patroli pengawasan SDKP di wilayah Bosowasi.
- 2) Perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi, pembinaan dan penyadaran hukum pada beberapa sentra nelayan perikanan tangkap, pelabuhan rakyat, pelabuhan tangkahan di pelosok melalui pemantauan kapal perikanan secara intensif.
- 3) Penguatan kelembagaan pengawasan berbasis masyarakat di daerah melalui kunjungan pembinaan masyarakat pengawas (Pokmaswas) di wilayah kerja Bosowasi.
- 4) Perlu adanya penegakan hukum terhadap para pelaku destructive fishing untuk memberikan efek jerah kepada mereka.

#### ■ **Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil**

Berdasarkan hasil pengukuran target yang telah direncanakan yang diikuti dengan capaian kinerja yang telah diperoleh pada setiap triwulan dalam kalender kegiatan Tahun Anggaran 2024, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pelaksanaan Seksi Pengelolaan Ruang laut CDK Bosowasi pada setiap triwulan telah mengalami peningkatan nilai secara kuantitatif dengan capaian nilai kinerja secara signifikan.

Oleh karena itu sebagai tindaklanjut rekomendasi atas hasil pengukuran capaian kinerja tersebut diatas pada tiap triwulan dalam tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

- 1) Perlu ditingkatkan koordinasi dengan aparat perikanan daerah dengan melakukan pemantauan terhadap tingkat pertumbuhan rehabilitasi mangrove pada setiap area pertanaman tahun 2024 dan 2023
- 2) Perlu adanya pentulaman kembali pada area pertanaman yang mengalami penurunan titik tumbuh akibat tekanan arus dan gelombang pada setiap musim panca robah.
- 3) Perlu meningkatkan pembinaan kelompok masyarakat pesisir pelestarian lingkungan di setiap lokasi daerah rehabilitasi mangrove.

#### **4.3.6. CDK MAMMINASATA**

Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan yang lestari dan berkelanjutan untuk mensejahterakan masyarakat nelayan, petani ikan dan pengolah ikan di Provinsi Sulawesi Selatan tidak dapat dipisahkan dari pemberdayaan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan perikanan. Oleh karena itu perlu perhatian terhadap kebijakan pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

Kebijakan pengawasan dan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan dilaksanakan secara teratur, sistematis dan komprehensif yang ditempuh dengan mengacu kepada Rencana Strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 - 2028 serta Rencana Strategi *Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan*

Pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2024 – 2028 yang pelaksanaannya dilakukan selama 5 tahunan.

Mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018, tentang organisasi dan tata kerja Cabang Dinas Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, dimana salah satu Cabang Dinas Kelautan yang dibentuk adalah Cabang Dinas Kelautan Mamminasata yang berkedudukan di Kab. Gowa dengan wilayah pelayanan Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar. Dengan ditetapkannya CDK Mamminasata sebagai organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal urusan pemerintah di bidang kelautan, maka pada tahun anggaran 2024 Cabang Dinas Kelautan Mamminasata dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.374.289.784,-untuk mendukung beberapa program diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 453.002.784,-
2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 771.801.000,-
3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan teralokasikan anggaran sebesar Rp. 129.565.000,-

Adapun program yang dilaksanakan oleh CDK Mamminasata selama tahun 2024 antara lain :

➤ **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

■ **Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil**

1. **Patroli Pengawasan SDKP**

Aktifitas illegal, Unregulated dan Unreported ( IUU) Fishing di Perairan wilayah Mamminasata masih cukup banyak dijumpai terutama alat tangkap Cantrang serta pengoperasian alat tangkap illegal namun tanpa dilengkapi dokumen perizinan. Hal ini menjadikan tugas kita bersama untuk menanggulangi atau paling tidak meminimalkan aktifitas yang bertentangan dengan aturan tersebut.

Kegiatan Patroli Pengawasan IUU Fishing CDK Maminasata dan Fasilitasi NIB dan Penataan Pelaku Usaha merupakan salah satu kegiatan pokok pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan, Cabang Dinas Kelautan Mamminasata yang bertujuan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan dokumen perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan tangkap tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2023 tentang Jalur Penempatan alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

Patroli Pengawasan IUU Fishing bertujuan untuk pengawasan, pembinaan dan pemeriksaan terhadap dokumen perizinan kapal perikanan yang wajib dimiliki oleh kapal-kapal penangkap ikan seperti : Pas Besar/Kecil, Surat Ukur, SIUP, SIPI/SIKPI, TDKP, SLO dan SPB serta sosialisasi PERMEN-KP No.36 Tahun 2023 tentang Jalur Penempatan alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Kegiatan Patroli Pengawasan IUU Fishing CDK Maminasata tahun anggaran 2024 dilaksanakan di wilayah perairan Makassar, Takalar dan Maros sampai bulan Desember dengan Jumlah kapal yang diperiksa sebanyak 104 kapal dimana 18 kapal melakukan pelanggaran berupa dokumen SIUP/SIPI yang habis masa berlakunya dan sedang dalam proses masa pengurusan.



## **2. Fasilitasi NIB dan Pendataan Pelaku Usaha**

Kegiatan Fasilitasi NIB dan Pendataan Pelaku Usaha berfungsi sebagai tempat fasilitasi nelayan dalam pengurusan dokumen tanda pengenal pelaku usaha, baik perorangan dan non perorangan sebagai loyalitas awal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dalam hal kegiatan usaha penangkapan ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik.

Bagi Perorangan sebelum mendaftar NIB pelaku usaha harus menyiapkan beberapa syarat dokumen antara lain : Nomor Induk Kependudukan ( NIK) sesuai KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP), Alamat email yang aktif, Nomor telepon yang aktif.

Pengajuan izin usaha di masa lalu dikenal lama dan rumit, kini pendaftaran NIB melalui OSS memudahkan pengajuan izin sehingga prosesnya semakin cepat dan sangat mudah dalam memyiimpan data perizinan dalam satu identitas. Jumlah dokumen NIB yang terfasilitasi di Wilayah CDK Mamminasata sebanyak 84 Kapal diantaranya Kab. Takalar 42 kapal, Kab. Gowa 3 Kapal, Kab. Maros 29 Kapal dan Kota Makassar 10 Kapal.



➤ **PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

**1) Kegiatan Rehabilitasi Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Visi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Sulawesi Selatan adalah "Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Melalui Pendekatan Kemandirian Lokal untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan Tahun 2028". Visi tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang tangguh dan mandiri, akan tercipta jika pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dan dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip pengelolaan.

Pengelolaan yang baik akan semakin meningkatkan produktivitas perairan, efektivitas pemanfaatan wilayah perairan dan kelestarian ekosistem, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat, kemandirian dan kesejahteraan.

Luas wilayah pesisir dan laut Sulawesi Selatan kurang lebih 94.399,85 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai sebesar 1.993,66 km serta memiliki pulau-pulau kecil sekitar 313 pulau. Khusus untuk wilayah Mamminasata total jumlah pulau 21 yang terbagi 9 pulau di kabupaten Takalar dan 12 pulau di Kota Makassar. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Selatan memiliki ekosistem yang cukup lengkap seperti ekosistem mangrove, dimana terdapat 19 spesies mangrove dengan luas sekitar 77.135 ha. Biomass hutan mangrove di wilayah Sulawesi diperkirakan berkisar 122 -245 ton/ha.

UU No. 27 Tahun 2007 Jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki wilayah pesisir wajib untuk menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) yang kemudian dilegalkan kedalam Peraturan Daerah (Perda). Penyusunan rencana Zonasi WP-3-K Provinsi merupakan salah satu bentuk pendekatan untuk mengintegrasikan sektor yang berkepentingan di wilayah pesisir melalui pengalokasian ruang WP-3-K untuk aktivitas/sektor tertentu berdasarkan daya dukung dan kesesuaian peruntukannya.

Secara normatif, kekayaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara. Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki hak untuk mengelola kawasan perairan yurisdiksi hingga batas 12 mil dari garis pantai. Terkait dengan pemanfaatannya, diperlukan suatu acuan dalam kerangka pengelolaan sumberdaya alam kelautan dan perikanan, yang mengatur atau mengarahkan kegiatan pengelolaan sumberdaya dalam konteks keruangan (spasial) untuk

menjaga keseimbangan antara aspek konservasi dan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan (*sustainable*).

- Kegiatan ini merupakan upaya pengembangan terhadap pemanfaatan SDKP secara langsung di laut di Wilayah Perairan Mamminasata untuk pengelolaan konservasi secara berkelanjutan.
- Diharapkan dengan kegiatan tersebut dapat menekan jumlah kerusakan pada wilayah pesisir

Adapun berdasarkan data Balai PDASRHL, data luas potensi mangrove di Sulawesi Selatan, yaitu 123.594,71 Ha dan luas eksisting mangrove wilayah Sulawesi Selatan seluas 12.256,90 Ha. Wilayah pesisir Sulawesi Selatan dihuni oleh 19 spesies mangrove dengan cakupan vegetasi cukup luas. Propinsi Sulawesi Selatan memiliki areal hutan mangrove yang terluas di Pulau Sulawesi. Selain itu, pada wilayah yang berbatasan dengan laut, hutan mangrove didominasi oleh *Avicennia* dan *Sonneratia*. Di bagian belakang zona tersebut ditemui *Bruguiera* dan *Rhizophora*. Sedang pada wilayah-wilayah yang berbatasan dengan daratan ditemukan pandan, *Ficus*, *Nypa* dan biota lain yang menjadi ciri peralihan antara wilayah laut dan daratan. Biomas hutan mangrove di wilayah Sulawesi diperkirakan berkisar 122 – 245 ton/ha, walaupun dengan laju pembukaan lahan tambak dan pemanfaatan kayu bakau sebagai bahan bakar dan lainnya dewasa ini diyakini tingkat penutupannya sudah jauh berkurang. Selain jenis-jenis ikan pemakan detritus, mangrove juga diketahui dihuni oleh kekerangan, udang, kepiting serta beberapa jenis burung dan fauna seperti tikus, babi dan kelelawar. Di wilayah mamminasata luas hutan mangrove untuk 3 daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Kabupaten	Luas Mangrove	Kondisi(Ha)		
		Baik	Rusak	Rusak Berat
Makassar	236.2	62.2	131	43
Maros	746.3	298.3	-	448
Takalar	5.611.9	826.9	1316	3469

Sumber : Laporan Tahunan CDK Mamminasata Tahun 2024

#### a) Belanja Penanaman Mangrove

- Penanaman Mangrove 38.000 Batang di Lantebung Kota Makassar dengan alokasi anggaran sebesar Rp.197.600.000, dengan realisasi fisik sampai bulan desember sudah mencapai 99.86% (Rp. 197.320.000,-) dengan realisasi keuangan sebesar 99.86% (Rp. 197.320.000,-)



- Penanaman Mangrove 38.000 Batang di Kabupaten Maros dengan alokasi anggaran sebesar Rp 197.600.000,- dengan realisasi Fisik sampai bulan Desember sudah mencapai 99.69% (Rp. 196.980.600) dengan realisasi keuangan sebesar 99.69% (Rp.196.980.600,-).



- Penanaman Mangrove 38.000 Batang di Kabupaten Takalar dengan alokasi anggaran sebesar Rp 197.600.000, dengan realisasi Fisik sampai bulan Desember sudah mencapai 99.69% (Rp.196.980.600,-) dengan realisasi keuangan sebesar 99.69% ( Rp. 196.980.600,-).



## PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

### 1. PERMASALAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- a Pelaksanaan tugas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabang Dinas Kelautan Mamminasata akan semakin baik dengan tambahan armada kapal pengawas bagi pokmaswas yang tersebar di beberapa lokasi. Namaun sampai saat ini proses pengadaan kapal pengawas mulai dari tahapan perencanaan, pembangunan fisik kapal dan pengawasan belum berjalan. Proses Perencanaan Kapal pengawas, saat ini baru dalam tahap proses pengadaan barang dan jasa. Hal inilah yang mempengaruhi sehingga pekerjaan fisik kapal pengawas dan dokumen pengawasannya belum dapat dilaksanakan.
- b Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di wilayah Mamminasata belum dapat dilakukan pembinaan secara maksimal. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran biaya operasional untuk melakukan kunjungan pembinaan terhadap Kelompok Pengawas di wilayah pesisir atau pulau, khususnya di Kota Makassar, Takalar dan Maros.
- c Masih rendahnya kemampuan SDM Pokmaswas dalam pelaksanaan pengawasan berbasis masyarakat, baik secara individual (keanggotaan) maupun secara berkelompok (kelembagaan).

- d. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan di daerah, serta minimnya ketaatan dan kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen perizinan, termasuk surat pencatatan atau Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) didaerah.

## 2. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

- a. Cabang Dinas Kelautan Mamminasata terus menerus melakukan pembinaan, sosialisasi dan penyadaran terhadap masyarakat nelayan di Wilayah Mamminasata guna menyamakan persepsi terhadap aturan penggunaan alat tangkap dan jalur penangkapan juga dalam upaya mendukung sumber daya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan.
- b. Cabang Dinas Kelautan Mamminasata aktif melakukan koordinasi penegakan hukum dengan aparat Polairud Polda Sulsel guna koordinasi dan kerjasama dalam penegakkan aturan pemanfaatan alat tangkap dan pasal pidana tentang aktivitas pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan.
- c. Cabang Dinas Kelautan Mamminasata terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian sebagai mitra dan Pembina Pokmaswas agar dapat merepon dengan baik laporan kejadian yang disampaikan masyarakat.
- d. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Mamminasata terus berupaya melakukan pengawasan untuk meminimalisir tindak *andestructive fishing* di seluruh perairan pedalaman pesisir wilayah Mamminasata secara bertahap dengan menggunakan sarana Pokmaswas yang ada.
- e. Pembinaan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pengawas diprioritaskan terhadap Pokmaswas wilayah pesisir yang memiliki daerah rawan *destructive fishing*, dan/atau Pokmaswas yang memiliki partisipasi aktif melakukan pengawasan atau pelaporan kepada aparat pengawas perikanan.
- f. Cabang Dinas Kelautan Mamminasata terus menerus melakukan pembinaan dan motivasi kepada masyarakat pengawas dan masyarakat pelaku usaha lainnya di setiap waktu dan tempat termasuk di sentra-sentra nelayan, pelabuhan/PPI/TPI, di laut dan diatas kapal perikanan agar selalu taat hukum khususnya untuk memiliki dokumen perizinan usaha/BPKP.
- g. Penanggung Jawab Kegiatan harus lebih proaktif dalam mengawal proses pengadaan barang / jasa agar proses pengadilan kapal pengawas dapat terselesaikan dengan baik.

### 4.3.7 CDK Ajatappareng

Cabang Dinas Kelautan dibentuk berdasarkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 106 tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Gubernur Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Cabang Dinas Kelautan ini dibentuk dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik urusan pemerintahan bidang kelautan dan

perikanan. Di dalam pembentukannya untuk daerah Sulawesi Selatan dibentuk 5 Cabang Dinas Kelautan. Salah satu diantaranya adalah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Ajatappareng yang membawahi 5 (lima) kabupaten/Kota Yaitu : Kabupaten Barru, Kota Pare Pare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Enrekang dengan berkedudukan di Kota Pare Pare. Adapun Fungsi dan tugas Cabang Dinas Kelautan diatur dalam Pergub no. 5 Tahun 2018. Untuk mendukung pencapaian target maka setiap Cabang Dinas Kelautan diberikan tugas yang intinya sebagai pengelola dan pengawasan perairan.

Sejak berdirinya pada tahun 2018 hingga sekarang, Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng Pembinaan telah berfungsi sebagai Cabang Dinas yang berwenang memberikan pembinaan, pengelolaan dan pengawasan perairan di 5 (lima) kabupaten/kota sebagai wilayah kerjanya. Adapun wilayah kerja Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng adalah Kabupaten Barru, Kota Pare Pare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Enrekang.

Dukungan dana dari APBD (*kinerja*) Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 melalui program (1) Program Pengawasan, Penataan dan Rehabilitasi Pesisir Laut, (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

➤ **APBD**

**1. Program Pengawasan, Penataan dan Rehabilitasi Pesisir Laut**

**a. Patroli Wilayah Ajatappareng**

Pelaksanaan kegiatan patroli CDK Ajatappareng adalah pengawasan sumberdaya kelautan perikanan untuk mengawal tertib pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang kelautan dan perikanan oleh semua pelaku usaha perikanan.

Kegiatan penangkapan ikan secara tidak bertanggung jawab bukan hanya terbatas pada kegiatan penangkapan secara illegal (Illegal Fishing) tetapi juga terdapat kegiatan penangkapan ikan dengan cara cara yang merusak (Destructive Fishing). Kegiatan ini dapat menyebabkan kerugian yang besar terutama terhadap kelestarian ekosistem perairan yang ada. Untuk itu Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan melalui Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng yang membawahi lima kabupaten sebagai wilayah pembinaannya yaitu Kab. Barru, Kota pare Pare, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap dan Kab. Enrekang untuk menjaga laut dan perairan umum dari Destructive Fishing.



**b. Pengadaan Perahu Pokmaswas Pantai Bahari Coppo**

Kelompok Masyarakat Pengawas merupakan salah satu faktor penting yang menunjang keberhasilan pengawasan sumberdaya kelautan. Maka diperlukan program-program pembinaan kelompok sehingga dapat menunjang tugas dan fungsi POKMASWAS dalam menjalankan tugasnya. Program-program pembinaan POKMASWAS dapat berupa penyuluhan pembinaan administrasi kelembagaan kelompok, digitalisasi kegiatan kelompok, memberikan media penyuluhan dan edukasi pembinaan selain itu dilakukan bantuan sarana dan prasarana pengawasan seperti perahu pokmaswas beserta kelengkapannya. Maka dari itu tahun 2024 CDK Ajatappareng melakukan pemberian bantuan sarana dan prasarana pokmaswas berupa perahu pokmaswas serta kelengkapannya kepada Pokmaswas Pantai Bahari Coppo Kabupaten Barru namun tahun ini hanya dianggarkan dokumen perencanaan untuk dilaksanakan fisik dan pengawasan tahun 2025.



**c. Penanaman Mangrove**

Keberadaan ekosistem mangrove terbilang cukup penting khususnya bagi kawasan pesisir, baik sebagai benteng pertahanan terhadap resiko bencana maupun sebagai mata pencaharian alternatif melalui pengembangan pariwisata. Tanaman mangrove berfungsi utama sebagai pencegah abrasi dan erosi (pengikisan tanah) di kawasan pantai. Ekosistem mangrove juga menjadi tempat hidup biota laut dan satwa satwa di sekitar area. Pada tahun 2024 pelaksanaan kegiatan penanaman mangrove dilakukan yaitu Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru sebanyak 28.435 Batang.

Output dari kegiatan ini yaitu masyarakat Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dapat merasakan manfaatnya mencegah abrasi dan erosi (pengikisan tanah) di kawasan pantai, serta merehabilitasi ekosistem pesisir sehingga hasil tangkapan nelayan dapat meningkat.



**d. Perencanaan Tambatan Perahu**

Tambatan Perahu adalah tempat untuk mengikat/menambat perahu-perahu saat berlabuh/parker sebelum dan setelah bongkar muat muatan (barang dan orang, dll). Upaya percepatan pengembangan sarana angkutan/transportasi laut diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan di wilayah Kabupaten Barru dan mendorong perkembangan wilayah-wilayah yang relatif masih kurang berkembang dan memacu wilayah yang berkembang terhadap wilayah yang belum berkembang dan untuk menstimulasi dan mengintegrasikan perkembangan antar pulau di kabupaten Barru maupun antar pulau dalam provinsi sebagai langkah Pemerintah Kabupaten Barru mengusulkan Proyek Pembangunan Tambatan Perahu melalui program bantuan pembangunan tambatan perahu. Untuk membangun tambatan perahu perlu ada tahap awal berupa perencanaan teknis. Pada dasarnya keuntungan dilakukannya Perencanaan teknis Pembangunan Tambatan Perahu adalah antisipasi risiko kontraktor karena kesalahan pekerjaan yang umum terjadi, mengurangi risiko-risiko yang mungkin terjadi pada tahap pembangunan tambatan perahu, menghindari kerugian dan bahkan menambah keuntungan, meningkatkan mutu pelaksanaan dan kehandalan bangunan yang dihasilkan sesuai perencanaan untuk meningkatkan mutu produk dan kehandalannya Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong dan mewujudkan karya yang sesuai dengan kepentingan dan tujuan kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pada TA. 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan melalui CDK Ajatappareng dan dibiayai dari dana APBD akan melaksanakan perencanaan teknis pembangunan tambatan perahu di Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.



**e. Sosialisasi CPCL**

Kegiatan Sosialisasi dan Identifikasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Terumbu Buatan Inovasi Rumah Ikan telah dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2024 bertempat di Auditorium Bj. Habibie Rumah Jabatan Walikota Parepare di Kota Parepare. Pelaksanaan Sosialisasi dan Identifikasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Terumbu Buatan Inovasi Rumah Ikan dihadiri oleh peserta sebanyak 220 orang peserta dari

Kelompok Nelayan Se Ajatappareng, Bidang Pesisir dan Pengelolaan Ruang Laut DKP Sulsel, Bidang Perikanan Tangkap DKP Sulsel, Bidang Pengawasan DKP Sulsel, Dinas Perikanan Se Ajatappareng, Pelaku Usaha Perikanan Se Ajatappareng, penyuluh perikanan, serta tokoh masyarakat.

Acara Sosialisasi dan Identifikasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Terumbu Buatan Inovasi Rumah Ikan dilakukan dengan metode tatap muka, paparan para narasumber kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dengan para peserta dengan durasi waktu pembelajaran di kelas bersama narasumber selama 4 jam mata pelajaran.

Upaya mewujudkan dan mendukung program prioritas pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Pengentasan Kemiskinan ekstrem dengan melakukan pembangunan yang bersifat terpadu pada kawasan pesisir, melakukan kerjasama dengan semua pihak khususnya melibatkan nelayan dalam pembangunan kawasan pesisir serta upaya mendukung perbaikan kualitas sektor perikanan



**f. Papan Bicara**

Papan bicara/Informasi adalah informasi pemerintah kepada seluruh stakeholders tentang himbauan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara lestari dan berkelanjutan, larangan menebang mangrove dengan ancaman pidana, larangan membuang sampah di laut, serta informasi penetapan zona konservasi.

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk Sosialisasi dengan tujuan memberikan pemahaman dan penyadaran kepada seluruh stakeholder dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perikanan.

Adapun target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan barang adalah: Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan teknis para stakeholder dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara lestari dan berkelanjutan, serta Terwujudnya kesadaran dan ketaatan para stakeholder dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dibidang kelautan dan perikanan.

➤ APBN

a. Perencanaan Pembangunan Steiger Kapal Pengawas Perikanan

Wilayah kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Ajatappareng meliputi Selat Makassar yang secara administrasi terdiri dari Kabupaten Barru, Kota Parepare, Kab. Pinrang. Dimana saat ini masih adanya terjadi praktik *illegal fishing* dan *destructive fishing* yang telah disebutkan diatas. Olehnya itu dibutuhkan sosialisasi yang massif dalam rangka membangun kesadaran masyarakat guna bersama-sama membantu mengurangi *praktek illegal dan destruktif fishing* yang saat ini masih tengah berlangsung.

Berkenaan dengan kompleksnya permasalahan tersebut diatas dan dengan luasnya wilayah kerja pengawasan yang rawan dengan berbagai pelanggaran dan kejahatan dibidang perikanan, maka diperlukan adanya Garasi (*Steiger*) yang diharapkan dapat menjadi tempat berlabuhnya armada kapal pengawas perikanan. Dimana keberadaan Garasi (*Steiger*) kapal pengawas tersebut diharapkan dapat meminimalisasi kerusakan kapal akibat pengaruh lingkungan.

Oleh karena itu, pada TA 2024, kami memiliki Steiger adalah Garasi Kapal yang dirancang khusus sebagai tempat berlabuhnya kapal pengawas perikanan yang digunakan untuk berbagai kegiatan patroli pengawasan SDKP di laut.

Output dari kegiatan ini yaitu kapal pengawas perikanan ajatappareng memiliki dokumen perencanaan untuk dibangun steiger (Garasi) untuk menjaga dan melestarikan sumberdaya perairan terutama memberantas tindakan *illegal fishing* dan *destructive fishing*

**TINDAKLANJUT REKOMENDASI ATAS PENGUKURAN CAPAIAN TRIWULAN TAHUN 2024**

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan telah menerbitkan Nota Dinas tentang Rekomendasi Hasil Monev Triwulan tahun 2024, maka kami dari Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng menindaklanjuti hasil rekomendasi atas pengukuran capaian triwulan tahun 2024 sebagai berikut :

1. Sesuai hasil rekomendasi bahwa setiap unit kerja harus memperhatikan realisasi keuangan dan realisasi fisik, Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng telah melakukan tindaklanjut atas rekomendasi diatas terbukti dengan tercapainya realiasi keuangan kami hingga akhir tahun sebesar 74,25% sedangkan realiasi fisik mencapai 85,29%. Realisasi fisik hanya mencapai 85,29% dikarenakan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan karena terkendala SPD yang tidak terbit dan waktu pelaksanaan kegiatan anggaran perubahan tidak mencukupi untuk dilaksanakan sedangkan realisasi keuangan mencapai 74,25% karena masih ada kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum

terbayarkan. dapat menandakan bahwa kami telah melakukan tindaklanjut hasil rekomendasi tersebut.

2. Sesuai rekomendasi bahwa setiap unit kerja harus secara intens memantau dan mengevaluasi kegiatan yang terindikasi terlambat dari jadwal kontrak untuk meminimalisir resiko, Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng telah melakukan tindaklanjut atas rekomendasi diatas terbukti dengan realaliasasi fisik mencapai 85,29%, hal ini tidak mencapai 100% dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena terkendala SPD dan waktu pelaksanaan kegiatan anggaran perubahan tidak mencukupi untuk dilaksanakan.
3. Sesuai hasil rekomendasi bahwa setiap unit kerja pelaksanaan kontrak jangan ada yang terlambat dan bergeser ditahun depan sehingga pembayarannya lewat tahun depan, Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng telah melakukan tindaklanjut atas rekomendasi diatas dengan capaian realisasi keuangan mencapai 74,25% dan capaian realiasasi fisik mencapai 85,29%, sehingga tahun 2024 CDK Ajatappareng telah melakukan kegiatan secara menyeluruh, adapun kegiatan yang tidak terlaksanakan karena terkendala SPD yang tidak terbit dan waktu pelaksanaan pada anggaran perubahan tidak mencukupi untuk dilaksanakan.
4. Sesuai hasil rekomendasi bahwa untuk persiapan menghadapi penyusunan kegiatan 2024, agar unit kerja membuat juknis pelaksanaan kegiatan dan pengadaan, Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng telah melakukan koordinasi internal dalam pembuatan juknis Ajatppareng telah melakukan koordinasi internal dalam pembuatan juknis.

### PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

Pada tahun 2024 Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang hadir dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sebagai pencapaian target dalam menangani illegal fishing, konservasi, dan pengelolaan perairan lainnya.

#### 1.1. PERMASALAHAN

Masalah yang dihadapi Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada tahun 2024 sebagai berikut :

- 1) Keberadaan Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng yang belum menghasilkan kinerja yang optimal terhadap permasalahan utamanya pengelolaan dan pengawasan SDKP karena belum sepenuhnya sarana dan prasarana tersedia di lapangan serta Kapal Pengawas Perikanan (KM. Mangiwang 02) seperti bahan bakar yang kurang optimal diberikan untuk melakukan patroli usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil.

- 2) Kemampuan SDM yang masih perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga lebih profesional dan permanen.
- 3) Kesadaran masyarakat perikanan yang masih kurang untuk memanfaatkan keberadaan Cabang Dinas Kelautan sebagai salah satu Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang siap selalu memberikan pembinaan tentang pengelolaan dan pengawasan di Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 4) Masih rendahnya koordinasi dan konsolidasi terhadap lembaga/masyarakat terkait tentang pengelolaan dan pengawasan SDKP karena masih terbatasnya sarana komunikasi dan transportasi.
- 5) Kasus IUU fishing yang ditangani penggunaan alat tangkap yang merusak (Destructive Fishing) seperti bom, bahan kimia (bius), illegal fishing tidak memiliki dokumen kapal (SPB, SIPI, SIUP).

## 1.2 UPAYA PEMECAHAN

Berdasarkan beberapa masalah diatas Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng melakukan upaya pemecahan masalah sebagai berikut :

- 1) Dengan adanya keterbatasan bahan bakar pada kapal pengawas perikanan (KM. Mangiwang 02), Maka kami melakukan pengawasan di sentra-sentra perikanan terlebih khusus di pelabuhan perikanan yang ada di wilayah kerja kami untuk memastikan ikan hasil tangkapan yang didaratkan bukan dari hasil tindakan IUU fishing selain itu kami juga melakukan pengecekan dokumen-dokumen kapal penangkap ikan untuk memastikan ijin-ijin/dokumen kapal perikanan lengkap sebelum berlayar.
- 2) Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng saat ini masih memiliki 12 Orang pegawai diantaranya 7 Orang ASN dan 5 Orang Tenaga Kontrak sedangkan luas cakupan wilayah Ajatappareng meliputi 5 Kabupaten/Kota, Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng telah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilakukan penambahan pegawai dan memberikan program pelatihan kepada pegawai kami terkait teknis kelautan dan perikanan yang seluruhnya tenaga kontrak kami tidak memiliki latar belakang pendidikan kelautan dan perikanan.
- 3) Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng telah melakukan pendekatan melalui kegiatan/pembinaan yang dilakukan di seksi Penataan dan pengelolaan kawasan pesisir maupun di seksi pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan, kami telah melaksanakan kegiatan dan pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat pesisir sehingga keberadaan Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng dapat bermanfaat bagi masyarakat pesisir.
- 4) Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng senantiasa melakukan koordinasi dengan masyarakat pesisir atau Kelompok konservasi dan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dengan cara langsung maupun secara online melalui pembuatan

Whatsapp Group sehingga dapat melakukan koordinasi terkait permasalahan pesisir di wilayah ajatappareng kapanpun dan dimanapun.

- 5) Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng rutin setiap bulan melakukan operasi pengawasan illegal fishing baik patroli laut maupun patroli darat serta memberikan pembinaan kepada nelayan dengan bertujuan upaya penurunan illegal fishing diwilayah Ajatappareng.

#### **4.3.8. CDK WILAYAH SELATAN**

Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur berdasarkan wilayah kerja. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan memiliki tugas sebagai berikut : 1) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur; 2) Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur; 3) Koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, dan; 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Wilayah perairan Sulsel sebagai bagian dari WPP 713 terdiri dari 4 daerah potensial penangkapan ikan yaitu perairan Selat Makassar, Laut Flores, Teluk Bone dan Perairan Bali, dimana pada umumnya telah menjadi daerah tujuan penangkapan ikan para nelayan Sulsel secara turun temurun. Wilayah kerja Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan yang meliputi kabupaten Jeneponto, Bantaeng dan Bulukumba.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan, DKP Sulawesi Selatan Tahun 2024 salah satunya adalah kegiatan Pengawasan SDKP di Wilayah Laut Flores . Kegiatan tersebut memprioritaskan penanganan pengendalian *illegal fishing* dan *destructive fishing*. Yaitu kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh masyarakat/nelayan atau pelaku usaha dengan cara merusak sumberdaya ikan dan lingkungannya seperti pemboman ikan, penggunaan racun sianida/pembiusan dan penggunaan alat tangkap terlarang seperti *trawl* (pukat harimau) serta eksplorasi habitat laut yang dilindungi. *Destruktive fishing* merupakan mal praktek dalam kegiatan penangkapan ikan yang secara yuridis merupakan perbuatan melawan hukum.

Secara umum, maraknya kegiatan *destructive fishing* disebabkan oleh beberapa faktor : (1) Rentang kendali dan luasnya wilayah pengawasan tidak seimbang dengan kemampuan tenaga pengawas yang ada saat ini, (2) Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan di laut, (3) Orientasi keuntungan jangka pendek secara maksimal, (4) Kemiskinan, (5) Posisi tawar industri lebih tinggi dari pada kepentingan pelestarian lingkungan,

(6) Bahan handak dan zat kimia mudah di dapat dan tidak mengenal musim, (7) Kurangnya alternatif alat tangkap yang produktif tapi ramah lingkungan, (8) Rendahnya penguasaan iptek dalam pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan dan menguntungkan, (9) Masih lemahnya penegakan hukum, serta ( 10 ) Lemahnya koordinasi dan komitmen antar aparatur penegak hukum. Untuk itu diperlukan kebijakan dalam peran pengawasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di daerah kab/kota Sulsel. Saat ini untuk wilayah selatan hanya memiliki tiga pulau yaitu Pulau Liukang Loe dan Pulau Kambing di Kabupaten Bulukumba dan Pulau Libukang di Kabupaten Jeneponto. Kedua pulau ini belum terkelola dengan maksimal, sehingga dengan keberadaan Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan diharapkan kedepan nantinya ketiga pulau ini bisa menjadi daerah konservasi.

Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh CDK Wilayah Selatan berdasarkan Tupoksinya antara lain:

#### **A. Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil**

##### ➔ Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil

■ Kegiatan Patroli Pengawasan SDKP yang dilakukan di Wilayah Selatan direncanakan sebanyak 3 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp.24.000.000 dengan realisasi fisik 0 % dan realisasi keuangan Rp.0 ( 0 %). Kegiatan Patroli Pengawasan SDKP tidak dilaksanakan disebabkan oleh karena adanya rencana refocusing anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah terbit DPA Perubahan ternyata kegiatan ini tidak jadi direfocusing. Mengingat akhir tahun kondisi cuaca di Laut Flores tidak bagus dan kalau dipaksakan dilaksanakan akan berpotensi menjadi hutang lagi pada Tahun 2025, maka diambil keputusan untuk tidak melaksanakan kegiatan ini.

##### ■ Pengadaan Perahu Motor Pokmaswas Marina Indah Kabupaten Bantaeng (DAK)

Kegiatan pengadaan Perahu Pokmaswas Marina Indah Kabupaten Bantaeng sebanyak 1 unit dengan jumlah anggaran di DPA sebesar Rp.200.000.000. (Dua Ratus Juta Rupiah). Setelah dilakukan proses pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang melalui e katalog, maka ditunjuk sebagai rekanan pengadaan adalah CV. Cendana Wajrapani 88. Adapun spesifikasi Perahu Pokmaswas Marina Indah Kabupaten Bantaeng sebagai berikut :

1. Panjang LOA : 7,50 M
2. Lebar B : 1,80 M
3. Tinggi H : 0,80 M
4. Sarat T : 0,40 M
5. Bahan : FRP (Fibreglass Reinforced Plastic)
6. Mesin Utama : 40 HP

7. Alat keselamatan dan navigasi meliputi life jacket 10 unit, portable fire extinguisher 2 kg 1 buah, bendera nasional 1 buah, kotak P3K 1 LS, kompas 1 buah, toolkit box 1 set, horm, 1 buah, lampu rotary 1 buah, teropong 1 buah, damprah ban bekas + tali 1 set, garmin GPMAP 78 Sc waterproof 1 unit, kamera 1 unit, handy talky 2 unit, dayung kayu 2 unit.

Dalam pelaksanaan pembuatan Perahu Pokmaswas Marina Indah Kabupaten Bantaeng melibatkan unsur teknis dari akademisi perkapanan Universitas Hasanuddin. Dilibatkannya unsur teknis dari perkapanan diharapkan perahu yang dibuat oleh rekanan dapat sesuai dengan spesifikasi teknis yang diharapkan, sehingga pada nantinya bisa dimanfaatkan oleh kelompok dengan baik tanpa ada kendala di lapangan.

Sedangkan pada saat selesai kegiatan pengadaan perahu pokmaswas dilakukan uji coba sea trail di sekitar perairan Kecamatan Tallo Kota Makassar. Sea trail meliputi :

- Kecepatan kapal
- Kemampuan olah gerak
- Berhenti dan mundur
- Kemampuan berputar
- Ketahanan mesin utama
- Percobaan peralatan komunikasi, peralatan navigasi, dan peralatan Penunjang lainnya

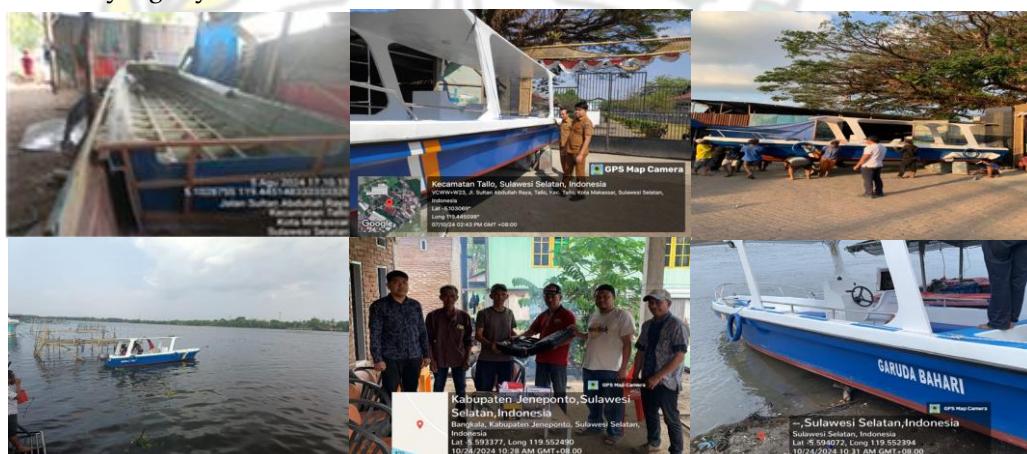


#### ■ Kegiatan Pengadaan Perahu Motor Pokmaswas Garuda Bahari Kabupaten Jeneponto (DAK)

Kegiatan pengadaan Perahu Pokmaswas Garuda Bahari Kabupaten Jeneponto sebanyak 1 unit dengan jumlah anggaran di DPA sebesar Rp.200.000.000. (Dua Ratus Juta Rupiah). Setelah dilakukan proses pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang melalui e

katalog, maka ditunjuk sebagai rekanan pengadaan adalah CV. Abadi Karca. Adapun spesifikasi Perahu Pokmaswas Marina Indah Kabupaten Bantaeng sebagai berikut :

1. Panjang LOA : 7,50 M
2. Lebar B : 1,80 M
3. Tinggi H : 0,80 M
4. Sarat T : 0,40 M
5. Bahan : FRP (Fibreglass Reinforced Plastic)
6. Mesin Utama : 40 HP
7. Alat keselamatan dan navigasi meliputi life jacket 10 unit, portable fire extinguisher 2 kg 1 buah, bendera nasional 1 buah, kotak P3K 1 LS, kompas 1 buah, toolkit box 1 set, horm, 1 buah, lampu rotary 1 buah, teropong 1 buah, damprah ban bekas + tali 1 set, garmin GPMAP 78 Sc waterproof 1 unit, kamera 1 unit, handy talky 2 unit, dayung kayu 2 unit.



#### ■ Pengadaan Papan Bicara/ Papan Informasi

Pengadaan Papan Bicara/ Papan Informasi sebanyak 9 buah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.5.414.000 dengan realisasi fisik 0 % dan realisasi keuangan Rp. 0 (0 %). Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena terbit di DPA Perubahan dan berpotensi menjadi hutang pada Tahun 2025.

#### ■ Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian DAK

Kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian DAK berupa perjalanan dinas dengan jumlah anggaran sebesar Rp.19.650.000 dengan realisasi fisik 68,45 % dan realisasi keuangan Rp. 10.825.000 (55,09 %). Realisasi fisik tidak mencapai 100 % disebabkan ada komponen yang tidak terserap keseluruhan berupa sewa rental dan penginapan.

**B. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**

❖ **Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

❖ **Penanaman Mangrove**

- 1) Kegiatan penanaman mangrove dilaksanakan di pesisir pantai Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba yaitu kegiatan bibit mangrove (bakau murah) sebanyak 38.000 batang dengan luas lahan 1,9 Ha, jumlah anggaran di DPA sebesar Rp.197.600.000. Realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.197.290.000,- (99,84 %). Kegiatan penamanan mangrove di Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba dilaksanakan pada Bulan Mei 2024. Jenis bakau yang ditanam yaitu Rhizophora Sp dalam bentuk propagul. Jarak tanam antara satu bibit dengan bibit lainnya 0,5 x 0,5 Meter, setiap titik ditanami 2 batang mangrove dan 2 ajir. Hasil monitoring pada Bulan Desember 2024 menunjukkan perkembangan yang sangat bagus karena sudah berdaun. Persentase kematian sekitar 1 %.



**PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN**

**1.1. PERMASALAHAN**

- Kegiatan patroli pengawasan SDKP CDK Wilayah Selatan di Laut Flores untuk pengawasan illegal fishing dan destructive fishing tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya rencana refocusing serta faktor cuaca di laut yang kurang bagus untuk melaksanakan patroli.
- Beberapa kegiatan swakelola seperti perjalanan dinas, makan minum dan bbm kendaraan dinas tidak bisa cair dananya hingga akhir Bulan Desember 2024.

**1.2. UPAYA PEMECAHAN**

- Terkait dengan kegiatan patroli pengawasan SDKP CDK Wilayah Selatan yang tidak terlaksana pada Tahun 2024, akan tetap dianggarkan Tahun 2025 untuk tetap menjaga laut di wilayah kerja CDK Wilayah Selatan dari kegiatan illegal fishing dan destructive fishing.
- Terkait kegiatan swakelola yang tidak cair dananya hingga akhir Bulan Desember 2024, agar kiranya sub bagian keuangan berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi dan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

**4.3.9. CDK Kepulauan Selayar**

Cabang Dinas Kelautan Kepulauan Selayar, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kelautan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur Sulawesi Selatan

berdasarkan wilayah kerja. Cabang Dinas Kelautan Kepulauan Selayar memiliki tugas sebagai berikut :

- 1). Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur Sulawesi Selatan.
- 2). Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur Sulawesi Selatan.
- 3). Koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya dan,
- 4). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan terkait tugas dan fungsinya.

Hasil pelaksanaan tersebut selama kurung waktu 1 (Satu) Tahun Anggaran 2024 pada Cabang Dinas Kelautan Kepulauan Selayar yang terdiri dari :

**1) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

- **Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**  
Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi terlaksana sesuai dengan rencana yaitu Penanaman Mangrove di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 38.000 Ha dengan luas tanam sebesar 3,8 Ha dengan anggaran Rp 197.600.000,00 realisasi fisik 100 % dengan Realisasi Keuangan Rp 196.980.600 (99,69 %).



**2) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

- **Pengawasan Sumber Daya Kelautan Sampai Dengan 12 Mil**

Hasil pelaksanaan kegiatan pada seksi pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan diuraikan sebagai berikut:

- Belanja Bahan Bakar Patroli Pengawasan  
Belanja bahan bakar minyak (BBM) pertamax sebanyak 1200 Liter dengan anggaran Rp16.260.000,00 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 0 %.
- Belanja Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri  
Belanja uang harian perjalanan dinas dalam negeri sebanyak 18 orang/hari dengan anggaran Rp7.740.000,00 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 0 %.



Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Sampai Dengan 12 Mil

#### 4.3.10. CDK Pangkajene dan Kepulauan

Pembangunan perikanan berkelanjutan (Sustainable Fisheries) harus berlangsung secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan generasi masa depan. Upaya Pembangunan Perikanan dan Kelautan Indonesia Dilakukan melalui tiga pilar, yaitu Kedaulatan (Sovereignty) yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, serta mencerminkan kepribadian indonesia sebagai negara kepulauan. Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan. Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan. Ketiga Pilar ini dimaksudkan dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan disulawesi selatan., namun sampai saat ini upaya tersebut dirasakan masih belum optimal, disamping karena keterbatasan sarana dan prasarana, penyebab lainnya adalah belum adanya pemahaman yang menyeluruh tentang aturan dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan sumbedaya kelautan dan perikanan. Untuk menjawab hal tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 3 Tahun 2018 tanggal 12 September 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, dibentuk Cabang Dinas Kelautan Pangkajene dan Kepulauan yang lebih bersifat Teknis dan operasional serta mandiri, hal ini dimaksudkan untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Kelautan yang menjadi Kewenangan Daerah berdasarkan Pelimpahan Kewenangan dari Gubernur berdasarkan wilayah cabang dinas kelautan pangkajene dan kepulauan, Cabang Dinas Kelautan Pangkajene dan kepulauan mempunyai dua tugas utama yaitu pengawasan dan pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta Penataan dan Pengelolaan kawasan perairan di wilayah Pangkajene dan Kepulauan.

## I. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

### A. Kegiatan Pengelolaan Ruang laut sampai dengan 12 Mil diluar Minyak dan Gas Bumi

#### 1. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

##### ■ Kegiatan Pertemuan Sosialisasi dan identifikasi CPCL Prioritas Terumbu Buatan Inovasi Rumah Ikan

Kegiatan Pertemuan sosialisasi dan identifikasi CPCL Prioritas Terumbu Buatan Inovasi Rumah Ikan bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendapatkan saran dan masukan Calon Penerima Calon Lokasi terumbu buatan Inovasi rumah ikan realisasi keuangan sebesar Rp 27.345.100,- (persentase 100 %) dan realisasi Fisik kegiatan sebesar 100 % dari total anggaran Rp 27.345.100. Kegiatan sosialisasi dan identifikasi CPCL Prioritas Terumbu Buatan Inovasi Rumah Ikan CPCL terdiri dari pertemuan sosialisasi dan identifikasi langsung di lapangan.



##### ■ Apartemen Ikan

Apartemen Ikan di Desa Mattiro Deceng, Kec. Liukang Tuppabiring Utara, Kab. Pangkep sebanyak 22 Modul dengan realisasi Fisik kegiatan sebesar 100 % dari total anggaran Rp 200.000.000,- di tahun 2023 namun baru terealisasi keuangan di tahun 2024.

Output dari kegiatan apartemen ikan ini adalah rehabilitasi sumberdaya ikan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.



##### ■ Monitoring Kawasan Konservasi dan Ekosistem Pesisir serta Pembinaan Masyarakat

Output dari kegiatan ini adalah sebagai bentuk pengelolaan Kawasan untuk meningkatkan fungsi-fungsi kawasan konservasi dan ekosistem pesisir dan laut dengan realisasi keuangan sebesar Rp 69.660.000,- (persentase 86,63 %) dan realisasi Fisik kegiatan sebesar 100 % dari total anggaran Rp 80.410.000,-



## **II. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

### **B. KEGIATAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SAMPAI 12 MIL**

#### **2. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai 12 Mil**

##### **■ Perlengkapan Pokmaswas**

###### **■ Pengadaan Perlengkapan Pengawasan SDKP (Pengawas Polsus PW3K di Kabupaten Pangkep).**

Pengadaan Perlengkapan Pengawasan SDKP (Pengawas Polsus PW3K di Kabupaten Pangkep) sebanyak 1 paket yang terdiri dari Pakaian Dinas Harian Polsus, GPS, Jangka Sorong Digital, Papan Informasi/Larangan/Segel, Polsus Line, Distometer, Timbangan Digital, Kamera Digital, Senter LED, Beton Stik, Pisau Komando dan Borgol Tangan dengan jumlah anggaran di DPA sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah). Jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender dimulai dari tanggal 4 Juli 2024 s/d 2 September 2024. Nilai SPK sebesar Rp.29.770.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.Rp.29.770.000 (100 %).



###### **■ Pengadaan Perlengkapan Pengawasan SDKP (Pengawas Perikanan Desa Pundata Baji Kecamatan Labbakkang Kabupaten Pangkep)**

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Pengawasan SDKP (Pengawas Perikanan Desa Pundata Baji Kecamatan Labbakkang Kabupaten Pangkep) sebanyak 1 paket yang terdiri dari Pakaian Dinas Harian Pengawas, GPS, Jangka Sorong Digital, Papan Informasi/Larangan/Segel, Pengawas Line, Distometer, Timbangan Digital, Kamera Digital, dan Senter LED dengan jumlah anggaran di DPA sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah). Jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender dimulai dari tanggal 4 Juli 2024 s/d 2 September 2024. Nilai SPK sebesar Rp.29.700.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.Rp.29.700.000 (100 %).

###### **■ Pengadaan Perahu Pokmaswas Tampaang Bersatu, Desa Tampaang, Kec. Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan.**

Kegiatan pengadaan Perahu Pokmaswas Tampaang Bersatu Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan sebanyak 1 unit dengan jumlah anggaran di DPA sebesar

Rp.200.000.000. (Dua Ratus Juta Rupiah). Jangka waktu pelaksanaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dimulai dari tanggal 17 Juli 2024 s/d 14 Oktober 2024. Nilai SPK sebesar Rp.198.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah). Realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.198.00.000 (99,00 %).



#### ■ Pengadaan Perahu Pokmaswas Mattiro Bombang 2 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Kegiatan pengadaan Perahu Pokmaswas Mattiro Bombang 2 Kabupaten Pangkejaene dan Kepulauan sebanyak 1 unit dengan jumlah anggaran di DPA sebesar Rp.200.000.000. (Dua Ratus Juta Rupiah). Jangka waktu pelaksanaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dimulai dari tanggal 17 Juli 2024 s/d 14 Oktober 2024. Nilai SPK sebesar Rp.197.500.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.197.500.000 (98,75 %).



#### ■ Patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam setahun di wilayah kepulauan pangkep dengan realisasi keuangan sebesar Rp 85.680.000,- (persentase 75,97 %) dan realisasi Fisik kegiatan sebesar 100 % dari total anggaran Rp 112.770.000,-. Output Kegiatan ini yaitu meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah pangkajene dan kepulauan dalam mencegah IUU Fishing dan Destructive Fishing.



#### ■ Gerakan Pemuda Cinta Bahari Anti Bom dan Bius Ikan (PACARITA)

Gerakan Pemuda Cinta Bahari Anti Bom dan Bius Ikan (PACARITA) yang dilaksanakan di Pulau Bontosua, Pulau Pala, Pulau Kapoposang, Kabupaten Pangkep dengan jumlah total peserta sebanyak 220 orang yang berasal dari pemuda dan masyarakat nelayan. Kegiatan ini memiliki realisasi keuangan sebesar Rp 88.030.000,- (persentase 89,86%) dan realisasi Fisik kegiatan sebesar 100 % dari total anggaran Rp 100.000.000,-. Output Kegiatan ini yaitu pemberdayaan masyarakat utamanya pendayagunaan pemuda dalam mencegah aktivitas penangkapan ikan dengan bom dan bius ikan.



#### ■ Fasilitasi NIB dan Pendataan Pelaku Usaha Perikanan

Fasilitasi Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) periode tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2024 sebanyak 264 buah milik nelayan asal Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Penerbitan Kartu Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA) mulai dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2024 sebanyak 442 nelayan asal Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Output kegiatan ini adalah Cabang Dinas Kelautan Pangkep memudahkan para Nelayan untuk mendapatkan perizinan dalam menjalankan kegiatannya hanya membawa berkas persyaratan yang dibutuhkan secara gratis



#### 4.3.11. CDK Luwu Raya

Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur berdasarkan wilayah kerja. Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya memiliki tugas sebagai berikut : 1) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur; 2) Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan

kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur; 3) Koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, dan; 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Menyikapi kompleksnya permasalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Luwu Raya, diperlukan peran dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat selaku *stakeholder* dalam membantu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat. Keberadaan Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya untuk melaksanakan dua fungsi yaitu dalam bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan serta bidang Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perairan di wilayah administrasi Luwu Raya yang mencakup sebagian perairan Teluk Bone.

Perairan Luwu Raya (Teluk Bone) yang merupakan bagian dari WPP-NRI 713 mencakup wilayah kerja pada enam kabupaten/kota antara lain Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tana Toraja. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya salah satunya adalah kegiatan pengawasan sumber daya kelautan. Kegiatan tersebut memprioritaskan penanganan/pengendalian *illegal fishing* dan *destructive fishing*. *Illegal fishing* dan *destructive fishing* merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh masyarakat/nelayan atau pelaku usaha perikanan dengan cara merusak sumber daya ikan dan lingkungannya seperti pengeboman ikan, penggunaan racun sianida/pembiusan dan penggunaan alat tangkap terlarang seperti *trawl* (pukat harimau) serta eksplorasi habitat laut yang dilindungi. *Destructive fishing* merupakan malpraktek dalam kegiatan penangkapan ikan yang secara yuridis merupakan perbuatan melawan hukum.

Selain kegiatan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan, Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya mempunyai tugas dalam hal penataan dan pengelolaan kawasan perairan di Luwu Raya. Salah satu contohnya adalah menata dan mengelola daerah konservasi. Kegiatan konservasi saat ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai harmonisasi atas kebutuhan masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumber daya yang ada bagi masa depan.

Hal tersebut di atas merupakan acuan bagi Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya dalam menyusun program kegiatannya dalam Tahun Anggaran 2024. Hal ini juga merupakan bagian dari tupoksi Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya sebagaimana yang telah digariskan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur No.03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan.

❖ **Pelaksanaan Tugas Seksi Penataan Dan Pengelolaan Kawasan Perairan**

Seksi Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perikanan merupakan salah satu seksi dari Cabang Dinas Kelautan Luwu Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas dan fungsi di bidang penataan dan pengelolaan kawasan perikanan meliputi seluruh wilayah perairan pesisir dan

pulau-pulau kecil dalam wilayah kerja Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk mendukung tugas operasional, Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terdiri dari Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil di Lur Minyak dan Gas Bumi dianggarkan sebesar Rp. 39.440.00,00 berupa perjalanan dinas. Hasil pelaksanaan kegiatan pada seksi penataan dan pengelolaan kawasan perairan diuraikan sebagai berikut:



**Koordinasi terkait CPCL inovasi terumbu buatan dengan Pemerintah Daerah di Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu**



**Pembinaan nelayan dan identifikasi CPCL inovasi terumbu buatan di Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu**



**Koordinasi terkait reklamasi pembangunan dermaga tambatan perahu di Desa Toddopuli, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu**



**Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut atas Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut PT Bumi Mineral Sulawesi di Perairan Teluk Bone, Desa Toddopuli, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan**



Verifikasi Data Calon Penerima Calon Lokasi Terkait nama nama nelayan miskin ekstrim di Kelurahan Bonepute Kec. Larompong Kab. Luwu



Monitoring Mangrove di Kelurahan Benteng dan Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo



Monitoring Mangrove di Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu



Monitoring Mangrove di Desa Burau Pantai, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur



Monitoring Mangrove di Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu



Monitoring Mangrove di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo



Monitoring Mangrove di Desa Tokke, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara



Restocking benih ikan air tawar di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara



Sosialisasi Pemeliharaan Mangrove dengan Metode Holistik di Desa Pabbarassang, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu



Penanaman Mangrove di Desa Pabbarassang bersama masyarakat dan pemerintah Desa Pabbarassang

❖ **Pelaksanaan Kegiatan Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan**

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya melaksanakan tugas pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di Wilayah Teluk Bone yang merupakan jalur penangkapan ikan yang berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPPNRI) 713 meliputi Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali (sesuai Permen Kelautan dan Perikanan No.18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan).

Untuk mendukung tugas operasional, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai

dengan 12 Mil dianggarkan sebesar Rp18.580.000,00 berupa bahan bakar dan uang harian perjalanan dinas dalam negeri.

Hasil pelaksanaan kegiatan pada seksi pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan diuraikan sebagai berikut:

**1. Belanja Bahan Bakar Patroli Pengawasan**

Belanja bahan bakar minyak (BBM) pertamax sebanyak 800 Liter dengan anggaran Rp. 10.840.000,00 realisasi fisik 97.50% dan realisasi keuangan 0 %.

**2. Belanja Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

Belanja uang harian perjalanan dinas dalam negeri sebanyak 18 orang/hari dengan anggaran Rp. 7.740.000,00 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 0 %



Rapat Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam rangka Penertiban Illegal Fishing (Bom Ikan) di Desa Munte Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara



Koordinasi untuk monev kegiatan yang pernah dilaksanakan di Kabupaten Luwu



Koordinasi terkait Pengawasan Kapal Perikanan, Pemanfaatan Ruang Laut dan Pendataan KUSUKA di Kelurahan Sabbang Paru, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo



Koordinasi dengan Kepala Dinas Perikanan Kota Palopo terkait Percepatan Pelayanan Dokumen Kapal Perikanan



**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**



**Pengawasan Perizinan Kapal Perikanan di Desa Takalala, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur**



**Pelayanan pembuatan kartu KUSUKA bagi pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya dan pemasar ikan) di wilayah Luwu Raya**



**Pengawasan Perizinan Kapal Perikanan di PPI Pontap, Kelurahan Ponjala, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo**



**Koordinasi Pengawasan dengan Satpolairud Polres Luwu**



**Koordinasi Pengawasan dengan Pangkalan PSDKP Bitung**

**TINDAK LANJUT REKOMENDASI ATAS PENGUKURAN CAPAIAN TRIWULAN TAHUN 2024**

- a. Keterlambatan realisasi anggaran pada Seksi Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perairan khususnya untuk subkegiatan Terumbu Buatan Inovasi Rumah Ikan disebabkan detail desain dan petunjuk teknis yang dibutuhkan dan merupakan dasar pokok pelaksanaan kegiatan tidak tersedia sampai pada akhir Triwulan II, kendala tersebut mengakibatkan kegiatan belum dapat terlaksana. Hal ini berarti penyerapan atau realisasi anggaran baik fisik maupun keuangan masih nihil. Kegiatan ini pada Triwulan III telah mengalami *refocusing* anggaran sehingga dihilangkan pada DPA Perubahan.
- b. Anggaran yang ada setelah *refocusing* adalah anggaran kegiatan yang merupakan utang kepada pihak ketiga yang dianggarkan ulang dan telah selesai 100%.
- c. Kegiatan anggaran pokok telah diselesaikan saat mendapatkan anggaran perubahan. Selain itu, kelengkapan dan kesiapan dokumen untuk kegiatan anggaran perubahan telah dilakukan.
- d. Hasil evaluasi realisasi keuangan dan fisik CDK Luwu Raya sebesar 47,63%, masih termasuk rendah (di bawah 75%), tindak lanjut penyelesaian permasalahan telah dilakukan berupa percepatan realisasi fisik dan keuangan.
- e. Hasil evaluasi capaian indikator sasaran strategis dan program yang masih rendah telah disampaikan permasalahan dan tindak lanjutnya untuk perbaikan perencanaan selanjutnyaaa

## V. HASIL PEMBANGUNAN PERIKANAN SULAWESI SELATAN

### 5.1. Ekonomi

#### 5.1.1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Indikator makro ekonomi untuk pembangunan Kelautan dan Perikanan yang dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2020 - 2024 data produksi total perikanan Sulawesi Selatan mengalami peningkatan rata - rata sebesar 4,2 %.

#### 5.1.2. Produksi Perikanan

Produksi perikanan di Sulawesi Selatan pada tahun 2024 total tercatat sebesar 4,825,587.5 ton. Dibanding dengan hasil yang dicapai tahun 2023 sebesar 4,620,291.8 ton, maka terjadi kenaikan produksi sebesar 205,295.7 ton atau 4,4 %, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah.

**Tabel 15. Perkembangan Produksi Perikanan dari Kegiatan Usaha di Sulawesi Selatan, Tahun 2023 - 2024**

No.	Sumber Daya	Tahun		%
		2023	2024	
1	<b>Penangkapan (Ton)</b>	<b>504,705.3</b>	<b>511,356.4</b>	<b>1.32</b>
	a. Laut	460,854.0	465,546.3	1.02
	b. Perairan Umum	43,851.3	45,810.1	4.47
2	<b>Budidaya (Ton)</b>	<b>4,115,586.5</b>	<b>4,314,231.1</b>	<b>4.83</b>
	a. Tambak	1,419,944.2	1,493,787.6	5.20
	b. Laut	2,673,009.0	2,796,410.3	4.62
	c. Kolam	16,200.7	17,411.7	7.47
	d. Sawah	5,756.1	5,992.1	4.10
	e. KJA (Laut)	82.5	63.9	(22.55)
	f. KJA (Tawar)	594.0	565.9	(4.73)
	<b>Jumlah (Ton)</b>	<b>4,620,291.8</b>	<b>4,825,587.5</b>	<b>4.44</b>

#### a. Budidaya

Ada 2 (dua) komoditi utama yang dipacu dalam menunjang eksport perikanan yaitu udang dan rumput laut, disamping itu komoditi kepiting bakau juga memiliki prospek untuk dieksport.

##### Udang

Di Sulawesi Selatan ada beberapa jenis udang yang hidup di tambak, tetapi yang dibudidayakan ada 2 (dua) jenis yaitu udang Windu dan Vannamei.

Produksi udang di Sulawesi Selatan pada tahun 2024 tercatat sebesar 68,577.5 ton yang terdiri dari udang Windu 9,236.6 ton, udang Vannamei 46,401.3 ton, dan udang lainnya 12,939.5 ton, Jika

dibandingkan dengan hasil yang dicapai pada tahun 2023 sebesar 67,295.2 ton, maka terjadi kenaikan produksi sebesar 1,9 %.

Produksi udang di Sulawesi Selatan terbanyak terdapat dikabupaten Bone sebesar 18,462.6 ton (26,9 %), Kabupaten Pinrang sebesar 13,932.0 ton (20,3 %), Kabupaten Wajo sebesar 9,009.1 ton (13,1 %), Kabupaten Barru sebesar 4,425.9 ton (6,5 %) dan Kabupaten Pangkep sebesar 3,992.1 ton (5,8 %).

#### **Rumput Laut**

Di Sulawesi Selatan ada 3 (tiga) jenis rumput laut yang diusahakan oleh pembudidaya yaitu jenis *Eucheuma spp*, *Spinosium spp* dan *Gracillaria spp*, jumlah produksi ketiga jenis rumput laut tersebut pada tahun 2024 sebesar 4,018,692.1 ton basah, yang terdiri dari *Eucheuma spp* sebesar 2,377,585.4 ton basah, *Gracillaria spp* sebesar 1,222,282.0 ton basah dan *Spinosium spp* sebesar 418,824.7 ton basah. Jika dibandingkan dengan produksi tahun 2022 sebesar 3,844,803.2 ton basah, maka terjadi kenaikan sebesar 4,5 %.

Daerah produksi *Eucheuma cottonii* yaitu Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Bulukumba, Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Pangkep, Barru, Luwu Timur, Pinrang, Maros, Sinjai, Kota Palopo dan Kota Pare - Pare

Produksi Rumput laut untuk jenis *Eucheuma cottonii* terbesar terdapat di kabupaten Wajo sebesar 446,759.8 ton basah (18,8 %), Kabupaten Takalar sebesar 399,832.1 ton (16,8 %), Kabupaten Luwu sebesar 313,101.3 ton (13,2 %), Kabupaten Pangkep sebesar 311,300.0 ton (13,1 %) dan Kabupaten Jeneponto sebesar 249,494.2 ton (10,5 %).

Daerah produksi *Gracillaria spp* yaitu Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Takalar, Maros, Pangkep, Luwu Timur, Pinrang, dan Kota Palopo.

Produksi Rumput laut untuk jenis *Gracillaria sp* terbesar terdapat dikabupaten Luwu sebesar 323,043.0 ton (26,4 %), Kabupaten Bone sebesar 206,801.0 ton (16,9 %), kabupaten Luwu Utara sebesar 201,384.5 ton (16,4 %), Kabupaten Luwu Timur sebesar 154,768.6 ton (12,7 %) dan Kota Palopo sebesar 150,515.0 ton (12,3 %).

Daerah produksi *Spinosium spp* yaitu Pangkep, Jeneponto, Takalar, Sinjai, Bulukumba, Selayar dan Bantaeng. Produksi Rumput laut untuk jenis *Spinosium spp* terbesar terdapat di kabupaten Takalar sebesar 138,912.5 ton (33,2 %), Bulukumba sebesar 126,837.2 ton (30,3 %), Pangkep sebesar 62,000.0 ton (15,9 %), Bantaeng sebesar 43,250.2 ton (10,3 %) dan Sinjai sebesar 28,889.6 ton (6,9 %).

### **Kepiting Bakau (*Scylla serrata*)**

Adapun komoditi lainnya melalui usaha budidaya yaitu kepiting bakau (*Scylla serrata*). Produksi pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,865.2 ton sedangkan pada tahun 2023 tercatat sebesar 2,463.7 ton atau terjadi kenaikan produksi sebesar 16,3 %.

Selain komoditi udang, rumput laut dan kepiting bakau, ada beberapa komoditi ikan hasil budidaya yang dipacu untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat meliputi ikan bandeng, ikan mas, ikan nila dan ikan lainnya.

### **Ikan Bandeng (*Chanos chanos*)**

Produksi ikan bandeng dari hasil budidaya pada tahun 2024 tercatat sebesar 193,873.1 ton dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 173,248.6 ton, maka terjadi kenaikan produksi sebesar 32,856.30 ton atau 11,9 %. Penghasil Bandeng di Sulawesi Selatan terdapat di kabupaten Bone sebesar 100,459.0 ton (51,8 %), Kabupaten Wajo sebesar 16,832.1 ton (8,7 %), kabupaten Pangkep sebesar 15,514.9 ton (8 %), kabupaten Luwu Timur sebesar 14,302.8 ton (7,8 %) dan kabupaten Luwu sebesar 11,865.6 ton (6,1 %).

### **Ikan Mas (*Cyprinus carpio*)**

Produksi ikan Mas dari hasil budidaya di kolam, sawah (mina padi), Tambak dan Keramba Jaring Apung (KJA) pada tahun 2024 tercatat sebesar 9,777.5 ton, dibanding dengan tahun 2023 tercatat sebesar 9,654.3 ton, maka terjadi kenaikan produksi sebesar 123.17 ton atau 1,3 %. Daerah - daerah yang selama ini andalan produksi ikan Mas yaitu Kabupaten Pinrang sebesar 2,144.7 ton (21,9 %), Kabupaten Toraja Utara sebesar 1,455.5 ton (14,9 %), Kabupaten Luwu Utara sebesar 1,235.8 ton (12,6 %), Kabupaten Bone sebesar 1,041.0 ton (10,6 %) dan Kabupaten Wajo sebesar 692.8 ton (7,1 %).

### **Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*)**

Produksi ikan Nila dari hasil budidaya kolam, sawah (mina padi), Tambak dan Keramba Jaring Apung (KJA) pada tahun 2024 tercatat sebesar 13,815.2 ton, dibanding dengan tahun 2023 tercatat sebesar 11,759.4 ton, maka terjadi kenaikan produksi sebesar 2,055.8 ton atau 17,5 %. Kabupaten penghasil ikan Nila di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Pinrang sebesar 3,253.1 ton (23,5 %), Kabupaten Pangkep sebesar 2,997.9 ton (21,7 %), Kabupaten Bone sebesar 1,193.9 ton (8,6 %), Kabupaten Sidrap sebesar 1,154.5 ton (8,4 %) dan Kabupaten Maros sebesar 979.9 ton (7,1 %).

## b. Penangkapan

### Ikan Tuna /Cakalang/Tongkol

Dimaksudkan dengan ikan tuna/cakalang/tongkol adalah ikan-ikan pelagis besar dalam hal ini meliputi : Albakora, Madidihang, Tuna Mata Besar, Setuhuk Loreng, Setuhuk Biru, Setuhuk Hitam, Ikan Layaran, Ikan pedang, Tongkol Komo, Tongkol Krai, Tongkol Abu-Abu, Lisong, Kenyar, Cakalang.

Pada tahun 2024 produksi tangkapan ikan tuna/Cakalang/Tongkol di Sulawesi Selatan tercatat sebesar 91,424.0 ton, sedangkan pada tahun 2023 tercatat sebesar 90,709.0 ton hal tersebut berarti terjadi kenaikan produksi tangkapan ikan tuna/cakalang/tongkol sebesar 715 ton atau sebesar 0,79 %. Kabupaten/Kota Penghasil TTC di Sulawesi selatan yaitu : Kabupaten Bukukumba sebesar 29,407.4 Ton (32,2 %), Kabupaten Sinjai 20,102.4 Ton (22 %), Kabupaten Bone sebesar 9,639.0 Ton (10,5 %), Kabupaten Pinrang sebesar 8,122.3 Ton (8,9 %) dan kabupaten Pangkep sebesar 5,550.0 Ton (6,1 %).

### **5.1.3. Konsumsi Ikan**

Konsumsi ikan perkapita masyarakat Sulawesi Selatan pada tahun 2024 tercatat sebesar 72,6 kg/kapita/tahun dan pada tahun 2023 tercatat sebesar 71,1 kg/kapita/ tahun dengan penduduk Sulawesi Selatan diproyeksi mencapai 9,463,390 jiwa. Hal tersebut berarti bahwa pada tahun 2024 terjadi kenaikan konsumsi perkapita sebesar 2,1 %.

### **5.1.4. Volume dan Nilai Eksport**

Komoditi hasil perikanan Sulawesi Selatan dipasarkan tujuan ekspor pada tahun 2024 tercatat sebesar 202,045.5 ton dengan nilai US\$ 372,471,217.2 dan pada tahun 2023 tercatat sebesar 200,927 ton dengan nilai US\$ 416,746,756.0 atau terjadi Kenaikan volume sebesar 0,6 % dan penurunan nilai 11,9 %. Penurunan nilai Eksport Perikanan Sulawesi Selatan disebabkan salah satunya menurunnya nilai eksport Rumput laut, dimana pada tahun 2024 nilai eksport rumput laut menurun dari 314,3 Juta US\$ menjadi 153,5 Juta US\$.

### **5.1.5. Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya**

Tingkat pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan sangat bervariasi besarnya, dimana sangat ditentukan oleh sumberdaya yang dikelola dan komoditi yang diusahakan.

Tingkat pendapatan rata-rata pertahun pembudidaya ikan di Sulawesi Selatan pada tahun 2024 tercatat antara Rp. 13,382,239 sampai Rp. 44,569,316 per tahun. Secara berurutan tingkat pendapatan rata-rata pertahun pembudidaya di Sulawesi Selatan adalah Budidaya Dilaut (Rumput Laut) Rp. 44,569,316, Budidaya Tambak Rp. 42,469,771 , Budidaya KJA laut Rp. 35,674,103 , Budidaya Kolam Rp. 26,762,269 , Budidaya sawah Rp. 17,691,023 dan Budidaya KJA tawar

Rp. 13,382,239 sedangkan pendapatan nelayan laut Rp. 36,087,495 dan nelayan perairan umum Rp. 61,261,429

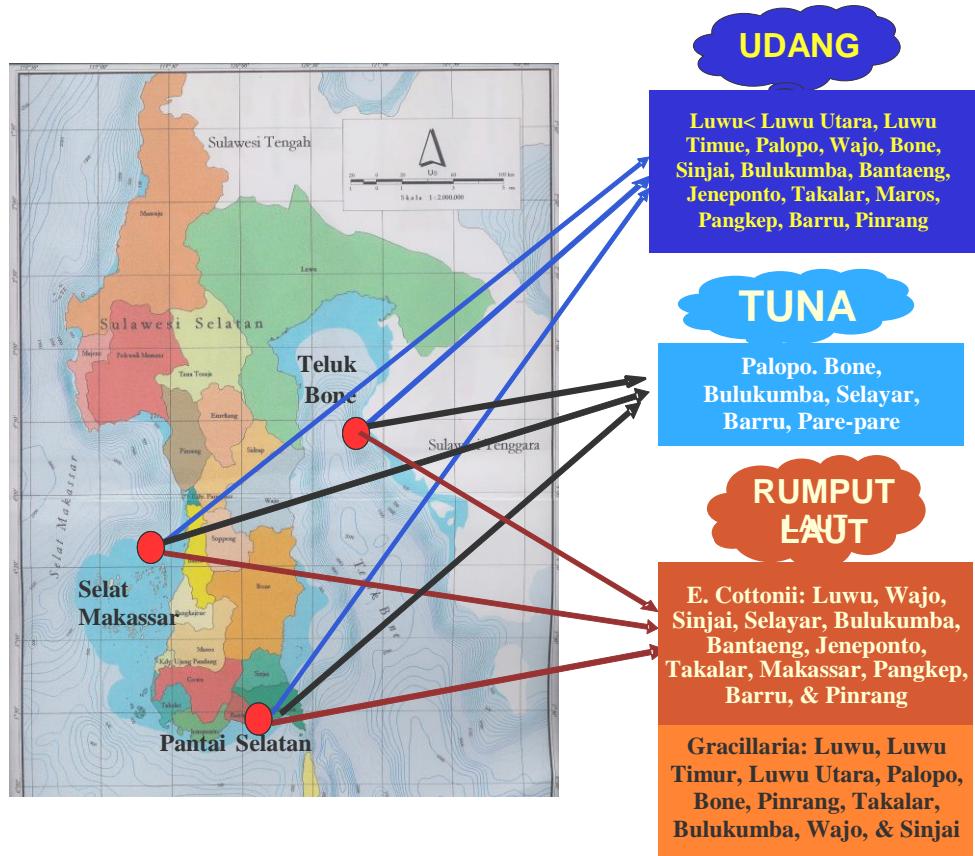
#### **5.1.6. Tenaga Kerja**

Jumlah tenaga kerja yang diserap pada sektor Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan tercatat pada Tahun 2024 sebanyak 504.824 orang atau 5,3 % dari jumlah penduduk, yang terdiri dari tenaga kerja pembudidaya sebanyak 281,727 orang (2,9 %), Nelayan (Laut + Perairan Umum) sebanyak 223,097 orang (2,4 %).

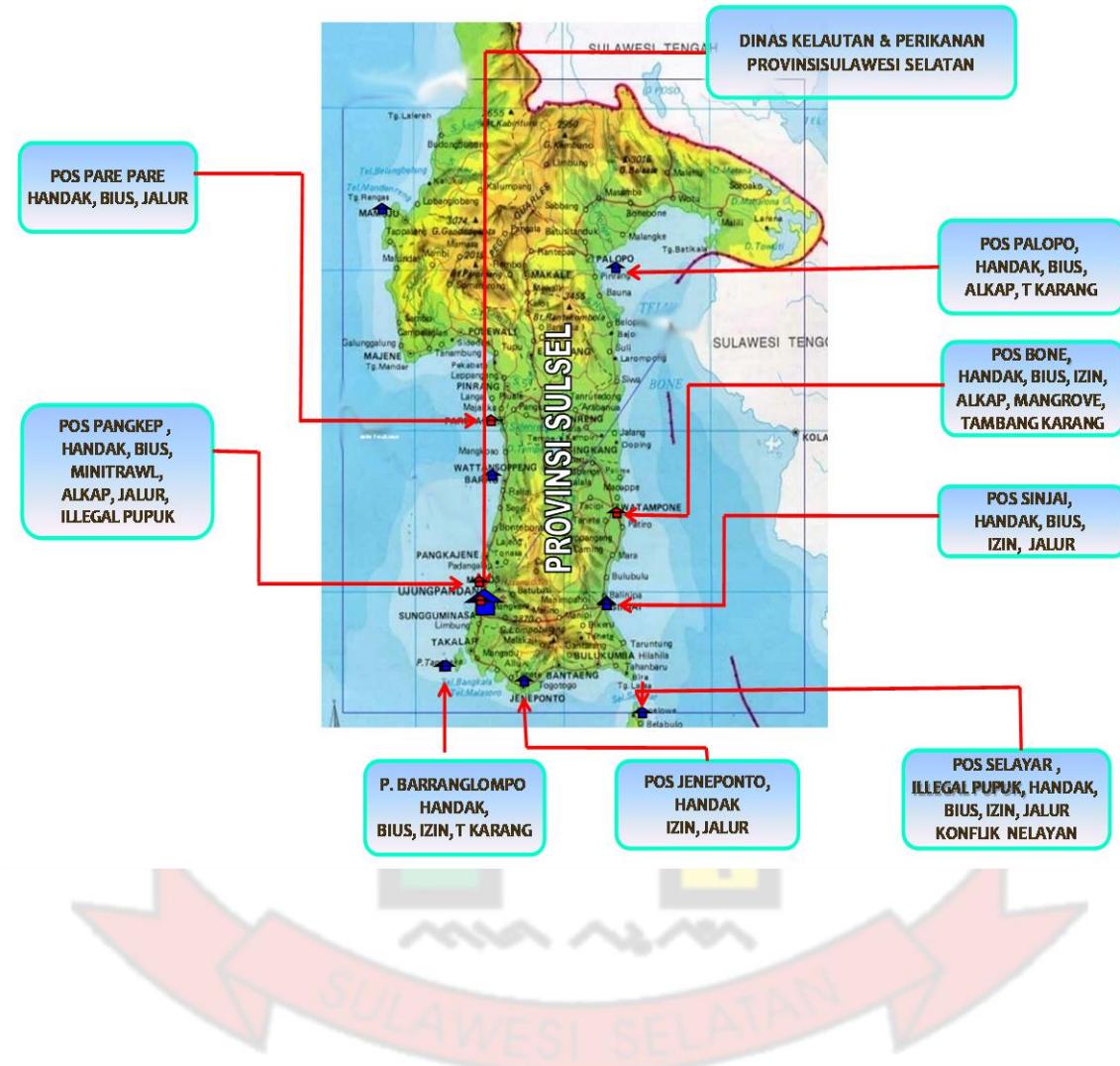




**Lampiran 1. Wilayah Peta Penangkapan Tuna dan Budidaya, Udang dan Rumput Laut**



**Lampiran 2. Lokasi Pos Pengawasan SDKP Subsidi Pengembangan SDM Pengawasan KP Sulawesi Selatan Tahun 2024**



**Lampiran 3. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten /Kota di Sulawesi Selatan,  
Tahun 2024**

*Satuan : Ribu Orang*

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk
1	Kepulauan Selayar	142.7
2	Bulukumba	454.72
3	Bantaeng	205.42
4	Jeneponto	418.97
5	Takalar	317.02
6	Gowa	814.04
7	Sinjai	270.43
8	Maros	413.59
9	Pangkajene Dan Kepulauan	359.16
10	Baru	189.21
11	Bone	830.12
12	Soppeng	239.36
13	Wajo	389.05
14	Sidenreng Rappang	330.74
15	Pinrang	424.65
16	Enrekang	238.1
17	Luwu	384.28
18	Tana Toraja	292.42
19	Luwu Utara	337.66
20	Luwu Timur	312.73
21	Toraja Utara	277.79
22	Kota Makassar	1464.64
23	Kota Parepare	160.92
24	Kota Palopo	195.67
<b>Total</b>		<b>9,463.39</b>

*Sumber : BPS dan Kementerian Dalam Negeri*

**Lampiran 4. Data Produksi Pemberian Udang Windu pada UPT Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Laut Tahun 2024**

**Periode Bulan Mei - Juli**

No	Nama	Komoditas	Jumlah (Ekor)	Harga	Nilai	Keterangan
1	Gondrong	Vanamae	120,000	25	3,000,000	Pembelian Umum
2	Jufri	Vanamae	120,000	25	3,000,000	Pembelian Umum
3	H. Sudi	Vanamae	140,000	25	3,500,000	Pembelian Umum
4	Madani	Vanamae	100,000	25	2,500,000	Pembelian Umum
5	Jamil	Vanamae	50,000	25	1,250,000	Pembelian Umum
6	Andi Amir	Vanamae	60,000	25	1,500,000	Pembelian Umum
7	Andi Sarifuddin	Vanamae	100,000	25	2,500,000	Pembelian Umum
8	Ruslan	Vanamae	40,000	25	1,000,000	Pembelian Umum
9	H. Sell	Vanamae	50,000	25	1,250,000	Pembelian Umum
10	Jusman	Vanamae	40,000	25	1,000,000	Pembelian Umum
11	Andi Saripuddin	Vanamae	60,000	25	1,500,000	Pembelian Umum
12	Jamil	Vanamae	50,000	25	1,250,000	Pembelian Umum
13	Andra	Vanamae	25,000	25	625,000	Pembelian Umum
14	Gusman	Vanamae	75,000	25	1,875,000	Pembelian Umum
15	Sumiati	Vanamae	100,000	25	2,500,000	Pembelian Umum
16	Ilyas	Vanamae	150,000	25	3,750,000	Pembelian Umum
17	Godrong	Vanamae	50,000	25	1,250,000	Pembelian Umum
18	Sabir	Vanamae	25,000	25	625,000	Pembelian Umum
<b>Sub Jumlah</b>			<b>1,355,000</b>		<b>33,875,000</b>	

**SIKLUS KEDUA (Anggaran di Recofucing)**

**SIKLUS KETIGA (Anggaran di Recofucing)**

**Rincian**

Benur Hasil Penjualan	<b>1,355,000</b>		<b>33,875,000</b>	
-----------------------	------------------	--	-------------------	--

*Sumber : UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU LAUT TAHUN 2024*

**Lampiran 5. Rekapitulasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024**

No	Nama UPI	Alamat	Jenis SKP	Jenis Olahan	Produk
<b>9</b>	<b>Januari</b>				
1	PT. USAHA CENTRALJAYA SAKTI	Jl. Kima V Kav E No.3A, Kel. Daya, Kec. Biringkannaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Baru Penambahan Ruang Lingkup	Beku	Cephalopod Rebus Beku
2	CV. SORE DANGKANG	Tanetea Kel. Bontorannu, Kec. Bangkala, Kabupaten Jenepono Sulawesi Selatan 92352	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed
3	PT. ANUGERAH KELAUTAN ABADI	Jl. Sultan Abdurrahman (Gudang 1) Kel. Tallo, Kec. Tallo, Kota Makassar Sulawesi Selatan 90212	Baru	Kering	Dried Seaweed
4	PT. WAHYU PRADANA BINAMULIA	JL. Kima 10 Kav. C-3A Kel. Daya, Kec. Biringkannaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan 90241	Perpanjangan	Beku	Frozen Raw Shrimp
					Frozen Cooked Shrimp
5	CV. GUNA BAHARI INDONESIA	Pergudangan Patene 88 Blok N No.1, Jl. Business Park Kel. Pa'benteng, Kec. Marusu, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan 90552	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed
6	CV. LEMO DAN BUNGI	Jl. Sawitto, Lerang2 Kel. Benteng Sawitto, Kec. Paleteang, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan 91213	Baru	Kering	Dried Seaweed
7	PT. ANUGERAH CAHAYA SAMUDRA	Jl. Ir. Sutami Komplek Pergudangan Lantebung Blok A 11 No.9B Kel. Parang Loe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan 90241	Baru	Kering	Dried Seaweed
					Dried Sea Cucumber
<b>25</b>	<b>Februari</b>				
1	UKM MARALA FOOD	Jl. Poros Palangga 67B, Kel. Jene'talasa, Kec. Palangga, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan	Baru	Beku	Frozen Value Added Fish Product (Fish Ball, Fish Cake, Fish Nugget)
2	PT. PIALA LAUT INDONESIA	Jl. Kima 17 Kav. DD 9, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	Frozen Shrimp
3	PT. MARI SEJAHTERA INDONESIA	Jl. KIMA 4 Gudang 3 Kav. M-1a, Kel. Daya, Kec. Biringkannaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Kering	Dried Seaweed
4	UD. NILAM FERSON (NFE)	Jl. Poros Bantaeng - Bulukumba, Pajukukang Kel. Pajukukang, Kec. Pajukukang, Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan 92460	Baru	Segar	Frozen Demersal Fish
5					Frozen Pelagic Fish
6	PT. KENNDO FISHERIES INDONESIA	Jl. Tol Lama No.3 (1 KM dari Ujung Jembatan Tol) Kel. Parang Loe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan 90241	Perpanjangan	Beku	Frozen Cephalopods
7	PT. GLOBAL MAJU PRATAMA	Pattene Business Park Blok H No. 2, Kel. Pabentengan, Kec. Marusu, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	Frozen Snail
8	PT. PRIMA GLOBAL SUKSES	Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No 32 A, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	Frozen Value Added Fish Product
9	CV. POSKO JASUDA	Dusun Kampung Beru, Kel. Desa Banyuanyara, Kec. Sanrobone, Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan	BARU	Kering	Dried Seaweed
10	PT. CHEN WOO FISHERY	Jl. Kima 4 Kav K-9 Blok B2 Kawasan Industri Makassar, Kel. Daya, Kec. Biringkannaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Segar	Fresh Demersal Fish
11					Fresh Pelagic Fish
12					Fresh Tuna
13					Frozen Demersal Fish
14				Beku	Frozen Pelagic Fish
15				Frozen Tuna	
16	CV. GUNA BAHARI INDONESIA	Pergudangan Parangloe Indah, Jl. Ir. Sutami Blok I-1 No.3 Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan 90241	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed

**Lanjutan.....**

No	Nama UPI	Alamat	Jenis SKP	Jenis Olahan	Produk
17	CV. BASMA BAHARI	Jl. Kompleks Ruko Pasar Grosir Daya Modern Blok D1 No. 20 RT 004 RW 005, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Kering	Fresh Demersal Fish
18					Fresh Pelagic Fish
19					Fresh Shrimp
20	PT. PINGAN SEAFOOD PRODUCT MANUFACTURE	Pattene Bussines Park Kel. Temmapaduae, Kec. Marusu, Kab. Maros Sulawesi Selatan 90551	Baru	Kering	Dried Sea Cucumber
21	PT. SUKSES RAYA FOOD	Jl. Bahagia No.2, Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Segar	Frozen Tuna
22				Beku	Fresh Tuna
23	PT. LONTARA JAYA SAKTI	Jl. Pasar Ikan Beba, Kel. Tamasaju, Kec. Galesong Utara, Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Segar	Fresh Demersal Fish
24					Fresh Pelagic Fish
25					Fresh Tuna

7

**Maret**

1	CV. SUMBER MARINA SEMESTA	Jl. Poros Makasar Maros No.138 Kel. Marumpa, Kec. Marusu, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan 90552	Perpanjangan	Segar	Fresh Demersal Fish
2					Fresh Pelagic Fish
3	PT. NUSADWIPA CITRA TUNGGAL	Jl. Kima 7 Blok J No 4A, Makassar Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Beku	Frozen Milkfish
4	PT. LINTAS ANTAR NUSA	Desa Aeng Batu-Batu Kel. Aeng Batu-Batu, Kec. Galesong Utara, Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan 92255	Perpanjangan	Beku	Frozen Demersal Fish
5					Frozen Pelagic Fish
6					Frozen Tuna
7	UKM NAYAS FOOD	Bilaji Kel. Kanjilo, Kec. Barombong, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan 90225	Baru	Beku	Frozen Value Added Fish Product (Fish Ball, Fish Cake, Fish Nugget, Siomay)

30

**April**

1	PT. CHANGLEONG MARITIM INDONESIA	Jl. O Blok O3-Pabentengang, Kel. Pabentengang, Kec. Marusu, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan	Baru	Segar	Fresh Demersal Fish
2					Frozen Demersal Fish
3				Beku	Frozen Pelagic Fish
4					Frozen Cephalopods
5	PT. BAHARI MAKMUR SEJATI - CABANG MAKASSAR	Jl. Kima 16 Kav BB 4, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	Frozen Shrimp
6	CV. ANUGERAH GLOBAL AGRICULTURE	Pergudangan Pelita Agro Blok A No.17, Jl.Ir. Sutami No.24, Kel. Parang Loe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Kering	Dried Seaweed
7					Fresh Tuna
8				Segar	Fresh Shrimp
9					Fresh Pelagic Fish
10					Fresh Demersal Fish
11	PT. AIKI MEGAH JAYA	Jl. Perintis Kemerdekaan Kima 2 No 3, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan		Frozen Demersal Fish
12					Frozen Milkfish
13				Beku	Frozen Shrimp
14					Frozen Cephalopods
15					Frozen Pelagic Fish
16					Frozen Tuna

**Lanjutan.....**

No	Nama UPI	Alamat	Jenis SKP	Jenis Olahan	Produk
17	PT. MITRA KARTIKA SEJATI	Jl. Kima Raya I Kav D-1B Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan 90241	Baru	Beku	Frozen Raw Shrimp
18					Frozen Cooked Shrimp
19	PT. BOGATAMA MARINUSA	Jl. Kima Raya 2 Kav N-4 B1 Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan 90241	Perpanjangan	Beku	Frozen Breaded Shrimp
20					Frozen Cooked Shrimp
21					Frozen Raw Shrimp
22	PT. PERIKANAN INDONESIA CABANG MAKASSAR	Jl. Sabutung 1 No.1 Paotere Kel. Gusung, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar Sulawesi Selatan 90163	Baru	Segar	Frozen Pelagic Fish
23					Frozen Demersal Fish
24	PT. CELEBES BERKAH NIAGA UNIT II	Pergudangan Garuda Blok B2, Jl. Lantebung No.42 Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan 90245	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed
25	CV. ELITISM MAKASSAR	Jl. Andi Mappainga Ruko 58, Kel. Barombong, Kec. Tamalate, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Shark Fin
26	CV. ANUGERAH LIN PERKASA	Jl. KIMA20 KAV. EE NO. 3 A, Kawasan Industri Makasar Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan 90241	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed
27	PT. KENCANA BINTANG TERANG	Jl. Kima 3 No.2 Kawasan Industri Makassar Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan 90241	Perpanjangan	Beku	Pasteurized Crab Meat
28	CV. ELITISM MAKASSAR	Jl. Andi Mappainga Ruko 58, Kel. Barombong, Kec. Tamalate, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Fish Skin
29					Dried Fish Maw
30					Dried Sea Cucumber

**11 May**

1	CV. ANUGRAH BINTANG CEMERLANG	Jl. Bambu Runcing No.99 Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros Sulawesi Selatan 90516	Perpanjangan	Beku	Frozen Demersal Fish
2					Frozen Pelagic Fish
3	CV. ANUGERAH BAHARI MANDIRI	Jl. Kapasa Raya No. 38A Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	Froz Milkfish
4					Frozen Demersal Fish
5					Frozen Pelagic Fish
6					Frozen Cephalopods
7	PT. MANARA ATHA SAMUIDERA	Jl. Kima 10 Kay T-3A Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan 90241	Perpanjangan	Beku	Tuna Beku
8					Tuna Loin Segar
9					Tuna Utuh Segar
10	PT. ALD OCEAN NUSANTARA	Dusun Saluminanga, Kel. Lakawali Pantai, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan	Baru	Kering	Dried Seaweed
11	PT. SAKINAH BAHARI INDONESIA	Pusat Distribusi Regional Jl. Kima-8, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Beku	Frozen Slipper Lobster

**7 Juni**

1	PT. BANTIMURUNG INDAH	Jl. Dr. Samratulangi No. 163 KM 31, Kel. Allepolea, Kec. Lau, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Segar	Semi Refined Carrageenan
2					Dried Seaweed
3					Alkali Treated Chips
4	PT. BLUE OCEAN RESOURCES	Jl. Kompleks Perhubungan Nomor 5, Kel. Bontoa, Kec. Mandai, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Segar	Fresh Tuna
5					Fresh Demersal Fish
6					Fresh Pelagic Fish
7	CV. NAJWA BAHARI	Jl. Sabutung Baru 3 No.25 Kel. Camba Berua, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar Sul Sel 90161	Baru	Segar	Tuna Segar

Lanjutan.....

No	Nama UPI	Alamat	Jenis SKP	Jenis Olahan	Produk
<b>23</b>			<b>Juli</b>		
1	PT. KENNDO FISHERIES INDONESIA	Jl. Tol Lama No.3 ( 1 KM dari Ujung Jembatan Tol) Kel. Parang Loe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan 90241	Perpanjangan	Beku	Gurita Rebus Beku
2	PT. KARISA TIMUR INDONESIA	Jl. Pattene Raya Ruko NONI No.3 Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Fish maw
3					
4	PT. LONTARA JAYA SAKTI	Jl. Pasar Ikan Beba Kel. Tamasa, Kec. Galesong Utara, Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan 92255	Perpanjangan	Beku	Frozen Tuna
5					
6	KOPERASI SIMPUL DISTRIBUSI KOMODITI	Jl. Dr. Ratulangi KM. 10 (Poros Palopo-Masamba) Lr. TPA Mancani, Kel. mancani, Kec. telluwanua, Kota Palopo Sul Sel	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed
7	CV. LINTAS SAMUDERA MANDIRI	Kompleks PPI Lonrae Kav 3, Kel. Lonrae, Kec. Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Segar	Ikan Demersal Segar
8					Tuna Segar
9					Cephalopoda Beku
10					Ikan Demersal Beku
11					Bandeng Beku
12				Beku	Tuna Beku
13					Udang Beku
14					Ikan Pelagis Beku
15	PT. RIKA RAYHAN MANDIRI	Jl. Kima IV Kav P3A, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed
16	PT. AGRO BOGA UTAMA CABANG MAKASSAR	Pattene Business Park Blok MM No. 15 Kel. Temmappaduae, Kec. Marusu, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan 90244	Baru		Fillet Ikan Beku
17					Fillet Patin Beku
18					Udang Kupas Beku
19					Fillet Salmon Beku
20					Cumi-Cumi Beku
21					Makarel Beku
22					Ikan Pelagis Beku
23					Salmon Beku
<b>32</b>			<b>Agustus</b>		
1	PT. MULIA MAKMUR JAYALESTARI	Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 17/A, Kel. Parang Ioe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Kering	Dried Seaweed
2	PT. UTAMAKAN KEMAKMURAN RAKYAT	Dusun Sentosa, Kel. Lekopancing, Kec. Tanraliti, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan	Baru	Hidup	Live Lobster
3					Live Crab
4	PT. MINA MAJU SEJAHTERA	Jl. Cinranee No.1, Kel. Marumpa, Kec. Marusu, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	Frozen Cephalopods (Cuttlefish, Squid)
5	PT. BIRU LAUT NUSANTARA	Jl. Kima 8 Kav SS No.23A Kawasan Industri Makassar, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Segar Beku	Frozen Crab
6					Frozen Sliper Lobster
7					Fresh Crab
8					Fresh Sliper Lobster
9	PT. SURYA SEAWEED INDONESIA	Jl. Abu Dg. Pasolong, Kel. Tibojong, Kec. Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone Sul Sel	Baru	Kering	Dried Seaweed
10	CV. NUMATA JAYA	Pergudangan 88 Blok R30A, Dusun Kaamba, Kel. Temmappaduae, Kec. Marusu, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan	Baru	Kering	Dried Seaweed
11	CV. 3 Berkat Murni Bara	Ruko 237 No.21, Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Segar	Tuna Loin Segar
12	PT. ASIA SEJAHTERA MINA. TBK	pergudangan 88 Pattene BiZ Park R-30, Kel. Marusu, Kec. Pabentengang, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed
13	PT. SAKINA BAHARI INDONESIA	Pusat Distribusi Regional Jl. Kima-8, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Segar	Frozen Demersal Fish
14					Frozen Pelagic Fish
15					Frozen Tuna
16					Frozen Cephalopods

**Lanjutan.....**

No	Nama UPI	Alamat	Jenis SKP	Jenis Olahan	Produk	
<b>17 September</b>						
1	PT. NIAGA ADIJAYA MANDIRI	Jl. Kima 6 Kav F3 Kawasan Industri Makassar, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Segar	Fresh Tuna	
2				Beku	Frozen Tuna	
3			Perpanjangan	Beku	Frozen Pelagic Fish	
4	PT. LAUTAN SAKTIJAYA	Jl. Kima No.19 Kav. DD 3 A. Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan			Frozen Demersal Fish	
5					Frozen Shrimp	
6					Frozen Cephalopoda	
7	PT. SIRIMAN JAYA	Palalakkang, Kel. Palalakkang, Kec. Galesong, Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Flying fish Roe	
8	CV. 3 Berkat Murni Bara	Ruko 237 No.21, Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Segar	Fresh Demersal Fish	
9					Fresh Pelagic Fish	
10	UKM MARIO 88	Jl. Poros Pinrang - Pare-Pare Km 6, Kel. Manarang, Kec. Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Olahan	Bakso Bandeng	
11					Abon Duri Bandeng	
12					Bandeng Presto	
13					Bandeng Tanpa Duri	
14					Stick Ikan	
15					Amplang Ikan	
16	PT. BINTANG MEGAH JAYA PERKASA	Jl. Batangase No50 Kel.Batangase, Kec. Bontoa, Kabupaten Maros Sul Sel 90552	Perpanjangan	Segar	Fresh Demersal Fish	
17					Fresh Pelagic Fish	
<b>13 Oktober</b>						
1	PT. ANUGERAH BINTANG CEMERLANG	Jl. Bambu Runcing No.99 Kel. Pettuadue, Kec. Turikale, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	Frozen Tuna	
2					Frozen Milkfish	
3				Segar	Fresh Fresh Tuna	
4	CV. NAJWA BAHARI	Jl. Kima V Kav. E No.3B, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Beku	Frozen Cephalopods	
5					Frozen Cooked Cephalopods	
6	PT. ANUGERAH BAHARI MANDIRI	Jl. Kapasa Raya No. 38A, Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Segar	Fresh Whole Tuna	
7					Fresh Pelagic Fish	
8					Fresh Demersal Fish	
9	PT. MULTI MONODON INDONESIA	Jl. Kima Raya I Blok D-2B, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Segar	Fresh Tuna	
10					Frozen Demersal Fish	
11					Frozen Tuna	
12	PT. DERYA UTAMA SEAFOOD	Jl. Sultan Abdullah Raya No.43, Kel. Tallo, Kec. Tallo, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Segar	Fresh Demersal Fish	
13	CV. MIRANTI	Griya Batas Kota Blok D 27 No.10, Kel. Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Hidup	Live Crab	
<b>35 November</b>						
1	PT. Hasba Group Indonesia	Pergudangan 88 Pattenne Busnis Park Blok L No.3, Kel. Temmapaduae, Kec. Marusu, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan	BARU	Kering	Dried Seaweed	
2	PT. Siriman Jaya Abadi	Palalakkang, Kel. Palalakkang, Kec. Galesong, Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Flying Fish Roe	
3	PT. Yin Jing Internasional	Jl. Kima 3 Kav S-13, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	Udang Beku	
4	CV. HOCKY SEAFOOD	Jl. Perintis Kemerdekaan Ruko 237 No.17-18, Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Hidup	Live Crab	
5	CV. BUANA LAUT NUSANTARA	Jl. Kima VI Kav F1/B1, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Segar	Fresh Demersal Fish	
6					Fresh Pelagic Fish	
7					Fresh Slipper Lobster	
8				Beku	Frozen Slipper Lobster	
9			Perpanjangan		Frozen Pelagic Fish	
10					Frozen Demersal Fish	
11					Frozen Cephalopods	
12					Frozen Cooked Cephalopods	

**L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 4**

**Lanjutan.....**

No	Nama UPI	Alamat	Jenis SKP	Jenis Olahan	Produk
13	PT. INTI MULIA CAHAYA	Kompleks Pelabuhan Paotere Makassar, Kel. Gusung, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Segatr	Fresh Pelagic Fish
14					Fresh Demersal Fish
15					Fresh Tuna
16	CV. SEMANGAT KAWAN SEJATI BARU	Jl. Gator Subroto V No.6, Kel. Kaluku Bodoa, Kec. Tallo, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Shark Fin
17	PT. FLYING FISH ALGAE	Jl. Ir. Sutami No.19, Kel. Parang Loe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed
18	PT. CHANGLEONG MARITIM INDONESIA	Jl. O Blok O3-Pabentengang, Kel. Pabentengang, Kec. Marusu, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan	BARU	Kering	Dried Flying Fish Roe
19				Beku	Frozen Shrimp
20	CV. DIVA BANDENG PRESTO	Jl. Poros Pelabuhan Biringkassi, Kel. Bowong Cindea, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene Dan Kepulauan Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	Pressed Cooked Milkfish
21					Boneless Milkfish
22					Stuffed Milkfish
23					Fish Ball
24					Fish Nugget
25			Baru	Kering	Fish Cake
26					Shredded Fish
27					Fish Amplang
28	PT. LAUTAN INDOMAJU ABADI	JL. Sultan Abdullah Raya Kota Makassar, Kel. Buloa, Kec. Tallo, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Kering	Dried Sea Cucumber
29	DAPOER BU WEEK	Jl Beruu Raya Komp Sikamaseng, Kel. Paccerakkang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Beku	Frozen Seasoning Fish
30	PT. MULTI MONODON INDONESIA	Jl. Kima Raya I Blok D-2B, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	Frozen Flying Fish Roe
31	CV NUR BAHARI ABADI	JL. Sultan Abdullah Raya Kota Makassar, Kel. Buloa, Kec. Tallo, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Kering	Dried Sea Cucumber
32	PT. INDO JAYA MARINA	Jl. Pasar Ikan No 22 A, Kel. Bulogading, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Hidup	Live Grouper
33					Live Lobster
34	PT. JIREH COMMODITY	Jl. Kima Raya 2 Komplek Kima Square Warehouse 2 Unit No.11-13 Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan 90241	Perpanjangan	Beku	Frozen Flying Fish Roe
35					Kering

**Desember**

1	UKM Cahaya Bandeng	Jl. Dusun Bira-bira, Kel. Kurusumange, Kec. Tamralili, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku Kering	Boneless Milkfish
2					Crackers Shredded Fish
3	PT. Wahyu Pradana Binamulia	Jl. Kima Raya I Blok D No.2C, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku Segar	Frozen Raw Shrimp
4					Frozen Cooked Shrimp
5	PT. Pacific Green Algae	Jl. Poros Pattene No. 34, Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	BARU	Kering	Fresh Slipper Lobster
6					Dried Seaweed
7	UKM Jutsuka	Dusun Sapiri Pangka, Kel. Balleoing, Kec. Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan	BARU	Kering	Salted Fish
8					Dried Fish
9					Fish Ball
10	Koprasir Bandeng Sejatera	Kampung Teko, RT/RW 001/002, Desa Manakku, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kel. Manakku, Kec. Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi Selatan	BARU	Beku	Boneless Milkfish

**LAPORAN TAHUNAN 2024**

**Lanjutan.....**

No	Nama UPI	Alamat	Jenis SKP	Jenis Olahan	Produk
11	PT. Nirvana Niaga Sejahtera	Jl. Kima 6 Kav F3/B1 - F3/B2 Kawasan Industri Makassar, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	Frozen Tuna
12				Segar	Fresh Tuna
13					Fish Dimsum
14					Fish Ball
15					Fish Drumstick
16					Fish Nugget
17					Fish Roll
18				Olahan	Fish Pempek
19					Fish Spring Rolls
20					Panada Tuna Fish
21					Nori Stick
22					Frozen Tempura
23					Shredded Tuna
24	PT. Kawa Guti	Jl. Dr. Ir. Sutami ( Tol Lama ) No. 22., Kel. Parang Loe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Flying Fish Roe
25				Beku	Frozen Flying Fish Roe
26	CV. Nur Bahari Abadi	JL. SULTAN ABDULLAH RAYA KOTA MAKASSAR, Kel. BULOA, Kec. TALLO, Kota Makassar Sulawesi Selatan	BARU	Kering	Dried Sea Cucumber
27	CV. Gimae Seaweed Spice	Kompleks Pergudangan Tone Biz Park B 6, Jl Ir Sutami ( Tol Lama ), Kel. Parang Loe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	BARU	Kering	Dried Seaweed
28	PT. Marindo Jaya Maros	Jl. Dr. Ratulangi (Poros Makassar-Pangkep) , Kel. Allepolea, Kec. Lau, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan	BARU	Segar	Fresh Pelagic Fish
29					Fresh Demersal Fish
30					Fresh Cephalopoda
31	PT. Keumkang Industri Indonesia	Jl. Kima 15 Kav R4D - R4E, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	BARU	Beku	Frozen Cooked Octopus
32	PT. Ariatama Perkasa Indonesia	Dusun Ujung Bulu Kompleks Pergudangan Patene Business Park Blok E-26, Desa/Kelurahan Pa'Benteng, Kec. Marusu, Kab. Maros Sulawesi Selatan	BARU	Kering	Dried Seaweed

Sumber : UPT Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan

**Lampiran 6. Daftar Unit CBIB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024**

No. Unit	Nama Unit Pemberian	Komoditas	Lokasi	Produksi	Ket Asal Ikan
	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 MAROS	Benih ikan Nila	JL Pasar Ikan No 63, Desa/Kelurahan Allepolea, Kec. Lau, Kab. Maros, Provinsi Sulawesi Selatan	750.000/ Tahun	Sukabumi

Sumber : Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

**Lampiran 7. Daftar Unit CPIB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024**

No. Unit	Nama Unit Pemberian	Komoditas	Lokasi
	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 MAROS	Benih ikan Nila	JL Pasar Ikan No 63, Desa/Kelurahan Allepolea, Kec. Lau, Kab. Maros, Provinsi Sulawesi Selatan

Sumber : Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

**Lampiran 8. Data Pokmaswas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024**

No	Kabupaten	Kec./Kel./Desa	Nama Pokmaswas	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Tahun Pembentukan
1	Pangkep		45 Klp				
		Kec. Liukang Tupabbiring Desa Mattiro Bone	Komando	Muh. Ridwan	13	Pengawasan di perairan laut dan rehabilitasi terumbu karang	2015
		Kec. Liukang Tuppabiring Desa Mattiro Ujung	Mattiro Ujung	Saparuddin	17	Pengawasan di perairan laut dan rehabilitasi terumbu karang	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Desa Mattiro Matae	Cinta Bahari	H. Tajuddin Nur	13	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Utara Desa Mattiro Bulu	Mattiro Bulu	Mustakim	9	Pengawasan di perairan laut	2015
		Kec. Liukang Tangayya Desa Balo-Baloang	Balo Baloang	Rustam	16	Pengawasan di perairan laut	2015
		Kec. Liukang Tupabbiring Desa Mattiro Deceng	Lestari Biru	Abdullah	13	Pengawasan di perairan laut dan rehabilitasi terumbu karang	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Desa Mattiro Langi	Alam Lestari	Muhammad Nur	10	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Desa Mattaro Adae	Mattaro Adae	Mustamin, S.Pdi	10	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Desa Mattiro Kanja	Mattiro Kanja	Abd. Rahman. N	11	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Desa Mattiro Baji	Baji Bahari	Hamirullah	22	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Utara Desa Mattiro Bombang	Mattiro Bombang 1	Syahrir	13	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Utara Desa Mattiro Bombang	Mattiro Bombang 2	Rijal	10	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Utara Desa Mattiro Wale	Pallodang	Nur Alam, Amd.Pi	10	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Utara Desa Mattiro Uleng	Nusa Bahari	Muksin	17	Pengawasan di perairan laut	2019

*Lanjutan.....*

No	Kabupaten	Kec./Kel./Desa	Nama Pokmaswas	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Tahun Pembentukan
	Kec. Liukang Kalmas Desa Dewakang	Cahaya Pulau	Juhairi	15	Pengawasan di perairan laut	2019	
	Kec. Liukang Tangayya Desa Balo Baloang	Bahari Lestari	Tinri	14	Pengawasan di perairan laut	2006	
	Kec. Liukang Tangayya Desa Satanger	Duta Bahari Sumanga	Muhlis	13	Pengawasan di perairan laut	2019	
	Kec. Liukang Tangayya Desa Satanger	Satanger Jaya	Muslimin	13	Pengawasan di perairan laut	2019	
	Kec. Mandalle Desa Mandalle	Mandalle	Anwar	15	Pengawasan di perairan Laut	2019	
	Kec. Mandalle Desa Tamarupa	Tamarupa	Faisal	25	Pengawasan di perairan Laut	2019	
	Kec. Liukang Tupabbirng Utara Desa Tamarupa	Sahabat Bahari	Burhanuddin	12	Pengawasan di perairan laut	2019	
	Kec. Liukang Tupabbirng Desa Mattiro Labangeng	Nelayan Tampaang Bersatu	Ramli	18	Pengawasan di perairan laut	2019	
	Kec. Liukang Tangayya Desa Tampaang	Nelayan Aloang Bersatu	A. Malau	15	Pengawasan di perairan laut	2019	
	Kec. Liukang Tangayya Desa Tampaang	Nelayan Kawassang Bersatu	Mansyur	18	Pengawasan di perairan laut	2019	
	Kec. Liukang Tangayya Desa Tampaang	Nelayan Sapunggang Bersatu	Ambo Naha	17	Pengawasan di perairan laut	2019	
	Kec. Liukang Tupabbirng Desa Mattiro Sompe	Toddopuli Balang Lompo	Maskur	13	Pengawasan di perairan laut	2019	
	Kec. Liukang Tupabbirng Desa Mattiro Dolangeng	Sahabat Jaya	Muh. Ilyas	10	Pengawasan di perairan laut	2019	
	Kec. Mandalle Desa Boddie	Bintang Laut	Muh. Safir	14	Pengawasan di perairan laut	2021	
	Kec. Liukang Kalmas Desa Sabaru	Pabeta Hebat	Muh. Arsyad	18	Pengawasan di perairan laut	2021	
	Kec. Liukang Tangayya Desa Sabalana	Arung Samudera Kayu Bangko	Sapo	24	Pengawasan di perairan laut	2022	
	Kec. Liukang Tangayya Desa Balo-Baloang	Passamaturukang	Tinri	14	Pengawasan di perairan laut	2019	

Lanjutan.....

No	Kabupaten	Kec./Kel./Desa	Nama Pokmaswas	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Tahun Pembentukan
		Kec. Liukang Tangayya Desa Kapoposang Bali	Sahabat Nelayan	Suhaedy	15	Pengawasan di perairan laut	2021
		Kec. Liukang Tangayya Desa Sailus Besar	Baracuda Perkasa	Rahman	11	Pengawasan di perairan Laut	2021
		Desa Mattirolangi Kecamatan Liukang Tuppabiring	Sea Of Sarappo	Nuryadi`	20	Pengawasan di perairan laut	2023
		Desa Bontomanai Kecamatan Labakkang	SINGA PESISIR	Tanaing	10	Pengawasan di perairan laut	2023
		Kec Liukang Tuppabiring	Podang Lestari	Abbas	16	Pengawasan di perairan Laut	2024
		Kec Liukang Tuppabiring	Pasir Putih	Santa	12	Pengawasan di perairan Laut	2024
		Kec Liukang Tuppabiring	Kompas	Bado	34	Pengawasan di perairan laut	2024
2	Luwu Utara	13 Klp					
		Kec. Bone Bone Desa Munte	Kuda Laut	Bahtiar Baso	14	Pengawasan di perairan Laut	2010
		Kec. Malangke Barat Desa Pombakka	Pombakka Affair	Mursalim	15	Pengawasan di perairan laut	2010
		Kec. Malangke Desa Takkalala	Bone Pute	Juswan	15	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Bone Bone Desa Poreang	Bunga Karang	Aksan Siswali	11	Pengawasan di perairan Laut	2010
		Kec. Malangke Desa Tongke	Bajak Laut	Jasmin	17	Pengawasan di perairan Laut	2010
		Kec. Bone Bone Desa Tamuku	Mappatunru	Hafid Hasan	14	Pengawasan di perairan Laut	2010
		Kec. Malangke Barat Desa Waelawi	Pulau Indah	Jisman	22	Pengawasan di perairan laut	2010
		Kec. Malangke Barat Desa Pao	Pao Raja	Marsuki	18	Pengawasan di perairan laut	2010
		Kec. Malangke Desa Benteng	Mamminasae	Syamsudin	15	Pengawasan di perairan Laut	2010
		Kec. Bone Bone Desa Batangtongka	Sipatuo	M. Arief	9	Pengawasan di perairan laut	2010
		Kec. Sukamaju Desa Subur	Harapan Baru	Darwis	9	Pengawasan di perairan laut	2010
		Kec. Malangke Desa Salekoe	Teluk Bone	Bahar	9	Pengawasan di perairan laut	2010
		Kec. Malangke Barat Desa Pengkajoang	Mantalinga Indah	H. Annas	13	Pengawasan di perairan laut	2018

*Lanjutan.....*

No	Kabupaten	Kec./Kel./Desa	Nama Pokmaswas	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Tahun Pembentukan
3	Kota Palopo		6 Klp				
		Kec. Wara Timur Kel. Sarutanga	Wahana Lingkungan	Basri Taha	19	Pengawasan di perairan laut	2010
		Kec. Wara Selatan Desa Sampoddo	Retona	Basmi	15	Pengawasan di perairan Laut	2015
		Kec. Wara Selatan Desa Takkalala	Salu Karo	Awaluddin	24	Pengawasan di perairan Laut	2015
		Kec. Wara Selatan Kel. Songka	Salutanga	Sabil	24	Pengawasan di perairan Laut	2015
		Kec. Wara Timur Kel. Benteng	Salu Tompotika	Idris	25	Pengawasan di perairan Laut	2015
		Kec. Wara Timur Kel. Malatunrung	Baja Pole	Drs. Hamruddin, SE	25	Pengawasan di perairan Laut	2015
4	Luwu Timur		9 Klp				
		Kec. Wotu Desa Bawalipu	Cinta Bahari	Mismar, S.Pd	34	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Angkona Desa Harapan Baru	Harapan Baru	Jumhur	21	Pengawasan di perairan laut	2011
		Kec. Angkona Desa Harapan Baru	Lampia	Rusdin	16	Pengawasan di perairan laut	2013
		Kec. Burau Desa Lauwo	Teluk Bone	Muh. Yusuf	27	Pengawasan di perairan laut	2011
		Kec. Wotu Desa Lera	Lalambate	Ansar M. Galib	22	Pengawasan di perairan laut	2011
		Kec. Malili Desa Cerekang	Pejuang WTC	Arlin, S.Pi	18	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Wotu Desa Lakawali	Bintang Timur	Andi Wahyudin	22	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Nuha Desa Nikkel	Pengawas Danau	H. Umar Ranggo	13	Pengawasan di PUD	2020
		Kec. Malili Kab Luwu Timur	Sinar Bakau	M. Said	23	Pengawasan di perairan Laut	2024
5	Takalar		14 Klp				
		Kec. Mangarabombang Desa Laikang	Tanjung Laikang	Basir Sila	34	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Sanrobone Desa Ujung Baji	Lestari Alam Samudra	Ahmad Yusuf Mile	10	Pengawasan di perairan laut	2014
		Kec. Mangarabombang Desa Punaga	Tubarania	Syamsu Alam	10	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Galesong Utara Desa Tamasaju	Sitalasi	Aswandi Dg. Duni	10	Pengawasan di perairan laut	2011

**L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 4**

**Lanjutan.....**

No	Kabupaten	Kec./Kel./Desa	Nama Pokmaswas	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Tahun Pembentukan
		Kec. Galesong Kota,Desa Galesong Baru	Sanrobengi	Ripai Nai	30	Pengawasan di perairan laut	2008
		Kec. Mangarabombang	Tumalilia	Abd. Rahman	10	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Galesong Selatan Ds. Bontokanang	Hunter	M. Ramli Liong	30	Pengawasan di perairan laut	2008
		Kec. Mappakasunggu	Panjis	Umar Bani	8	Pengawasan di perairan Laut	2008
		Kec. Galesong Utara	Perintis Bahari	Mustari Tantu	15	Pengawasan di perairan Laut	2008
		Kec. Galesong Desa	Lestari Bahari	Saharuddin Dg. Tayang	30	Pengawasan di perairan Laut	2008
		Kec. Mappakasunggu Desa Balang Datu	Balang Datu	Abdul Malik Dg. Ngewa	11	Pengawasan di perairan laut	2013
		Kec. Mappakasunggu Desa Tompo Tanah	Tompo Tanah	Haris Dg. Nangga	13	Pengawasan di perairan laut	2013
		Desa Matirobaji Kec Kep Tanakeke	Jagad Samudera	Masriadi	16	Pengawasan di perairan Laut	2023
		Kec Kep Tanakeke Kab Takalar	Ma'minasa Baji	Fadli	18	Pengawasan di perairan Laut	2024
6	Maros	<b>9 Klp</b>					
		Kec. Bonto Desa Pajukukang	Singa Laut	Ilham	20	Pengawasan di perairan Laut	2020
		Kec. Bontoa Desa Pajukukang	Bahari	Hasanuddin /	25	Pengawasan di perairan Laut	2021
		Kec. Bontoa Kel. Pajukukang	Sipakatau	Idrus Bora	19	Pengawasan di perairan Laut	2008
		Kec. Marusu Kel. Nisombalia	Mina Bahari	H. Ruslan Manye	13	Pengawasan di perairan Laut	2008
		Kec. Maros Baru Kel. Bori Masunggu	Minasa Baji	Supriadi	15	Pengawasan di perairan Laut	2008
		Kec. Lau Kel. Soreang	Sejahtera	Arsyad Rauf	13	Pengawasan di perairan Laut	2008
		Kec. Marusu Desa Nisombalia	Samudra Bahari Jaya	Sapri	13	Pengawasan di perairan Laut	2021
		Kec. Lau Desa Marannu Dusun Kalokko	Rajawali	Safaruddin	13	Pengawasan di perairan laut	2021
7	Bantaeng	<b>14 Klp</b>					
		Kec. Bisapu Desa Bontojai	Pantai Batunu	Subhan Yusuf	10	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Bissapu Desa Bonto Lebang	Sikamaseang	syahrir	10	Pengawasan di perairan laut	2011

**Lanjutan.....**

No	Kabupaten	Kec./Kel./Desa	Nama Pokmaswas	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Tahun Pembentukan
8	Luwu	Kec. Pajukukang Desa Nipa Nipa	Kuda Laut	Nasir	9	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Pajukukang Desa Borong Loe	Marina Indah	H. Nurung	10	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Pajukukang Biangkeke Berkarya	Ismail		27	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Desa Biangkeke	Pantai Gading	Ahmad	11	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Pajukukang Ds. Lumpanggang	Lumpanggang Raya	Hasan	7	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Pajukukang Desa Pajukukang	Pajukukang Raya	Bakso Pali	10	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Pajukukang Desa Papanloe	Papanloe Bersinar	H. Arif	10	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Pajukukang Kel. Lembang	Pantai Selatan	Ihsan	7	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Pajukukang Desa Rappoa	Pinang Raya	M. Yunus	10	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Bantaeng Kel. Palantikang	Timur Laut	Achmad	10	Pengawasan di perairan Laut	2015
		Kelurahan Lembang Kec Bantaeng	Pantai Lamalaka	Aidil	33	Pengawasan di perairan Laut	2023
		Kelurahan Lembang Kec Bantaeng	BERKAH	Irvan	16	Pengawasan di perairan Laut	2023
8	Luwu	<b>6 Klp</b>					
9	Bone	Kec Larompang Desa Buntu Matabing	Bilongka	Abd. Rahman	30	Pengawasan di perairan laut	2013
		Kec. Larompang Selatan Desa Babang	Pasir Putih	Ismail Marsuki, SH	10	Pengawasan di perairan laut	2007
		Kec. Larompang Selatan Desa Batu Lappa	Antasari	Drs. Syukri. L	19	Pengawasan di perairan laut	2010
		Kec. Larompang Selatan Desa Temboe	Cinta Bahari	Abdi, S.Pd	10	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Belopa Utara Desa Lauwa	Alam Bahari	M. Aris Sade, SH.MH	22	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Ponrang Desa Muladimeng	Teluk Mutiara	Ihwan Ilham	12	Pengawasan di perairan Laut	2021
		<b>14 Klp</b>					
		Kec. Salomekko Desa Manera	Manera	Muh. Asaf	20	Pengawasan di perairan Laut	2007
		Kec. Tellu Siattinge Desa Lamuru	Mabarakkae	Bakhris Bahtiar	56	Pengawasan di perairan Laut	2007
		Kec. Awangpone Desa Mallari	Mallari Ade	Mahyudin, S.Ag.S.Pd	19	Pengawasan di perairan Laut	2007
		Kec. Tonra Desa Bulu-Bulu	Bahari	Arsyad	20	Pengawasan di perairan Laut	2009
		Kec. Sibulue Desa Pattiro Sompe	Pattiro Sompe	Abbas Amir, S.Pd,Msi	25	Pengawasan di perairan Laut	2007

Lanjutan.....

No	Kabupaten	Kec./Kel./Desa	Nama Pokmaswas	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Tahun Pembentukan
		Kec. Awangpone	Mallusetasi	Herman Sukri	21	Pengawasan di perairan Laut	2007
		Kec. Awangpone Desa Kajuara	Mattiro Deceng	Suardi	33	Pengawasan di perairan Laut	2007
		Desa Carigading	Pallete	Abdullah, A.Ma	30	Pengawasan di perairan Laut	2007
		Kec. Tanete Riattang Timur Desa Pallete	Bintang Laut	Zulkifli Azroni	25	Pengawasan di perairan Laut	2007
		Kec. Tanete Riattang Timur Desa Bajoe	Kading	Kile	10	Pengawasan di perairan Laut	2007
		Kec. Barebo Desa Kading	Sipatokkong	Mujetaba	37	Pengawasan di perairan Laut	2007
		Kec. Mare Desa Ujung Salangketo	Pada Tuo	Abdullah	15	Pengawasan di perairan Laut	2007
		Kec. Kajuara Desa Angkue	Angkue	Alias	15	Pengawasan di perairan Laut	2007
		Kec. Tanete Riattang Timur Kel. Bajoe	Bajo Bersatu	Suyuti	10	Pengawasan di perairan laut	2020
10	Makassar	9 Klp					
		Kec. Ujung Pandang Kel. Lae Lae	Lumba Lumba	Yusran	8	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Ujung Pandang Kel. Lae Lae	Hiu	H. Yusup	8	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Ujung Tanah Kel. Barrang Lompo	Bahari	Abd. Rasyid	10	Pengawasan di perairan Laut	2008
		Kec. Mariso Kel. Mariso (Pulau Samalona)	Barakuda	Kamaruddin Dg. Lalo	15	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Kepulauang Sangkarang Kel. Barrang	Barrang Lompo	Ismail Muhtar	10	Pengawasan di perairan laut	2008
		Kec. Ujung Pandang Kel. Lae Lae	Cinta Laut	Wahab Dg. Sikki	7	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Ujung Tanah Kel. Barrang Cadi	Bahari Nusantara	Jala'	14	Pengawasan di perairan Laut	2021
		Kel. Barrang Caddi Kec. Kepulauan Sangkarang	Mutiara Laut	Naba	16	Pengawasan di perairan Laut	2023
		Kec. Kepulauan Sangkarang	Sipakatau	Tabrani	12	Pengawasan di perairan Laut	2024
11	Pare-Pare	3 Klp					
		Kec. Wattang Soreang Kel. Wattang Soreang	Bagan Lolo	Ali Hafid	17	Pengawasan di perairan laut	2014
		Kec. Bacukiki Barat Kel. Data	La' Balesse	Ahmad Yani	11	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Desa Lumpue Kec Bacukiki Barat	Madecenge	Abdul Wahid, SP, MM	7	Pengawasan di perairan Laut	2023

**Lanjutan.....**

No	Kabupaten	Kec./Kel./Desa	Nama Pokmaswas	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Tahun Pembentukan
12	Barru		7 Klp				
		Kec. Mallusetasi Kel. Mallawa	Nirwana Bahari	Bowo Prihanto	33	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Mallusetasi Desa Kupa	Batu Loange	Suardi Haruna	40	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Palanro Kel. Palanro	Bunga Nelayan	Udin Basri	10	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Tanete Rillau Desa Lasitae	Balanak	Usman	23	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Tanete Rillau Desa Tellumpanua	Bahari Polejiwa	Hamzah	13	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Desa Lembae Kecamatan Barru	Pantai Bahari Coppo	Ismail	12	Pengawasan di perairan Laut	2023
		Desa Bojo Kec. Mallusetasi	Bolong Bojo	Amir	12	Pengawasan di perairan Laut	2023
13	Sinjai		9 Klp				
		Kec. Tellulimpoe Desa Bua	Sipakainge	Bustam	12	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Sinjai Timur Desa Panaikang	Adapi Nagau	Umar, S.Pdi	18	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Pulau Sembilan Ds. Pulau Persatuan	Mamminasae	Andi Darwis	15	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Pulau Sembilan Desa Pulau Padaelo	Seasseri	Hijriandi	14	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Sinjai Timur Desa Sinjai	Mattiro Deceng	Baharuddin, S.Sos	21	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Pulau Sembilan Desa Pulau Harapan	Karang Merah	Abdullah	10	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Pulau Sembilan Ds. P. Buhung Pitue	Batu Maccidong	Umar	13	Pengawasan di perairan laut	2014
		Kec. Sinjai Timur Desa Pasimaranu	Mabbulo Sipeppa	Rustan, S.Pi	14	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Desa Pulau Padaelo	Padaelo	M. Malik	23	Pengawasan di perairan Laut	2023
14	Jeneponto		10 Klp				
		Kec. Bangkala Kel. Pantai Bahari	Bahari	Muh. Nasir	25	Pengawasan di perairan Laut	2013
		Kec. Bangkala Kel. Pantai Bahari	General	Suharto	13	Pengawasan di perairan Laut	2013
		Kec. Binamu Kel. Empoang Selatan	Pannara Indah	Dado Dg. Joa	15	Pengawasan di perairan Laut	2012
		Kec. Arungkeke Kel. Araneae	Bahari Arungkeke	Abd. Razak	15	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Tamalate Desa Bontojai	Lombo Bulu	Dulla	20	Pengawasan di perairan Laut	2012
		Kec. Tarowang Kel. Tarowang	Tarowang Indah	Bazuki	20	Pengawasan di perairan Laut	2013
		Kec. Bangkala Barat Desa Garassikang	Samaturu	Supardi	23	Pengawasan di perairan Laut	2012
		Kec. Bangkala Kel. Pantai Bahari	Garuda Bahari	Andi Mattewakang	15	Pengawasan di perairan Laut	2016

Lanjutan.....

No	Kabupaten	Kec./Kel./Desa	Nama Pokmaswas	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Tahun Pembentukan
		Kec. Binamu Kel. Empoang Selatan	Senapan	Sudirman	13	Pengawasan di perairan Laut	2009
		Desa Tuju Kec. Bangkala Barat	Sipakatutu	Zainal	7	Pengawasan di perairan Laut	2022
15	Selayar	<b>15 Klp</b>					
		Kec. Bontomanai Desa Parak	Bambangan	Andi Nawir	16	Pengawasan di perairan Laut	2015
		Kec. Bontosikuyu Desa Patikarya	Haraya	Mursalim	10	Pengawasan di perairan Laut	2012
		Kec. Benteng Kel. Benteng Utara	Antasena	Rahmat Bonto	8	Pengawasan di perairan Laut	2021
		Kec. Bontoharu Ds. Bontoborusu	Liang Kreta	Lukman	11	Pengawasan di perairan Laut	2015
		Kec. Bontomatene Desa Barat Lambangan	Boneria	Demma Lalli	14	Pengawasan di perairan Laut	2015
		Kec. Bontomanai Desa Barugaia	JuLu Siri	Andi Suryanto	12	Pengawasan di perairan Laut	2020
		Kec. Pasimarranu Desa Bonea	Taka Bassi Bonea 2	La onso	10	Pengawasan di perairan Laut	2021
		Kec. Bontomanai Desa Parak	Pamtera 2	Burhanuddin	11	Pengawasan di perairan Laut	2015
		Kec. Pasimarranu Desa Bonea	Taka Bassi Bonea	Kamaluddin	11	Pengawasan di perairan Laut	2021
		Kec. Bontosikuyu Ds. Tambolongan	Nambolaki	Muh. Amang	10	Pengawasan di perairan Laut	2021
		Kec. Bontomatene Ds. Menara Indah	Cahaya Purnama	Marzuki	14	Pengawasan di perairan Laut	2021
		Desa Bontona Kec Bontomatene	Langsangiring	Sabri Anto	10	Pengawasan di perairan Laut	2023
		Desa Kayu Bauk Kec Bontomatene	Lembangia	Mappalewa	12	Pengawasan di perairan Laut	2023
		Desa Kahu Kahu Kec Bontoharu	Harma laut	Ansar	15	Pengawasan di perairan Laut	2023
		Kecamatan Buki	ASSIPAINGA	Andi Arwin Patta	38	Pengawasan di perairan Laut	2024

**Lanjutan.....**

No	Kabupaten	Kec./Kel./Desa	Nama Pokmaswas	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Tahun Pembentukan
16	Pinrang		8 Klp				
		Kec. Supa Desa Lotang Salo	Lotang Salo	Abidin	19	Pengawasan di perairan Laut	2013
		Kec. Lembang Desa Binanga Karang	Bina Bahari	Muh. Basir Basiru	22	Pengawasan di perairan Laut	2008
		Kec. Mattiro Sompe Kel. Langnga	Sinar Bahari	Herman	10	Pengawasan di perairan Laut	2013
		Kec. Lasinrang Desa Waetueoe	Mario Marennu	Muladi	33	Pengawasan di perairan Laut	2013
		Kec. Lembang Desa Sabang Paru	Bina Bahari	Alimuddin	28	Pengawasan di perairan Laut	2013
		Kec. Mattiro Sompe Kel. Pallameang	Samaturue	Ibnu Hajar	24	Pengawasan di perairan Laut	2010
		Kec. Supa, Desa Labuang Ujung	Bersatu	H. Ahmad Jawadi	28	Pengawasan di perairan Laut	2015
		Kec. Supa, Desa Labuang Ujung	Siamasei	Erwin Daming	19	Pengawasan di perairan Laut	2015
17	Wajo		17 Klp				
		Kec. Takkalala ,Ds Pantai Timur	Sipakainge	Syarifudin	12	Pengawasan di perairan Laut	2015
		Kec. Pitumpuanua Kel. Siwa	Kompas	Muchin	21	Pengawasan di perairan Laut	2021
		Kec. Takkalala Desa Pantai Timur	Mappideceng	Umar H. Sandu	13	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Penrang Desa Doping	Wahana Bahari	H. Panogi	19	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Bola Desa Pasir Putih	Mappasitujue	Baso Mattalunru	15	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Sajoanging Desa Akkajeng	Bina Lestari	Mustamin	21	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Pitumpuanua Desa Siwa	Siwa Bahari	Gunawan Malik	19	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Keera Desa Keera	Maruddanie	Nurdin	31	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Pitumpuanua Desa Siwa	Basma Community	Hafid Assegaf	31	Pengawasan di perairan Laut	2016
		Kec. Pammana Desa Pammana	Sukamaju	Abd. Halid	15	Pengawasan di perairan Laut	2016
		Kec. Tanasitolo Desa Tanasitolo	Massedie	Samsu Alam	15	Pengawasan di perairan Laut	2016
		Kec. Tempe Desa Watallipue	Siparingerrang	Arifin	15	Pengawasan di perairan Laut	2016
		Kec. Belawa Desa Limporilau	Tosagena	Suparman	11	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Maniangpajo Desa Maniangpajo	Sipakainge	Joni. K	11	Pengawasan di PUD	2015
		Kec. Belawa Ds. Lautang	Nelayan danau tempe	Amiruddin	11	Pengawasan di perairan Darat	2022
		Kec sajoanging	Mattiro deceng	Akmal salahuddin	13	Pengawasan di perairan laut	2023

Lanjutan.....

No	Kabupaten	Kec./Kel./Desa	Nama Pokmaswas	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Tahun Pembentukan
		Kec Bola Ds. Pasir Putih	Delapan Enam	Radinal	18	Pengawasan di perairan Darat	2024
18	Soppeng	<b>3 Klp</b>					
		Kec. Marioriawa Desa Attang Salo	Salomate	Ismail	5	Pengawasan di perairan umum	2017
		Kec. Marioriawa Desa Attang Salo	Bintang 27	Ambo Aman	13	Pengawasan di perairan umum	2017
		Kec. Marioriawa Kel. Kaca	Lasimpo	La Tanggung	14	Pengawasan di perairan umum	2017
19	Bulukumba	<b>7 Klp</b>					
		Kec. Kajang Desa Tana Jaya	Lumba Lumba Putih	H. Muh. Judar	12	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Bontobahari Kelurahan Sapoloh	Batu Mesu	Nurdin Patta	14	Pengawasan di perairan Laut	2012
		Kec. Herlang Kel. Bonto Kamase	Katinroang Jangang	Sangkali	12	Pengawasan di perairan Laut	2012
		Kec. Bontobahari Desa Tanah Lemo	Ujung Baru	H. Ali Imran	10	Pengawasan di perairan Laut	2013
		Kec. Bontobahari Kel. Eka Tiro	Cakalang	Badorra	13	Pengawasan di perairan Laut	2012
		Kec. Bonto Bahari Ds. Darubiah Dusun Kasuso	Kasuso Bersatu	Mappawali	27	Pengawasan di perairan Laut	2022
		Desa Lembanna Kec Bontobahari	SINGKOLO	Ahmad Arfan	14	Pengawasan di perairan Laut	2023
20	Sidrap	<b>2 Klp</b>					
		Kec. Watang Sidenreng Desa Mojong	Mamminasae	H. Ardin	26	Pengawasan di perairan umum	2015
		Kec. Watang Sidendreng Desa Mojong	Mojong Sejahtera	Balbastian	16	Pengawasan di perairan umum	2022
21	Enrekang	<b>12 Klp</b>					
		Kec. Baraka Desa Baraka	Baraka	Simen	18	Pengawasan di perairan umum	2015
		Kec. Malua Kel. Malua	Malua	Sudirman Datma	12	Pengawasan di perairan umum	2015
		Kec. Curio Kel. Salasa	Wai Sitodon	Syarif Sinaru	17	Pengawasan di perairan umum	2015
		Kec. Masalle Desa Buntu Sarong	Masalle	Mardan, A.Md.Pi	14	Pengawasan di perairan umum	2015
		Kec. Cendana Desa Cendana	Salu Sa'dang	Muhammad Yunus, S.Sos	15	Pengawasan di perairan umum	2015
		Kec. Buntu Batu Desa Latimojong	Buntu Batu	Ikhsan	16	Pengawasan di perairan umum	2015
		Kec. Anggeraja Desa Tampo	Anggeraja	Taufan Supu	18	Pengawasan di perairan umum	2015
		Kec. Baroko Desa Baroko	Baroko	Waluddin	15	Pengawasan di perairan umum	2015
		Kec. Maiwa Desa Pattondonsalu	Maiwa	Sainal Ballu	16	Pengawasan di perairan umum	2015

*Lanjutan.....*

No	Kabupaten	Kec./Kel./Desa	Nama Pokmaswas	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Tahun Pembentukan
		Kec. Bungin Kel. Bungin	Bungin	Jamaluddin	19	Pengawasan di perairan umum	2015
		Kec. Enrekang Kel. Galonta	Samata	Supatman Polimin, SP	17	Pengawasan di perairan umum	2015
		Kec. Alla Desa Pana	Pedas Alla	Basri Pea	30	Pengawasan di perairan umum	2015
22	Gowa	<b>3 Klp</b>					
		Kec. Parangloe Kel.Bontoparang	Beroangging	Rais Patta, S.Sos	26	Pengawasan di perairan umum	2011
		Kec. Parangloe Kel. Lanna	Jeneberang	Hadi, S.Sos	16	Pengawasan di perairan umum	2011
		Kec. Manuju Kel.Bontoparang	Sinar Moncong Loe	Johannis	15	Pengawasan di perairan umum	2011
		Kec Somba Opu Kel Mawang	Danau Mawang	Sakir Dg Sarring	15	Pengawasan di perairan umum	2024
		<b>235 Klp</b>					
<b>Jumlah</b>		<b>235 Klp</b>					

*Sumber : Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 2024*

**Lampiran 9. Data Tindak Pidana Perikanan Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahun 2024**

NO	JENIS KASUS	NAMA PELAKU	BARANG BUKTI	WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN	PASAL YANG DIGUNAKAN	TINDAK LANJUT	HASIL
1	Destructive Fishing Bahan Peledak (Bom Ikan)	H. DUDDIN Bin DG. MADO	52 (Lima Puluh Dua) Jerigen ukuran 5 liter diduga berisi pupuk Ammonium Nitrate 7 (Tujuh) botol plastik ukuran 1,5 liter di duga berisi pupuk Ammonium Nitrate	Rabu, 03 Januari 2024, sekitar pukul 13.00 Wita di Gudang Milik H. DUDDIN Bin MAIDO di Pulau Kodingareng Kel./desa Kodingareng Kec. Sangkarrang, Kota Makassar	Pasal 1 ayat (1) UU DRT No 12 Tahun 1951, dan/atau pasal 85 UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Membawa, Memiliki, Menguasai, Menyimpan, Mempunyai persediaan padanya suatu bahan peledak.	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Mamminasata sebagai AHU SIDIK	P 21
2	Destructive Fishing Bahan Peledak (Bom Ikan)	YUNUS Bin BEDDULAKENG dan ACO bin DARWIS	1 Unit Angkutan (Darat, Laut, Udara) Perahu Motor-1 Unit Perahu Speed Kayu tanpa nama 2 Unit Lain-lain Mesin Kapal -2 Unit Mesin Katinting 13 PK 6 Buah bahan peledak detonator -6 batang detonator rakitan seberat 3,9 Gram 250 ekor ikan air laut-3 buah gabus-+250 ekor yang berisi ikan jenis campuran 2 buah lain-lain obat nyamuk bakar-2 keping potongan obat nyamuk 2 bungkus lain-lain korek api-2 buah korek kayu 2 bungkus Lain-lain korek api-2 buah korek gas 5 buah macam karet sendal karet-5 buah potongan sendal karet berbentuk bulat seukuran ibu jari kaki 2 buah plastik botol - 2 botol plastik berisi minyak tanah tersisa setengah 2 buah lain-lain kacamata selam -2 buah kacamata selam 1 Unit elektronik video-1 buah file video	Rabu, 17 Januari 2024, sekitar pukul 16.00 Wita di Jl. Perairan Bone Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riatang Timur Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan Pada Koordinat 04 27'630"S - 120 24'031"E	pasal 84 ayat (1) dan atau Pasal 85 UU RI No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUH Pidana	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Bosowa sebagai AHU SIDIK	Kasus di proses secara hukum, pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim telah selesai di Pengadilan Negeri Bone, Terpidana dikenakan vonis sanksi pidana

Lanjutan.....

NO	JENIS KASUS	NAMA PELAKU	BARANG BUKTI	WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN	PASAL YANG DIGUNAKAN	TINDAK LANJUT	HASIL	
3	Destroyive Fishing Bahan Peledak (Bom Ikan)	ARNAS BIN SANGKALA	1 (satu) Unit Perahu Jolloro Tanpa Nama 1 (satu) Unit Mesin merk Mitsubishi 1 (satu) Unit Kompressor 5 (lima) buah detonator yang terangkai sumbu api 2 (dua) buah jerigen ukuran 4 liter diduga berisi pupuk Ammonium Nitrate 2 (dua) buah botol plastik ukuran 1,5 liter diduga berisi pupuk Ammonium Nitrate 2 (dua) buah botol plastik ukuran 600 ml diduga berisi pupuk Ammonium Nitrate 1 (satu) buah botol plastik berisi bahan bakar pertalite 2 (dua) gulung sabut kelapa 2 (dua) roll selang 2 (dua) buah korek gas 2 (dua) bungkus korek kayu 3 (Tiga) buah kacamata selam 1 (Satu) buah GPS Merk Garmin 1 (satu) buah kompas 1 (satu) pasang sepatu bebek 1 (satu) pasang sepatu karet 2 (dua) buah regulator/dakor 1 (satu) buah sampan gabus	sabtu, 17 Februari 2024, sekitar pukul 10.00 WITA di wilayah perairan pangkep,gusung palekko,ke/desa mattiro ujung, kec.liukang tupabbiring kab.pangkajene dan kepulauan, provinsi sulawesi selatan, titik koordinat 4°51'32.37"S - 118°59'24.62"E	pasal 85 UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Pangkep sebagai AHLI SIDIK	P-21 tahap I dan II, Vonis Majelis Hakim	
4.	Destroyive Fishing Bahan Peledak (Bom Ikan)	CADDI Bin KAMARUDDIN	7 (Tujuh) buah botol kaca bekas ukuran 620 ml di duga berisi pupuk ammonium nitrate 1 (satu) buah botol kaca bekas ukuran 1 liter diduga berisi pupuk ammonium nitrate 23 (dua puluh tiga) Buah jerigen ukuran 1 liter diduga berisi pupuk ammonium nitrate 1 (satu) buah jerigen ukuran 1/2 liter diduga berisi pupuk ammonium nitrate	kamis, 21 Maret 2024, sekitar pukul 02.00 Wita di dalam rumah kosong samping rumah sdr. CADDI yang beralamat di kampung Bajo, kelurahan bajoe, kecamatan tanete riattang timur, kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan	Pasal 84 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan atau pasal 85 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Bosowasi sebagai AHLI SIDIK	Kasus di proses secara hukum, pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim telah selesai di Pengadilan Negeri Bone, Terpidana dikenakan vonis sanksi pidana	
5.	Destroyive Fishing Bahan Peledak (Bom Ikan)	Abdullah Bin Dg Raga	1 (satu) Unit Perahu Jolloro tanpa nama 1 (satu) Unit mesin kompresor 2 (Dua) buah jerigen ukuran 4 liter diduga berisi pupuk Ammonium Nitrate 1 (satu) Roll selang 1 (Satu) pasang sepatu bebek 1 (Satu) buah regulator 1 (satu) buah kacamata selam 10 (sepuluh) ekor ikan jenis campur	Pada hari jumat, tanggal 26 April 2024, sekitar pukul 15.00 Wita di Pesisir pantai pulau lanyukang kelurahan barrang caddi kecamatan kepulauan sangkarang, kota makassar	pasal 85 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Mamminasata sebagai AHLI SIDIK	P21	
6.	Illegal Fishing alat penangkapan ikan (API) yang merusak	Jamaluddin Bin Sumang	1 (satu) unit perahu motor 2 (Dua) papan pemberat dengan panjang 1.13 (satu meter, tiga belas centimeter), jaring trawl warna biru dan timah pemberat 7 kg	Pada hari selasa Tanggal 7 Mei 2024, sekitar pukul 03.50 Wita, pelabuhan nelayan desa sumpang Minangae Kec.Sibulue Kab. Bone	pasal 85 jo Pasal 9 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 8 ayat (3) huruf b PerMen KP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan WPNNRI	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Bosowasi sebagai AHLI SIDIK	Kasus di proses secara hukum, pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim telah selesai di Pengadilan Negeri Bone, Terpidana dikenakan vonis sanksi pidana	

**Lanjutan.....**

NO	JENIS KASUS	NAMA PELAKU	BARANG BUKTI	WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN	PASAL YANG DIGUNAKAN	TINDAK LANJUT	HASIL
7.	Illegal Fishing alat penangkapan ikan (API) yang merusak	Basri bin H. Bacotang	1 (satu) unit perahu motor tanpa nama Tahun pembuatan 2016 dengan 2 (Dua) unit mesin merek mitsubishi ps 120 dan Mesin Merek JIANDONG 24 PK dengan cat perahu berwarna biru sliping orange, putih dan merah 2 (dua) buah papan pemberat jaring warna biru dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter tali dengan panjang 120 (seratus dua puluh) meter kiri kanan dan pelampung warna putih Beberapa hasil tangkapan berupa ikan dan cumi	Pada hari Kamis Tanggal 27 Juni 2024, sekitar pukul 14.50 Wita, pelabuhan Nelayan Desa Manera Kec. Salomekko Kab. Bone	pasal 85 jo Pasal 9 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 8 ayat (3) huruf b PerMen KP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan WPPNRI	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Bosowasi sebagai AHLI SIDIK	Kasus di proses secara hukum, pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim telah selesai di Pengadilan Negeri Bone, Terpidana dikenakan vonis sanksi pidana
8.	Illegal Fishing alat penangkapan ikan (API) yang merusak	Andi Sudirman Bin Andi Saenal Abidin	1 (satu) unit Angkutan (Darat, Laut, Udara) Perahu Motor 1(Dua) buah lain-lain Alat Tangkap Ikan (Pair Trawl) 2 (dua) buah lain-lain Pemberat 2 (dua) buah Plastik Tali Tambang 1 (satu) lembar Surat berharga Dokumen Nota Penjualan	Pada hari Rabu, Tanggal 21 Agustus 2024, Jl. Taka Taninting RT, RW, Titik Koordinat-5.079445 S,120.343105 E, pesisir pulau Kanalo desa Pulau Persatuan Pulau Sembilan, Kab. Sinjai	pasal 85 jo Pasal 9 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 8 ayat (3) huruf b PerMen KP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan WPPNRI	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Bosowasi sebagai AHLI SIDIK	Kasus diproses secara hukum, Divonis dengan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai 114/Pid. Sus/2024/PN Snj.Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
9.	Illegal Fishing alat penangkapan ikan (API) yang merusak	Andri Adrian Bin Bakri	1 Lembar surat berharga berupa dokumen nota penjualan 1 Unit Angkutan (Darat, Laut, Udara) Perahu Motor 1 Buah Lain-Lain Jaring Ikan Pukat Trawl 2 Buah Lain-Lain Pemberat 4 Buah Plastik Tali Tambang	Pada hari Kamis, Tanggal 19 Septembe 2024, PERAIRAN LOMPOGE RT, RW, Titik Koordinat Lat- 5024385 Long 120 450229, Pulau Sembilan, Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan	pasal 85 jo Pasal 9 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 8 ayat (3) huruf b PerMen KP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan WPPNRI	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Bosowasi sebagai AHLI SIDIK	Kasus di proses secara hukum, pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim telah selesai di Pengadilan Negeri Sinjai, Terpidana dikenakan vonis sanksi pidana
10.	Destructive Fishing Bahan Peledak (Bom Ikan)	-Ikbal Bin Sukri - Jusman Bin Sukri (DPO) - Peri alias Peye Bin Mansur - Bentos alias Entos Bin Pelling	1 (satu) Unit Angkutan (Darat, Laut, Udara)perahu motor 3 (Tiga) buah lain-lain kacamata selam 1 (satu) buah elektronik senter 1 (satu) unit mekanik kompresor 50 meter plastik selang	Pada hari selasa, tanggal 05 November 2024, pukul 19.48 Wita Jl. Perairan Taka Bungi Tellue, RT, RW, Titik koordinat LAT 5.145056 LONG 120.389801, pulau Buhung Pitue, Pulau Sembilan, Kabupaten	Pasal 84 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan atau pasal 85 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Bosowasi sebagai AHLI SIDIK	Kasus di proses secara hukum, pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim telah selesai di Pengadilan Negeri Sinjai, Terpidana dikenakan vonis sanksi pidana
11.	Destructive Fishing Bahan Peledak (Bom Ikan)	Sofyan Bin Rasidong	1 (Satu) Buah perahu Jolloro tanpa nama 2 (Dua) Buah Jeregen ukuran 4 (empat) liter diduga berisi pupuk Amonium Nitrate 2 (Dua) Buah botol plastik ukuran 1 (satu) liter diduga berisi pupuk Amonium Nitrate 2 (Dua) Buah botol air mineral ukuran 500 ml diduga berisi pupuk Amonium Nitrate 5 (Lima) Buah pipa aluminium diduga detonator yang terangkai sumbu Ani	senin, 17 Februari 2024, sekitar pukul 10.00 WITA di wilayah perairan pangkep,gusung palekko,ke/desa mattiro ujung, kec.Iukang tupabbiring kab.pangkajene dan kepulauan, provinsi sulawesi selatan, titik koordinat 4 51'32.37"S - 118 59'24.62"E	pasal 1 ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951, dan/atau pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Jl. Pasal 55 Ayat 1 ke I KUH Pidana	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Pangkep sebagai AHLI SIDIK	P-21 tahap I dan II, Vonis Majelis Hakim

*Lanjutan.....*

NO	JENIS KASUS	NAMA PELAKU	BARANG BUKTI	WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN	PASAL YANG DIGUNAKAN	TINDAK LANJUT	HASIL
12.	Destuctive Fishing Bahan Peledak (Bom Ikan)	Elysfikal Bin Haji Sangkala	1 (Satu) botol berwarna putih tulang yang berisi 1 (satu) buah detonator terangkai dengan sumbu api pabrikan adalah positif mengandung trinitrotoluena (TNT) 7 (Tujuh) potong sumbu api pabrikan berwarna merah adalah positif mengandung Black Powder 2 (Dua) Buah detonator pabrikan adalah positif mengandung tetracene (C18H12)	Rabu, 27 Maret 2024, sekitar pukul 15.30 WITA di perairan sebelah utara pulau karangrang, kec.liukang tupabbiring utara kab.pangkep sulawesi selatan, dengan koordinat 04°50'59,3" S - 119°23'07,3" E	Pasal 1 ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951, dugaan tindak pidana barang siapa tanpa hak, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan suatu bahan peledak	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Pangkep sebagai AHLI SIDIK	P-21 tahap I dan II
13.	Destuctive Fishing Blus	Radit Bin Baco	1 (Satu) botol plastik berwarna biru diduga berisi cairan kimia (potassium) dengan tutup botol berwarna putih serta terdapat selang warna kuning dengan panjang kurang lebih 30 cm dan terdapat penutup selang yang terbuat dari kayu 1 (Satu) buah jaring kantong (bunre) warna biru 1 (Satu) buah toples bening dengan penutup warna merah berisi bubuk yang terbungkus plastik warna putih diduga bubuk potassium cyanida (CN) pabrikan adalah positif mengandung tetracene (C18H12) 1 (Satu) botol bekas yang berisi cairan diduga cairan kimia berupa cairan kecoklatan dengan berat 790 ml tersebut positif mengandung cyanida	Senin, 13 Mei 2024, sekitar pukul 15.25 WITA di wilayah di tepi atau pinggir pulau Makaranganan, desa Sailus Kecamatan liukang Tangaya, kab.pangkep provinsi sulawesi selatan	Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan atas perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Pangkep sebagai AHLI SIDIK	P-21 tahap I dan II, Vonis Majelis Hakim
14.	Destuctive Fishing Blus	Zainal Bin Gau	1 (Satu) botol plastik berwarna biru diduga berisi cairan kimia (potassium) dengan tutup botol berwarna putih serta terdapat selang warna kuning dengan panjang kurang lebih 30 cm dan terdapat penutup selang yang terbuat dari kayu 1 (Satu) buah jaring kantong (bunre) warna biru 1 (Satu) buah toples bening dengan penutup warna merah berisi bubuk yang terbungkus plastik warna putih diduga bubuk potassium cyanida (CN) pabrikan adalah positif mengandung tetracene (C18H12) 1 (Satu) botol bekas yang berisi cairan diduga cairan kimia berupa cairan kecoklatan dengan berat 790 ml tersebut positif mengandung cyanida	Senin, 13 Mei 2024, sekitar pukul 15.45 WITA di wilayah di tepi atau pinggir pulau Makaranganan, desa Sailus Kecamatan liukang Tangaya, kab.pangkep provinsi sulawesi selatan	Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan atas perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Pangkep sebagai AHLI SIDIK	P-21 tahap I dan II, Vonis Majelis Hakim

***Lanjutan.....***

NO	JENIS KASUS	NAMA PELAKU	BARANG BUKTI	WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN	PASAL YANG DIGUNAKAN	TINDAK LANJUT	HASIL
15.	Destructive Fishing Bahan Peledak (Bom Ikan)	Nurba Haeril Jihab Bin Bahrung	4 (Empat) botol kaca diduga berisi pupuk Amonium Nitrate, 1(Satu) buah botol plastik ukuran 1500 ml diduga berisi pupuk Amonium Nitrate, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter berisi pupuk Amonium Nitrate 1 (satu) buah jerigen ukuran 10 liter berisi pupuk Amonium Nitrate 4 (empat) buah Detonator rakitan yang terangkai sumbu api	Pada hari kamis, tanggal 09 Mei 2024, sekitar jam 05.30 Wita di Perairan sebelah timur pulau Kodingareng desa padaelo, Kec. Pulau Sembilan, Kab. Sinjai	Pasal 84 ayat (1) junto Pasal 8 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Boswasi sebagai AHLI SIDIK	Kasus diproses secara hukum, Divonis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
16.	Illegal Fishing Tidak Memiliki/ tidak membawa SIPI Asli/habis masa berlakunya	H. Darwis/Pemilik Kapal Perikanan	KM. Nurhidayah, Perahu Jolloro tidak memiliki /tidak membawa SIPI Asli/dokumen perizinan habis masa berlakunya (expired)	Pada hari Kamis, Tanggal 21Maret 2024, di perairan Teluk Bone Kab. Bone	Pasal 27 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Boswasi sebagai AHLI SIDIK	Pembinaan (Memanggil pemilik / kuasanya untuk dimintai keterangan)
17.	Illegal Fishing Tidak Memiliki/ tidak membawa SIPI Asli/habis masa berlakunya	Haris/Pemilik Kapal Perikanan	KM. Jibril Abad 01, Perahu Jolloro tidak memiliki /tidak membawa SIPI Asli/dokumen perizinan habis masa berlakunya (expired)	Pada hari Kamis, Tanggal 21Maret 2024, di perairan Teluk Bone Kab. Bone	Pasal 27 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Boswasi sebagai AHLI SIDIK	Pembinaan (Memanggil pemilik / kuasanya untuk dimintai keterangan)
18.	Illegal Fishing Tidak Memiliki/ tidak membawa SIPI Asli/habis masa berlakunya	DG. Bella/Pemilik Kapal Perikanan	KM. Aisah 56, Perahu Jolloro tidak memiliki /tidak membawa SIPI Asli/dokumen perizinan habis masa berlakunya (expired)	Pada hari Senin, Tanggal 27 Mei 2024, di perairan Pulau Sembilan Kab. Sinjai	Pasal 27 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Boswasi sebagai AHLI SIDIK	Pembinaan (Memanggil pemilik / kuasanya untuk dimintai keterangan)
19.	Illegal Fishing Tidak Memiliki/ tidak membawa SIPI Asli/habis masa berlakunya	Arjun/Pemilik Kapal Perikanan	KM. Dolphin 77, Perahu Jolloro tidak memiliki /tidak membawa SIPI Asli/dokumen perizinan habis masa berlakunya (expired)	Pada hari Rabu, Tanggal 29 Mei 2024, di perairan Pulau Sembilan Kab. Sinjai	Pasal 27 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Boswasi sebagai AHLI SIDIK	Pembinaan (Memanggil pemilik / kuasanya untuk dimintai keterangan)
20.	Illegal Fishing Tidak Memiliki/ tidak membawa SIPI Asli/habis masa berlakunya	Rahman/Pemilik Kapal Perikanan	KM. Harapan HR 02, Perahu Jolloro tidak memiliki /tidak membawa SIPI Asli/dokumen perizinan habis masa berlakunya (expired)	Pada hari Rabu, Tanggal 29 Mei 2024, di perairan Pulau Sembilan Kab. Sinjai	Pasal 27 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Boswasi sebagai AHLI SIDIK	Pembinaan (Memanggil pemilik / kuasanya untuk dimintai keterangan)
21.	Illegal Fishing Tidak Memiliki/ tidak membawa SIPI Asli/habis masa berlakunya	Trisno Sandi/Pemilik Kapal Perikanan	KM. Tanpa Nama, Perahu Jolloro tidak memiliki /tidak membawa SIPI Asli/dokumen perizinan habis masa berlakunya (expired)	Pada hari Selasa, Tanggal 25 Juni 2024, di perairan Teluk Bone Kab. Bone	Pasal 27 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Boswasi sebagai AHLI SIDIK	Pembinaan /Teguran
22.	Illegal Fishing Tidak Memiliki/ tidak membawa SIPI Asli/habis masa berlakunya	Bahri/Pemilik Kapal Perikanan	KM. Ahmad Hidayat, Perahu Jolloro tidak memiliki /tidak membawa SIPI Asli/dokumen perizinan habis masa berlakunya (expired)	Pada hari Kamis, Tanggal 26 September 2024, di perairan Pulau Pulau Sembilan Kab. Sinjai	Pasal 27 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Boswasi sebagai AHLI SIDIK	Pembinaan /Teguran
23.	Illegal Fishing Tidak Memiliki/ tidak membawa SIPI Asli/habis masa berlakunya	Ahmad/Pemilik Kapal Perikanan	KM. AIR ZAM-ZAM, Perahu Jolloro tidak memiliki /tidak membawa SIPI Asli/dokumen perizinan habis masa berlakunya (expired)	Pada hari Jumat, Tanggal 27 September 2024, di perairan Pulau Pulau Sembilan Kab. Sinjai	Pasal 27 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Boswasi sebagai AHLI SIDIK	Pembinaan /Teguran
24.	Illegal Fishing Tidak membawa dokumen SLO dan SIB pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Suardi	KMN. Anita Jaya	Pada hari Jumat, Tanggal 26 April 2024, di PPI Bonto Bahari Kab. Bulukumba	Pasal 26, 27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Wilayah Selatan sebagai AHLI SIDIK	dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut (pembinaan)
25.	Illegal Fishing Tidak membawa dokumen SLO dan SIB pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Arifuddin	KMN. Ilham Hidayat	Pada hari Jumat, Tanggal 26 April 2024, di PPI Bonto Bahari Kab. Bulukumba	Pasal 26, 27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Wilayah Selatan sebagai AHLI SIDIK	dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut (pembinaan)

**L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 4**

*Lanjutan.....*

NO	JENIS KASUS	NAMA PELAKU	BARANG BUKTI	WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN	PASAL YANG DIGUNAKAN	TINDAK LANJUT	HASIL
26.	<b>Illegal Fishing</b> Tidak membawa dokumen SLO dan SIB pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Melly Asni	KMN. Difa Mandiri 01	Pada hari Jumat, Tanggal 26 April 2024, di PPI Bonto Bahari Kab. Bulukumba	Pasal 26, 27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIP, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Wilayah Selatan sebagai AHLI SIDIK	dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut (pembinaan)
27.	<b>Illegal Fishing</b> Tidak membawa dokumen SLO dan SIB pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Firdaus Nursyam	KMN. Nur Rezky	Pada hari Jumat, Tanggal 26 April 2024, di PPI Bonto Bahari Kab. Bulukumba	Pasal 26, 27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIP, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Wilayah Selatan sebagai AHLI SIDIK	dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut (pembinaan)
28.	<b>Illegal Fishing</b> Tidak membawa dokumen SLO dan SIB pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Mahful	KMN. Bintang Timur 01 Sapoloh	Pada hari Jumat, Tanggal 26 April 2024, di PPI Bonto Bahari Kab. Bulukumba	Pasal 26, 27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIP, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Wilayah Selatan sebagai AHLI SIDIK	dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut (pembinaan)
29.	<b>Illegal Fishing</b> Tidak membawa dokumen SLO dan SIB pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Hatijah Dg. Bollo	KMN. Nur Ratu Indah 03	Pada hari Jumat, Tanggal 26 April 2024, di PPI Bonto Bahari Kab. Bulukumba	Pasal 26, 27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIP, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Wilayah Selatan sebagai AHLI SIDIK	dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut (pembinaan)
30.	<b>Illegal Fishing</b> Tidak membawa dokumen SLO dan SIB pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Hasrul	KMN. Kevin Arseno	Pada hari Jumat, Tanggal 26 April 2024, di PPI Bonto Bahari Kab. Bulukumba	Pasal 26, 27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIP, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Wilayah Selatan sebagai AHLI SIDIK	dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut (pembinaan)
31.	<b>Illegal Fishing</b> Tidak membawa dokumen SLO dan SIB pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Syafaruddin	KMN. Sahabat Sejahtera	Pada hari Jumat, Tanggal 26 April 2024, di PPI Bonto Bahari Kab. Bulukumba	Pasal 26, 27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIP, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Wilayah Selatan sebagai AHLI SIDIK	dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut (pembinaan)
32.	<b>Destructive Fishing</b> Bahan Peledak (Bom Ikan)	Tinggala Bin Dg Sampara	Bahan Bom Ikan	Pada hari jumat, tanggal 26 April 2024, sekitar pukul 15.00 Wita di Pesisir pantai pulau lanyukang kelurahan barrang caddi kecamatan kepulauan sangkarang, kota makassar	pasal 85 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Mamminasata sebagai AHLI SIDIK	P21
33.	<b>Illegal Fishing</b> alat penangkapan ikan (API) yang merusak	Suhardi	-	Pada hari minggu tanggal 31 Maret 2024, Desa Barugaiyya Kec. Bontomaiyah Kabupaten Kepulauan Selayar	-	Tidak patuh disebabkan menggunakan alat tangkap pukat dasar pada daerah terumbu karang sehingga merusak ekosistem karang	Membuat surat pernyataan untuk menggunakan alat tangkap tersebut sesuai dengan zonasi penangkapannya
34.	<b>Illegal Fishing</b>	Andi Nuradi	Mattiyo Kota 234-02	Pada hari Kamis, Tanggal 28 Maret 2024, Desa Lantibongan Kec. Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar	-	Tidak patuh disebabkan berlabuh dipelabuhan tidak sesuai dengan izin SIUP yang dimiliki	Memberikan sosialisasi dan mengarahkan untuk berlabuh di Pelabuhan perikanan sesuai dengan izinnya yang berlaku
35.	<b>Illegal Fishing</b>	Yardiman	Trabas 01	Pada hari Senin, Tanggal 19 Februari 2024, Desa Majapahit Kec. Pasimaranu	-	Patuh	-
36.	<b>Illegal Fishing</b>	Cahyadi	Rahmat Ilahi 78	Pada hari Kamis, Tanggal 19 Februari 2024, Desa Majapahit Kec. Pasimaranu	-	Patuh	-
37.	<b>Illegal Fishing</b>	Jadir	Rahmayanti	Pada hari Senin, Tanggal 05 Februari 2024, Desa Appatanah Kec. Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar	-	Patuh	-
38.	<b>Illegal Fishing</b>	Sukiman	Cahaya Purnama 09	Pada hari Kamis, Tanggal 16 Mei 2024, Desa Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar	-	Patuh	-

**Lanjutan.....**

39.	<b>Illegal Fishing</b>	H. Ramli	Rifatul Ilmiah	Pada hari Kamis, Tanggal 16 Mei 2024, Desa Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar		Patuh	
40.	<b>Illegal Fishing</b>	Aco Ahmad	Sumber Wahyu 02	Pada hari Kamis, Tanggal 16 Mei 2024, Desa Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar		Patuh	
41.	<b>Illegal Fishing</b>	Muh. Irwan Nawir	Pasilambena	Pada hari Rabu, Tanggal 05 Juni 2024, Desa Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar		Patuh	
42.	<b>Illegal Fishing</b>	Bangun	Alam Nusantara	Pada hari Rabu, Tanggal 05 Juni 2024, Desa Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar		Patuh	
43.	<b>Illegal Fishing</b>	Saharuddin	Sinar Dua Putri 01	Pada hari Rabu, Tanggal 05 Juni 2024, Desa Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar		Patuh	
44.	<b>Illegal Fishing</b>	Pabottingi	Pammana Jaya	Pada hari Rabu, Tanggal 05 Juni 2024, Desa Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar		Patuh	
45.	<b>Illegal Fishing</b>	Rustum Sangkala Wijaya	Berkah Ilahi 18	Pada hari Jumat, Tanggal 28 Juni 2024, Desa Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar		Patuh	
46.	<b>Illegal Fishing</b>	Usman	Ilham Karumpa	Pada hari Jumat, Tanggal 28 Juni 2024, Desa Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar		Patuh	
47.	<b>Illegal Fishing</b>	Patta Daeng	Farida Jaya	Pada hari Jumat, Tanggal 28 Juni 2024, Desa Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar		Patuh	
48.	<b>Illegal Fishing</b>	Usman	Ilham Karumpa	Pada hari Rabu, Tanggal 31 Juli 2024, Di PPI Bonehalang Kec. Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar		Patuh	
49.	<b>Illegal Fishing</b>	Rustum Sangkala Wijaya	Berkah Ilahi 18	Pada hari Rabu, Tanggal 31 Juli 2024, Di PPI Bonehalang Kec. Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar		Patuh	
50.	<b>Illegal Fishing</b>	Aco Ahmad	Sumber Wahyu 02	Pada hari Rabu, Tanggal 31 Juli 2024, Di PPI Bonehalang Kec. Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar		Patuh	

Lanjutan.....

NO	JENIS KASUS	NAMA PELAKU	BARANG BUKTI	WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN	PASAL YANG DIGUNAKAN	TINDAK LANJUT	HASIL
51.	Illegal Fishing	Pabottingi	Pammana Jaya	Pada hari Jumat, Tanggal 13 September 2024, Di PPI Bonehalang Kec. Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar		Patuh	
52.	Illegal Fishing	Saharuddin	Sinar Dua Putri 01	Pada hari Sabtu, Tanggal 14 September 2024, Di PPI Bonehalang Kec. Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar		Patuh	
53.	Illegal Fishing	Bangun	Alam Nusantara	Pada hari Sabtu, Tanggal 14 September 2024, Di PPI Bonehalang Kec. Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar		Patuh	
54.	Illegal Fishing	Muhammad Irwan Nawir	Pasilambena	Pada hari Sabtu, Tanggal 14 September 2024, Di PPI Bonehalang Kec. Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar		Patuh	
55.	Illegal Fishing	Muh. Neng	Surya Abadi HN	Pada hari Rabu, Tanggal 02 Oktober 2024, Di Desa Lowa Kec. Bontosikuyu Kab. Kep.Selayar	Sudah Memiliki izin tapi perlu diperpanjang		Diarahkan untuk mengurus kelengkapan berkas untuk pengurusan perpanjangan izin SIPI
56.	Illegal Fishing	Bokoi Dg Ruppa	Rahmat INDAH 02	Pada hari Kamis, Tanggal 03 Oktober 2024, Di Perairan Pulau Pasi Gusung Kec. Bontoaruhu Kab. Kep.Selayar		Patuh	
57.	Illegal Fishing	Risnawati	Indah Risma II	Pada hari Jumat, Tanggal 04 Oktober 2024, Di Perairan Pulau Pasi Gusung Kec. Bontoaruhu Kab. Kep.Selayar	Sudah Memiliki izin tapi perlu diperpanjang		Diarahkan untuk mengurus kelengkapan berkas untuk pengurusan perpanjangan izin SIUP dan SIPI
58.	Illegal Fishing	Usman	Ilham Karumpa	Pada hari Kamis, Tanggal 10 Oktober 2024, di PPI Bonehalang Kec. Benteng Kab. Kep.Selayar		Patuh	
59.	Illegal Fishing	Rahmayanti	Papanah	Pada hari Kamis, Tanggal 10 Oktober 2024, di PPI Bonehalang Kec. Benteng Kab. Kep.Selayar	Belum Memiliki Tanda Daftar Kapal Perikanan		Diarahkan untuk mengurus kelengkapan berkas untuk pengurusan TDKP
60.	Illegal Fishing	Ichwan	Rajawali 04	Pada hari Kamis, Tanggal 10 Oktober 2024, di PPI Bonehalang Kec. Benteng Kab. Kep.Selayar	Sudah melengkapi dokumen izin namun terdapat masalah pada nomor SIUP		Koordinasi dengan PTSP Prov. Sulsel untuk mengubah nomor SIUP
61.	Illegal Fishing	Ichwan	Rajawali 06	Pada hari Kamis, Tanggal 10 Oktober 2024, di PPI Bonehalang Kec. Benteng Kab. Kep.Selayar	Sudah melengkapi dokumen izin namun terdapat masalah pada nomor SIUP		Koordinasi dengan PTSP Prov. Sulsel untuk mengubah nomor SIUP
62.	Illegal Fishing	Ichwan	Rajawali Satu	Pada hari Kamis, Tanggal 10 Oktober 2024, di PPI Bonehalang Kec. Benteng Kab. Kep.Selayar	Sudah melengkapi dokumen izin namun terdapat masalah pada nomor SIUP		Koordinasi dengan PTSP Prov. Sulsel untuk mengubah nomor SIUP

**Lanjutan.....**

NO	JENIS KASUS	NAMA PELAKU	BARANG BUKTI	WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN	PASAL YANG DIGUNAKAN	TINDAK LANJUT	HASIL
63.	Illegal Fishing	Saharuddin	Nurfadillah	Pada hari Kamis, Tanggal 10 Oktober 2024, di PPI Bonehalang Kec. Benteng Kab. Kep.Selayar		Patuh	
64.	Illegal Fishing	Muh. Arsyad	Ilham Kajang 02	Pada hari Kamis, Tanggal 10 Oktober 2024, di PPI Bonehalang Kec. Benteng Kab. Kep.Selayar		Izin SIPI sudah mati dan perlu diperpanjang	Diarahkan untuk melengkapi dokumen untuk pengurusan perpanjangan SIPI
65.	Illegal Fishing	Aco Ahmad	Sumber Wahyu 02	Pada hari Jumat, Tanggal 11 Oktober 2024, di PPI Bonehalang Kec. Benteng Kab. Kep.Selayar		Patuh	
66.	Illegal Fishing	H. Ramli	Rifatul Ilmiah	Pada hari Jumat, Tanggal 11 Oktober 2024, di PPI Bonehalang Kec. Benteng Kab. Kep.Selayar		Patuh	
67.	Illegal Fishing	Sukiman	Cahaya Purnama 09	Pada hari Jumat, Tanggal 11 Oktober 2024, di PPI Bonehalang Kec. Benteng Kab. Kep.Selayar		Patuh	
68.	Illegal Fishing	Mustakim	Syafikah Marwah	Pada hari Jumat, Tanggal 11 Oktober 2024, di PPI Bonehalang Kec. Benteng Kab. Kep.Selayar		Patuh	
69.	Illegal Fishing	Sukkuru	Sinar Harapan 30	Pada hari Jumat, Tanggal 11 Oktober 2024, di PPI Bonehalang Kec. Benteng Kab. Kep.Selayar		Patuh	
70.	Illegal Fishing	Iskandar	Sejahtera 10	Pada hari Jumat, Tanggal 11 Oktober 2024, di PPI Bonehalang Kec. Benteng Kab. Kep.Selayar		Patuh	
71.	Illegal Fishing	Irmawati	Usaha Baru	Pada hari Jumat, Tanggal 11 Oktober 2024, di PPI Bonehalang Kec. Benteng Kab. Kep.Selayar		Patuh	
72.	Illegal Fishing	Abd. Kadir L	Kmn Ta'jul Harapan	Pada hari Jumat, Tanggal 11 Oktober 2024, di PPI Bonehalang Kec. Benteng Kab. Kep.Selayar		Patuh	
73.	Illegal Fishing	Muh. Arsil	Alif Jaya Mandiri	Pada hari Jumat, Tanggal 11 Oktober 2024, di PPI Bonehalang Kec. Benteng Kab. Kep.Selayar		Belum memiliki Dokumen Perizinan kapal perikanan	Diarahkan untuk melengkapi berkas untuk pengurusan dokumen izin Kapal Perikanan
74.	Illegal Fishing	Nurbin H. Badaruddin	Putri idaman 77	Pada hari Jumat, Tanggal 11 Oktober 2024, di PPI Bonehalang Kec. Benteng Kab. Kep.Selayar		Belum memiliki Dokumen Perizinan kapal perikanan	Diarahkan untuk melengkapi berkas untuk pengurusan dokumen izin Kapal Perikanan
75.	Illegal Fishing	Albar	-	Pada hari Kamis, Tanggal 14 November 2024, di Dusun Padang Desa Bontosunggu Kec. Bontoaruh Kab. Kep.Selayar		Belum memiliki Dokumen Perizinan kapal perikanan	Diarahkan untuk melengkapi berkas untuk pengurusan dokumen izin Kapal Perikanan

Lanjutan.....

NO	JENIS KASUS	NAMA PELAKU	BARANG BUKTI	WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN	PASAL YANG DIGUNAKAN	TINDAK LANJUT	HASIL
76.	Illegal Fishing	Abd Rifai	-	Pada hari Kamis, Tanggal 14 November 2024, di Dusun Padang Desa Bontosunggu Kec. Bontoaruh Kab. Kep.Selayar		Belum memiliki Dokumen Perizinan kapal perikanan	Diarahkan untuk melengkapi berkas untuk pengurusan dokumen izin Kapal Perikanan
77.	Illegal Fishing	Sukardi	-	Pada hari Jumat, Tanggal 15 November 2024, di Dusun Padang Desa Bontosunggu Kec. Bontoaruh Kab. Kep.Selayar		Belum memiliki Dokumen Perizinan kapal perikanan	Diarahkan untuk melengkapi berkas untuk pengurusan dokumen izin Kapal Perikanan
78.	Illegal Fishing	Rustum Sangkala Wijaya	Berkah Ilahi 05	Pada hari Jumat, Tanggal 15 November 2024, di Dusun Padang Desa Bontosunggu Kec. Bontoaruh Kab. Kep.Selayar		Patuh	
79.	Illegal Fishing	Lukman	Husna Jaya 02	Pada hari Sabtu, Tanggal 21 Desember 2024, di PPI Bonehalang Kab. Kep.Selayar		Izin SIPI sudah mati dan perlu diperpanjang	Diarahkan untuk melengkapi dokumen untuk pengurusan perpanjangan SIPI
80.	Illegal Fishing	Burhanuddin	Herik Jaya	Pada hari Sabtu, Tanggal 21 Desember 2024, di PPI Bonehalang Kab. Kep.Selayar		Izin SIPI sudah mati dan perlu diperpanjang	Diarahkan untuk melengkapi dokumen untuk pengurusan perpanjangan SIPI
81.	Illegal Fishing	Munir	Rezki Ilahi Kayuadi	Pada hari Sabtu, Tanggal 21 Desember 2024, di PPI Bonehalang Kab. Kep.Selayar		Izin SIPI sudah mati dan perlu diperpanjang	Diarahkan untuk melengkapi dokumen untuk pengurusan perpanjangan SIPI
82.	Illegal Fishing	Abd Majid	-	Pada hari Sabtu, Tanggal 21 Desember 2024, di PPI Bonehalang Kab. Kep.Selayar		Belum memiliki Dokumen Perizinan kapal perikanan	Diarahkan untuk melengkapi berkas untuk pengurusan Dokumen Izin Kapal Perikanan

Sumber : laporan Tahunan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

**Lampiran 10. Data Penanganan Kasus Destructive Fishing Wilayah Cdk Bosowasi TA. 2024**

No	Jenis kasus	Nama pelaku / identitas kapal / Alamat	Barang Bukti	Pasal yang digunakan	Keterangan*
1	Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak / bom ikan.	YUNUS Bin BEDDULAKENG dan ACO Bin DARWIS / Kampung Bajo, RT/RW 001, Tanete Riattang Timur Kab. Bone	6 (enam) batang Detonator rakitan; 250 (dua ratus lima puluh) ekor ikan jenis campuran; 2 (dua) keping obat nyamuk bakar; 2 (dua) buah korek kayu;	Pasal 84 ayat (1) dan atau Pasal 85 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana	Kasus diproses secara hukum, pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim telah selesai di Pengadilan Negeri Bone, Terpidana dikenakan vonis sanksi pidana.
2		CADDI Bin KAMARAUDDIN / Kampung Bajo, RT/RW 002, Tanete Riattang Timur Kab. Bone	23 buah botol kaca bekas ukuran 620 ml diduga berisi pupuk ammonium nitrate, 1 buah botol kaca bekas 1 liter diduga berisi pupuk ammonium nitrate, 7 buah jerigen 1 liter diduga berisi pupuk ammonium nitrate, 1 buah jerigen ukuran ½ liter diduga berisi pupuk ammonium nitrate	Pasal 84 ayat (1) junto Pasal 8 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.	Kasus diproses secara hukum, pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim telah selesai di Pengadilan Negeri Bone, Terpidana dikenakan vonis sanksi pidana.

***Lanjutan.....***

No	Jenis kasus	Nama pelaku / identitas kapal / Alamat	Barang Bukti	Pasal yang digunakan	Keterangan*
3		NURBA HAERIL JIHAD Bin BAHRUNG / Pulau Kodingare RT/RW 003/002 Desa Padaelo Kec Pulau Sembilan Kab Sinjai	4 buah botol kaca diduga berisi pupuk Amonium Nitrate, - 1 buah botol plastic ukuran 1500 ml diduga berisi pupuk Amonium Nitrate, - 1 buah jerigen ukuran 5 liter berisi pupuk Amonium Nitrate, - 1 buah jerigen ukuran 10 liter berisi pupuk Amonium Nitrate, - 1 buah jerigen ukuran 10 liter berisi pupuk Amonium Nitrate, - 4 buah Detonator rakitan yang terangkai sumbu api	Pasal 84 ayat (1) junto Pasal 8 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.	Kasus diproses secara hukum, Divonis dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4		-IKBAL Bin SUKRI -JUSMAN Bin SUKRI (DPO) -PERI alias PEYE Bin MANSUR. -BENTOS alias ENTOS Bin PELLING	Perahu Jolloro, Detonator, Alat Selam	Pasal 84 ayat (1) junto Pasal 8 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.	Pasal 84 ayat (1) junto Pasal 8 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.
5	Penggunaan alat penangkapan ikan (API) yang merusak	JAMALUDDIN Bin SUMANG,/ Desa Sumpang Minangae Kec. Sibulue Kab. Bone	Alkap Trawls, perahu jolloro,	Pasal 85 jo Pasal 9 UU RI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan.---- Pasal 8 ayat (3) huruf b PerMen KP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan WPPNRI	Kasus diproses secara hukum, pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim telah selesai di Pengadilan Negeri Bone, Terpidana dikenakan vonis sanksi pidana.
6		BASRI Bin H. BACOTANG / Dusun Ulunipa, Manera, Kec Salomekko, Kab Bone	Alkap Trawls, perahu jolloro,	Pasal 85 jo Pasal 9 UU RI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan.---- Pasal 8 ayat (3) huruf b PerMen KP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan WPPNRI	Kasus diproses secara hukum, pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim telah selesai di Pengadilan Negeri Bone, Terpidana dikenakan vonis sanksi pidana.

*Lanjutan.....*

No	Jenis kasus	Nama pelaku / identitas kapal / Alamat	Barang Bukti	Pasal yang digunakan	Keterangan*
7		ANDI SUDIRMAN Bin ANDI SAENAL ABIDIN / Lagoppo Desa Masangkae Kec.Kajuara Kab.Bone. dan- AMBO Bin ABDUL MAJID // Lagoppo Desa Masangkae Kec.Kajuara Kab.Bone	Alkap Trawls, perahu jolloro,	Pasal 85 jo Pasal 9 UU RI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan.----- Pasal 8 ayat (3) huruf b PerMen KP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan WPPNRI	Kasus diproses secara hukum, Divonis dengan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai 114 / Pid. Sus / 2024 / PN Snj. Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
8		ANDRI ADRIAN Bin BAKRI / Dusun Macedde, Kel. Bajoe, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone	Alkap Trawls, perahu jolloro,	Pasal 85 jo Pasal 9 UU RI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan.----- Pasal 8 ayat (3) huruf b PerMen KP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan WPPNRI	Kasus diproses secara hukum, pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim telah selesai di Pengadilan Negeri Sinjai, Terpidana dikenakan vonis sanksi pidana.
9	Tidak memiliki / tidak membawa SIPI Asli / habis masa berlakunya	H. DARWIS / Pemilik Kapal Perikanan	KM Nurhidayat, Perahu Jolloro tidak memiliki / tidak membawa SIPI Asli / dokumen perizinan habis masa berlakunya (expired)	Pasal 27 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.	Pembinaan (Memanggil pemilik / kuasanya utk dimintai keterangan)
10		Haris / Pemilik kapal perikanan	KM Jibril Abadi 01, Perahu Jolloro tidak memiliki / tidak membawa SIPI Asli / dokumen perizinan habis masa berlakunya (expired)	Pasal 27 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.	Pembinaan (Memanggil pemilik / kuasanya utk dimintai keterangan)
11		DG BELLA /Pemilik Kapal Perikanan	KM Aisah 56, Perahu Jolloro tidak memiliki / tidak membawa SIPI Asli / dokumen perizinan habis masa berlakunya (expired)	Pasal 27 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.	Pembinaan (Memanggil pemilik / kuasanya utk dimintai keterangan)
12		ARJUN / Pemilik kapal perikanan	KM Dolphin 77, Perahu Jolloro tidak memiliki / tidak membawa SIKPI Asli / dokumen perizinan habis masa berlakunya (expired)	Pasal 27 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.	Pembinaan (Memanggil pemilik / kuasanya utk dimintai keterangan)

**Lanjutan.....**

No	Jenis kasus	Nama pelaku / identitas kapal / Alamat	Barang Bukti	Pasal yang digunakan	Keterangan*
13		RAHMAN / Pemilik kapal perikanan	KM Harapan HR 02, Perahu Jolloro tidak memiliki / tidak membawa SIPI Asli / dokumen perizinan habis masa berlakunya (expired)	Pasal 27 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.	Pembinaan (Memanggil pemilik / kuasanya utk dimintai keterangan)
14		TRISNO SANDI / Pemilik kapal perikanan	KM Tanpa Nama, Perahu Jolloro tidak memiliki / tidak membawa TDKP Asli / dokumen perizinan habis masa berlakunya (expired)	Pasal 27 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.	Pembinaan (Memanggil pemilik / kuasanya utk dimintai keterangan)
15		BAHRI / Pemilik kapal perikanan	KM AHMAD HIDAYAT , Perahu Jolloro tidak memiliki / tidak membawa SIPI / dokumen perizinan habis masa berlakunya (expired)	Pasal 27 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.	Pembinaan (Memanggil pemilik / kuasanya utk dimintai keterangan)
16		AHMAD / Pemilik kapal perikanan	KM AIR ZAM-ZAM , Perahu Jolloro tidak memiliki / tidak membawa SIPI / dokumen perizinan habis masa berlakunya (expired)	Pasal 27 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.	Pembinaan (Memanggil pemilik / kuasanya utk dimintai keterangan)

*Sumber : CDK Bosowasi 2024*

**Lampiran 11. Data Penanaman Mangrove yang dilakukan Oleh CDK Bosowasi TA 2024**

No	Kab/Kota	Kecamatan	Desa	Jumlah Bibit	Luas Areal	Jenis Mangrove
1	Sinjai	Sinjai Timur	Tongke- Tongke	38.000	1 Ha	Rhizophora,Sp
2	Bone	Kec. Salomekko	Kelurahan Mappatoba	38.000	1 Ha	Rhizophora,Sp
3	Bone	Sibulue	Pattiro Sompe	38.000	1 Ha	Rhizophora,Sp

*Sumber : CDK Bosowasi 2024*

**Lampiran 12. Data Penanaman Mangrove yang dilakukan Oleh CDK Mamminasata TA 2024**

No	Kab/Kota	Kecamatan	Desa	Jumlah Bibit	Luas Areal	Titik Koordinat
1	Makassar	Tamalanrea	Bira	38.000 Batang	1.8 Ha	-5.078119,119.465294
2	Maros	Bontoa	Pajukukang	38.000 Batang	1.8 Ha	-4.924788,119.523337
3	Takalar	Kep. Tanakeke	Pulau Bauluwang Kel. Mattiro Baji	38.000 Batang	1.8 Ha	-5.464600,119.233411

*Sumber : CDK Mamminasata 2024*

**Lampiran 13. Data illegal Fishing yang didapatkan Oleh CDK Mamminasata TA 2024**

No	Jenis kasus	Nama pelaku usaha/identitas kapal	Barang bukti	Waktu dan tempat kejadian	Pasal yang digunakan	Ket*
1	Penggunaan Bom Ikan	Abdullah Bin Dg Raga	Bahan Bom Ikan	Taggal 26 April 2024 di Pulau Lanjukang	Pasal 85 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan	
2	Penggunaan Bom Ikan	Tinggala Bin Dg Sampara	Bahan Bom Ikan	Taggal 26 April 2024 di Pulau Lanjukang	Pasal 85 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan	

*Sumber : CDK Mamminasata 2024*

**Lampiran 14. Data Penanaman Mangrove yang dilakukan Oleh CDK Ajatappareng TA 2024**

No	Kab/Kota	Kecamatan	Desa	Jumlah Bibit	Luas Areal	Jenis Mangrove
1	Barru	Mallusetasi	Bojo	28.435	2,85 Ha	Rhizophora

*Sumber : CDK Ajatappareng 2024*

**Lampiran 15. Data kasus *illegal fishing* atau pelanggaran / tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah Ajatappareng selama TA 2024**

NO	Jenis Kasus / Jenis Pelanggaran TPP	Nama Pelaku / Tersangka	Barang Bukti	Pasal Yang Disangkakan	Keterangan
1	Belum memperhatikan Dokumen Yang expayer	Nambi/Cahaya Makmur	Dokumen perizinan	Pasal 1 ayat (17) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Dokumen disita sementara dan dilakukan pembinaan agar mengurus perizinannya
2	Belum memperhatikan Dokumen Yang expayer	H.Safaruddin/Wira Putra	Dokumen perizinan	Pasal 1 ayat (17) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Dokumen disita sementara dan dilakukan pembinaan agar mengurus perizinannya
3	Belum memperhatikan Dokumen Yang expayer	M. Arif/ Buana Harapan	Dokumen perizinan	Permen KP No.3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan	Dokumen disita sementara dan dilakukan pembinaan agar mengurus perizinannya
4	Tidak memiliki TDKP	Hendra/ Tonreng	Dokumen perizinan	Pasal 1 ayat (17) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Dokumen disita sementara dan dilakukan pembinaan agar mengurus perizinannya
5	SIPI habis masa berlakunya	Cahaya Akbar 3/ Suhardi	Dokumen perizinan	Permen KP No.3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan	Dokumen disita sementara dan dilakukan pembinaan agar mengurus perizinannya
6	Tidak memiliki TDKP	Mutiara/ Budiman	Dokumen perizinan	Pasal 1 ayat (17) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Dokumen disita sementara dan dilakukan pembinaan agar mengurus perizinannya
7	Tidak membawa dokumen kapal melaut	Mamminasae/Amirullah	Dokumen perizinan	Pasal 1 ayat (17) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Dokumen disita sementara dan dilakukan pembinaan agar mengurus perizinannya
8	Tidak membawa dokumen kapal melaut	Wanda/H. Syamsuddin	Dokumen perizinan	Pasal 1 ayat (17) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Dokumen disita sementara dan dilakukan pembinaan agar mengurus perizinannya
9	Pas kecil & TDKP tidak ada	Laut Lestari/ Junari	Dokumen perizinan	Permen KP No.3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan	Dokumen disita sementara dan dilakukan pembinaan agar mengurus perizinannya
10	Tidak memiliki TDKP	Amin abadi/ Amin	Dokumen perizinan	Permen KP No.3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan	Dokumen disita sementara dan dilakukan pembinaan agar mengurus perizinannya
11	Pas kecil & TDKP tidak ada	Barokah/ Aco	Dokumen perizinan	Permen KP No.3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan	Dokumen disita sementara dan dilakukan pembinaan agar mengurus perizinannya .

***Lanjutan.....***

NO	Jenis Kasus / Jenis Pelanggaran TPP	Nama Pelaku / Tersangka	Barang Bukti	Pasal Yang Disangkakan	Keterangan
12	SIPI habis masa berlakunya	Cahaya Makmur 01/Nambi	Dokumen perizinan	Pasal 1 ayat (17) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Dokumen disita sementara dan dilakukan pembinaan agar mengurus perizinannya .
13	SIPI Habis masa berlakunya	Faisal Jaya 01/H.Abd. Kadir	Dokumen perizinan	Pasal 1 ayat (17) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Dokumen disita sementara dan dilakukan pembinaan agar mengurus perizinannya .
14	SIPI Habis masa berlakunya	Bunga Dunia/Abdul Salam	Dokumen perizinan	Pasal 1 ayat (17) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Dokumen disita sementara dan dilakukan pembinaan agar mengurus perizinannya .
15	SIPI habis masa berlakunya	Nurlia Indah/Hamsar	Dokumen perizinan	Pasal 1 ayat (17) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Dokumen disita sementara dan dilakukan pembinaan agar mengurus perizinannya .
16	Pas kecil & TDKP tidak ada	Nur Madina/Masdar	Dokumen perizinan	Pasal 1 ayat (17) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Dokumen disita sementara dan dilakukan pembinaan agar mengurus perizinannya .
17	Tidak memiliki TDKP	Oce/Hamsi	Dokumen perizinan	Pasal 1 ayat (17) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Dokumen disita sementara dan dilakukan pembinaan agar mengurus perizinannya .
18	Tidak membawa dokumen kapal melaut	Rani Aulia/Hasanuddin	Dokumen perizinan	Pasal 1 ayat (17) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Dokumen disita sementara dan dilakukan pembinaan agar mengurus perizinannya .
19	Pas kecil & TDKP tidak ada	Buana Hawa 02/ Muskadi	Dokumen perizinan	Pasal 1 ayat (17) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Dokumen disita sementara dan dilakukan pembinaan agar mengurus perizinannya .
20	Tidak memiliki TDKP	Jembatan Rezeki/Muhammad	Dokumen perizinan	Pasal 1 ayat (17) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Dokumen disita sementara dan dilakukan pembinaan agar mengurus perizinannya .
21	Tidak memiliki TDKP	Siqri 01/ Hamka	Dokumen perizinan	Pasal 1 ayat (17) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Dokumen disita sementara dan dilakukan pembinaan agar mengurus perizinannya .
22	Tidak Bawa TDKP	Kurniallahio1/Suparman	Dokumen perizinan	Pasal 1 ayat (17) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Dokumen disita sementara dan dilakukan pembinaan agar mengurus perizinannya .

*Sumber : CDK Ajatappareng 2024*

**Lampiran 16. Data kasus *illegal fishing* atau pelanggaran/tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah CDK Wilayah Selatan selama Tahun 2024**

NO	Jenis Kasus / Jenis Pelanggaran TPP	Nama Pelaku / Tersangka	Barang Bukti	Waktu dan Tempat Kejadian (TKP)	Pasal Yang Disangkakan	Keterangan
1	Tidak membawa dokumen SLO dan SIB pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Suardi	KMN. Anita Jaya	Tanggal 26 April 2024 di PPI Bonto Bahari Kab. Bulukumba	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut (pembinaan)
2	Tidak membawa dokumen SLO dan SIB pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Arifuddin	KMN. Ilham Hidayat	Tanggal 26 April 2024 di PPI Bonto Bahari Kab. Bulukumba	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut (pembinaan)
3	Tidak membawa dokumen SLO dan SIB pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Melly Asni	KMN. Difa Mandiri 01	Tanggal 26 April 2024 di PPI Bonto Bahari Kab. Bulukumba	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut (pembinaan)
4	Tidak membawa dokumen SLO dan SIB pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Firdaus Nursyam	KMN. Nur Rezky	Tanggal 26 April 2024 di PPI Bonto Bahari Kab. Bulukumba	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut (pembinaan)
5	Tidak membawa dokumen SLO dan SIB pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Mahful	KMN. Bintang Timur 01 Sapoloh	Tanggal 26 April 2024 di PPI Bonto Bahari Kab. Bulukumba	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut (pembinaan)
6	Tidak membawa dokumen SLO dan SIB pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Hatijah Dg. Bollo	KMN. Nur Ratu Indah 03	Tanggal 26 April 2024 di PPI Bonto Bahari Kab. Bulukumba	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut (pembinaan)

**Lanjutan.....**

NO	Jenis Kasus / Jenis Pelanggaran TPP	Nama Pelaku / Tersangka	Barang Bukti	Waktu dan Tempat Kejadian (TKP)	Pasal Yang Disangkakan	Keterangan
7	Tidak membawa dokumen SLO dan SIB pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Hasrul	KMN. Kevin Arseno	Tanggal 26 April 2024 di PPI Bonto Bahari Kab. Bulukumba	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut (pembinaan)
8	Tidak membawa dokumen SLO dan SIB pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Syafaruddin	KMN. Sahabat Sejahtera	Tanggal 26 April 2024 di PPI Bonto Bahari Kab. Bulukumba	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut (pembinaan)

*Sumber : CDK Wilayah Selatan 2024*

**Lampiran 17. Data Penanaman Mangrove yang dilakukan oleh CDK Wilayah Selatan Tahun 2024**

No	Kab/Kota	Kecamatan	Desa	Jumlah Bibit	Luas Areal	Jenis Mangrove
1	Bulukumba	Ujung Loe	Garanta	38.000 Batang	1,9 Ha	Rhizophora

*Sumber : CDK Wilayah Selatan 2024*

**Lampiran 18. Data Tindak Pidana Perikanan yang Ditemukan di Wilayah CDK Pangkep Tahun 2024**

No	Jenis Kasus	Nama Pelaku	Barang Bukti	Pasal yang digunakan	Keterangan	Hasil
1	Destuctive Fishing Bahan Peledak (Bom Ikan)	Arnas Bin Sangkala	<ul style="list-style-type: none"> <li>- (Satu) Buah perahu jolloro tanpa nama</li> <li>- 2 (Dua) Buah Jeregen ukuran 4 (empat) liter diduga berisi pupuk Amonium Nitrate</li> <li>- 2 (dua) buah botol plastik ukuran 1 (satu) liter diduga berisi pupuk Amonium Nitrate</li> <li>- 2 (dua) buah botol air mineral ukuran 500 ml diduga berisi pupuk Amonium Nitrate</li> <li>- 5 (lima) buah pipa aluminium diduga detonator yang terangkai sumbu api</li> </ul>	Pasal 1 ayat (1) UU DRT No 12 Tahun 1951, dan/atau pasal 85 UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Jo Pasal 55 Ayat 1 ke I KUHPidana	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Pangkep sebagai AHLI SIDIK	P-21 tahap I dan II, Vonis Majelis Hakim

*Lanjutan.....*

No	Jenis Kasus	Nama Pelaku	Barang Bukti	Pasal yang digunakan	Keterangan	Hasil
2	Destuctive Fishing Bahan Peledak (Bom Ikan)	Sofyan Bin Rasidong	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Satu) Buah perahu jolloro tanpa nama</li> <li>- 2 (Dua) Buah Jeregen ukuran 4 (empat) liter diduga berisi pupuk Amonium Nitrate</li> <li>- 2 (dua) buah botol plastik ukuran 1 (satu) liter diduga berisi pupuk Amonium Nitrate</li> <li>- 2 (dua) buah botol air mineral ukuran 500 ml diduga berisi pupuk Amonium Nitrate</li> <li>- 5 (lima) buah pipa aluminium diduga detonator yang terangkai sumbu api</li> </ul>	<p>Pasal 1 ayat (1) UU DRT No 12 Tahun 1951, dan/atau pasal 85 UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Jo Pasal 55 Ayat 1 ke I KUHPidana</p>	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Pangkep sebagai AHLI SIDIK	P-21 tahap 1 dan II, Vonis Majelis Hakim
3	Destuctive Fishing Bahan Peledak (Bom Ikan)	Elysfikal Bin Haji Sangkala	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Satu botol berwarna putih tulang yang berisi 1 (satu) buah detonator terangkai dengan sumbu api pabrikan adalah positif mengandung <i>trinitrotoluena (TNT)</i></li> <li>- 7 (Tujuh) potong sumbu api pabrikan berwarna merah adalah positif mengandung <i>BlackPowder</i></li> <li>- 2 (dua) buah detonator pabrikan adalah positif mengandung <i>tetracene (C<sub>18</sub>H<sub>12</sub>)</i></li> </ul>	<p>Pasal 1 ayat (1) UU DRT No 12 Tahun 1951, dugaan tindak pidana barang siapa tanpa hak, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan suatu bahan peledak</p>	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Pangkep sebagai AHLI SIDIK	P-21 tahap 1 dan II
4	Destuctive Fishing Bius	Radit Bin Baco	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 botol plastik berwarna biru diduga berisi cairan kimia (potassium ) dengan tutup botol berwarna putih serta terdapat selang warna kuning dengan panjang kurang lebih 30 cm dan terdapat penutup selang yang terbuat dari kayu</li> <li>- 1 buah jaring kantong (bunre) warna biru</li> <li>- 1 buah toples bening dengan penutup warna merah berisi bubuk yang terbungkus plastik warna putih diduga bubuk potassium cyanida (CN) pabrikan adalah positif mengandung tetracene (C<sub>18</sub>H<sub>12</sub>)</li> <li>- 1 botol bekas yang berisi cairan diduga cairan kimia berupa cairan kecoklatan dengan berat 790ml tersebut positif mengandung cyanida</li> </ul>	<p>Pasal 84 ayat (1) JO Pasal 8 ayat (1) UU RI No 45 Tahun 2009 tentang perikanan atas perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan</p>	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Pangkep sebagai AHLI SIDIK	P-21 tahap 1 dan II, Vonis Majelis Hakim

*Lanjutan.....*

No	Jenis Kasus	Nama Pelaku	Barang Bukti	Pasal yang digunakan	Keterangan	Hasil
5	Destructive Fishing Bius	Zainal Bin Gau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (Satu) botol plastik berwarna biru diduga berisi cairan kimia (potassium ) dengan tutup botol berwarna putih serta terdapat selang warna kuning dengan panjang kurang lebih 30 cm dan terdapat penutup selang yang terbuat dari kayu</li> <li>- 1 (Satu) buah jaring kantong (bunre) warna biru</li> <li>- 1 (Satu) buah toples bening dengan penutup warna merah berisi bubuk yang terbungkus plastik warna putih diduga bubuk potassium cyanida (CN) pabrikan adalah positif mengandung tetracene (<math>C_{18}H_{12}</math>)</li> <li>- 1 botol bekas yang berisi cairan diduga cairan kimia berupa cairan kecoklatan dengan berat 790ml tersebut positif mengandung cyanida</li> </ul>	Pasal 84 ayat (1) JO Pasal 8 ayat (1) UU RI No 45 Tahun 2009 tentang perikanan atas perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Pangkep sebagai AHLI SIDIK	P-21 tahap I dan II, Vonis Majelis Hakim

*Sumber Data : CDK Pangkajene dan Kepulauan*

**Lampiran 19. Daftar Unit Pengolahan Ikan/Udang dan Rumput Laut Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024**

NO	NAMA UPI	ALAMAT	JENIS PRODUK
1	2	3	4
1	PT. Bogatama Marinusa	Jl. Kima Raya 2 Kav. N. 4-B1 Makassar	Frozen cooked shrimp, Frozen Breaded shrimp, Frozen Raw Shrimp
2	PT. Mitra Kartika Sejati	Jl. Kima Raya I Kav. D-1b , Makassar	Frozen Shrimp Frozen cooked shrimp
3	CV. Bone Agung Mina Persada	Jl. Wiyatamandala Kel. Lonrae Timur	Frozen Shrimp, Frozen Demersal Fish Frozen Pelagic Fish , Frozen Chepalopods
4	PT. Multi Monodon Indonesia	Jl. Kima raya l Blok D-2B	Frozen cooked shrimp, Frozen Raw Shrimp, Frozen Demersal Fish Frozen Cephalopods , Frozen Tuna (loin, steak), Frozen Farm Raised Fish (lele) Dried Flying Fish Roe
5	PT. South Suco	Jl. Kima VI Blok G/IV B	Frozen Shrimp
6	PT. Wahyu Pradana BM	Jl. Kima raya l Blok D No. 2C	Frozen shrimp Dried flying fish roe Frozen Demersal Fish, Frozen Cephalopods, Fresh Tuna Frozen Tuna Frozen Cookedshrimp

Lanjutan.....

NO	NAMA UPI	ALAMAT	JENIS PRODUK
1	2	3	4
7	CV. Prima Indo Tuna	Jl. Ir. Sutami No. 32	Fresh & Frozen Tuna Fresh & Frozen Demersal Fish
8	PT. Sinar Graha	Jl. Sultan Abdullah No. 59	Frozen Pelagic Fish, Frozen Slipper Lobster, Frozen Octopus, Frozen Fish Fillet
9	PT. Perikanan Nusantara	Jl. Sabutung 1 No.1.	Frz Demersal & Pelagic Fish Frozen Chepalopods
10	PT. Prima Bahari Inti lestari	Jl. Kima 12 Kav. 5C	Fresh tuna, Frozen Tuna, Fresh chepalopods, Frozen Chepalopods Fresh fillet fish, Frozen Chepalopods Fresh fish, Frozen Demersal Fish Frozen Boneless Milkfish
11	PT. Chen Woo Fishery	Jl. Kima 4 Blok K. 9/B2 Jl.Kima 4 Kav.P-28,Makassar	Fresh tuna, Frozen tuna, Ikan Demersal Beku, Ikan Demersal Segar
12	PT. Phillips Seafood Indonesia	Jl. Lamellang No. 42 kel. Bojo baru Kec. Mallusetasin Kab. Barru	Chilled pasteurized crab meat Frozen Paste urized crabmeat Can Frozen demersal fish,Ikan Scombroide Beku
13	CV.Ome tradingcoy	Jl. Poros kanjilo gowa	Hana katsubushi
14	PT. Donglim Jireh	Komp kima squere blok B. 1-2,	Dried Flying Fish Roe
15	PT. Dunia Marine Product	Jl. Kima 3 Kav. 4b	Dried flying fish roe, Frozen Shrimp FrzCephalopods, Teripang krg
16	PT. Kawa Guti	Jl. Tol lama no.22	Frozen flying fish roe (Dried Flying Fish Roe)
17	PT. Omeresso food	Jl. Poros Kanjilo, Barombong Gowa	Katsuo Powder Hana Katsuo
18	CV. Makassar jaya	Jl. Batara bira 6 Komp. PU No. 13	Dried sea cucumber
19	PT. Multi Sari Makassar	Jl. Kima 14 Kav. SS 12	Fresh Demersal Fish,Frozen Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Frozen, Pelagic Fish Frozen chepalopods, Fresh chepalopods, Frozen Tuna, Fresh Tuna Frozen Shrimp, Fresh Shrimp
20	PT. Parlevliet Paraba	Jln. Jembatan Tua No.89 Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros	Fresh Tuna &Frozen Tuna Fresh Pelagic, & Frz. Pelagic Fresh & Frz. Demersal Fish Fresh Cephalopods
21	PT. Kemilau Bintang timur	Jl. Kima 3 Kav. 2A	Frozen Crabmeat Frozen Pasteurized crabmeat Frozen Raw shrimp, Frozen chepalopods, Fresh Pelagic Fish, Frozen Pelagic Fish, Fresh Demersal fish, Frozen Demersal fish, Fresh Farm Raised Fish, Frozen Farm Raised Fish
22	CV. Usaha Centra Jaya Sakti	Jl. Kima V Kav. E No.31	Frozen octopus, frozen tuna & fresh Tuna Fresh demersal fish, Frozen Demersal Fish, Fresh Milk Fish
23	UD Resky Bahari	Jl. Perintis kemerdekaan km. 19	Fresh Demersal Fish,Fresh Pelagic Fish

**Lanjutan.....**

<b>NO</b>	<b>NAMA UPI</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JENIS PRODUK</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
24	CV. Jaya Indah Cemerlang	Jl. Buru No. 47	Fresh Pelagic Fish, Fresh Demersal Fish Dried Shark Fin, Sea Cucumber
25	PT. Global Seafood International Indonesia	Jl. Poros Bantaeng, Bulukumba Km. 131 Ds. Pa'jukukang, Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng	Frozen Surimi
26	PT. Ocean Cham Seafood	Jl. Kima 7 Kav. J-2	Pateurized Canned Crab meat
27	PT. Kelola Mina laut	Jl. Kima 17 Blok DD-15-16, Makassar	Frozen demersal fish, Frozen pelagic fish , Frozen cephalopods
28	CV. Sumber Bahari Mandiri	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 12 Ruko No. 5	Produk kering (Dried Sea Cucumber, sirip Ikan, Perut Ikan, abalone dan rumput laut)
29	CV. Hokky Seafood	Jl. Perintis Kemerdekaan Ruko 17	Live Crab, Fresh Tuna Fresh Demersal & Pelagic Fish
30	CV. Anugerah Sejati	Jl. Metro Tanjung Bunga A.33 Ruko Somba Opu	Dried Flying Fish Roe
31	CV. Udin Jaya	Jl. Komp Perumahan Nusa Indah mas	Frozen pelagic Fish , Live fish
32	PT. Mina Maju Sejahtera	Jl. Cinrancae No. 1, Bulu-Bulu Kec. Marusu Kab. Maros	Fresh Demersal Fish, Fresh Pelagic Fish Fresh shrimp, Live Fish
33	PT. Anugerah Bintang Cemerlang	Jl. Bambu runcing No. 99	Fresh & Frozen Tuna
34	PT. Nusa Dwipa Citra Tunggal	Jl. Kima VII Blok J. N. 4	Frozen Fish
35	PT. Wahyu Putra BimaSakti	Jl. Kima 10 T-2B Makassar	Carrageenan Chip
36	UD. Atops	Jl. Bahagia No. 2	Dried flying Fis Roe
37	CV. Inti Makmur	Jl. Kima 6 Blok F1/A2	Fresh & Frozen Tuna, Fresh & Frozen demersal Fish, Frozen Chepalopods Fresh & Frozen Shrimp
38	PT. Mitra Sejahtera Makassar	Jl. Ir. Sutami Blok G2 No.11	Rumput Laut
39	UD. Delton	Jl.Ir.Sutami Pergudangan karunia Blok C No. 11 Makassar SulSel	Rumput laut Kering
40	CV. Sentosa Bimantara Laut	Jl.Ir.Sutami Pergudangan karunia Sulawesi Blok C No. 10 makassar SulSel	Rumput laut Kering
41	PT. Giwang Citra Laut	Poros Pabrik Gula Takalar Km 1,5 Ds.Pa'rappunganta,polombangkeng Utara.Kab. Talakar	carrageenan Chips , Semi Refined Carrageenan
42	Koperasi Agroniaga	JL. BAKAU NO. 66, KOTA PALOPO	Dried Seaweed
43	PT. Sumberguna Makassar Nusa	Jl. Ujung Pandang Baru No.17 Makassar	Dried Seaweed
44	PT. Rapid Niaga International	Jl. Ir. Sutami Blok L.5, Makassar	Dried Seaweed

Lanjutan.....

NO	NAMA UPI	ALAMAT	JENIS PRODUK
1	2	3	4
45	CV. Putri Jaya	Kawasan Pergudangan Parang Loe Indah	Dried Seaweed
46	CV. Adi Tirta	Jl. Sabutung No. 123 Makassar	Dried Seaweed
47	CV. Benur Rahma	Jl. Tala-Tala Ds. Pattinong, Kec. Galesong Takalar. (0411) 82326564	Dried Flying fish roe
48	PT. Rika Rayhan Mandiri	Jl. Kima 4 Kav.P3A, Makassar	Dried Seaweed
49	UD. Centralindo Agar Utama	Gudang Parangloe Indah Blok E No. 10 Makassar Telp.(0411) 5774648,	Dried Seaweed
50	PT. Mega Citra Karya	Jl. Ir. Sutami No.1 Gudang A.Mks	Dried Seaweed
51	CV. Bintang Mas Sportindo	Jl. Pemuda Pantai Salu Songka Kec. Wara Timur, Kota Palopo.	Dried Seaweed
52	CV. Pelita	Jl. Ir. Sutami No.1 Gudang A Mks	Dried Seaweed
53	UD. Baharu	Komplek Pergudangan lantebung Jl.Ir. Sutami Blok A.12 No.5 Makassar	Dried Seaweed
54	CV. Agro Mina Dewata	Jl. Sungai Saddang Baru No.9A, Makassar	Fresh Demersal Fish
55	PT. Bantimurung Indah	Jl. Sam Ratulangi No. 163, Maros.	carageenan Chips , Semi Refined Carageenan
56	PT. Biru Laut Nusantara	Jl. Kima VIII Kav. SS No.23A Kima, Makassar	Frozen Tuna
57	PT. Nuansa Cipta Magello	Jl. Kima 3 Kav.5 Makassar	Daging Rajungan Kaleng Past
58	PT. Mitra Timur Nusantara	JL. Sultan Abdullah Raya Lrg.3 No. 9 Makassar, Fax (0411) 428228	Ikan Demersal Beku ,Ikan Pelagis Beku Cephalopoda Beku , Tuna Beku
59	PT. Mina Timur Indonesia	Jl.ABD.Kudus barombong kec. Tamalate, Makassar. Telp (0411) 2122637	Telur ikan terbang kering.
60	PT. Sentosa Sumber galesong	Komps.Graha Satelit Blok A/20 Jl. Sultan Hasanuddin , Sungguminasa Gowa, Makassar.	Telur ikan terbang kering
61	PT. Sinar Laut Nusantara	Ds Cikoang,DesaLakatong, Kec. Mangarabombang, Takalar	Fresh Demersal Fish, Frozen Demersal Fish, Fresh Pelagis Fish Frozen Pelagis Fish, Fresh Cephalopods, Frozen Cephalopods Fresh & Frozen Lobster Fresh & Frozen Slipper Lobster, Fresh Milkfish, Fresh Shrimp
62	PT. Tujuh Samudera Jaya	Jl. Malino Ds. Nirannuang, kec Bontomarannu, Gowa	Frozen Flying Fish Roe
63	PT. Asia Sejahtera Mina	Jl. Ir. Sutami Kawasan Terpadu Logistik Blok A-1 Makassar	Dried Seaweed
64	UKM "88 Marijo"	Jl. Poros Pinrang-Pare,Kel.Manarang (bulu) Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang	Boneless Milkfish
65	PT. Mitra Sejahtera	Jl. Ir. Sutami No. 38 Blok H2-10, Makassar	Dried Seaweed
66	CV. Eltisyah	Jl. Monumen Emmy Zaelan III Komplek BTN Agraria blok q9/24,Makassar	Fish JELLY Product
67	PT. Karya Jaya Mandiri	Jl. Prof.Ir. Sutami no.15A, Makassar	Dried Seaweed
68	PT. Goh Fadel Buana	Jl. Poros Makassar-Maros no. 126 Ballu-Ballu Kel. Taroada, Kec. Turikale, Makassar	Fresh Pelagic Fish, Frozen Pelagic Fish, fresh Demersal Fish,frozen Demersal Fish, Frozen Fish Fillet
69	PT. Lintas Antar Nusa	Jl. Poros Kupa , Kec. Mallusetasi, Barru	Ikan Terbang beku
70	PT. Lintas Antar Nusa	Desa Aeng batu-Batu, Galesong Utara, Kab. Takalar	Frozen Dried Flying fish roe

*Lanjutan.....*

<b>NO</b>	<b>NAMA UPI</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JENIS PRODUK</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
71	PT. Anugerah Gemilang succes sedayu	Jl.Poros Macoppa Maros Km.26. No.44 Kab.Maros	Dried Seaweed
72	PT. Galesong	Jl. Baso Dg. BellaDesa Kalukuang Galesong Kab. Takalar	Dried Flying fish roe
73	PT. Prima Global Sukses	Jl. Prof.Dr.Ir.SutamiNo.32A	Ikan Demersal Segar, Ikan Demersal beku, Fresh Tuna, Frozen Tuna Cephalopoda Beku
74	PT. Boddia Jaya	Jl.Karaeng Salamaka, Dusun Boddia, Kec. Galesong, Kab. Takalar	Dried Flying fish roe
75	UD. Generasi Baru	Jl. Andi Malla Poros pattiro Bajo. Kel. Biru kec. Tanete Riattang, Bone sulsel	Bandeng asap Bandeng duri lunak & tanpa duri
76	PT.Jireh Commodity	Jl. Kima Raya 2 Komplek Kima Square warehouse 2 No.11,12,13, Makassar	Dried Flying fish roe Frozen Flying fish roe Teripang Kering, Teripang Beku
77	PT. Agarindo	Kab. Bone	Rumput Laut Kering
78	CV. Persada Semesta	Dusun Cikoang, Desa Lakatong, Kec. Mangarabombang, Takalar	Rumput Laut Kering

